PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT

Jl. Dr. WahidinSudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308
E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

Nomor : 700 / 624 /437.72/2026
Tanggal : 31 Maret 2026
Hal : Pernyataan Reviu atas LPPD Tahun 2025

Kepada Yth. :
Bapak Bupati Gresik
di
GRESIK

Dengan ini disampaikan bahwa kami telah melakukan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Gresik.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/209/IJ Tentang Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini. Sedangkan hasil reviu sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr, ACHMAD HADI, S.P., MT., CGCAE,CfrA
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan limpahan karunia – Nya, sehingga kami telah menyelesaikan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Timur. Laporan ini dibuat untuk memenuhi amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Tahun 2025 mengalami perubahan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 2026 Nomor: 100.2.7/989/OTDA Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dalam rangka melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik selama satu tahun anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang memuat ruang lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Laporan ini memuat informasi tentang capaian indikator kinerja makro, target dan capaian Kinerja Pemerintah Daerah yang disampaikan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJIP), gambaran narasi tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di enam urusan wajib pelayanan dasar dan pengisian Indikator Kinerja Kunci yang sudah dilakukan perubahan format antara lain: Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah. Dengan demikian, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 diperoleh dari data mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari penyajian maupun substansi materi yang disajikan, karena belum seluruh tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Gresik dapat dilaksanakan secara optimal. Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini dibuat, terima kasih kepada semua pihak dan seluruh dukungan data dari Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik yang telah berkontribusi besar dalam penyusunan laporan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak untuk diketahui masyarakat seluas-luasnya dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di masa yang akan datang.

Gresik, 17 Maret 2026

BUPATI GRESIK



Fandi Akhmad Yani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB I Pendahuluan **1**

1.1 Penjelasan Umum **1**

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah 1

b. Data Geografis Wilayah 2

c. Jumlah Penduduk 11

d. Jumlah Kecamatan 12

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah 24

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 35

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah **74**

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 74

b. Visi dan Misi Kepala Daerah 77

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal **80**

1.3.1 Dasar Pertimbangan Penerapan SPM (Latar Belakang) 80

a. Dasar Penerapan SPM 82

b. Kebijakan Umum 84

c. Kebijakan Penerapan SPM 86

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **99**

2.1 Capaian Kinerja Makro **99**

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 100

2.1.2 Angka Kemiskinan 101

2.1.3 Angka Pengangguran 101

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi 102

2.1.5 Pendapatan Perkapita 103

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan 104

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan **104**

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil 105
2.2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan dasar 105
a. Urusan Wajib Pendidikan 106
b. Urusan Wajib Kesehatan 108
c. Urusan Pekerjaan Umum & Tata Ruang 112
d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 115
e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 117
f. Urusan Wajib Sosial 119
2.2.1.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 120
a. Urusan Wajib Tenaga Kerja 123
b. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 125
c. Urusan Pangan 126
d. Urusan Pertanahan 126
e. Urusan Lingkungan Hidup 128
f. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 129
g. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 131
h. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 132
i. Urusan Perhubungan 134
j. Urusan Komunikasi Dan Informatika 135
k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 136
l. Urusan Penanaman Modal 137
m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 138
n. Urusan Statistik 139
o. Urusan Persandian 140
p. Urusan Kebudayaan 141
q. Urusan Perpustakaan 142
r. Urusan Kearsipan 143
2.2.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan 143
a. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 144
b. Urusan Pilihan Pariwisata 145
c. Urusan Pilihan Pertanian 146
d. Urusan Pilihan Perdagangan 148

e. Urusan Pilihan Perindustrian 148

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 151

a. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan) 153

b. Penunjang Urusan Pemerintah (Keuangan) 153

c. Penunjang Urusan Pemerintahan (Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) 155

d. Penunjang Urusan Pemerintahan (Fungsi Pengawasan) 156

e. Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) 157

f. Penunjang Urusan Pemerintahan (Hubungan dengan Perwakilan Daerah)..... 158

g. Penunjang Urusan Pemerintahan (Pelayanan Publik) 159

h. Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan) 160

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 162

a. Perjanjian Kinerja Periode Tahun 2021 - 2026 165

b. Pengukuran Kinerja 167

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Realisasi Sebelumnya ... 170

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah 173

e. Pengukuran Capain Kinerja Dibandingkan dengan Capaian Nasional/Provinsi Jawa Timur/Kabupaten lain 176

f. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan 179

g. Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan 187

h. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai 190

i. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 202

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 234

b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 237

c. Pengukuran Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya 241

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Pembangunan Jangka Menengah 245

e. Pengukuran Capain Kinerja Dibandingkan dengan Capaian Nasional/Provinsi Jawa Timur 249

f. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan 253

g. Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan 263

h. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai 270

i. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 275

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 333

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 334

4.1 Urusan Pendidikan 334

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar 334

a. Pendidikan Anak Usia Dini 334

b. Pendidikan Dasar 334

c. Pendidikan Kesetaraan 334

4.1.2 Target Pencapaian SPM 334

4.1.3 Realisasi 339

4.1.4 Alokasi Anggaran 342

4.1.5 Dukungan Personil 344

4.1.6 Permasalahan dan Solusi 346

4.2 Urusan Kesehatan 348

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar 348

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 349

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 349

c. Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir 350

d. Pelayanan Kesehatan Balita 350

e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 350

f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif 351

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 351

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 352

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus 352

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 353

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB) 353

l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 353

4.2.2 Target Pencapaian SPM 354

4.2.3 Realisasi 371

4.2.4 Alokasi Anggaran 394
4.2.5 Dukungan Personil 395
4.2.6 Permasalahan dan Solusi 398
4.3 Urusan Pekerjaan Umum 404
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar 404
4.3.2 Target Pencapaian SPM 405
4.3.3 Realisasi 410
4.3.4 Alokasi Anggaran 415
4.3.5 Dukungan Personil 417
4.3.6 Permasalahan dan Solusi 418
4.4 Urusan Perumahan Rakyat 420
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar 420
4.4.2 Target Pencapaian SPM 421
4.4.3 Realisasi 423
4.4.4 Alokasi Anggaran 428
4.4.5 Dukungan Personil 429
4.4.6 Permasalahan dan Solusi 430
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 431
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar 431
4.5.2 Target Pencapaian SPM 432
4.5.3 Realisasi 446
4.5.4 Alokasi Anggaran 469
4.5.5 Dukungan Personil 475
4.5.6 Permasalahan dan Solusi 480
4.6 Urusan Sosial 483
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar 483
4.6.2 Target Pencapaian SPM 484
4.6.3 Realisasi 490
4.6.4 Alokasi Anggaran 495
4.6.5 Dukungan Personil 496
4.6.6 Permasalahan dan Solusi 497
BAB V Penutup 499

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1.1 Data Luas Wilayah Menurut Kecamatan Se Kabupaten Gresik 3

Tabel 1.3.1.2 Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (Ha)..... 6

Tabel 1.3.1.3 Keterangan per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (Ha) 7

Tabel 1.3.1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025 12

Tabel 1.3.1.5 Jumlah Kartu Keluarga Kabupaten Gresik Tahun 2024 – 2025..... 15

Tabel 1.3.1.6 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik 17

Tabel 1.3.1.7 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik serta Dasar Hukum Pembentukkan Perangkat Daerah 24

Tabel 1.3.1.8 Pemerintahan Kabupaten Gresik Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 36

Tabel 1.3.1.9 Pemerintahan Kabupaten Gresik Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 40

Tabel 1.3.1.1 Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan 86

Tabel 1.3.1.2 Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan..... 87

Tabel 1.3.1.3 Tabel Jenis Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 88

Tabel 1.3.1.4 Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan..... 88

Tabel 1.3.1.5 Tabel Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum 91

Tabel 1.3.1.6 Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum..... 92

Tabel 1.3.1.7 Tabel Jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat..... 93

Tabel 1.3.1.8 Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat 93

Tabel 1.3.1.9 Tabel Jenis Pelayanan Dasar Bidang Trantibumlinmas..... 94

Tabel 1.3.1.10 Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas 95

Tabel 1.3.1.11 Tabel Jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial 96

Tabel 1.3.1.12 Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Sosial 97

Tabel 1.3.1.1 Capaian Indikator Kinerja IPM Kabupaten Gresik..... 99

Tabel 2.2.1.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 105

Tabel 2.2.1.2 Urusan Wajib Pendidikan 106
Tabel 2.2.1.3 Urusan Wajib Kesehatan 108
Tabel 2.2.1.4 Urusan Pekerjan Umum & Tata Ruang 112
Tabel 2.2.1.5 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 115
Tabel 2.2.1.6 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 117
Tabel 2.2.1.7 Urusan Sosial 119
Tabel 2.2.1.8 Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 121
Tabel 2.2.1.9 Rincian OPD yang Menangani Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 121
Tabel 2.2.1.10 Urusan Wajib Tenaga Kerja 123
Tabel 2.2.1.11 Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 125
Tabel 2.2.1.12 Urusan Pangan 126
Tabel 2.2.1.13 Urusan Pertanahan 127
Tabel 2.2.1.14 Urusan Lingkungan Hidup 128
Tabel 2.2.1.15 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 130
Tabel 2.2.1.16 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 132
Tabel 2.2.1.17 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 133
Tabel 2.2.1.18 Urusan Perhubungan 134
Tabel 2.2.1.19 Urusan Komunikasi dan Informatika 135
Tabel 2.2.1.20 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 137
Tabel 2.2.1.21 Urusan Penanaman Modal 137
Tabel 2.2.1.22 Urusan Kepemudaan dan Olahraga 138
Tabel 2.2.1.23 Urusan Statistik 140
Tabel 2.2.1.24 Urusan Persandian 140
Tabel 2.2.1.25 Urusan Kebudayaan 141
Tabel 2.2.1.26 Urusan Perpustakaan 142

Tabel 2.2.1.27 Urusan Kearsipan 143
Tabel 2.2.1.28 Urusan Pilihan yang dilaksanakan OPD.....144
Tabel 2.2.1.29 Urusan Kelautan dan Perikanan.....145
Tabel 2.2.1.30 Urusan Pariwisata 145
Tabel 2.2.1.31 Urusan Pertanian 146
Tabel 2.2.1.32 Urusan Perdagangan.....148
Tabel 2.2.1.33 Urusan Perindustrian 149
Tabel 2.2.2.1 Urusan Penunjang.....151
Tabel 2.2.2.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan) 153
Tabel 2.2.2.3. Penunjang Urusan Pemerintah (Keuangan).....154
Tabel 2.2.2.4 Penunjang Urusan Pemerintahan (Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) 156
Tabel 2.2.2.5 Penunjang Urusan Pemerintahan (Fungsi Pengawasan).....156
Tabel 2.2.2.6 Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan).....158
Tabel 2.2.2.7 Penunjang Urusan Pemerintahan (Hubungan dengan Perwakilan Daerah) ...159
Tabel 2.2.2.8 Penunjang Urusan Pemerintahan (Pelayanan Publik).....160
Tabel 2.2.2.9 Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan) 160
Tabel 4.1.2.1 Target SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025 335
Tabel 4.1.3.1 Realisasi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025 339
Tabel 4.1.4.1 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025 342
Tabel 4.1.5.1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025.....344
Tabel 4.2.2.1 Target SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025 355
Tabel 4.2.3.1 Realisasi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025.....371
Tabel 4.2.4.1 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025 394
Tabel 4.2.5.1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025.....395
Tabel 4.3.2.1 Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 406

Tabel 4.3.3.1 Realisasi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 410

Tabel 4.3.4.1 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 415

Tabel 4.3.5.1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025...417

Tabel 4.4.2.1 Target Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 422

Tabel 4.4.3.1 Realisasi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025.....423

Tabel 4.4.4.1 Anggaran Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 428

Tabel 4.4.5.1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 429

Tabel 4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025.....432

Tabel 4.5.2.1 Target SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 433

Tabel 4.5.3.1 Realisasi Penerapan SPM Urusan Trantibum Tahun 2025.....447

Tabel 4.5.4.1 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025.....469

Tabel 4.5.5.1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas 475

Tabel 4.6.2.1 Target SPM Urusan Sosial Tahun 2025 485

Tabel 4.6.3.1 Tabel Realisasi Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2025.....490

Tabel 4.6.4.1 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2025.....495

Tabel 4.6.5.1 Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Sosial 496

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik 5

Gambar 1.1.2 Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik 9

Gambar 1.1.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gresik 11

Gambar 1.1.4 Persentase Penduduk Per Kecamatan 12

Gambar 1.1.5 Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2020 – 2025 15

Gambar 1.1.6 Grafik Sebaran Keluarga dan Penduduk di Kabupaten Gresik Tahun 2025 17

BAB I Pendahuluan

1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun berdasarkan pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPPD);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 2026 Nomor: 100.2.7/989/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025;

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Gresik termasuk salah satu kabupaten di dalam wilayah pesisir utara Provinsi Jawa Timur. Letak Kabupaten Gresik berada di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibu Kota Provinsi. Pusat Pemerintahan Kabupaten Gresik yaitu Kecamatan Kebomas berada 20 Km sebelah Utara Kota Surabaya. Kabupaten Gresik terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 desa dan 26 kelurahan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak Antara 112°–113° BT dan 7°–8° LS dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Gresik berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Timur : Kota Surabaya dan Selat Madura

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto
4. Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Gresik beriklim tropis basah dan kering serta mengenal 2 musim kemarau dan musim penghujan. Musim Penghujan di Kabupaten Gresik biasanya berlangsung sejak bulan Desember hingga Maret dengan bulan terbasah Januari yang jumlah curah hujan perbulan lebih dari 250 mm per bulan. Sedangkan musim kemarau dimulai dari bulan Mei hingga bulan Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus. Suhu rata-rata tahunan di wilayah Kabupaten Gresik adalah ±28,3 °C dan tingkat kelembapan nisbi sebesar ±76%. Jumlah curah hujan tahunan di wilayah Gresik adalah 1200–1600 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90–120 hari hujan per tahun.

Total luas wilayah Kabupaten Gresik ialah 1.191,25 Km^2 yang terbagi antara wilayah daratan dengan luas 993,83 Km^2 dan wilayah kepulauan dengan luas 197,42 Km^2. Wilayah administrasi Kabupaten Gresik terbagi dalam 18 Kecamatan (2 Kecamatan berada di Pulau Bawean) serta terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Kecamatan Sangkapura merupakan wilayah kecamatan terluas di Kabupaten Gresik dengan luas 118,72 Km^2 atau sekitar 9,97 % terhadap luas Kabupaten Gresik. Sedangkan wilayah terkecil di Kabupaten Gresik adalah Kecamatan Gresik dengan luas 5,54 Km^2 atau sekitar 0,47 % terhadap luas Kabupaten Gresik.

Tabel 1.3.1.1 Data Luas Wilayah Menurut Kecamatan Se Kabupaten Gresik

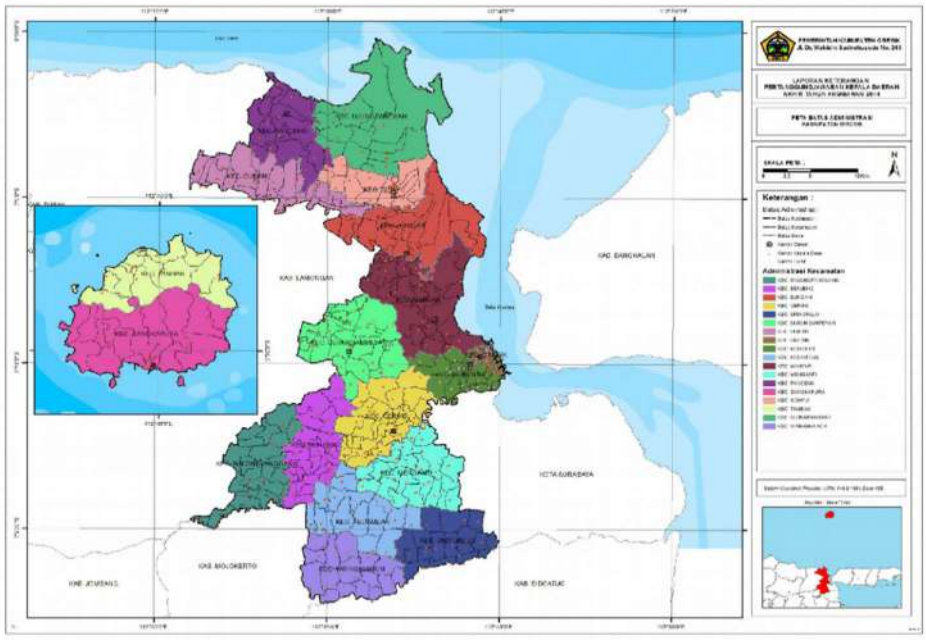
NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km^2)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
1	Dukun	59,03 Km^2	4.96
2	Balongpanggang	63,88 Km^2	5.36

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km^2)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
3	Panceng	62,59 Km^2	5.25
4	Benjeng	61,26 Km^2	5.14
5	Duduksampeyan	74,29 Km^2	6.24
6	Wringinanom	62,62 Km^2	5.26
7	Ujungpangkah	94,82 Km^2	7.96
8	Kedamean	65,96 Km^2	5.54
9	Sidayu	47,13 Km^2	3.96
10	Manyar	95,42 Km^2	8.01
11	Cerme	71,73 Km^2	6.02
12	Bungah	79,49 Km^2	6.67
13	Menganti	68,71 Km^2	5.77
14	Kebomas	30,06 Km^2	2.52
15	Driyorejo	51,30 Km^2	4.31
16	Gresik	5,54 Km^2	0.47
17	Sangkapura	118,72 Km^2	9.97
18	Tambak	78,70 Km^2	6.61
Jumlah		**1.191,25 Km^2**	**100,00**

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Gresik

Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Gambar 1.1.1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik



Sumber: Bapelitbangda Kab. Gresik

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelasi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan).

Berdasarkan kondisi topografis, pada umumnya ketinggian di wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Distribusi wilayah Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Wilayah dengan ketinggian 0 – 10 mdpl seluas 92.843,00 Ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik;
b) Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl seluas 18.246,00 Ha atau sekitar 15,54%;
c) Ketinggian diatas 20 mdpl seluas 6.318,00 Ha atau sekitar 5,38%.

Adapun distribusi ketinggian wilayah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.1.2 Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Meter dpl	10-20 Meter dpl	>20 Meter dpl	
Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00

Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.529,00
Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
Jumlah	92.843,00	18.246,00	6.318,00	119.513,00
Prosentase	79,08	15,54	5,38	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40%. Sebagian besar wilayah yang memiliki kemiringan 0 - 2% mempunyai luas 94.613,00 Ha atau sekitar 80,59%, sedangkan wilayah yang memiliki kemiringan lebih dari 40% mempunyai luas 1.072,23 Ha atau sekitar 0,91% yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2 (dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura. Adapun sebaran kelerengan beserta luasnya per kecamatan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.1.3 Keterangan per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	**Lereng**				**Jumlah**
	0-2 %	**3-15 %**	**16-40 %**	**>40 %**	
Wringinanom	3.968,00	2/286,00	0,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00

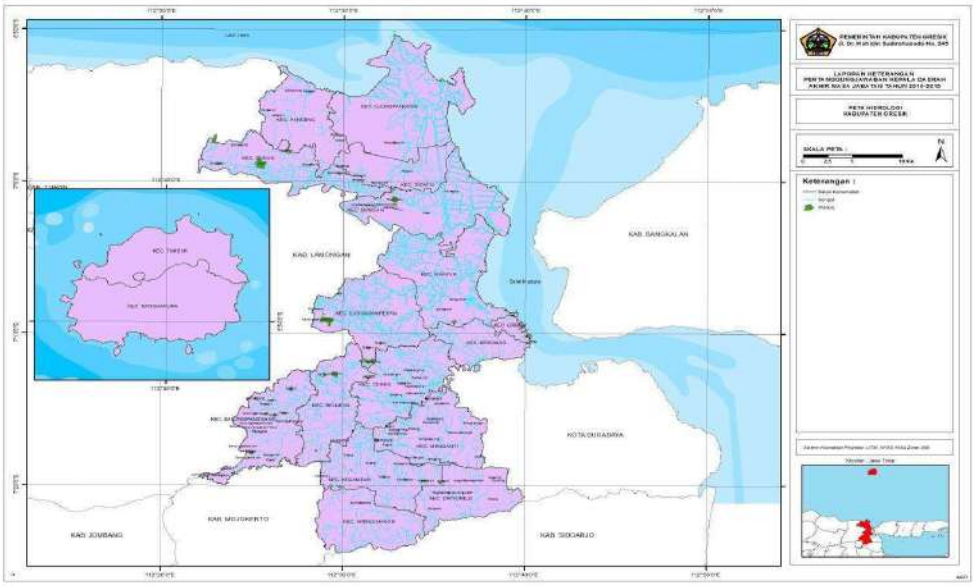
Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.529,00
Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
Tambak	143,00	2.756,94	4.899,81	55,25	7.739,00
Jumlah	94.613,00	12.251,28	9.470,49	1.071,23	119.513,00
Prosentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

Secara Hidrografi, keadaan permukaan air tanah di wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa yang memiliki permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara

Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong yang juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai tersebut memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi yang mampu membawa sedimen lebih banyak jika dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat terjadi. Adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai diatas, keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, mata air, pompa air dan sumur bor. Semua sumber air baku di Kabupaten Gresik berasal dari dam, waduk, telaga, bendungan serta sungai-sungai dengan klasifikasi I – IV. Sumber air tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan masyarakat.

Gambar 1.1.2 Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik



Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik

Secara **Klimatologi**, seperti halnya kondisi Jawa Timur lainnya, wilayah Kabupaten Gresik memiliki kondisi iklim yang hampir sama. Iklim Kabupaten Gresik termasuk tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli

sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84% terjadi pada bulan Maret dengan kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dan arah rata-rata ke Selatan. Iklim daerah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi:

a. Musim kering yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September;
b. Musim penghujan basah yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret;
c. Musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November; dan
d. Musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

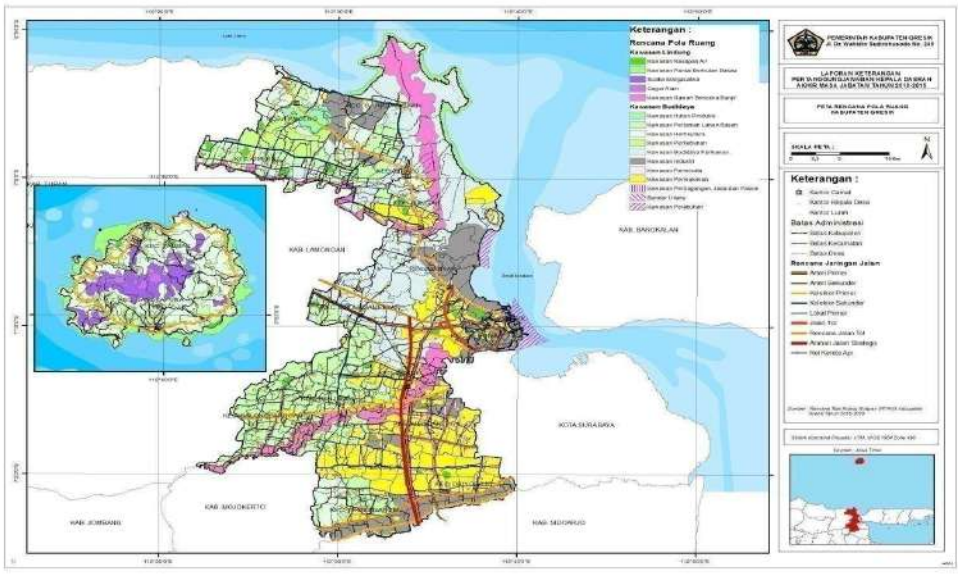
Adapun **Penggunaan Lahan** berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

a. Kawasan Lindung
    1. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9,426.12 hektar;
    2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5,828.62 hektar;
    3. Kawasan Terumbu Karang 5,387.00 hektar;
    4. Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3,831.60 hektar;
    5. Kawasan Resapan Air 1,252.58 hektar;
    6. Kawasan Cagar Alam 725.00 hektar;
b. Kawasan Budidaya
    1. Kawasan Permukiman 26,063.55 hektar;
    2. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23,372.70 hektar;
    3. Kawasan Perikanan Budidaya 21,678.36 hektar;
    4. Kawasan Hortikultura 16,885.48 hektar;
    5. Kawasan Industri 12,448.03 hektar;
    6. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6,644.01 hektar;
    7. Kawasan Perkebunan 2,573.67 hektar;
    8. Kawasan Hutan Produksi 1,017.00 hektar;

9. Kawasan Pertambangan 817.25 hektar;
10. Kawasan Pariwisata 82.85 hektar;
11. Kawasan Bandar Udara 68.44 hektar;
12. Kawasan Pelabuhan 1,257.69 hektar;

Adapun peta rencana pola ruang Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 1.1.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gresik

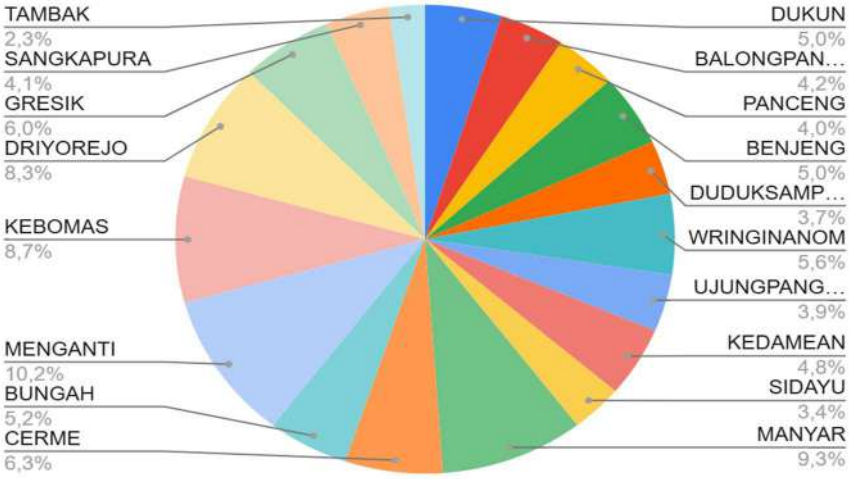


Sumber: RTRW Kab. Gresik Tahun 2010- 2030

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2025 sebanyak 1.343.463 jiwa yang terdiri dari 675.387 laki-laki dan 668.078 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2025 sebesar 1.127,78 jiwa/ Km^2. Sedangkan angka rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2025 sebesar 1:1. Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Menganti dengan jumlah penduduk sebanyak 137.285 jiwa dan wilayah dengan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Tambak dengan jumlah penduduk 31.420 jiwa.

Gambar 1.1.4 Persentase Penduduk Per Kecamatan



Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Gresik sebesar 14.442,24 jiwa/ Km^2 dan terendah ada di Kecamatan Tambak yaitu 399,24 jiwa/ Km^2.

d. Jumlah Kecamatan

Jumlah penduduk kabupaten dengan rincian per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3.1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk					
		Tahun 2024			Tahun 2025		
		L	P	Total	L	P	Total
1	DUKUN	33.321	32.765	**66,086**	33.580	33.009	**66.589**
2	BALONGPANGGANG	28.240	28,622	**56.862**	28.087	28.414	**56.501**
3	PANCENG	26.845	26.761	**53.606**	27.119	27.049	**54.168**
4	BENJENG	33.421	33.187	**66.608**	33.649	33.342	**66.991**

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk					
		Tahun 2024			Tahun 2025		
		L	P	Total	L	P	Total
5	DUDUKSAMPEYAN	24.868	24.868	**49.736**	24.854	24.978	**49.832**
6	WRINGINANOM	37.372	36.782	**74.154**	37.564	37.006	**74.570**
7	UJUNGPANGKAH	26.387	25.972	**52.359**	26.731	26.190	**52.921**
8	KEDAMEAN	32.448	31.765	**64.213**	32.846	32.121	**64.967**
9	SIDAYU	22.444	22.098	**44.542**	22.665	22.418	**45.083**
10	MANYAR	61.933	60.712	**122.645**	62.891	61.861	**124.752**
11	CERME	42.291	41.612	**83.903**	42.870	42.075	**84.945**
12	BUNGAH	35.240	34.341	**69.581**	35.514	34.696	**70.210**
13	MENGANTI	67.540	66.335	**133.875**	69.257	68.028	**137.285**
14	KEBOMAS	57.627	57.415	**115.078**	58.466	58.371	**116.837**
15	DRIYOREJO	54.918	54.006	**108.924**	55.959	55.081	**111.040**
16	GRESIK	39.737	40.268	**80.005**	39.687	40.323	**80.010**

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk					
		Tahun 2024			Tahun 2025		
		L	P	Total	L	P	Total
17	SANGKAPURA	27.434	26.877	**54.311**	27.959	27.385	**55.344**
18	TAMBAK	15.474	15.535	**31.009**	15.689	15.731	**31.420**
JUMLAH		**667.540**	**659.957**	**1.327.497**	**675.387**	**668.078**	**1.343.465**
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)		**1,20%**					
KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km^2)		**1.127,78 Jiwa/ Km^2**					

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2025

Dari Tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Gresik tahun 2025 mengalami kenaikan penduduk sebesar 15.968 dibanding tahun sebelumnya (tahun 2024). Hal tersebut dipengaruhi fluktuasi kenaikan dan penurunan akibat mortalitas, fertilitas, dan migrasi, serta dipengaruhi juga oleh proses pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas.

Gambar 1.1.5 Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2020 – 2025



Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik

Adapun jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada tahun 2025 sebanyak 437.725 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 428.915 keluarga, maka terjadi peningkatan jumlah keluarga sebanyak 8.810 keluarga atau 2,05%. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

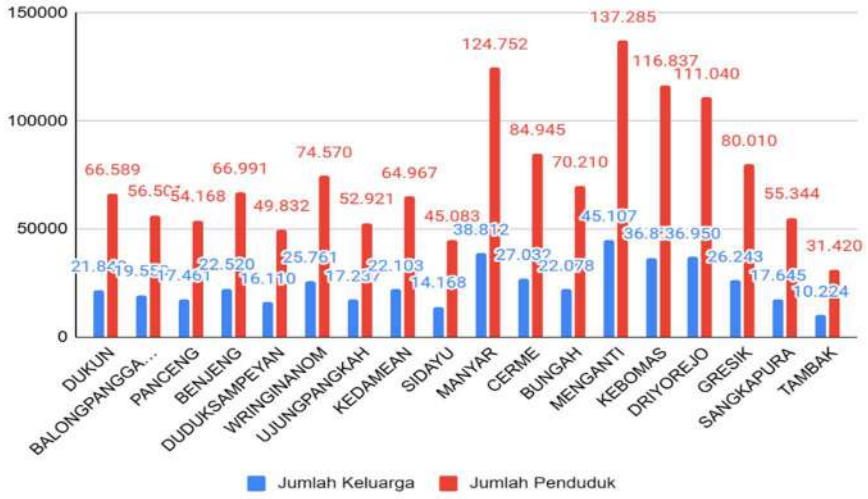
Tabel 1.3.1.5 Jumlah Kartu Keluarga Kabupaten Gresik Tahun 2024 – 2025

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KELURAHAN	JUMLAH KK
			2025
1	DUKUN	26	21.840
2	BALONGPANGGANG	25	19.559
3	PANCENG	14	17.461
4	BENJENG	23	22.520
5	DUDUKSAMPEYAN	23	16.110
6	WRINGINANOM	16	25.761
7	UJUNGPANGKAH	13	17.237
8	KEDAMEAN	15	22.103

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KELURAHAN	JUMLAH KK
			2025
9	SIDAYU	21	14.168
10	MANYAR	23	38.812
11	CERME	25	27.032
12	BUNGAH	22	22.078
13	MENGANTI	22	45.107
14	KEBOMAS	21	36.875
15	DRIYOREJO	16	36.950
16	GRESIK	21	26.243
17	SANGKAPURA	17	17.645
18	TAMBAK	13	10.224
	JUMLAH	**356**	**437.725**

Sumber: Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2025

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya. Diketahui bahwa pada tahun 2025, jumlah keluarga terbanyak berada di Kecamatan Menganti dengan jumlah 45.107 KK, yang selaras dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 137.285 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 10.224 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 31.420 jiwa



Gambar 1.1.6 Grafik Sebaran Keluarga dan Penduduk di Kabupaten Gresik Tahun 2025

Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3.1.6 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Kelurahan/ Desa	Dusun
1	Dukun	26 Desa	Sawo, Petiyin Tunggal, Tebuwung, Bulangan, Ima'an, Karangcangkring, Mejopetung, Mentaras, Bangeran, Babaksari, Babakbowo, Sambogunung, Gedung Kedo'an, Tiremenggal, Madumulyorejo, Lowayu Sembunganyar, Jrebeng, Dukuh Kembar, Baron, Sembungan Kidul, Kalirejo, Dukunanyar,	38 Dusun

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Kelurahan/ Desa	Dusun
			Padang Bandung, Sekargadung, Wonokerto,	
2	Balongpang-gang	25 Desa	Ngasin, Ganggang, Pinggir, Dohoagung, Klotok, Tenggor, Babatan, Pacuh, Pucung Balongpanggang, Wonorejo, Kedungsumber, Kedungpring, Mojogede, Bandungsekaran, Wahas, Karangsemanding, Banjaragung, Sekarputih, Wotansari, Tanahladean, Dapet, Brangkal, Jombangdelik, Ngampel	85 Dusun
3	Panceng	14 Desa	Banyutengah, Dalegan, Ketanen, Pantenan, Campurejo, Prupuh, Surowiti, Wotan, Siwalan, Sukodono, Sumurber, Serah, Doudo, Petung	14 Dusun
4	Benjeng	23 Desa	Jatirembe, Jogodalu, Pundut Trate, Metatu, Banter, Munggugebang, Klampok, Kedungsekar, Sirnoboyo, Karangkidul, Dermo, Kalipadang, Bulurejo, Munggugianti, Kedungrukem,	78 Dusun

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Kelurahan/ Desa	Dusun
			Bengkelolor, Gluranploso, Deliksumber, Sedapurklagen, Bulangkulon, Lundo, Balongmojo, Balongtunjung	
5	Duduksampeyan	23 Desa	Kramat, Kemudi, Wadak Lor, Wadak Kidul, Glanggang, Pandaan, Kawistowindu, Petisbenem, Tumapel, Setrohadi, Tambakrejo, Samirplapan, Kandangan, Tebaloan, Ambeng-Ambeng Watangrejo, Panjunan, Sumengko, Sumari, Tirem, Gredek, Bendungan, Duduksampeyan, Palebon	39 Dusun
6	Wringinanom	16 Desa	Sooko, Kesambenkulon, Sumbergede, Padangan, Watestanjung, Sembung, Kepuhklagen, Pasinanlemahputih, Sumengko, Wringinanom, Sumberame,Lebaniwaras, Kedunganyar, Sumberwaru, Lebanisuko, Mondoluku	72 Dusun
7	Ujungpangkah	13 Desa	Pangkah Kulon, Pangkah Wetan, Banyu Urip, Ngemboh, Cangaan, Gosari, Kebonagung,	28 Dusun

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Kelurahan/ Desa	Dusun
			Ketapanglor, Karangrejo, Bolo, Tanjangawan, Glatik, Sekapuk	
8	Kedamean	15 Desa	Cermen Lerek, Lampah, Glindah, Tulung, Turirejo, Katimoho, Slempit, Tanjung, Belahanrejo, Sidoraharjo, Mojowuku, Kedamean, Ngepung, Banyuurip, Manunggal	60 Dusun
9	Sidayu	21 Desa	Randu Boto, Wadeng, Sedangaran, Sambi Pondok, Mriyungan, Golokan, Sukorejo, Purwodadi, Racitengah, Srowo, Lasem, Kertosono, Ngawen, Pengulu, Bunderan, Sido Mulyo, Raci Kulon, Asem Papak, Gedangan, Kauman, Mojo Asem	16 Dusun
10	Manyar	23 Desa	Manyarejo, Morobakung, Tanggulrejo, Sembayat, Ngampel, Karangrejo, Gumeno, Sumberejo, Betoyoguci, Betoyokauman, Manyar Sidomukti, Leran, Sukomulyo, Penganden, Banjarsari, Pongangan, Roomo, Tebalo, Suci, Yosowilangun,	47 Dusun

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Kelurahan/ Desa	Dusun
			Pejangganan, Banyuwangi, Manyar Sidorukun	
11	Cerme	25 Desa	Banjarsari, Padeg, Gedangkulut, Semampir, Wedani, Jono, Kambingan, Pandu, Cerme Lor, Cagakagung, Ngabetan, Kandangan, Cerme Kidul, Dungus, Betiting, Iker-Iker Geger, Dooro, Lengkong, Dampaan, Gununganyar, Morowudi, Ngembung, Dadapkuning, Sukoanyar, Tambakberas, Jono	60 Dusun
12	Bungah	22 Desa	Gumeng, Sungonlegowo, Bedanten, Tanjung Widoro, Indrodelik, Raciwetan, Pegundan, Kemangi, Mojopurowetan,Mojopurogede, Kisik, Sidomukti, Melirang, Watuagung, Abar-Abir, Sidokumpul, Kramat, Masangan, Bungah, Sidorejo, Sukorejo, Sukowati	67 Dusun
13	Menganti	22 Desa	Kepatihan, Hendrosari, Gempolkurung, Palemwatu, Drancang, Pengalangan,	78 Dusun

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Kelurahan/ Desa	Dusun
			Boteng, Gadingwatu, Randupadangan, Domas, Sidojangkung, Hulaan, Setro, Bringkang, Sidowugu, Pranti, Menganti, Laban, Mojotengah, Boboh, Beton, Putatlor	
14	Kebomas	11 Desa	Dahanrejo, Giri, Karangkering, Kedanyang, Kembangan, Klangonan, Randuagung, Segoromadu, Sekarkurung, Sukorejo. Prambangan	56 Dusun
		10 Kelurahan	Gending, Gulomantung, Indro, KawisAnyar, Kebomas, Ngargosari, Sidomoro, Sidomukti, Singosari, Tenggulunan	
15	Driyorejo	16 Desa	Wedoroanom, Gadung, Randegansari, Petiken, Karangandong, Mojosarirejo, Mulung, Sumput, Bambe, Kesambenwetan, Tenaru, Tanjungan, Banjaran, Cangkir, Driyorejo, Krikilan, Randengansari	49 Dusun
16	Gresik	5 Desa	Gapurosukolilo, Kramatinggil, Pulopancikan, Sidorukun, Tlogobendung	

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Kelurahan/ Desa	Dusun
		16 Kelurahan	Bedilan, Karangpoh, Karangturi, Kebungson, Kemuteran, Kroman, Lumpur, Ngipik, Pekauman, Pekelingan, Sidokumpul, Sukodono, Sukorame, Tlogopatut, Tlogopojok, Trate.	Tidak Ada Dusun
17	Sangkapura	17 Desa	Kebuntelukdalam, Gunungteguh, Patarselamat, Suwari, Pudakitbarat, Pudakittimur, Bululanjang, Daun, Lebak, Sunaiteluk, Sawahmulya, Kotakusuma, Balikterus, Dekatagung, Kumalasa, Sidogedungbatu, Sungairujing	116 Dusun
18	Tambak	13 Desa	Diponggo, Tambak, Kepuhteluk, Pekalongan, Grejeg, Sukalela, Kepuhlegundi, Klomponggubug, Paromaan, Tanjungori, Gelam, Sukaoneng, Telukjatidawang	90 Dusun
	Jumlah	**330 Desa dan 26 Kelurahan**		**993 Dusun**

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.1.7 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik serta Dasar Hukum Pembentukkan Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
Dinas		
1	Dinas Pendidikan	Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal, Satuan Pendidikan Non Formal
2	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tusi Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
4	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik
6	Dinas Sosial	Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik
7	Dinas Tenaga Kerja	Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik
8	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan

No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
9	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gresik
12	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Nomor 57 tentang Tusi Dinas Perhubungan
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tusi Dinas Komunikasi Dan Informatika
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Nomor 60 tentang Tusi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
16	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Gresik
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Gresik
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Peraturan Bupati Gresik Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gresik
19	Dinas Perikanan	Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
20	Dinas Pertanian	Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian
Badan		
21	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
22	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja
23	Badan Kepegawaian Daerah	Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik

No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik
Sekretariat		
26	Sekretariat Daerah	
	- Bagian Umum	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
	- Bagian Humas dan Protokol	Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik

No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	- Bagian Hukum	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
	- Bagian Pemerintahan	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
	- Bagian Perekonomian dan SDA	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja

No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
	- Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
	- Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
	- Bagian Program Pembangunan	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
27	Sekretariat Dewan	Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik
Kecamatan		
28	Kecamatan Gresik	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
29	Kecamatan Kebomas	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
30	Kecamatan Manyar	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
31	Kecamatan Cerme	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
32	Kecamatan Benjeng	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
33	Kecamatan Balongpanggang	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
34	Kecamatan Duduksampeyan	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
35	Kecamatan Driyorejo	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
36	Kecamatan Wringinanom	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
37	Kecamatan Kedamean	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
38	Kecamatan Menganti	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
39	Kecamatan Sidayu	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
40	Kecamatan Ujung Pangkah	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
41	Kecamatan Panceng	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
42	Kecamatan Bungah	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
43	Kecamatan Dukun	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
44	Kecamatan Sangkapura	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
45	Kecamatan Tambak	Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan
Inspektorat		
46	Inspektorat Daerah	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

No	Nama Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp 3,863,790,043,589.08, sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 3.808.784.958.343,28 atau mencapai 98.58%. Kinerja Pendapatan Daerah terbagi atas Capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 94,08%, capaian Pendapatan Transfer mencapai 101,64% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah mencapai 0% Berikut Rincian Realisasi Jenis Pendapatan pada Tahun 2025:

Tabel 1.3.1.8 Pemerintahan Kabupaten Gresik Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	2		3	4	5	6
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.1.1**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.1.1.1**				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	1,038,700,000,000.00	960,468,393,710.00	92.47	793,322,673,442.23
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	236,145,900,000.00	118,008,753,104.60	49.97	87,430,225,680.00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	12,645,000,000.00	12,267,234,269.30	97.01	13,425,554,336.30
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	310,353,235,728.00	294,284,303,516.86	94.82	276,843,902,540.56
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**	**5.1.1.1**	**1,597,844,135,728.00**	**1,385,028,684,600.76**	**86.68**	**1,171,022,355,999.09**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.2**				
9	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan**	**5.1.1.2.1**				
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1	221,213,304,000.00	252,458,013,000.00	114.12	200,617,875,334.00
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1	952,986,932,000.00	976,604,015,000.00	102.48	915,176,119,975.00
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1	102,267,487,000.00	98,720,516,184.00	96.53	122,396,553,183.00
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1	367,434,277,840.00	353,934,571,941.00	96.33	334,220,697,453.00
14	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**5.1.1.2.1**	**1,643,902,000,840.00**	**1,681,717,116,125.00**	**102.30**	**1,572,411,245,945.00**
15	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**5.1.1.2.2**				

No.	Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
1	2		3	4	5	6
16	Dana Desa	5.1.1.2.2	321,507,175,000.00	321,507,175,000.00	100.00	318,788,865,000.00
17	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2	36,385,778,000.00	36,385,778,000.00	100.00	0.00
18	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**5.1.1.2.2**	**357,892,953,000.00**	**357,892,953,000.00**	**100.00**	**318,788,865,000.00**
19	**Pendapatan Transfer Antar daerah**	**5.1.1.2.3**				
20	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3	300,596,613,624.00	289,414,392,200.00	96.28	334,088,066,900.00
21	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3	16,180,867,000.00	16,180,867,000.00	100.00	16,190,424,121.00
22	**Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**5.1.1.2.3**	**316,777,480,624.00**	**305,595,259,200.00**	**96.47**	**350,278,491,021.00**
23	**Jumlah Pendapatan Transfer**	**5.1.1.2**	**2,318,572,434,464.00**	**2,345,205,328,325.00**	**101.15**	**2,241,478,601,966.00**
24	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.1.1.3**				
25	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	0.00	186,000,000.00	0.00	3,890,000,000.00
26	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.1.1.3	0.00	0.00	-	0.00
27	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**5.1.1.3**	**0.00**	**186,000,000.00**	**-**	**3,890,000,000.00**
28	**JUMLAH PENDAPATAN DAERAH**	**5.1.1**	**3,916,416,570,192.00**	**3,730,420,012,925.76**	**95.25**	**3,416,390,957,965.09**
29	**BELANJA DAERAH**	**5.1.2**				
30	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**				
31	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1,127,045,955,366.13	1,085,548,797,241.45	96.32	1,009,787,854,448.88
32	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1,143,117,115,411.87	1,010,692,655,425.09	88.42	868,397,712,028.13

No.	Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
33	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	964,120,371.00	964,120,370.60	100.00	0.00
34	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	398,709,272,025.00	382,505,675,850.32	95.94	303,819,808,881.60
35	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	27,467,447,500.00	15,651,445,000.00	56.98	20,473,066,972.00
36	**Jumlah Belanja Operasi**	**5.1.2.1**	**2,697,303,910,674.00**	**2,495,362,693,887.46**	**92.51**	**2,202,478,442,330.61**
37	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**				
38	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	9,517,500,000.00	1,727,306,005.00	18.15	11,021,176,466.00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	108,896,637,327.00	86,126,274,741.00	79.09	123,664,589,654.00
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	134,290,136,174.00	118,169,885,080.81	88.00	149,832,834,297.05
41	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	220,349,338,060.00	208,508,996,188.58	94.63	133,679,243,538.30
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	8,626,438,504.00	8,617,485,563.00	99.90	10,702,434,291.00
43	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1,324,275,000.00	1,312,000,000.00	99.07	2,440,000,000.00
44	**Jumlah Belanja Modal**	**5.1.2.2**	**483,004,325,065.00**	**424,461,947,578.39**	**87.88**	**431,340,278,246.35**
45	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.1.2.3**				
46	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	6,221,807,986.00	2,026,255,613.38	32.57	1,183,127,722.00
47	**Jumlah Belanja Tidak Terduga**	**5.1.2.3**	**6,221,807,986.00**	**2,026,255,613.38**	**32.57**	**1,183,127,722.00**
48	**BELANJA TRANSFER**	**5.1.2.4**				
49	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1	103,870,000,000.00	99,090,915,050.00	95.40	84,525,792,400.00
50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.2	23,598,390,000.00	16,322,812,800.00	69.17	12,026,574,200.00
51	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.3	660,763,137,197.00	660,311,350,000.00	99.93	687,083,019,791.00
52	**Jumlah Belanja Transfer**	**5.1.2.4**	**788,231,527,197.00**	**775,725,077,850.00**	**98.41**	**783,635,386,391.00**
53	**JUMLAH BELANJA DAERAH**	**5.1.2**	**3,974,761,570,922.00**	**3,697,575,974,929.23**	**93.03**	**3,418,637,234,689.96**
54	**SURPLUS / DEFISIT**	**5.1.3**	**-58,345,000,730.00**	**32,844,037,996.53**	**-56.29**	**-2,246,276,724.87**

No.	Uraian	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan TA 2025	Realisasi TA 2025	%	Realisasi TA 2024
55	**PEMBIAYAAN**	**5.1.4**				
56	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.1**				
57	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1	78,495,000,730.00	76,370,858,730.47	97.29	59,002,535,455.34
58	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.4.1	0.00	0.00	0.00	20,000,000,000.00
59	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1	0.00	7,000,000.00	0.00	45,925,000.00
60	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**	**5.1.4.1**	**78,495,000,730.00**	**76,377,858,730.47**	**97.30**	**79,048,460,455.34**
61	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.2**				
62	Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
63	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.4.2	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	0.00	0.00
64	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**	**5.1.4.2**	**20,150,000,000.00**	**20,150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
65	**PEMBIAYAAN NETTO**	**5.1.4**	**58,345,000,730.00**	**56,227,858,730.47**	**96.37**	**79,048,460,455.34**
66	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**5.1.5**	**0.00**	**89,071,896,727.00**		**76,802,183,730.47**

**Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama*

Tabel 1.3.1.9 Pemerintahan Kabupaten Gresik Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

Tahun Anggaran 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	**3,916,416,570,192.00**	**3,730,420,012,925.76**	**-185,996,557,266.24**	**-4.75**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**309,529,135,728.00**	**288,491,643,212.97**	**-21,037,492,515.03**	**-6.80**
1.02 1.02.0.00.0.00.01.	**KESEHATAN**	**307,223,235,728.00**	**286,626,377,838.61**	**-20,596,857,889.39**	**-6.70**
	DINAS KESEHATAN	307,223,235,728.00	286,626,377,838.61	-20,596,857,889.39	-6.70
1.03 1.03.2.10.0.00.00.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**510,000,000.00**	**179,001,000.00**	**-330,999,000.00**	**-64.90**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	510,000,000.00	179,001,000.00	-330,999,000.00	-64.90
1.04 1.04.1.03.0.00.01.	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1,795,900,000.00**	**1,686,264,374.36**	**-109,635,625.64**	**-6.10**
	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,795,900,000.00	1,686,264,374.36	-109,635,625.64	-6.10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**133,340,000,000.00**	**62,549,020,374.36**	**-70,790,979,625.64**	**-53.09**
2.11 2.11.0.00.0.00.01.	**LINGKUNGAN HIDUP**	**8,600,000,000.00**	**3,643,108,934.00**	**-4,956,891,066.00**	**-57.64**
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,600,000,000.00	3,643,108,934.00	-4,956,891,066.00	-57.64

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.15 2.15.0.00.0.00.01.	**PERHUBUNGAN**	**21,800,000,000.00**	**5,929,593,508.00**	**-15,870,406,492.00**	**-72.80**
	DINAS PERHUBUNGAN	21,800,000,000.00	5,929,593,508.00	-15,870,406,492.00	-72.80
2.17 2.17.3.30.3.31.07.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**2,500,000,000.00**	**2,062,249,771.00**	**-437,750,229.00**	**-17.51**
	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2,500,000,000.00	2,062,249,771.00	-437,750,229.00	-17.51
2.18 2.18.0.00.0.00.23.	**PENANAMAN MODAL**	**100,440,000,000.00**	**50,914,068,161.36**	**-49,525,931,838.64**	**-49.31**
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100,440,000,000.00	50,914,068,161.36	-49,525,931,838.64	-49.31
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**1,130,000,000.00**	**1,130,290,023.00**	**290,023.00**	**0.03**
3.25 3.25.0.00.0.00.21.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**165,000,000.00**	**166,045,000.00**	**1,045,000.00**	**0.63**
	DINAS PERIKANAN	165,000,000.00	166,045,000.00	1,045,000.00	0.63
3.26 3.26.2.22.2.19.02.	**PARIWISATA**	**850,000,000.00**	**786,621,023.00**	**-63,378,977.00**	**-7.46**
	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	850,000,000.00	786,621,023.00	-63,378,977.00	-7.46
3.27 3.27.2.09.0.00.10.	**PERTANIAN**	**115,000,000.00**	**177,624,000.00**	**62,624,000.00**	**54.46**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	DINAS PERTANIAN	115,000,000.00	177,624,000.00	62,624,000.00	54.46
	UNSUR PENUNJANG	**3,472,417,434,464.00**	**3,378,249,059,315.43**	**-94,168,375,148.57**	**-2.71**
5.02 5.02.0.00.0.00.05.	**KEUANGAN**	**3,472,417,434,464.00**	**3,378,249,059,315.43**	**-94,168,375,148.57**	**-2.71**
	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3,472,417,434,464.00	3,378,249,059,315.43	-94,168,375,148.57	-2.71
	BELANJA	**3,974,761,570,922.00**	**3,697,575,974,929.23**	**-277,185,595,992.77**	**-6.97**
1.01 1.01.0.00.0.00.01.5.	**Pendidikan**	**1,030,998,567,356.00**	**993,929,098,739.51**	**-37,069,468,616.49**	**-3.60**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
1.01	**1.01.0.00.0.00.01.5.**	**DINAS PENDIDIKAN**	**1,030,998,567,356.00**	**993,929,098,739.51**	**-37,069,468,616.49**	**-3.60**
1.01	**1.01.0.00.0.00.01.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**985,087,804,623.00**	**949,134,527,072.96**	**-35,953,277,550.04**	**-3.65**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	522,465,946,309.13	514,333,879,269.96	-8,132,067,039.17	-1.56

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
1.01	1.01.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	180,687,802,673.87	164,606,606,219.00	-16,081,196,454.87	-8.90
1.01	1.01.0.00.0.00.01.5.1.05.	Belanja Hibah	278,914,855,640.00	270,194,041,584.00	-8,720,814,056.00	-3.13
1.01	1.01.0.00.0.00.01.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	3,019,200,000.00	0.00	-3,019,200,000.00	-100.00
1.01	**1.01.0.00.0.00.01.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**45,910,762,733.00**	**44,794,571,666.55**	**-1,116,191,066.45**	**-2.43**
1.01	1.01.0.00.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,147,292,578.00	15,053,757,992.00	-93,534,586.00	-0.62
1.01	1.01.0.00.0.00.01.5.2.05.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22,230,622,100.00	21,210,525,544.55	-1,020,096,555.45	-4.59
1.01	1.01.0.00.0.00.01.5.2.06.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,532,848,055.00	8,530,288,130.00	-2,559,925.00	-0.03
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.**	**KESEHATAN**	**758,428,652,559.00**	**710,547,619,525.10**	**-47,881,033,033.90**	**-6.31**
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.5.**	**DINAS KESEHATAN**	**758,428,652,559.00**	**710,547,619,525.10**	**-47,881,033,033.90**	**-6.31**
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**668,797,294,472.00**	**640,384,157,609.77**	**-28,413,136,862.23**	**-4.25**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	268,845,673,090.00	265,513,532,416.93	-3,332,140,673.07	-1.24

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	397,151,621,382.00	372,072,457,553.84	-25,079,163,828.16	-6.31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.5.1.05.	Belanja Hibah	2,800,000,000.00	2,798,167,639.00	-1,832,361.00	-0.07
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**89,631,358,087.00**	**70,163,461,915.33**	**-19,467,896,171.67**	**-21.72**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,070,228,087.00	50,347,957,927.00	-10,722,270,160.00	-17.56
1.02	1.02.0.00.0.00.01.5.2.05.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,811,130,000.00	19,815,503,988.33	-7,995,626,011.67	-28.75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.5.2.06.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	750,000,000.00	0.00	-750,000,000.00	-100.00
1.03	**1.03.2.10.0.00.00.**	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**368,451,610,940.00**	**351,085,339,759.49**	**-17,366,271,180.51**	**-4.71**
1.03	**1.03.2.10.0.00.00.5.**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**	**253,170,832,872.00**	**240,623,590,844.53**	**-12,547,242,027.47**	**-4.96**
1.03	**1.03.2.10.0.00.00.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**69,995,217,911.00**	**65,735,628,113.67**	**-4,259,589,797.33**	**-6.09**
1.03	1.03.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	12,942,697,553.00	12,609,796,110.03	-332,901,442.97	-2.57
1.03	1.03.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57,052,520,358.00	53,125,832,003.64	-3,926,688,354.36	-6.88

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
1.03	**1.03.2.10.0.00.00.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**183,175,614,961.00**	**174,887,962,730.86**	**-8,287,652,230.14**	**-4.52**
1.03	1.03.2.10.0.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,029,497,275.00	793,445,784.00	-236,051,491.00	-22.93
1.03	1.03.2.10.0.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,927,172,631.00	1,304,896,027.69	-622,276,603.31	-32.29
1.03	1.03.2.10.0.00.00.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180,218,945,055.00	172,789,620,919.17	-7,429,324,135.83	-4.12
1.03	**1.04.1.03.0.00.01.5.**	**DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**115,280,778,068.00**	**110,461,748,914.96**	**-4,819,029,153.04**	**-4.18**
1.03	**1.04.1.03.0.00.01.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**19,826,619,693.00**	**18,037,577,394.85**	**-1,789,042,298.15**	**-9.02**
1.03	1.04.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14,391,619,693.00	12,602,577,394.85	-1,789,042,298.15	-12.43
1.03	1.04.0.00.0.00.01.5.1.05.	Belanja Hibah	5,435,000,000.00	5,435,000,000.00	0.00	0.00
1.03	**1.04.1.03.0.00.01.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**95,454,158,375.00**	**92,424,171,520.11**	**-3,029,986,854.89**	**-3.17**
1.03	1.04.1.03.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95,858,650.00	33,300,000.00	-62,558,650.00	-65.26
1.03	1.04.1.03.0.00.01.5.2.04.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70,171,037,353.00	68,342,958,515.46	-1,828,078,837.54	-2.61

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
1.06	1.06.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174,601,576.00	164,553,000.00	-10,048,576.00	-5.76
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	**2.07.0.00.0.00.01.**	**TENAGA KERJA**	**11,540,775,900.00**	**10,649,453,736.22**	**-891,322,163.78**	**-7.72**
2.07	**2.07.0.00.0.00.01.5.**	**DINAS TENAGA KERJA**	**11,540,775,900.00**	**10,649,453,736.22**	**-891,322,163.78**	**-7.72**
2.07	**2.07.0.00.0.00.01.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**10,675,280,604.00**	**9,837,709,692.15**	**-837,570,911.85**	**-7.85**
2.07	2.07.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4,832,006,000.00	4,703,196,377.15	-128,809,622.85	-2.67
2.07	2.07.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5,843,274,604.00	5,134,513,315.00	-708,761,289.00	-12.13
2.07	**2.07.0.00.0.00.01.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**865,495,296.00**	**811,744,044.07**	**-53,751,251.93**	**-6.21**
2.07	2.07.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	607,679,096.00	557,807,000.00	-49,872,096.00	-8.21
2.07	2.07.0.00.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	257,816,200.00	253,937,044.07	-3,879,155.93	-1.50
2.08	**2.14.2.08.0.00.05.**	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**3,612,616,000.00**	**3,051,243,698.00**	**-561,372,302.00**	**-15.54**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
2.08	**2.14.2.08.0.00.05.5.**	**DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**3,612,616,000.00**	**3,051,243,698.00**	**-561,372,302.00**	**-15.54**
2.08	**2.14.2.08.0.00.05.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**3,612,616,000.00**	**3,051,243,698.00**	**-561,372,302.00**	**-15.54**
2.08	2.14.2.08.0.00.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3,612,616,000.00	3,051,243,698.00	-561,372,302.00	-15.54
2.09	**3.27.2.09.0.00.10.**	**PANGAN**	**880,408,825.00**	**699,829,150.00**	**-180,579,675.00**	**-20.51**
2.09	**3.27.2.09.0.00.10.5.**	**DINAS PERTANIAN**	**880,408,825.00**	**699,829,150.00**	**-180,579,675.00**	**-22.99**
2.09	**3.27.2.09.0.00.10.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**874,468,825.00**	**694,029,150.00**	**-180,439,675.00**	**-20.63**
2.09	3.27.2.09.0.00.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	874,468,825.00	694,029,150.00	-180,439,675.00	-20.63
2.09	**3.27.2.09.0.00.10.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**5,940,000.00**	**5,800,000.00**	**-140,000.00**	**-2.36**
2.09	3.27.2.09.0.00.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,940,000.00	5,800,000.00	-140,000.00	-2.36
2.10	**1.03.2.10.0.00.00.**	**PERTANAHAN**	**10,875,000,000.00**	**2,416,732,779.00**	**-8,458,267,221.00**	**-77.78**
2.10	**1.03.2.10.0.00.00.5.**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**	**10,875,000,000.00**	**2,416,732,779.00**	**-8,458,267,221.00**	**-77.78**
2.10	**1.03.2.10.0.00.00.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**1,357,500,000.00**	**689,426,774.00**	**-668,073,226.00**	**-49.21**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
2.10	1.03.2.10.0.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,357,500,000.00	689,426,774.00	-668,073,226.00	-49.21
2.10	**1.03.2.10.0.00.00.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**9,517,500,000.00**	**1,727,306,005.00**	**-7,790,193,995.00**	**-81.85**
2.10	1.03.2.10.0.00.00.5.2.01.	Belanja Modal Tanah	9,517,500,000.00	1,727,306,005.00	-7,790,193,995.00	-81.85
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.**	**LINGKUNGAN HIDUP**	**49,076,735,294.00**	**41,911,699,872.11**	**-7,165,035,421.89**	**-14.60**
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.5.**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**49,076,735,294.00**	**41,911,699,872.11**	**-7,165,035,421.89**	**-14.60**
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**37,959,438,870.00**	**35,016,646,609.22**	**-2,942,792,260.78**	**-7.75**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	9,135,965,489.00	8,914,487,747.55	-221,477,741.45	-2.42
2.11	2.11.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28,254,293,413.00	25,532,978,893.67	-2,721,314,519.33	-9.63
2.11	2.11.0.00.0.00.01.5.1.05.	Belanja Hibah	569,179,968.00	569,179,968.00	0.00	0.00
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**11,117,296,424.00**	**6,895,053,262.89**	**-4,222,243,161.11**	**-37.98**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,226,831,271.00	3,804,116,656.00	-2,422,714,615.00	-38.91
2.11	2.11.0.00.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,279,108,908.00	2,483,580,361.89	-1,795,528,546.11	-41.96

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
2.11	2.11.0.00.0.00.01.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	611,356,245.00	607,356,245.00	-4,000,000.00	-0.65
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.**	**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**11,531,752,187.00**	**10,317,545,347.64**	**-1,214,206,839.36**	**-10.53**
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.5.**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	**11,531,752,187.00**	**10,317,545,347.64**	**-1,214,206,839.36**	**-10.53**
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**11,271,635,287.00**	**10,089,420,347.64**	**-1,182,214,939.36**	**-10.49**
2.12	2.12.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4,738,026,438.00	4,495,494,523.64	-242,531,914.36	-5.12
2.12	2.12.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6,533,608,849.00	5,593,925,824.00	-939,683,025.00	-14.38
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**260,116,900.00**	**228,125,000.00**	**-31,991,900.00**	**-12.30**
2.12	2.12.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260,116,900.00	228,125,000.00	-31,991,900.00	-12.30
2.13	**2.13.0.00.0.00.01.**	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**19,094,132,355.00**	**17,813,826,070.40**	**-1,280,306,284.60**	**-6.71**
2.13	**2.13.0.00.0.00.01.5.**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**19,094,132,355.00**	**17,813,826,070.40**	**-1,280,306,284.60**	**-6.71**
2.13	**2.13.0.00.0.00.01.5.1.01.**	**BELANJA OPERASI**	**19,026,509,505.00**	**17,757,551,070.40**	**-1,268,958,434.60**	**-6.67**
2.13	2.13.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4,438,718,086.00	4,321,131,817.40	-117,586,268.60	-2.65
2.13	2.13.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14,587,791,419.00	13,436,419,253.00	-1,151,372,166.00	-7.89
2.13	**2.13.0.00.0.00.01.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**67,622,850.00**	**56,275,000.00**	**-11,347,850.00**	**-16.78**
2.13	2.13.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67,622,850.00	56,275,000.00	-11,347,850.00	-16.78
2.14	**2.14.2.08.0.00.05.**	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**22,172,778,977.00**	**21,029,185,932.06**	**-1,143,593,044.94**	**-5.16**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
2.14	**2.14.2.08.0.00.05.5.**	**DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**	**22,172,778,977.00**	**21,029,185,932.06**	**-1,143,593,044.94**	**-5.16**
2.14	**2.14.2.08.0.00.05.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**20,177,496,577.00**	**19,117,765,932.06**	**-1,059,730,644.94**	**-5.25**
2.14	2.14.2.08.0.00.05.5.1.01.	Belanja Pegawai	4,066,998,946.00	3,917,264,986.06	-149,733,959.94	-3.68
2.14	2.14.2.08.0.00.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16,110,497,631.00	15,200,500,946.00	-909,996,685.00	-5.65
2.14	**2.14.2.08.0.00.05.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**1,995,282,400.00**	**1,911,420,000.00**	**-83,862,400.00**	**-4.20**
2.14	2.14.2.08.0.00.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,966,282,400.00	1,911,420,000.00	-54,862,400.00	-2.79
2.14	2.14.2.08.0.00.05.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29,000,000.00	0.00	-29,000,000.00	-100.00
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.**	**PERHUBUNGAN**	**70,327,454,107.00**	**60,792,982,940.11**	**-9,534,471,166.89**	**-13.56**
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.5.**	**DINAS PERHUBUNGAN**	**70,327,454,107.00**	**60,792,982,940.11**	**-9,534,471,166.89**	**-13.56**
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**66,979,976,550.00**	**58,586,040,020.11**	**-8,393,936,529.89**	**-12.53**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	7,429,787,958.00	7,144,322,581.11	-285,465,376.89	-3.84
2.15	2.15.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59,550,188,592.00	51,441,717,439.00	-8,108,471,153.00	-13.62
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**3,347,477,557.00**	**2,206,942,920.00**	**-1,140,534,637.00**	**-34.07**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,583,932,533.00	1,127,556,420.00	-456,376,113.00	-28.81
2.15	2.15.0.00.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,763,545,024.00	1,079,386,500.00	-684,158,524.00	-38.79

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.**	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**23,439,745,639.00**	**22,414,225,142.30**	**-1,025,520,496.70**	**-4.38**
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.5.**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**23,439,745,639.00**	**22,414,225,142.30**	**-1,025,520,496.70**	**-4.38**
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**18,771,823,284.00**	**18,545,483,142.30**	**-226,340,141.70**	**-1.21**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
2.16	2.16.2.20.2.21.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4,679,530,695.00	4,622,795,184.30	-56,735,510.70	-1.21
2.16	2.16.2.20.2.21.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14,092,292,589.00	13,922,687,958.00	-169,604,631.00	-1.20
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**4,667,922,355.00**	**3,868,742,000.00**	**-799,180,355.00**	**-17.12**
2.16	2.16.2.20.2.21.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,067,922,355.00	3,275,742,000.00	-792,180,355.00	-19.47
2.16	2.16.2.20.2.21.01.5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	600,000,000.00	593,000,000.00	-7,000,000.00	-1.17
2.17	**2.17.3.30.3.31.07.**	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**10,743,273,600.00**	**10,288,965,465.98**	**-454,308,134.02**	**-4.23**
2.17	**2.17.3.30.3.31.07.5.**	**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**10,743,273,600.00**	**10,288,965,465.98**	**-454,308,134.02**	**-4.23**
2.17	**2.17.3.30.3.31.07.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**10,743,273,600.00**	**10,288,965,465.98**	**-454,308,134.02**	**-4.23**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
2.17	2.17.3.30.3.31.07.5.1.01.	Belanja Pegawai	7,556,688,000.00	7,238,383,421.98	-318,304,578.02	-4.21
2.17	2.17.3.30.3.31.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3,186,585,600.00	3,050,582,044.00	-136,003,556.00	-4.27
2.18	**2.18.0.00.0.00.23.**	**PENANAMAN MODAL**	**12,145,696,947.00**	**11,378,667,628.98**	**-767,029,318.02**	**-6.32**
2.18	**2.18.0.00.0.00.23.5.**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**12,145,696,947.00**	**11,378,667,628.98**	**-767,029,318.02**	**-6.32**
2.18	**2.18.0.00.0.00.23.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**12,052,623,432.00**	**11,311,111,541.83**	**-741,511,890.17**	**-6.15**
2.18	2.18.0.00.0.00.23.5.1.01.	Belanja Pegawai	7,032,118,497.00	6,810,235,465.83	-221,883,031.17	-3.16
2.18	2.18.0.00.0.00.23.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5,020,504,935.00	4,500,876,076.00	-519,628,859.00	-10.35
2.18	**2.18.0.00.0.00.23.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**93,073,515.00**	**67,556,087.15**	**-25,517,427.85**	**-27.42**
2.18	2.18.0.00.0.00.23.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65,614,515.00	40,253,020.00	-25,361,495.00	-38.65
2.18	2.18.0.00.0.00.23.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,459,000.00	27,303,067.15	-155,932.85	-0.57
2.19	**3.26.2.22.2.19.02.**	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**30,023,365,436.00**	**28,566,213,665.95**	**-1,457,151,770.05**	**-4.85**
2.19	**3.26.2.22.2.19.02.5.**	**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH**	**30,023,365,436.00**	**28,566,213,665.95**	**-1,457,151,770.05**	**-4.85**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
2.19	**3.26.2.22.2.19.02.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**29,755,007,111.00**	**28,375,181,579.99**	**-1,379,825,531.01**	**-4.64**
2.19	3.26.2.22.2.19.02.5.1.01.	Belanja Pegawai	5,836,560,000.00	5,610,748,359.95	-225,811,640.05	-3.87
2.19	3.26.2.22.2.19.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17,233,447,111.00	16,449,490,484.04	-783,956,626.96	-4.55
2.19	3.26.2.22.2.19.02.5.1.05.	Belanja Hibah	6,685,000,000.00	6,314,942,736.00	-370,057,264.00	-5.54
2.19	**3.26.2.22.2.19.02.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**268,358,325.00**	**191,032,085.96**	**-77,326,239.04**	**-28.81**
2.19	3.26.2.22.2.19.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76,334,325.00	0.00	-76,334,325.00	-100.00
2.19	3.26.2.22.2.19.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	192,024,000.00	191,032,085.96	-991,914.04	-0.52
2.20	**2.16.2.20.2.21.01.**	**STATISTIK**	**967,931,181.00**	**916,324,753.00**	**-51,606,428.00**	**-5.33**
2.20	**2.16.2.20.2.21.01.5.**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**967,931,181.00**	**916,324,753.00**	**-51,606,428.00**	**-5.33**
2.20	**2.16.2.20.2.21.01.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**229,481,181.00**	**183,259,753.00**	**-46,221,428.00**	**-20.14**
2.20	2.16.2.20.2.21.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	229,481,181.00	183,259,753.00	-46,221,428.00	-20.14
2.20	**2.16.2.20.2.21.01.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**738,450,000.00**	**733,065,000.00**	**-5,385,000.00**	**-0.73**
2.20	2.16.2.20.2.21.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,175,000.00	14,065,000.00	-110,000.00	-0.78

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
2.20	2.16.2.20.2.21.01.5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	724,275,000.00	719,000,000.00	-5,275,000.00	-0.73
2.21	**2.16.2.20.2.21.01.**	**PERSANDIAN**	**248,756,275.00**	**234,909,366.00**	**-13,846,909.00**	**-5.57**
2.21	**2.16.2.20.2.21.01.5.**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**248,756,275.00**	**234,909,366.00**	**-13,846,909.00**	**-5.57**
2.21	**2.16.2.20.2.21.01.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**248,756,275.00**	**234,909,366.00**	**-13,846,909.00**	**-5.57**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
2.21	2.16.2.20.2.21.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	248,756,275.00	234,909,366.00	-13,846,909.00	-5.57
2.22	**3.26.2.22.2.19.02.**	**KEBUDAYAAN**	**2,790,999,900.00**	**2,000,473,337.00**	**-790,526,563.00**	**-28.32**
2.22	**3.26.2.22.2.19.02.5.**	**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH**	**2,790,999,900.00**	**2,000,473,337.00**	**-790,526,563.00**	**-28.32**
2.22	**3.26.2.22.2.19.02.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**2,768,679,900.00**	**1,978,161,832.00**	**-790,518,068.00**	**-28.55**
2.22	3.26.2.22.2.19.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2,109,679,900.00	1,978,161,832.00	-131,518,068.00	-6.23

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
2.22	3.26.2.22.2.19.02.5.1.05.	Belanja Hibah	659,000,000.00	0.00	-659,000,000.00	-100.00
2.22	**3.26.2.22.2.19.02.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**22,320,000.00**	**22,311,505.00**	**-8,495.00**	**-0.04**
2.22	3.26.2.22.2.19.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22,320,000.00	22,311,505.00	-8,495.00	-0.04
2.23	**2.23.2.24.0.00.02.**	**PERPUSTAKAAN**	**7,155,738,606.00**	**6,767,017,917.52**	**-388,720,688.48**	**-5.43**
2.23	**2.23.2.24.0.00.02.5.**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**7,155,738,606.00**	**6,767,017,917.52**	**-388,720,688.48**	**-5.43**
2.23	**2.23.2.24.0.00.02.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**6,769,055,112.00**	**6,382,825,957.52**	**-386,229,154.48**	**-5.71**
2.23	2.23.2.24.0.00.02.5.1.01.	Belanja Pegawai	4,093,506,606.00	3,881,830,513.52	-211,676,092.48	-5.17
2.23	2.23.2.24.0.00.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2,675,548,506.00	2,500,995,444.00	-174,553,062.00	-6.52
2.23	**2.23.2.24.0.00.02.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**386,683,494.00**	**384,191,960.00**	**-2,491,534.00**	**-0.64**
2.23	2.23.2.24.0.00.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376,835,994.00	374,591,960.00	-2,244,034.00	-0.60
2.23	2.23.2.24.0.00.02.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,847,500.00	9,600,000.00	-247,500.00	-2.51
2.24	**2.23.2.24.0.00.02.**	**KEARSIPAN**	**125,030,000.00**	**124,098,225.00**	**-931,775.00**	**-0.75**
2.24	**2.23.2.24.0.00.02.5.**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**125,030,000.00**	**124,098,225.00**	**-931,775.00**	**-0.75**
2.24	**2.23.2.24.0.00.02.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**110,030,000.00**	**109,098,225.00**	**-931,775.00**	**-0.85**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
2.24	2.23.2.24.0.00.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110,030,000.00	109,098,225.00	-931,775.00	-0.85
2.24	**2.23.2.24.0.00.02.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
2.24	2.23.2.24.0.00.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	**3.25.0.00.0.00.21.**	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**15,243,196,857.00**	**10,324,197,693.85**	**-4,918,999,163.15**	**-32.27**
3.25	**3.25.0.00.0.00.21.5.**	**DINAS PERIKANAN**	**15,243,196,857.00**	**10,324,197,693.85**	**-4,918,999,163.15**	**-32.27**
3.25	**3.25.0.00.0.00.21.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**12,891,018,949.00**	**9,573,191,107.90**	**-3,317,827,841.10**	**-25.74**
3.25	3.25.0.00.0.00.21.5.1.01.	Belanja Pegawai	4,341,352,832.00	4,088,829,622.18	-252,523,209.82	-5.82
3.25	3.25.0.00.0.00.21.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6,914,266,117.00	4,313,655,065.72	-2,600,611,051.28	-37.61
3.25	3.25.0.00.0.00.21.5.1.05.	Belanja Hibah	1,635,400,000.00	1,170,706,420.00	-464,693,580.00	-28.41
3.25	**3.25.0.00.0.00.21.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**2,352,177,908.00**	**751,006,585.95**	**-1,601,171,322.05**	**-68.07**
3.25	3.25.0.00.0.00.21.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	599,677,908.00	173,750,000.00	-425,927,908.00	-71.03
3.25	3.25.0.00.0.00.21.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,690,000,000.00	515,099,906.75	-1,174,900,093.25	-69.52

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
3.25	3.25.0.00.0.00.21.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62,500,000.00	62,156,679.20	-343,320.80	-0.55
3.26	**3.26.2.22.2.19.02.**	**PARIWISATA**	**1,550,004,764.00**	**1,110,198,390.83**	**-439,806,373.17**	**-28.37**
3.26	**3.26.2.22.2.19.02.5.**	**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH**	**1,550,004,764.00**	**1,110,198,390.83**	**-439,806,373.17**	**-28.37**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
3.26	**3.26.2.22.2.19.02.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**1,550,004,764.00**	**1,110,198,390.83**	**-439,806,373.17**	**-28.37**
3.26	3.26.2.22.2.19.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,550,004,764.00	1,110,198,390.83	-439,806,373.17	-28.37
3.27	**3.27.2.09.0.00.10.**	**PERTANIAN**	**50,158,085,514.00**	**45,638,659,184.94**	**-4,519,426,329.06**	**-9.01**
3.27	**3.27.2.09.0.00.10.5.**	**DINAS PERTANIAN**	**50,158,085,514.00**	**45,638,659,184.94**	**-4,519,426,329.06**	**-9.01**
3.27	**3.27.2.09.0.00.10.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**47,523,356,989.00**	**44,917,109,184.94**	**-2,606,247,804.06**	**-5.48**
3.27	3.27.2.09.0.00.10.5.1.01.	Belanja Pegawai	12,622,414,999.00	12,442,692,652.67	-179,722,346.33	-1.42
3.27	3.27.2.09.0.00.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31,777,106,190.00	29,840,830,232.27	-1,936,275,957.73	-6.09

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
3.27	3.27.2.09.0.00.10.5.1.05.	Belanja Hibah	3,123,835,800.00	2,633,586,300.00	-490,249,500.00	-15.69
3.27	**3.27.2.09.0.00.10.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**2,634,728,525.00**	**721,550,000.00**	**-1,913,178,525.00**	**-72.61**
3.27	3.27.2.09.0.00.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	911,592,525.00	721,550,000.00	-190,042,525.00	-20.85
3.27	3.27.2.09.0.00.10.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199,136,000.00	0.00	-199,136,000.00	-100.00
3.27	3.27.2.09.0.00.10.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,524,000,000.00	0.00	-1,524,000,000.00	-100.00
3.30	**2.17.3.30.3.31.07.**	**PERDAGANGAN**	**2,022,500,000.00**	**336,564,838.00**	**-1,685,935,162.00**	**-83.36**
3.30	**2.17.3.30.3.31.07.5.**	**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**2,022,500,000.00**	**336,564,838.00**	**-1,685,935,162.00**	**-83.36**
3.30	**2.17.3.30.3.31.07.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**1,284,807,025.00**	**336,564,838.00**	**-948,242,187.00**	**-73.80**
3.30	2.17.3.30.3.31.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,284,807,025.00	336,564,838.00	-948,242,187.00	-73.80
3.30	**2.17.3.30.3.31.07.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**737,692,975.00**	**0.00**	**-737,692,975.00**	**-100.00**
3.30	2.17.3.30.3.31.07.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,692,975.00	0.00	-7,692,975.00	-100.00
3.30	2.17.3.30.3.31.07.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	730,000,000.00	0.00	-730,000,000.00	-100.00

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
3.31	**2.17.3.30.3.31.07.**	**PERINDUSTRIAN**	**175,000,000.00**	**104,571,686.00**	**-70,428,314.00**	**-40.24**
3.31	**2.17.3.30.3.31.07.5.**	**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**175,000,000.00**	**104,571,686.00**	**-70,428,314.00**	**-40.24**
3.31	**2.17.3.30.3.31.07.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**175,000,000.00**	**104,571,686.00**	**-70,428,314.00**	**-40.24**
3.31	2.17.3.30.3.31.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175,000,000.00	104,571,686.00	-70,428,314.00	-40.24
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.**	**SEKRETARIAT DAERAH**	**109,404,068,905.00**	**90,859,936,862.08**	**-18,544,132,042.92**	**-16.95**
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.5.**	**SEKRETARIAT DAERAH**	**109,404,068,905.00**	**90,859,936,862.08**	**-18,544,132,042.92**	**-16.95**
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**107,081,181,358.00**	**88,810,266,216.08**	**-18,270,915,141.92**	**-17.06**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	24,989,948,000.00	22,558,838,766.23	-2,431,109,233.77	-9.73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52,482,138,358.00	45,003,586,449.85	-7,478,551,908.15	-14.25
4.01	4.01.0.00.0.00.01.5.1.05.	Belanja Hibah	26,564,095,000.00	21,247,841,000.00	-5,316,254,000.00	-20.01
4.01	4.01.0.00.0.00.01.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	3,045,000,000.00	0.00	-3,045,000,000.00	-100.00
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**2,322,887,547.00**	**2,049,670,646.00**	**-273,216,901.00**	**-11.76**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,911,844,818.00	1,645,707,000.00	-266,137,818.00	-13.92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380,304,646.00	378,863,646.00	-1,441,000.00	-0.38
4.01	4.01.0.00.0.00.01.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30,738,083.00	25,100,000.00	-5,638,083.00	-18.34

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.**	**SEKRETARIAT DPRD**	**110,103,971,901.00**	**84,074,570,764.36**	**-26,029,401,136.64**	**-23.64**
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.5.**	**SEKRETARIAT DEWAN**	**110,103,971,901.00**	**84,074,570,764.36**	**-26,029,401,136.64**	**-23.64**
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**107,713,236,059.00**	**82,550,372,814.36**	**-25,162,863,244.64**	**-23.36**
4.02	4.02.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	36,307,109,901.00	35,676,678,960.05	-630,430,940.95	-1.74
4.02	4.02.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71,406,126,158.00	46,873,693,854.31	-24,532,432,303.69	-34.36
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**2,390,735,842.00**	**1,524,197,950.00**	**-866,537,892.00**	**-36.25**
4.02	4.02.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,390,735,842.00	1,524,197,950.00	-866,537,892.00	-36.25

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	**5.01.5.05.0.00.02.**	**PERENCANAAN**	**12,369,070,900.00**	**11,547,343,545.31**	**-821,727,354.69**	**-6.64**
5.01	**5.01.5.05.0.00.02.5.**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**12,369,070,900.00**	**11,547,343,545.31**	**-821,727,354.69**	**-6.64**
5.01	**5.01.5.05.0.00.02.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**12,227,309,025.00**	**11,409,793,545.31**	**-817,515,479.69**	**-6.69**
5.01	5.01.5.05.0.00.02.5.1.01.	Belanja Pegawai	5,975,097,000.00	5,782,853,561.31	-192,243,438.69	-3.22
5.01	5.01.5.05.0.00.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6,252,212,025.00	5,626,939,984.00	-625,272,041.00	-10.00
5.01	**5.01.5.05.0.00.02.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**141,761,875.00**	**137,550,000.00**	**-4,211,875.00**	**-2.97**
5.01	5.01.5.05.0.00.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141,761,875.00	137,550,000.00	-4,211,875.00	-2.97
5.02	**5.02.0.00.0.00.05.**	**KEUANGAN**	**867,540,972,938.00**	**827,473,895,276.03**	**-40,067,077,661.97**	**-4.62**
5.02	**5.02.0.00.0.00.05.5.**	**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**867,540,972,938.00**	**827,473,895,276.03**	**-40,067,077,661.97**	**-4.62**
5.02	**5.02.0.00.0.00.05.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**72,448,089,430.00**	**49,156,035,490.65**	**-23,292,053,939.35**	**-32.15**
5.02	5.02.0.00.0.00.05.5.1.01.	Belanja Pegawai	52,005,539,154.00	34,873,332,870.50	-17,132,206,283.50	-32.94
5.02	5.02.0.00.0.00.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19,478,429,905.00	13,318,582,249.55	-6,159,847,655.45	-31.62
5.02	5.02.0.00.0.00.05.5.1.03.	Belanja Bunga	964,120,371.00	964,120,370.60	-0.40	-0.00

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
5.02	**5.02.0.00.0.00.05.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**639,548,325.00**	**566,526,322.00**	**-73,022,003.00**	**-11.42**
5.02	5.02.0.00.0.00.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	535,814,325.00	482,476,900.00	-53,337,425.00	-9.95
5.02	5.02.0.00.0.00.05.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103,734,000.00	84,049,422.00	-19,684,578.00	-18.98
5.02	**5.02.0.00.0.00.05.5.3.**	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6,221,807,986.00**	**2,026,255,613.38**	**-4,195,552,372.62**	**-67.43**
5.02	5.02.0.00.0.00.05.5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	6,221,807,986.00	2,026,255,613.38	-4,195,552,372.62	-67.43
5.02	**5.02.0.00.0.00.05.5.4.**	**BELANJA TRANSFER**	**788,231,527,197.00**	**775,725,077,850.00**	**-12,506,449,347.00**	**-1.59**
5.02	5.02.0.00.0.00.05.5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	127,468,390,000.00	115,413,727,850.00	-12,054,662,150.00	-9.46
5.02	5.02.0.00.0.00.05.5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	660,763,137,197.00	660,311,350,000.00	-451,787,197.00	-0.07
5.03	**5.03.5.04.0.00.02.**	**KEPEGAWAIAN**	**14,013,251,704.00**	**11,846,968,104.99**	**-2,166,283,599.01**	**-15.46**
5.03	**5.03.5.04.0.00.02.5.**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**14,013,251,704.00**	**11,846,968,104.99**	**-2,166,283,599.01**	**-15.46**
5.03	**5.03.5.04.0.00.02.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**13,316,031,789.00**	**11,271,009,104.99**	**-2,045,022,684.01**	**-15.36**
5.03	5.03.5.04.0.00.02.5.1.01.	Belanja Pegawai	6,800,056,816.00	6,639,173,044.99	-160,883,771.01	-2.37
5.03	5.03.5.04.0.00.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6,515,974,973.00	4,631,836,060.00	-1,884,138,913.00	-28.92
5.03	**5.03.5.04.0.00.02.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**697,219,915.00**	**575,959,000.00**	**-121,260,915.00**	**-17.39**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
5.03	5.03.5.04.0.00.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	511,117,915.00	390,589,000.00	-120,528,915.00	-23.58
5.03	5.03.5.04.0.00.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	186,102,000.00	185,370,000.00	-732,000.00	-0.39
5.04	**5.03.5.04.0.00.02.**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**2,759,612,113.00**	**2,019,621,105.00**	**-739,991,008.00**	**-26.82**
5.04	**5.03.5.04.0.00.02.**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**2,759,612,113.00**	**2,019,621,105.00**	**-739,991,008.00**	**-26.82**
5.04	**5.03.5.04.0.00.02.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**2,759,612,113.00**	**2,019,621,105.00**	**-739,991,008.00**	**-26.82**
5.04	5.03.5.04.0.00.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2,759,612,113.00	2,019,621,105.00	-739,991,008.00	-26.82
5.05	**5.01.5.05.0.00.02.**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**1,440,000,000.00**	**1,310,558,698.00**	**-129,441,302.00**	**-8.99**
5.05	**5.01.5.05.0.00.02**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**1,440,000,000.00**	**1,310,558,698.00**	**-129,441,302.00**	**-8.99**
5.05	**5.01.5.05.0.00.02.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**1,440,000,000.00**	**1,310,558,698.00**	**-129,441,302.00**	**-8.99**
5.05	5.01.5.05.0.00.02.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,440,000,000.00	1,310,558,698.00	-129,441,302.00	-8.99
		UNSUR PENGAWAS				
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.**	**INSPEKTORAT**	**29,178,315,379.00**	**13,390,148,705.94**	**-15,788,166,673.06**	**-54.11**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.5.**	**INSPEKTORAT**	**29,178,315,379.00**	**13,390,148,705.94**	**-15,788,166,673.06**	**-54.11**
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**24,019,277,189.00**	**13,067,937,705.94**	**-10,951,339,483.06**	**-45.59**
6.01	6.01.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	7,977,808,768.00	7,573,117,708.94	-404,691,059.06	-5.07
6.01	6.01.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16,041,468,421.00	5,494,819,997.00	-10,546,648,424.00	-65.75
6.01	**6.01.0.00.0.00.01.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**5,159,038,190.00**	**322,211,000.00**	**-4,836,827,190.00**	**-93.75**
6.01	6.01.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,159,038,190.00	322,211,000.00	-4,836,827,190.00	-93.75
		UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	**7.01.0.00.0.00.**	**KECAMATAN**	**108,079,118,754.00**	**99,672,258,186.28**	**-8,406,860,567.72**	**-7.78**
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.**	**KECAMATAN GRESIK**	**27,606,310,730.00**	**24,419,455,593.53**	**-3,186,855,136.47**	**-11.54**
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**24,532,864,639.00**	**21,781,676,300.53**	**-2,751,188,338.47**	**-11.21**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	14,054,547,354.00	12,211,139,298.18	-1,843,408,055.82	-13.12
7.01	7.01.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10,478,317,285.00	9,570,537,002.35	-907,780,282.65	-8.66
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**3,073,446,091.00**	**2,637,779,293.00**	**-435,666,798.00**	**-14.18**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,558,208,929.00	1,203,293,000.00	-354,915,929.00	-22.78

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	956,171,902.00	949,739,622.00	-6,432,280.00	-0.67
7.01	7.01.0.00.0.00.01.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	559,065,260.00	484,746,671.00	-74,318,589.00	-13.29
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.**	**KECAMATAN KEBOMAS**	**19,335,637,348.00**	**17,205,202,992.17**	**-2,130,434,355.83**	**-11.02**
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**16,383,549,253.00**	**14,531,584,458.57**	**-1,851,964,794.43**	**-11.30**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.5.1.01.	Belanja Pegawai	8,933,244,000.00	7,698,272,500.57	-1,234,971,499.43	-13.82
7.01	7.01.0.00.0.00.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7,450,305,253.00	6,833,311,958.00	-616,993,295.00	-8.28
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**2,952,088,095.00**	**2,673,618,533.60**	**-278,469,561.40**	**-9.43**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	730,153,495.00	514,263,000.00	-215,890,495.00	-29.57
7.01	7.01.0.00.0.00.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	343,984,000.00	341,829,523.60	-2,154,476.40	-0.63

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**3,859,243,269.00**	**3,750,556,959.02**	**-108,686,309.98**	**-2.82**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,875,520,600.00	1,815,126,010.00	-60,394,590.00	-3.22

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.02.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,430,000.00	2,400,000.00	-30,000.00	-1.23
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.**	**KECAMATAN MANYAR**	**3,859,243,269.00**	**3,750,556,959.02**	**-108,686,309.98**	**-2.82**
7.01	7.01.0.00.0.00.03.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,807,923,655.00	2,731,704,807.02	-76,218,847.98	-2.71
7.01	7.01.0.00.0.00.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,051,319,614.00	1,018,852,152.00	-32,467,462.00	-3.09
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.**	**KECAMATAN CERME**	**3,390,858,026.00**	**3,197,380,874.02**	**-193,477,151.98**	**-5.71**
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**3,309,960,626.00**	**3,168,039,074.02**	**-141,921,551.98**	**-4.29**
7.01	7.01.0.00.0.00.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,404,917,056.00	2,302,467,080.02	-102,449,975.98	-4.26
7.01	7.01.0.00.0.00.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	905,043,570.00	865,571,994.00	-39,471,576.00	-4.36
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**80,897,400.00**	**29,341,800.00**	**-51,555,600.00**	**-63.73**
7.01	7.01.0.00.0.00.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80,897,400.00	29,341,800.00	-51,555,600.00	-63.73
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.**	**KECAMATAN BENJENG**	**4,414,251,262.00**	**4,143,221,510.37**	**-271,029,751.63**	**-6.14**
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**4,353,908,098.00**	**4,143,221,510.37**	**-210,686,587.63**	**-4.84**
7.01	7.01.0.00.0.00.05.5.1.01.	Belanja Pegawai	3,386,554,000.00	3,245,753,480.37	-140,800,519.63	-4.16
7.01	7.01.0.00.0.00.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	967,354,098.00	897,468,030.00	-69,886,068.00	-7.22
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**60,343,164.00**	**0.00**	**-60,343,164.00**	**-100.00**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60,343,164.00	0.00	-60,343,164.00	-100.00
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.**	**KECAMATAN BALONGPANGGANG**	**4,292,302,020.00**	**4,117,514,619.69**	**-174,787,400.31**	**-4.07**
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**4,273,064,520.00**	**4,098,289,619.69**	**-174,774,900.31**	**-4.09**
7.01	7.01.0.00.0.00.06.5.1.01.	Belanja Pegawai	3,477,712,820.00	3,339,353,042.69	-138,359,777.31	-3.98
7.01	7.01.0.00.0.00.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	795,351,700.00	758,936,577.00	-36,415,123.00	-4.58
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**19,237,500.00**	**19,225,000.00**	**-12,500.00**	**-0.06**
7.01	7.01.0.00.0.00.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,237,500.00	19,225,000.00	-12,500.00	-0.06
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.**	**KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN**	**3,783,577,246.00**	**3,713,427,547.47**	**-70,149,698.53**	**-1.85**
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**3,759,659,796.00**	**3,690,597,547.47**	**-69,062,248.53**	**-1.84**
7.01	7.01.0.00.0.00.07.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,737,333,246.00	2,710,916,436.47	-26,416,809.53	-0.97
7.01	7.01.0.00.0.00.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,022,326,550.00	979,681,111.00	-42,645,439.00	-4.17
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**23,917,450.00**	**22,830,000.00**	**-1,087,450.00**	**-4.55**
7.01	7.01.0.00.0.00.07.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23,917,450.00	22,830,000.00	-1,087,450.00	-4.55
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.**	**KECAMATAN DRIYOREJO**	**3,400,084,500.00**	**3,272,339,886.87**	**-127,744,613.13**	**-3.76**
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**3,373,823,625.00**	**3,246,489,886.87**	**-127,333,738.13**	**-3.77**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.08.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,622,427,000.00	2,507,547,773.87	-114,879,226.13	-4.38
7.01	7.01.0.00.0.00.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	751,396,625.00	738,942,113.00	-12,454,512.00	-1.66
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**26,260,875.00**	**25,850,000.00**	**-410,875.00**	**-1.56**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.08.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,260,875.00	25,850,000.00	-410,875.00	-1.56
7.01	**7.01.0.00.0.00.09.**	**KECAMATAN WRINGINANOM**	**3,634,348,057.00**	**3,489,653,144.86**	**-144,694,912.14**	**-3.98**
7.01	**7.01.0.00.0.00.09.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**3,606,479,657.00**	**3,461,924,144.86**	**-144,555,512.14**	**-4.01**
7.01	7.01.0.00.0.00.09.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,782,177,944.00	2,658,120,459.86	-124,057,484.14	-4.46
7.01	7.01.0.00.0.00.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	824,301,713.00	803,803,685.00	-20,498,028.00	-2.49
7.01	**7.01.0.00.0.00.09.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**27,868,400.00**	**27,729,000.00**	**-139,400.00**	**-0.50**
7.01	7.01.0.00.0.00.09.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,868,400.00	27,729,000.00	-139,400.00	-0.50
7.01	**7.01.0.00.0.00.10.**	**KECAMATAN KEDAMEAN**	**3,353,787,873.00**	**3,249,365,409.76**	**-104,422,463.24**	**-3.11**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
7.01	**7.01.0.00.0.00.10.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**3,339,546,048.00**	**3,249,365,409.76**	**-90,180,638.24**	**-2.70**
7.01	7.01.0.00.0.00.10.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,334,029,873.00	2,304,674,836.76	-29,355,036.24	-1.26
7.01	7.01.0.00.0.00.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,005,516,175.00	944,690,573.00	-60,825,602.00	-6.05
7.01	**7.01.0.00.0.00.10.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**14,241,825.00**	**0.00**	**-14,241,825.00**	**-100.00**
7.01	7.01.0.00.0.00.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,241,825.00	0.00	-14,241,825.00	-100.00
7.01	**7.01.0.00.0.00.11.**	**KECAMATAN MENGANTI**	**3,676,810,041.00**	**3,560,983,228.49**	**-115,826,812.51**	**-3.15**
7.01	**7.01.0.00.0.00.11.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**3,631,147,641.00**	**3,526,483,228.49**	**-104,664,412.51**	**-2.88**
7.01	7.01.0.00.0.00.11.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,737,252,000.00	2,661,934,255.49	-75,317,744.51	-2.75
7.01	7.01.0.00.0.00.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	893,895,641.00	864,548,973.00	-29,346,668.00	-3.28
7.01	**7.01.0.00.0.00.11.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**45,662,400.00**	**34,500,000.00**	**-11,162,400.00**	**-24.45**
7.01	7.01.0.00.0.00.11.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45,662,400.00	34,500,000.00	-11,162,400.00	-24.45
7.01	**7.01.0.00.0.00.12.**	**KECAMATAN SIDAYU**	**3,976,844,100.00**	**3,595,402,215.10**	**-381,441,884.90**	**-9.59**
7.01	**7.01.0.00.0.00.12.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**3,970,230,450.00**	**3,588,789,215.10**	**-381,441,234.90**	**-9.61**
7.01	7.01.0.00.0.00.12.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,947,449,000.00	2,602,743,352.10	-344,705,647.90	-11.70
7.01	7.01.0.00.0.00.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,022,781,450.00	986,045,863.00	-36,735,587.00	-3.59

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
7.01	**7.01.0.00.0.00.12.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**6,613,650.00**	**6,613,000.00**	**-650.00**	**-0.01**
7.01	7.01.0.00.0.00.12.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,613,650.00	6,613,000.00	-650.00	-0.01
7.01	**7.01.0.00.0.00.13.**	**KECAMATAN UJUNGPANGKAH**	**3,512,191,803.00**	**3,351,473,275.32**	**-160,718,527.68**	**-4.58**
7.01	**7.01.0.00.0.00.13.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**3,486,160,428.00**	**3,325,448,275.32**	**-160,712,152.68**	**-4.61**
7.01	7.01.0.00.0.00.13.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,680,452,464.00	2,520,562,678.32	-159,889,785.68	-5.97
7.01	7.01.0.00.0.00.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	805,707,964.00	804,885,597.00	-822,367.00	-0.10
7.01	**7.01.0.00.0.00.13.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**26,031,375.00**	**26,025,000.00**	**-6,375.00**	**-0.02**
7.01	7.01.0.00.0.00.13.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,031,375.00	26,025,000.00	-6,375.00	-0.02
7.01	**7.01.0.00.0.00.14.**	**KECAMATAN PANCENG**	**3,988,420,566.00**	**3,916,032,411.63**	**-72,388,154.37**	**-1.81**
7.01	**7.01.0.00.0.00.14.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**3,911,753,391.00**	**3,839,473,211.63**	**-72,280,179.37**	**-1.85**
7.01	7.01.0.00.0.00.14.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,975,268,820.00	2,911,848,119.63	-63,420,700.37	-2.13
7.01	7.01.0.00.0.00.14.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	936,484,571.00	927,625,092.00	-8,859,479.00	-0.95
7.01	**7.01.0.00.0.00.14.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**76,667,175.00**	**76,559,200.00**	**-107,975.00**	**-0.14**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.14.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76,667,175.00	76,559,200.00	-107,975.00	-0.14
7.01	**7.01.0.00.0.00.15.**	**KECAMATAN BUNGAH**	**4,338,096,867.00**	**4,119,875,602.15**	**-218,221,264.85**	**-5.03**
7.01	**7.01.0.00.0.00.15.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**4,228,882,242.00**	**4,011,532,852.15**	**-217,349,389.85**	**-5.14**
7.01	7.01.0.00.0.00.15.5.1.01.	Belanja Pegawai	3,280,889,250.00	3,092,187,813.15	-188,701,436.85	-5.75
7.01	7.01.0.00.0.00.15.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	947,992,992.00	919,345,039.00	-28,647,953.00	-3.02
7.01	**7.01.0.00.0.00.15.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**109,214,625.00**	**108,342,750.00**	**-871,875.00**	**-0.80**
7.01	7.01.0.00.0.00.15.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53,834,625.00	53,513,750.00	-320,875.00	-0.60
7.01	7.01.0.00.0.00.15.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55,380,000.00	54,829,000.00	-551,000.00	-0.99
7.01	**7.01.0.00.0.00.16.**	**KECAMATAN DUKUN**	**4,324,724,200.00**	**4,220,989,001.99**	**-103,735,198.01**	**-2.40**
7.01	**7.01.0.00.0.00.16.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**4,299,884,200.00**	**4,196,149,001.99**	**-103,735,198.01**	**-2.41**
7.01	7.01.0.00.0.00.16.5.1.01.	Belanja Pegawai	3,335,889,000.00	3,233,567,588.99	-102,321,411.01	-3.07
7.01	7.01.0.00.0.00.16.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	963,995,200.00	962,581,413.00	-1,413,787.00	-0.15
7.01	**7.01.0.00.0.00.16.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**24,840,000.00**	**24,840,000.00**	**0.00**	**0.00**
7.01	7.01.0.00.0.00.16.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24,840,000.00	24,840,000.00	0.00	0.00
7.01	**7.01.0.00.0.00.17.**	**KECAMATAN SANGKAPURA**	**3,769,955,896.00**	**3,271,152,192.43**	**-498,803,703.57**	**-13.23**
7.01	**7.01.0.00.0.00.17.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**3,687,612,268.00**	**3,256,448,137.43**	**-431,164,130.57**	**-11.69**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.17.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,624,149,797.00	2,521,555,087.43	-102,594,709.57	-3.91
7.01	7.01.0.00.0.00.17.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,063,462,471.00	734,893,050.00	-328,569,421.00	-30.90
7.01	**7.01.0.00.0.00.17.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**82,343,628.00**	**14,704,055.00**	**-67,639,573.00**	**-82.14**
7.01	7.01.0.00.0.00.17.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82,343,628.00	14,704,055.00	-67,639,573.00	-82.14
7.01	**7.01.0.00.0.00.18.**	**KECAMATAN TAMBAK**	**3,421,674,950.00**	**3,078,231,721.41**	**-343,443,228.59**	**-10.04**
7.01	**7.01.0.00.0.00.18.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**3,364,246,317.00**	**3,022,333,722.41**	**-341,912,594.59**	**-10.16**
7.01	7.01.0.00.0.00.18.5.1.01.	Belanja Pegawai	2,481,384,95000	2,263,665,234.41	-217,719,715.59	-8.77
7.01	7.01.0.00.0.00.18.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	882,861,367.00	758,668,488.00	-124,192,879.00	-14.07
7.01	**7.01.0.00.0.00.18.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**57,428,633.00**	**55,897,999.00**	**-1,530,634.00**	**-2.67**
7.01	7.01.0.00.0.00.18.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57,428,633.00	55,897,999.00	-1,530,634.00	-2.67
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.**	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**82,953,008,185.00**	**79,411,941,302.06**	**-3,541,066,882.94**	**-4.27**
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.5.**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**82,953,008,185.00**	**79,411,941,302.06**	**-3,541,066,882.94**	**-4.27**
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.5.1.**	**BELANJA OPERASI**	**82,769,581,752.00**	**79,317,816,302.06**	**-3,451,765,449.94**	**-4.17**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	3,350,101,786.00	3,224,619,833.78	-125,481,952.22	-3.75
8.01	8.01.0.00.0.00.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7,171,574,349.00	4,009,261,264.96	-3,162,313,084.04	-44.10

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
8.01	8.01.0.00.0.00.01.5.1.05.	Belanja Hibah	72,247,905,617.00	72,083,935,203.32	-163,970,413.68	-0.23
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.5.2.**	**BELANJA MODAL**	**183,426,433.00**	**94,125,000.00**	**-89,301,433.00**	**-48.69**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158,139,000.00	69,125,000.00	-89,014,000.00	-56.29
8.01	8.01.0.00.0.00.01.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25,287,433.00	25,000,000.00	-287,433.00	-1.14

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah sebesar 10,13 sementara Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 13,99. Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara rata-rata lama sekolah sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, antara lain:

1. Dari sisi siswa, dengan mencegah putus sekolah dan mendorong masyarakat mengikuti pendidikan kesetaraan, mengintensifkan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat;
2. Dari sisi guru, dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas guru guna keberlanjutan proses dan peningkatan kualitas pendidikan; dan
3. Dari sisi sarana/ prasarana pendidikan, dengan melengkapi dan membangun sarana/ prasarana pendidikan guna mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat.

Mengacu pada permasalahan secara umum di Jawa Timur terkait urusan kesehatan masih perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi) dan Penanganan Stunting. Dalam upaya menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (angka Kematian Bayi), perlu dilakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan serta program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/ Kelurahan yang meliputi penguatan kapasitas kader dalam rangka penurunan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi), melahirkan dan nifas. Pada tahun 2025 Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 70,21 per 100.000 KH dan Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 7,4 per 1.000 KH.

Sebagai upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting, pada tahun 2025 terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 balita stunting sebagaimana data resmi SSGI menunjukkan angka 15,04%, namun pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil

menurunkan ke angka 8,07%. Angka tersebut terpaut jauh jika dibandingkan dengan jumlah stunting di Provinsi Jawa Timur yang mencapai angka 14,7%.

Identifikasi permasalahan pembangunan merupakan salah satu upaya evaluasi atas kinerja pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih tepat dalam memprioritaskan program dan kegiatan di tahun selanjutnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Gresik yang menjadi isu strategis adalah sebagaimana berikut:

1. Infrastruktur Jalan

   Kondisi Jalan lingkungan di Kabupaten Gresik sudah cukup baik, berbeda dengan Jalan raya poros utama di Kabupaten Gresik yang kondisinya masih memprihatinkan baik itu yang berstatus jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Potret jalan yang kondisinya memprihatinkan terdapat di Kecamatan Driyorejo. Tidak sedikit rusaknya jalan raya di titik tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat. Langkah awal yang perlu dilakukan terkait perbaikan infrastruktur jalan ini adalah dengan memetakan kondisi jalan dalam empat kategori yaitu baik, sedang, rusak ringan , dan rusak berat. Dengan dipetakannya kondisi jalan maka akan lebih tepat dalam menentukan lokasi strategis untuk perbaikan jalan sehingga dapat teratasi dengan baik dan tuntas.

2. Penanganan Banjir

   Di Kabupaten Gresik pada setiap musim hujan selalu mengalami banjir akibat meluapnya Kali Lamong. Sudah menjadi bencana rutin yang terjadi di sebagian teritori kabupaten dengan luas wilayah sekitar 1.191,25 Km^2 ini. Sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi manusia serta berdampak secara sosial dan ekonomi. Wilayah Kecamatan Benjeng, Balongpanggang dan Cerme menjadi 3 titik terparah pada setiap

tahunnya, karena terletak tidak jauh dari aliran anak sungai Bengawan Solo, yaitu Kali Lamong. Beberapa permasalahan dalam mengatasi banjir antara lain:

a. Belum tuntasnya upaya pengurangan wilayah genangan banjir, sementara itu muncul wilayah genangan baru;
b. Belum optimalnya penataan wilayah Kabupaten dalam membangun lahan-lahan serapan air;
c. Belum tuntasnya pembangunan sarana prasarana pematusan;
d. Semakin meningkatnya kerusakan jalan akibat banjir.

3. Kemiskinan Ekstrem

Tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik mengalami penurunan secara konsisten dari 12,42% pada tahun 2021 menjadi 11,06% pada tahun 2022, 10,96% pada tahun 2023, 10,32% pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 9,95% pada tahun 2025. Penanggulangan kemiskinan belum menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten, program penanggulangan kemiskinan tidak dilakukan secara terfokus, berkesinambungan dan terukur. Selain itu kurangnya sinkronisasi data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) serta hilangnya variabel pendukung seperti tingkat kesejahteraan sosial pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sehingga penentuan penerima bantuan sosial menjadi kurang valid dan salah sasaran. Kurangnya kolaborasi dengan dunia usaha dan kerja untuk menghapus kemiskinan ekstrim. Perbaikan data adalah kunci utama dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrim pada Kabupaten Gresik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah pada hakikatnya ditujukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan oleh dan untuk masyarakat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, semua aspirasi dan segala kepentingan daerah yang tumbuh dari masyarakat harus diarahkan untuk menjaga keserasian dan keselarasan antara Pembangunan Daerah, Pembangunan Regional dan Pembangunan Nasional.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam upaya menjaga keserasian dan keselarasan Pembangunan Daerah, Pembangunan Regional dan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, Visi dan Misi yang dirumuskan sebagai berikut:

"Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat."

1.1. Misi

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2025-2029 sebagaimana berikut:

Misi ke-1

Memperkuat insan unggul yang sehat, cerdas, berkarakter dan berakhlakul karimah

Misi ke-2

Percepatan pembangunan perekonomian daerah, merata, berbasis potensi keunggulan lokal yang berkualitas dan berdaya saing

Misi ke-3

Menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat

Misi ke-4

Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Misi ke-5

Meningkatkan taraf hidup masyarakat Gresik melalui penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar

a. Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

1) Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui 3 Program, 10 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 1.070.284.013.606,07 dengan realisasi sebesar Rp 1.009.807.333,27 atau 94,35% tidak terserap sebesar Rp 60.476.680.329,14.

2) Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui 5 Program, 18 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan alokasi Alokasi Anggaran pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 754.759.765.679,39 dengan realisasi sebesar Rp 684.533.054.282,70 atau 90,70% tidak terserap sebesar Rp 70.226.711.396,69.

3) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Cipta Karya Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui 17 program 38 kegiatan dan 105 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 288.497.103.312,05 yang terealisasi sebesar Rp 134.947.347.997,54 atau 46,78% tidak terserap sebesar Rp 153.549.755.314,51.

b. Alokasi Anggaran pada Dinas Cipta Karya Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 97.172.324.727,00 yang terealisasi sebesar Rp 88.191.466.970,72 atau 90,76% tidak terserap sebesar Rp 8.980.857.756,28.

4) Perumahan Rakyat dan Permukiman

Penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui 11 program 21 kegiatan dan 49 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 97.172.324.727,00 yang terealisasi sebesar Rp 88.191.466.970,72 atau 90,76% tidak terserap sebesar Rp 8.980.857.756,28.

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melalui 6 program 28 kegiatan dan 87 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp 26.570.315.743,00 yang terealisasi sebesar Rp 24.442.629.716,19 atau 91,99% tidak terserap sebesar Rp 2.127.686.027,71;
b. Alokasi Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 8.785.497.443,00 yang terealisasi sebesar Rp 7.418.387.180,19 atau 84,44% tidak terserap sebesar Rp 1.367.110.262,81;
c. Alokasi Anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp 11.475.625.060,00 yang terealisasi sebesar Rp 9.401.638.174,69 atau 81,93% tidak terserap sebesar Rp 2.073.986.885,31;

6) Penyelenggaraan urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui 6 program 16 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 24.892.018.506,00 yang terealisasi sebesar Rp

20.458.422.287,45 atau 82,19% tidak terserap sebesar Rp 4.433.596.218,55.

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1.3.1 Dasar Pertimbangan Penerapan SPM (Latar Belakang)

Dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 18, dijelaskan Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/ Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan

kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, *monitoring* dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/ Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/ indikator kinerja.

Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang *excellent*, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Gresik juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan

ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

a. Dasar Penerapan SPM

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, yang diganti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar

Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota.

b. Kebijakan Umum

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan kunci dari Strategi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/ terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut:

a) Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/ hak dasar masyarakat;

b) Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintah dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Arahan ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara. Fleksibilitas pelayanan pemerintahan juga diarahkan kepada terselenggaranya sinkronisasi dan harmonisasi hubungan eksternal antara Pemerintah kabupaten dengan seluruh PD, dan pemerintahan desa;

c) Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan *skill* dan manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat);

d) Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan aset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah dioptimalkan untuk menambah porsi Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

c. Kebijakan Penerapan SPM

Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator di dalam SPM dijalankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

A. Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

i. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM di bidang Urusan Pendidikan antara lain:

Tabel 1.3.1.1 Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
1	Pendidikan Dasar
2	Pendidikan Kesetaraan
3	Pendidikan Anak Usia Dini

ii. Target Pencapaian SPM oleh Daerah Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 1.3.1.2 Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	2025
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2025
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2025

B. Bidang Urusan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan.

i. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM di bidang Urusan Pendidikan antara lain:

Tabel 1.3.1.3 Tabel Jenis Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
13	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV

ii. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 1.3.1.4 Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100%	2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	100%	2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	100%	2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	Resiko terinfeksi HIV	yang menerima layanan kesehatan		

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

i. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM di bidang Urusan Pendidikan antara lain:

Tabel 1.3.1.5 Tabel Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

ii. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 1.3.1.6 Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	2025
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2025

D. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota.

i. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM di bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman antara lain:

Tabel 1.3.1.7 Tabel Jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

ii. Target Pencapaian SPM oleh Daerah Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 1.3.1.8 Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2025
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan	100%	2025

		rumah yang layak huni		

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/ Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota.

i. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM di bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

Tabel 1.3.1.9 Tabel Jenis Pelayanan Dasar Bidang Trantibumlinmas

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2	Pelayanan Informasi rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

ii. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 1.3.1.10 Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	2025
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2025
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2025
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan	100%	2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
		dan evakuasi korban bencana		
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	2025

F. Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/ Kota.

i. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM di bidang Urusan Sosial antara lain:

Tabel 1.3.1.11 Tabel Jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti

4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana

ii. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 1.3.1.12 Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2025
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2025
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh	100%	2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
		Rehabilitasi sosial diluar Panti		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	2025
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	100%	2025

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Capaian tersebut dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten yang selaras dengan Pembangunan Provinsi dan Pembangunan Nasional, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Daerah dirinci menjadi Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah secara makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 1.3.1.1 Capaian Indikator Kinerja IPM Kabupaten Gresik

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,93	79,69	0,96
2.	Angka Kemiskinan	10,32	9,95	-3,59
3.	Angka Pengangguran	6,45	5,47	-15,19
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,79	4,91	2,51

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
5.	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	188604,51	202004,47	7,10
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	0,322	0,327	1,55

Sumber: Gresik Dalam Angka tahun 2026 (https://gresikkab.bps.go.id)

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan data strategis yang menjadi salah satu ukuran kinerja Pemerintah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pelayanan dasar seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dengan mudah. IPM dapat menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk) dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/ negara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik dilakukan untuk melihat sejauh mana pembangunan kualitas hidup manusia di wilayah Kabupaten Gresik yang dilakukan selama tahun 2025. Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks Pembangunan manusia Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Posisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik pada tahun 2024 berada pada level 78,93 persen dan pada tahun 2025 mencapai 79,69 persen. Perubahan Indeks Pembangunan Manusia tersebut disebabkan adanya peningkatan di tiga dimensi yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur

melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) serta dimensi standar layak yang diukur.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), namun turunnya P0 tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan pergerakan P1 dan P2 antar waktu dan juga melakukan analisis terhadap turunnya tingkat kemiskinan yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk yang masih miskin.

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik mengalami penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Posisi Angka Kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2024 berada pada 10,32 persen dan pada tahun 2025 mencapai 9,95 persen. Penurunan angka kemiskinan tersebut disebabkan karena pada tahun 2025 kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik mulai menggeliat setelah pandemik Covid-19 dan disertai dengan beragamnya program bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Gresik.

2.1.3 Angka Pengangguran

Angka Pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kabupaten Gresik sebagai wilayah yang mempunyai banyak industri tentunya memberikan peran dalam menyerap tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran. Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, disimpulkan bahwa Angka Pengangguran Kabupaten Gresik mengalami penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Posisi Angka Pengangguran Kabupaten Gresik pada tahun 2024 mencapai level 6,45 persen dan pada tahun 2025 mencapai angka 5,47 persen. Hal tersebut disebabkan karena pada Tahun 2024 terdapat

penurunan pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik yang berimplikasi pada menurunnya jumlah tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh setiap negara. Pertumbuhan ekonomi juga termasuk indikasi keberhasilan perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mampu menggambarkan proses perkembangan dan perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang umumnya digunakan untuk mengukur kinerja dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi regional merupakan suatu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Indikator pertumbuhan ekonomi daerah umumnya berupa angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu daerah.

PDB dan PDRB disusun menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha yang merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas pelbagai aktivitas produksi; dan pendekatan sisi pengeluaran yang menjelaskan tentang penggunaan nilai tambah bruto. PDB maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dimana seluruh agregat yang dinilai menggunakan harga pada tahun berjalan; dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang penilaiannya didasarkan pada harga tahun dasar

tertentu. Indikator pertumbuhan ekonomi daerah umumnya berupa angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Posisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2024 berada pada level 4,79 persen dan pada tahun 2025 sebesar 4,91 persen. Kenaikan kondisi perekonomian tersebut disebabkan karena berhasilnya upaya pemerintah dalam pengendalian pandemik Covid-19. Konsumsi pemerintah terus memegang peranan aktif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi selama pandemik. Alhasil, upaya ini dapat mendorong peningkatan pada komponen konsumsi rumah tangga dan investasi.

2.1.5 Pendapatan Perkapita

PDRB Perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/ daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas” untuk menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Dari series data PDRB, pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka dapat dilihat melalui data PDRB perkapita.

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Makin tinggi pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat yang semakin

baik. Kabupaten Gresik merupakan daerah yang mengandalkan sektor industri dan perdagangan dalam pembentukan PDRBnya. Adapun pendapatan perkapita Kabupaten Gresik pada tahun 2024 mencapai angka 188604,51 sedangkan pada tahun 2025 mencapai 202004,47.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Ratio Gini) dapat dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri. Semakin tinggi nilai indeksnya, maka pengeluaran diantara penduduk miskin semakin timpang. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan terjadinya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,55 dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Gresik tercatat sebesar 0,322 dan mengalami perubahan menjadi 0,327 pada tahun 2025.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan atau Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Kabupaten/ Kota melalui Kepala Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, urusan wajib sendiri dibagi menjadi Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Selain Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, juga terdapat Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Capaian kinerja urusan pemerintah merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintah daerah memuat data/ informasi kinerja setiap urusan pemerintah sesuai dengan indikator masing-masing Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

2.2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan dasar

Urusan Pemerintahan Wajib adalah merupakan bagian Urusan Pemerintahan Konkuren yang wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib *yang* ***Berkaitan*** dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik meliputi:

a. Urusan pendidikan;
b. Urusan kesehatan;
c. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f. Urusan sosial.

Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO.	URUSAN WAJIB	NAMA OPD PELAKSANA
Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1.	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN WAJIB	NAMA OPD PELAKSANA
Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
2.	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		RSUD Ibnu Sina
3.	Urusan Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
4.	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Urusan Sosial	Dinas Sosial

Ringkasan pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Gresik untuk Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar disampaikan secara rinci sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melalui pencapaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada skala kategori Sangat Baik**.** Adapun Capaian Indikator Kinerja *Output* Urusan Wajib Pendidikan sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1.2 Urusan Wajib Pendidikan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun	91,4769 %	Dinas Pendidikan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini			
		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	90,7666 %	Dinas Pendidikan	
		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Dinas Pendidikan	
		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	43.0322 %	Dinas Pendidikan	
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	36.7470 %	Dinas Pendidikan	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase anak usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini pada tahun tahun 2025 sebesar 91,4769%. Sementara itu, persentase anak usia 7–15 tahun yang berpartisipasi dalam

pendidikan dasar pada tahun 2025 tercatat 90,7666%. Adapun persentase anak usia 7–18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun 2025 telah mencapai 100%, yang menunjukkan capaian optimal pada indikator tersebut.

Di sisi lain, kondisi sarana dan prasarana pendidikan masih perlu mendapat perhatian, dimana persentase toilet Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik pada tahun 2025 sebesar 43,0322%, serta persentase ruang kelas dalam kondisi baik pada jenjang yang sama sebesar 36,7470%.

b. Urusan Wajib Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Ibnu Sina dengan rincian capaian indikator kinerja urusan kesehatan pada tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1.3 Urusan Wajib Kesehatan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Kesehatan	Persentase kematian ibu	0.0703 %	Dinas Kesehatan	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	8.0671 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	91.5928 %	Dinas Kesehatan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95.1100 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	95.2088 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88.6728 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar kesehatan sesuai standar	98,91%	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		Persentase pelayanan kesehatan orang	100%	Dinas Kesehatan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		terduga Tuberkulosis sesuai standar			
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tujuh dari 14 indikator kinerja kunci hasil urusan wajib kesehatan telah mencapai capaian optimal yakni angka 100%. Tujuh indikator tersebut antara lain persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar, persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar, persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar, persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar, persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar dan persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar.

Sedangkan capaian lainnya belum mencapai capaian optimal, antara lain persentase kematian ibu pada tahun 2025 sebesar 0.0703%, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 8.0671%, persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar sebesar 91.5928%, persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar sebesar 95.2088%, persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 88.6728%, dan persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar kesehatan sesuai standar sebesar 98.91%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperkuat upaya untuk mencapai indikator yang belum optimal.

c. Urusan Pekerjaan Umum & Tata Ruang

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Capaian indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada tahun 2025 dengan sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.4 Urusan Pekerjan Umum & Tata Ruang

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Urusan Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	76.149 %	Dinas PUTR	
		Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	71,22%	Dinas PUTR	
		Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk yang	94.3467 %	DCKPKP	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten/ Kota			
		Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	93.0354 %	DCKPKP	
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	11.2805 %	DCKPKP	
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan	-	DCKPKP	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/ Kota			
		Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota	100%	DPMPTSP	
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	100%	Dinas PUTR	
		Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	86.3309 %	DINAS PUTR	
		Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan	5.4389 %	DINAS PUTR	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Pemanfaatan Ruang yang Sudah Diterbitkan di Kabupaten/ Kota			

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat dua Indikator Kinerja Kunci Hasil pada Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah mencapai capaian optimal 100% yaitu pada IKK persentase kepatuhan persetujuan bangunan gedung kabupaten/ kota, dan persentase persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan untuk capaian terendah terdapat pada persentase penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/ kota yang hanya mencapai angka 5.4389%. Sehingga diperlukan perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk memiliki strategi dalam upaya meningkatkan capaian tersebut.

d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Capaian indikator kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 dengan sasaran dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1.5 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.		Persentase warga negara korban bencana	92.3077 %	DCKPKP	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Urusan Perumahan Rakyat	kabupaten/ kota yang memperoleh rumah layak huni			
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	291.4000 %	DCKPKP	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	7.0517%	DCKPKP	
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum	100%	DCKPKP	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tiga dari empat IKK telah berjalan baik, dibuktikan dengan dua IKK telah mencapai capaian optimal, yaitu persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dan persentase perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum. Adapun IKK yang perlu untuk menjadi perhatian yakni persentase rumah tidak layak huni yang tertangani hanya mencapai sebesar 7.0517%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa IKK tersebut masih jauh dari kata optimal sehingga memerlukan perhatian dan upaya yang lebih intensif dari pemerintah daerah.

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.6 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100%	SATPOL PP	
		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	SATPOL PP	
		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100%	SATPOL PP	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	BPBD	
		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	91.15 %	DISDAM-KARLA	

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2025 sebagian besar indikator kinerja pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menunjukkan capaian yang sangat optimal, dengan mayoritas indikator mencapai angka 100%. Sementara itu untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran mencapai 91,15%

yang menunjukkan kinerja yang baik namun masih memerlukan peningkatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

f. Urusan Wajib Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Capaian indikator kinerja Urusan Sosial pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1.7 Urusan Sosial

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	47.1024 %	DINSOS	
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	DINSOS	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	DINSOS	
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	DINSOS	
		Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam	100%	DINSOS	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota			
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	8.7819 %	DINSOS	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar indikator pada urusan sosial tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat optimal, dengan persentase 100% pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, gelandangan dan pengemis, lanjut usia terlantar, serta korban bencana. Namun demikian, persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti baru tercapai 47,1024% dan persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara keseluruhan tercatat sebesar 8,78%. Hal tersebut menunjukkan masih perlunya perluasan jangkauan layanan dan peningkatan efektivitas program agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

2.2.1.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang ***Tidak Berkaitan*** dengan Pelayanan Dasar meliputi 18 urusan yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1.8 Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a.	Tenaga kerja;	j.	komunikasi dan informatika;
b.	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;	k.	koperasi, usaha kecil, dan menengah;
c.	pangan;	l.	penanaman modal;
d.	pertanahan;	m.	kepemudaan dan olah raga;
e.	lingkungan hidup;	n.	statistik;
f.	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;	o.	persandian;
g.	pemberdayaan masyarakat dan Desa;	p.	kebudayaan;
h.	pengendalian penduduk dan keluarga berencana;	q.	Perpustakaan
i.	perhubungan;	r.	Kearsipan

Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah. Terdapat beberapa OPD yang menangani lebih dari 1 urusan wajib, adapun rincian OPD yang menangani urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.9 Rincian OPD yang Menangani Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

NO.	URUSAN WAJIB	NAMA OPD PELAKSANA
Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1.	Urusan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

NO.	URUSAN WAJIB	NAMA OPD PELAKSANA
2.	Urusan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
3.	Urusan Pangan	Dinas Pertanian
4.	Urusan Pertanahan	Dinas Pertanahan
5.	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
6.	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
7.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
8.	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
9.	Urusan Perhubungan	Dinas Perhubungan
10.	Urusan Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi & Informatika
11.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian
12.	Urusan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP
13.	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas Kepemudaan & Olahraga
14.	Urusan Statistik	Dinas Komunikasi & Informatika
15.	Urusan Persandian	Dinas Komunikasi & Informatika
16.	Urusan Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17.	Urusan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan & Kearsipan

NO.	URUSAN WAJIB	NAMA OPD PELAKSANA
18.	Urusan Kearsipan	Dinas Perpustakaan & Kearsipan

Ringkasan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diuraikan sebagaimana berikut:

a. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Capaian indikator kinerja urusan tenaga kerja pada tahun 2025 dengan sasaran dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1.10 Urusan Wajib Tenaga Kerja

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	DISNAKER	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala	30.2595 %	DISNAKER	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)			
		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	100%	DISNAKER	

Merujuk pada tabel diatas dijabarkan bahwa persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja mencapai 100%, persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) dengan capaian 30.2595%, sedangkan untuk persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 100%. Berdasarkan rincian informasi tersebut diketahui bahwa tingkat penerapan tata kelola kerja yang layak di perusahaan masih relatif rendah, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut.

b. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.11 Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	Dinas KBPPA	
		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	Dinas KBPPPA	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif mencapai 100%. Sedangkan untuk persentase perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif berada pada angka maksimal yakni 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu memberikan layanan perlindungan secara menyeluruh

kepada kelompok rentan, baik anak maupun perempuan, yang menjadi korban kekerasan.

c. Urusan Pangan

Penyelenggaraan Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Capaian indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2024 dijelaskan sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1.12 Urusan Pangan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Urusan Wajib Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	166.76 15%	Dinas Pertanian	

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut diketahui bahwa persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Gresik mencapai 166.7615%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan cadangan pangan daerah telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang relatif kuat.

d. Urusan Pertanahan

Penyelenggaraan Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Capaian indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2025 dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1.13 Urusan Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kerja	Sumber Data	Ket
1.	Urusan Wajib Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	32.6922 %	Dinas PUTR	
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	2.5625 %	Dinas PUTR	
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	100%	Dinas PUTR	

Tabel diatas menggambarkan bahwa persentase ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah mencapai 32.6922%, untuk persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah dengan capaian 2.5625%, serta persentase rencana detail tata ruang yang sudah dilegalkan dengan telah mencapai 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa regulasi perencanaan tata ruang, khususnya legalisasi RDTR telah terlaksana secara optimal. Namun demikian masih diperlukan peningkatan dalam penetapan hak atas tanah serta kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.i Capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.14 Urusan Lingkungan Hidup

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang	81,1321%	DLH	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota			
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	77.321 7%	DLH	

Dari sajian tabel di atas dijelaskan bahwa persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik mencapai 81,1321% dan untuk persentase jumlah sampah yang tertangani mencapai angka 77.3217%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepedulian pelaku usaha terhadap lingkungan hidup sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih optimal. Demikian pula dalam hal pengelolaan sampah, meskipun sebagian besar telah tertangani, masih terdapat sampah yang belum terkelola secara maksimal.

f. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.15 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Administrasi Kependudukan dan Pencatata Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	99.4731 %	Disdukc apil	
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	80.0504 %	Disdukc apil	
		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100%	Disdukc apil	
		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	99.2147 %	Disdukc apil	
		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	Disdukc apil	
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	Disdukc apil	
		Persentase akta perceraian yang	100%	Disdukc apil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		diterbitkan bagi yang melaporkan			

Merujuk pada tabel di atas diketahui bahwa persentase akta kelahiran yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Gresik hampir mencapai angka optimal yakni 99.4731%, untuk indikator persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan capaian 80.0504%, sedangkan pada persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan mencapai 100%. Sementara itu, untuk persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik berada pada angka 99.2147, persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan dengan capaian 100%, persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan dengan capaian 100%, serta persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan mencapai angka 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Gresik secara umum telah berjalan dengan sangat baik, khususnya dalam hal penerbitan dokumen kependudukan utama dan penyediaan data kependudukan.

g. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2025 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1.16 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	DPMD	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	100%	DPMD	
		Persentase fasilitasi kerja sama desa	100%	DPMD	

Mengacu pada data yang tersaji pada tabel di atas ditunjukkan bahwa persentase pengentasan desa tertinggal mencapai 100%, indikator persentase peningkatan status desa mandiri dengan capaian 100%, sedangkan untuk persentase fasilitasi kerja sama desa mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan kemandirian desa secara menyeluruh.

h. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Capaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2025 ialah sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1.17 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/ TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	96%	Dinas KBPPPA	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/ *modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR)	64.3939 %	Dinas KBPPPA	
		Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	86.2595 %	Dinas KBPPPA	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun) dengan capaian 96%, sedangkan untuk angka prevalensi kontrasepsi modern/ *modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) dengan capaian 64.3939%. Sementara itu persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (*unmet need*) mencapai angka 86.2595%. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat fertilitas telah mendekati target

yang ditetapkan, pemanfaatan kontrasepsi modern masih perlu ditingkatkan.

i. Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Capaian indikator kinerja urusan perhubungan pada tahun 2025 dengan sasaran dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1.18 Urusan Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kerja	Sumber Data	Ket
1.	Urusan Wajib Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/ Kota	100%	Dishub	
		Volume/ *Capacity Ratio* di Jalan Kabupaten/ Kota	0,38	Dishub	
		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	33.3333 %	Dishub	

Dari sajian tabel di atas diketahui bahwa rasio konektivitas kabupaten/ kota mencapai 100%, volume/ *capacity ratio* di jalan kabupaten/ kota mencapai angka 0,38%, sementara untuk persentase jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan berada pada angka 33.3333%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa dari sisi konektivitas dan kapasitas jaringan jalan sudah cukup memadai. Namun untuk aspek keselamatan transportasi perlu untuk dilakukan peningkatan.

j. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.19 Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Diskominfo	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70.3704 %	Diskominfo	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan	100%	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota			

Pada tabel diatas diketahui bahwa persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika mencapai angka 100%. Untuk persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi mencapai 70.3704 serta persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan dan konektivitas antar Perangkat Daerah telah terbangun secara optimal sehingga persebaran informasi kebijakan dan program prioritas kepada masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Namun demikian, tingkat integrasi layanan publik secara digital masih perlu ditingkatkan agar seluruh layanan dapat terhubung dalam satu sistem yang efektif, dan efisien.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Capaian indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun 2025 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.1.20 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	139.61 %	Diskoperindag	
		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	100%	Diskoperindag	

Adapun persentase pertumbuhan volume usaha koperasi berdasarkan tabel diatas telah mencapai angka 139.61%, sedangkan persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal mencapai 100%. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan upaya pemberdayaan usaha mikro, namun masih diperlukan peningkatan guna mendorong pertumbuhan volume usaha koperasi di kabupaten Gresik.

l. Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal pada tahun 2025 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1.21 Urusan Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Penanaman Modal	Persentase peningkatan	- 22.2201 %	Dinas Penanaman	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		investasi di kabupaten/ kota		Modal dan PTSP	
		Realisasi total terhadap target investasi	147.4269 %	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

Mengacu pada tabel di atas diketahui bahwa pertumbuhan persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota mencapai -22.2201%, sedangkan untuk realisasi total terhadap target investasi dengan capaian 147.4269%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika investasi, di mana meskipun pertumbuhan investasi mengalami penurunan namun realisasi investasi tetap berjalan optimal.

m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga. Capaian indikator kinerja urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.22 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	9.32%	Disparekrafbudpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	23.3108 %	Disparekra fbudpora	
		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/ kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	3.47%	Disparekra fbudpora	
		Persentase jumlah atlet berprestasi	46.32%	Disparekra fbudpora	

Berdasarkan uraian pada tabel tersebut diketahui bahwa persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri sebesar 100%. Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan capaian 23.3108 %. Sementara untuk persentase atlet yang berasal dari kabupaten/ kota yang masuk pemusatan latihan daerah provinsi mencapai 3.47% dan persentase jumlah atlet berprestasi dengan capaian 46.32%.

n. Urusan Statistik

Penyelenggaraan Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Capaian indikator kinerja urusan statistik pada tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1.23 Urusan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	57.0156 %	Diskominfo	

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah mencapai angka 57.0156%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam penyampaian data masih perlu ditingkatkan guna mendukung ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi.

o. Urusan Persandian

Penyelenggaraan Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Capaian indikator kinerja urusan persandian pada tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1.24 Urusan Persandian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi	58.9325 %	Diskominfo	

		Pemerintah Daerah			

Mengacu pada informasi dalam tabel tersebut diketahui bahwa persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah mencapai angka 58.9325%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan keamanan siber dan persandian telah berjalan cukup baik namun masih memerlukan penguatan agar berjalan lebih optimal.

p. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga. Capaian indikator kinerja urusan kebudayaan pada tahun 2025 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1.25 Urusan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100%	Dispar-krafbudpora	
		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	18.9115%	Disparekrafbudpora	

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan mencapai 100%.

Sedangkan untuk persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah dengan capaian 18.9115%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pelestarian budaya telah dilakukan secara optimal, tantangan tetap muncul dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif baik melalui kunjungan hingga partisipasi dalam kegiatan seni.

q. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pengukuran kinerja pada urusan perpustakaan terintegrasi dengan sasaran pada urusan kependudukan dan catatan sipil pada Berikut merupakan capaian indikator urusan perpustakaan pada tahun 2025:

Tabel 2.2.1.26 Urusan Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	67,04	Disperpussip	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	6,42	Disperpussip	

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat Kabupaten Gresik mencapai angka 67,04 sedangkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan capaian 6,42. Nilai IPLM yang relatif rendah mengindikasikan perlunya upaya

lebih sistematis dalam pengembangan literasi guna meningkatkan minat membaca masyarakat serta memperkuat kemampuan dalam memahami informasi.

r. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Dilaksanakan Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun capaian sasaran urusan kearsipan tahun 2025 antara lain berikut:

Tabel 2.2.1.27 Urusan Kearsipan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	71,66	Disperpussip	

Pada tabel tersebut digambarkan bahwa tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional mencapai angka 71,66. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di lingkungan perangkat daerah telah berjalan cukup baik.

2.2.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pilihan dalam urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dilaksanakan kabupaten/ kota sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Ada sebanyak 6 (enam) urusan pilihan antara lain urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral,

perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Urusan Pilihan tidak dilaksanakan oleh semua daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota melaksanakan urusan pilihan tersebut sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, Kabupaten Gresik tidak melaksanakan urusan transmigrasi, karena tidak memiliki potensi maupun kebutuhan penyelenggaraan program transmigrasi di wilayahnya. Adapun Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.28 Urusan Pilihan yang dilaksanakan OPD

No	Urusan Pilihan	Nama OPD
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
2.	Urusan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian
4.	Urusan ESDM	-
5.	Urusan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
6.	Urusan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
7.	Urusan Transmigrasi	-

Ringkasan pelaksanaan Urusan Pilihan disampaikan secara rinci sebagai berikut:

a. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.29 Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Kelautan dan Perikanan	Persentase Produksi perikanan tangkap dan budidaya	101.6435 %	Dinas Perikanan	
		Angka konsumsi ikan (Kg/ Kap/ Th)	58.36	Dinas Perikanan	

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase produksi perikanan tangkap dan budidaya mencapai angka 101.6435% sedangkan angka konsumsi ikan (Kg/ Kap/ Th) mencapai 58.36. Capaian produksi yang melampaui target menunjukkan kinerja sektor perikanan yang baik, sedangkan untuk tingkat konsumsi ikan perlu untuk dilakukan peningkatan kedepannya.

b. Urusan Pilihan Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga. Capaian indikator kinerja urusan pariwisata pada tahun 2025 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1.30 Urusan Pariwisata

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	0.0941 %	Dispare krafbud pora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	210.9300%	Dispare krafbudpora	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	9.8152%	Dispare krafbudpora	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase investasi pada sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum tercatat sebesar 0,09%. Sementara itu, untuk pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 210,93%, serta persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Gresik mencapai 9,82%. Hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif pada sektor pariwisata, khususnya dari sisi peningkatan kunjungan wisatawan.

c. Urusan Pilihan Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Capaian indikator kinerja urusan pertanian pada tahun 2025 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1.31 Urusan Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Pertanian	Peningkatan produksi	8.5914%	Dinas Pertanian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		tanaman pangan			
		Peningkatan produksi hortikultura	3.6598%	Dinas Pertanian	
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	1.8471%	Dinas Pertanian	
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveilans penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100%	Dinas Pertanian	

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel tersebut diketahui adanya peningkatan produksi tanaman pangan yang mencapai 8,5914%, sementara untuk peningkatan produksi hortikultura sebesar 3,6598%, serta peningkatan produksi komoditas peternakan sebesar 1,8471%. Selain itu, persentase wilayah yang

terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), berdasarkan hasil surveilans terhadap lima jenis penyakit, telah mencapai 100%. Capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan kinerja pada sektor pertanian dan peternakan, baik dari sisi produksi maupun pengendalian penyakit hewan.

d. Urusan Pilihan Perdagangan

Pelaksanaan Urusan Perdagangan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Capaian indikator kinerja tahun 2025 dalam hal perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.32 Urusan Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pedagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	Diskoperindag	

Berdasarkan uraian pada tabel tersebut diketahui bahwa persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dengan mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap ketentuan telah terpenuhi secara optimal sehingga memberikan jaminan kepastian ukuran dalam kegiatan perdagangan serta melindungi konsumen dan pelaku usaha.

e. Urusan Pilihan Perindustrian

Penyelenggaraan Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

Capaian indikator kinerja urusan perindustrian pada tahun 2025 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.1.33 Urusan Perindustrian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan non migas kabupaten/ kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/ Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/ kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/ kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/ kota	99,95 %	Diskoperindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	100%	Diskoperindag	
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/ kota	1.2637 %	Diskoperindag	
		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	30.19 %	Diskoperindag	

Pada tabel diatas diketahui bahwa pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan produk domestik regional bruto sektor industri pengolahan non migas kabupaten/ kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik regional bruto kabupaten/ kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/ kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/ kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/ kota dengan capaian 99,55% Sementara itu, persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah dalam melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional mencapai 100%. Sedangkan pada pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/ kota dengan mencapai angka 1.2637%. Untuk persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan dengan total realisasi investasi seluruh sektor mencapai 30.19 %, yang menunjukkan

kontribusi sektor industri yang optimal dalam struktur investasi daerah.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur penunjang pemerintahan daerah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan konkuren.

Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, pada daerah Kabupaten/ Kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang kewilayahannya melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana serta berintensitas tinggi.

Berikut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan daerah:

Tabel 2.2.2.1 Urusan Penunjang

NO	URUSAN PENUNJANG	NAMA OPD PELAKSANA
1	Inspektorat	Inspektorat
2	Urusan Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah

NO	URUSAN PENUNJANG	NAMA OPD PELAKSANA
3	Urusan Keuangan	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
4	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan & Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah
5	Urusan Penelitian & Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan
6	Sekretariat	Sekretariat Daerah
		Sekretariat DPRD
7	Kecamatan	Kecamatan Gresik
		Kecamatan Kebomas
		Kecamatan Manyar
		Kecamatan Bungah
		Kecamatan Sidayu
		Kecamatan Ujung Pangkah
		Kecamatan Panceng
		Kecamatan Dukun
		Kecamatan Cerme
		Kecamatan Duduk Sampeyan
		Kecamatan Menganti
		Kecamatan Balong Panggang
		Kecamatan Driyorejo
		Kecamatan Kedamean

NO	URUSAN PENUNJANG	NAMA OPD PELAKSANA
		Kecamatan Wringinanom
		Kecamatan Benjeng
		Kecamatan Tambak
		Kecamatan Sangkapura

a. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Perencanaan) dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan capaian indikator kinerja urusan pemerintah pada tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.2.2 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100%	BAPEDDA	

Pada tabel diatas diketahui bahwa persentase kesesuaian antara rencana kerja pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencapai angka 100%.

b. Penunjang Urusan Pemerintah (Keuangan)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Keuangan) Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan capaian indikator kinerja urusan pemerintah pada tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.2.3. Penunjang Urusan Pemerintah (Keuangan)

No	Fungsi Penghujung	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	13.4024 %	BPPKAD	
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	38.7345 %	BPPKAD	
		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total	57.0938 %	BPPKAD	

No	Fungsi Penghujung	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N			
		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	36.1545 %	BPPKAD	

Tabel diatas menggambarkan persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya mencapai 13.4024%. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah mencapai angka 38.7345%. Sedangkan persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N sebesar 57.0938%. Sementara itu, persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dengan capaian 36.1545%.

c. Penunjang Urusan Pemerintahan (Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan capaian indikator penunjang urusan pemerintahan pada tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.2.4 Penunjang Urusan Pemerintahan (Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan)

No	Fungsi Penghujung	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	68.1330 %	BKPSDM	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan mencapai angka 68.1330%.

d. Penunjang Urusan Pemerintahan (Fungsi Pengawasan)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Fungsi Pengawasan) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dengan capaian indikator penunjang urusan pemerintahan pada tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.2.5 Penunjang Urusan Pemerintahan (Fungsi Pengawasan)

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Fungsi Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	
		Manajemen risiko Indeks	Level 2	Inspektorat	
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	100%	Inspektorat	

Merujuk pada data pada tabel diatas diketahui bahwa maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah mencapai Level 3, demikian pula pada Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada pada Level 3. Selain itu, manajemen risiko yang tercermin dari indeks persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran N-1 telah mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan fungsi pengawasan telah berjalan dengan cukup baik.

e. Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah dengan capaian indikator penunjang urusan pemerintahan pada tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.2.6 Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)	40	BLP	
		Pemanfaatan sistem pengadaan	25,95	BLP	
		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa (SDM PBJ)	19,71	BLP	

Sesuai dengan data yang tersaji pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) dengan capaian 40 serta pemanfaatan sistem pengadaan yang mencapai 25,95. Sedangkan pada kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa (SDM PBJ) mencapai angka 19,71. Angka tersebut menunjukkan bahwa UKPBJ telah berada pada tahap pengelolaan yang proaktif, mampu merencanakan dan mengendalikan proses pengadaan secara terstruktur. Namun untuk pemanfaatan sistem pengadaan masih relatif rendah serta kompetensi SDM perlu ditingkatkan untuk mendukung optimalisasi fungsi pengadaan yang efektif dan transparan.

f. Penunjang Urusan Pemerintahan (Hubungan dengan Perwakilan Daerah)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Hubungan dengan Perwakilan Daerah) Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan capaian indikator penunjang urusan pemerintahan pada tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.2.7 Penunjang Urusan Pemerintahan (Hubungan dengan Perwakilan Daerah)

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat	Bagian Hukum	
		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	28.5714 %	Bagian Hukum	

Pada tabel diatas diketahui bahwa ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N sudah tepat waktu dan persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N mencapai angka 28.5714%. Angka tersebut menunjukkan bahwa proses pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah perlu untuk ditingkatkan.

g. Penunjang Urusan Pemerintahan (Pelayanan Publik)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Pelayanan Publik) dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Gresik dengan capaian indikator penunjang urusan pemerintahan pada tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.2.8 Penunjang Urusan Pemerintahan (Pelayanan Publik)

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	91,59	Bagian Organisasi	

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas diketahui bahwa penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik mencapai angka 91,59%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sudah cukup baik.

h. Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan) Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan capaian indikator penunjang urusan pemerintahan pada tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.2.9 Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian	100%	BAPPEDA	

		dari program kegiatan			

Tabel diatas menunjukkan persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan mencapai angka 100%.



AKUNTABILITAS KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban untuk Mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Bupati dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman pada amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	91% <100%	sangat tinggi
2	76% < 90%	tinggi
3	66% < 75%	sedang
4	51% < 65%	rendah
5	<50%	sangat rendah

SKALA PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA

Rumus perhitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagi berikut :

- Indikator **Positif** apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capain kinerjanya, dengan rumus: Persentase Capaian kinerja = Realisasi / Target X 100 %
- Indikator **Negatif** apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya, dengan rumus: Persentase Capaian kinerja = Target-(realisasi-target) / Target X 100 %

PENGUKURAN KINERJA

PERIODE 2021-2026



Visi & Misi
2021-2026

VISI

Mewujudkan Gresik Baru yang lebih mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan Akhlakul Karimah

MISI

- Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
- Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
- Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
- Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
- Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

A. PERJANJIAN KINERJA 2025

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif			
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	86.85
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik	4.4
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	54.43
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota			
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3.62
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	90
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.93
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	93.04
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah			
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	5.2
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0.33
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	5-6

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah			
T.4	Tujuan : Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	80.92
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	80
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	82.70
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	85
		Prevalensi Stunting	8.5-7
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik			
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	9.4-9.7
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	100

Perjanjian kinerja inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025, Dalam pencapaian target kinerja yang diperjanjikan di perlukan anggaran sebesar :

- Pagu Anggaran 2025 : Rp.3,843,558,853,847.60 (APBD)
  Rp 3,945,861,940,316.08 (PAPBD)
- Pagu Anggaran 2024 : Rp.3,974,761,570,922.00 (PAPBD)

B. PENGUKURAN KINERJA 2025

Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Gresik Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis dituangkan dalam PK Bupati merupakan tahun ke-5 (kelima) pada periode RPJMD 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada 2025 adalah sebesar 97.52 kategori "SANGAT TINGGI" yang dihitung dari rata-rata capaian IKU. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KATEGORI
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif						
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	86.85	88.01	101.34	SANGAT TINGGI
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik	4.4	4.32	98.18	SANGAT TINGGI
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	54.43	57.98	106.52	SANGAT TINGGI
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota						
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3.62	3.76	103.87	SANGAT TINGGI
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	90	89.71	99.68	SANGAT TINGGI
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.93	65.81	108.01	SANGAT TINGGI
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	93.04	91.25	98.08	SANGAT TINGGI

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KATEGORI
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah						
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	5.2	4.91	94.42	SANGAT TINGGI
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0.33	0.43	dinormalisasi 110.00	SANGAT TINGGI
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	5-6	1.63	32.60	SANGAT RENDAH
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah						
T.4	Tujuan : Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	80.92	79.69	98.48	SANGAT TINGGI
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	80	82.43	103.04	SANGAT TINGGI
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	82.70	84.22	101.84	SANGAT TINGGI
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	85	84.46	99.36	SANGAT TINGGI
		Prevalensi Stunting	8.5-7	8.07	105.06	SANGAT TINGGI

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KATEGORI
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik						
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	9.4-9.7	9.95	97.42	SANGAT TINGGI
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6	5.47	108.83	SANGAT TINGGI
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	100	100	100	SANGAT TINGGI
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75	67.99	90.65	TINGGI
	rata-rata capaian kinerja				97.76	SANGAT TINGGI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat diketahui :

A. Pengukuran Kinerja TUJUAN :

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 (dua) target
2. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 4 (empat) target

B. Pengukuran Kinerja SASARAN :

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 target
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 7 target

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA

Berikut hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 5 tahun Bupati Gresik adalah sebagai berikut :

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2024	2024	2025
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif							
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	69.47	68.93	86.84	85.55	88.01
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik	3.31	3.27	4.28	4.32	4.32
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	43.04	48.4	45.92	54.43	57.98
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota							
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	2.59	3.42	3.38	3.73	3.76
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	87.39	87.39	89.62	89.71	89.71
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53.72	58.15	58,5	60.12	65.84
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	89.93	90.2	90.78	91.01	91.25

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2024	2024	2025
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah							
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	3.79	7.38	4.62	4.79	4.91
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0.35	0.35	0.35	0.35	0.43
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	-3.01	3.17	3.2	1.63	1.63
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah							
T.4	Tujuan : Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	76.5	77.16	78,44	78.93	79.69
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	80.56	79.16	79.16	80.32	82.43
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	73.41	73.41	80.98	82.41	84.22
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	65.94	65.94	82.2	82.5	84.46
		Prevalensi Stunting	23.5	10.7	9.12	8.14	8.07

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2024	2024	2025
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik							
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	12.42	11.06	10.96	10.32	9.95
		Tingkat Penganggura n Terbuka	5.74	7.84	6.82	6.45	5.47
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70	68.3	70.12	71.61	67.99
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	89.97	90.66	100	100	100

Perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya 5 indikator yang mengalami peningkatan, yang menandakan terjadinya perbaikan kinerja pada sejumlah sektor pembangunan. Peningkatan tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan daerah, serta hasil dari penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target kinerja.

Sementara itu, terdapat 7 indikator yang belum dirilis atau tidak dilakukan penilaian oleh kementerian pada tahun ini, sehingga pengukuran capaian masih menggunakan data tahun sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan evaluasi kinerja pada indikator-indikator tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan terkini. Namun demikian, pemerintah daerah tetap melakukan pemantauan internal sebagai dasar pengendalian dan perbaikan kinerja. Secara keseluruhan, tren peningkatan pada sebagian indikator serta upaya menjaga stabilitas pada indikator yang belum dinilai menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan capaian kinerja dari tahun ke tahun.

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif					
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	88.6	88.01	-
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik	4.13	4.32	+
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	52	57.98	+
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota					
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3.72	3.76	+
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	90	89.71	-
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.18	65.81	+
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	93.64	91.25	-

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah					
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	5.5	4.91	-
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0.35	0.43	+
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	5-6	1.63	-
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah					
T.4	Tujuan : Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	81.12	79.69	-
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	74	82.43	+
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	83.6	84.22	+
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	73.3	84.46	+
		Prevalensi Stunting	7	8.07	-

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik					
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	9-9.4	9.95	-
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5.54	5.47	+
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	100	100	+
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78	67.99	-

Pada tahun berjalan, capaian kinerja pembangunan daerah menunjukkan hasil yang positif, ditandai dengan adanya 9 indikator yang telah melampaui target akhir periode RPJMD (2026). Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sejumlah sektor strategis berjalan efektif serta mampu menghasilkan output dan outcome yang lebih baik dari proyeksi awal. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penguatan perencanaan berbasis kinerja, sinergi lintas perangkat daerah, serta dukungan kebijakan dan pendanaan yang relatif memadai.

Di sisi lain, masih terdapat 10 indikator yang belum mencapai target akhir RPJMD, meskipun sebagian besar di antaranya menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pencapaian target masih berada pada jalur yang tepat, namun memerlukan percepatan melalui penguatan intervensi, penajaman sasaran program, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Dengan mempertahankan kinerja pada indikator yang telah melampaui target dan meningkatkan fokus pada indikator yang belum tercapai, diharapkan keseluruhan target RPJMD dapat diraih secara lebih optimal pada akhir periode perencanaan.

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN NASIONAL / PROV. JATIM / KAB LAIN

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif					
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	93.82	88.01	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik	3.62	4.32	LEBIH TINGGI DARI PROV JATIM
			3.12	4.32	LEBIH TINGGI DARI NASIONAL
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	90.84	57.98	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota					
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3.91	3.76	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	N/A	89.71	-
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.24	65.81	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	92.15	91.25	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah					
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	5.23	4.91	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0.49	0.43	LEBIH RENDAH DARI PROV KALSEL
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	6.24	1.63	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah					
T.4	Tujuan : Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	76.15	79.69	LEBIH TINGGI DARI PROV JATIM
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	81.77	82.43	LEBIH TINGGI DARI MOJOKERTO
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	N/A	84.22	-
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	N/A	84.46	-
		Prevalensi Stunting	14.7	8.07	LEBIH TINGGI DARI PROV JATIM

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik					
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	9.5	9.95	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3.61	5.47	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	N/A	100	-
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73.98	67.99	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM

Hasil pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan capaian nasional, Provinsi Jawa Timur, serta kabupaten lain menunjukkan kinerja yang cukup beragam. Terdapat 4 indikator yang memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan wilayah pembanding, yang mencerminkan keunggulan daerah pada sektor-sektor pembangunan manusia, kesalehan, SPBE dan penanganan stunting.

Di sisi lain, terdapat 11 indikator yang capaian kinerjanya masih lebih rendah. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan dan kebutuhan penguatan intervensi pada sektor-sektor tersebut, baik melalui peningkatan kualitas perencanaan, optimalisasi sumber daya, maupun penguatan kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, terdapat 4 indikator yang tidak dapat dilakukan perbandingan karena belum tersedia data pembanding dari tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten lain.

F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif				
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	• Dukungan pimpinan daerah terhadap pelaksanaan RB dan peningkatan tata kelola pemerintahan. • Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pengembangan. • Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). • Penguatan sistem pengawasan internal dan akuntabilitas keuangan.	• Penguatan kepemimpinan RB, penetapan target kinerja RB yang jelas di setiap OPD. • Pelatihan berbasis kompetensi, manajemen talenta, dan sistem reward and punishment. • Penguatan arsitektur SPBE dan integrasi data lintas perangkat daerah. • Penguatan peran APIP dan monitoring tindak lanjut rekomendasi pengawasan.
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik	• Adanya kebijakan SPBE dan transformasi digital daerah • Tersedianya arsitektur dan peta rencana SPBE • Tersedianya berbagai aplikasi layanan publik	• Penyusunan pedoman teknis SPBE; harmonisasi regulasi lintas OPD • Review dan penajaman roadmap SPBE; pengendalian pelaksanaan berbasis monev • Integrasi layanan melalui portal terpadu; rasionalisasi dan konsolidasi aplikasi
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	• dilakukan pengembangan SDM terkait inovasi • diselenggarakan kompetisi inovasi • dilaksanakan evaluasi inovasi setiap triwulan • inovasi dijadikan sebagai salah satu dasar pemberian reward kepada OPD	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota				
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	• Stabilitas pemerintahan dan regulasi daerah • Layanan publik digital berkembang	• Reformasi layanan perizinan; penguatan kepastian regulasi • Digitalisasi UMKM; peningkatan literasi digital
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	• Jaringan jalan utama dan akses kawasan industri memadai • Kedekatan dengan pelabuhan dan jalur nasional • Dokumen perencanaan infrastruktur tersedia	• Peningkatan kapasitas jalan; pemeliharaan rutin berbasis kondisi • Optimalisasi akses logistik; pengembangan logistics hub • Integrasi perencanaan infrastruktur lintas sektor
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	• Adanya program saji sapo (Satu Jiwa Satu Pohon). • Pemantauan kualitas air badan air secara rutin yang mewakili musim penghujan dan musim kemarau • Pemantauan kualitas udara ambien secara rutin yang mewakili musim penghujan dan kemarau • Adanya pengolahan sampah dari sumber (hulu)	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	• Akses pendidikan dasar–menengah relatif setara antara perempuan dan laki-laki. • Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta kesadaran kesehatan reproduktif. • Peluang ekonomi perempuan meningkat melalui UMKM dan sektor perdagangan.	• Beasiswa pendidikan perempuan, pelatihan vokasi dan keterampilan kerja. • Penguatan layanan kesehatan primer dan kesehatan reproduktif perempuan. • Fasilitasi UMKM perempuan, akses permodalan, dan pemasaran digital.
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah				
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	• Iklim investasi relatif kondusif dan lokasi strategis di kawasan industri Jawa Timur. • Belanja pemerintah dan program pembangunan mendorong aktivitas ekonomi. • Tersedianya lapangan kerja di sektor industri dan jasa pendukung.	• Penyederhanaan perizinan, pengembangan kawasan industri baru, dan fasilitasi pembiayaan usaha. • Optimalisasi PAD, kemitraan dengan swasta, dan pemanfaatan CSR untuk pembangunan ekonomi. • Pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri dan link and match dunia usaha–pendidikan.
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	• Pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah • Tingginya investasi daerah • Penguatan UMKM dan ekonomi lokal	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	• peningkatan jumlah produksi komoditas unggulan pertanian menjadi 872.247,4 ton. • peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan menjadi 167.516,55 ton. • menurunnya luas areal tanam tembakau dari 255,9 ha menjadi 171,06 ha. • Produksi jambu mete turut mengalami penurunan signifikan, dari 55,2 ton/ha menjadi 8,53 ton/ha, yang disebabkan oleh umur tanaman yang sudah tua sehingga produksi kurang maksimal	• Mengantisipasi potensi penurunan produksi melalui penerapan teknik budidaya yang tepat, penyediaan benih unggul, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara berkelanjutan • Membantu kemitraan usaha bagi petani tembakau serta melakukan peremajaan terhadap tanaman

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.4	Tujuan : Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	• Peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah, • Perbaikan layanan kesehatan dasar. • Tersedianya lapangan kerja industri dan jasa pendukung yang menyerap tenaga kerja terdidik. • Implementasi PUG dalam perencanaan pembangunan daerah. • Kesadaran kesetaraan gender mulai tumbuh di masyarakat.	• pembangunan dan rehabilitasi sarana sekolah, serta dukungan pembiayaan pendidikan yang menekan angka putus sekolah dan meningkatkan harapan lama sekolah. • Perluasan RSUD Ibnu sina dan Pengoperasian RSGS • Pemberian pelatihan tenaga kerja lokal • Penguatan kapasitas OPD, monitoring dan evaluasi PUG. • Edukasi kesetaraan gender berbasis komunitas dan keluarga.
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	• Aktifnya lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. • Nilai religius mendorong perilaku saling membantu dan toleransi. • Adanya kebijakan dan program pembinaan sosial-keagamaan. • Kondisi sosial relatif kondusif dan harmonis.	• Pembentukan komunitas sosial pemuda, kegiatan sosial kreatif, dan pemberian insentif/non-materi bagi relawan. • Edukasi dan kampanye kesalehan sosial yang menekankan praktik sosial, bukan hanya ritual. • Sinergi dengan ormas, CSR perusahaan, dan komunitas lokal untuk perluasan program sosial. • Dialog lintas komunitas, forum kerukunan, dan kegiatan sosial lintas agama.

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	• Tingginya kecenderungan kerja dini di kecamatan zonasi industri • Daya tarik sektor industri menyebabkan sebagian penduduk usia sekolah memilih bekerja dibanding melanjutkan pendidikan	• Penguatan pendidikan kesetaraan (Paket C) yang fleksibel • Kerja sama dengan dunia usaha dan industri melalui program CSR pendidikan dan dukungan kelanjutan sekolah
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	• Ketersediaan dan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang relatif baik di wilayah perkotaan dan kecamatan, • tingginya cakupan kepesertaan JKN, • berjalannya layanan kesehatan ibu dan anak melalui puskesmas dan posyandu.	• Penguatan layanan kesehatan keliling dan rujukan wilayah kepulauan • Perluasan kepesertaan JKN PBI dan reaktivasi kepesertaan • Penguatan layanan KIA, gizi ibu hamil, dan pencegahan stunting
		Prevalensi Stunting	• Pemberian makanan tambahan (PMT) • pemeriksaan kehamilan rutin, persalinan di fasilitas kesehatan, dan pemantauan tumbuh kembang balita. • Pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri • Imunisasi lengkap serta pencegahan dan penanganan penyakit infeksi pada balita. • Optimalisasi peran posyang.	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik				
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	• Pertumbuhan ekonomi daerah relatif stabil dan ditopang sektor industri pengolahan. • Tersedianya lapangan kerja di sektor industri dan jasa pendukung. • Bantuan sosial membantu menjaga daya beli kelompok rentan. • Mulai berkembangnya UMKM dan usaha mikro.	• Pengembangan ekonomi lokal dan padat karya di wilayah perdesaan. • Pelatihan vokasi, reskilling, dan link and match dunia kerja. • Pemutakhiran data kemiskinan dan integrasi program perlindungan sosial. • Fasilitasi pembiayaan mikro, pendampingan usaha, dan akses pasar digital. •
		Tingkat Penganggur an Terbuka	• Dominasi sektor industri dan jasa pendukung yang menyerap tenaga kerja. • Sebagian tenaga kerja terserap sesuai kebutuhan industri. • Peningkatan akses pendidikan menengah dan kejuruan. • Keberadaan kawasan industri menciptakan peluang kerja. •	• Pengembangan sektor padat karya dan diversifikasi lapangan kerja. • Pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri dan sertifikasi kompetensi. • Program magang, link and match SMK–industri, dan pelatihan siap kerja. • Prioritas tenaga kerja lokal dan kerja sama rekrutmen dengan perusahaan. •

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik				
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	• PKH Inklusi • Pemutakhiran data berkala penerima program jaminan kesehatan (UHC) • Kejar paket tuntaskan putus sekolah (JAKETKU) • beasiswa mahasiswa miskin	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	• Iklim investasi yang kondusif, sehingga mendorong masuknya penanaman modal dan ekspansi usaha.	• Program pelatihan dan penempatan tenaga kerja, termasuk job fair, magang, dan link and match dengan dunia usaha.

G. ALOKASI ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	alokasi	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif						
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	31.09%	Rp 1,226,946,750,917.55	Rp 1,093,179,447,244.89	89.10
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik	22.63%	Rp 892,901,422,081.59	Rp 817,321,494,332.77	91.54
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	8.47%	Rp 334,045,328,835.95	Rp 275,857,952,912.12	82.58
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota						
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	15.55%	Rp 613,702,425,493.19	Rp 424,816,331,979.81	69.22
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	6.62%	Rp 261,130,790,368.93	Rp 161,689,823,439.11	61.92
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2.17%	Rp 85,778,730,308.44	Rp 74,294,822,933.34	86.61
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	6.76%	Rp 266,792,904,815.82	Rp 188,831,685,607.36	70.78

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	alokasi	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah						
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	2.94%	Rp 116,007,817,194.29	Rp 93,458,711,502.95	80.56
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0.89%	Rp 35,250,981,159.88	Rp 23,844,522,094.20	67.64
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	2.05%	Rp 80,756,836,034.41	Rp 69,614,189,408.76	86.20
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah						
T.4	Tujuan : Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	39.06%	Rp 1,541,101,122,724.31	Rp 1,429,408,938,762.47	92.75
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	9.82%	Rp 387,635,945,427.40	Rp 357,426,120,610.58	92.21
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	8.01%	Rp 316,238,768,993.21	Rp 299,277,944,533.06	94.64
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	13.15%	Rp 518,859,459,710.82	Rp 474,110,122,220.02	91.38
		Prevalensi Stunting	8.07%	Rp 318,366,948,592.88	Rp 298,594,751,398.82	93.79

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	alokasi	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik						
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	11.08%	Rp 437,008,370,592.18	Rp 394,937,417,936.04	90.37
		Tingkat Pengangguran Terbuka	0.28%	Rp 11,095,453,394.56	Rp 9,983,724,973.15	89.98
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	11.08%	Rp 437,008,370,592.18	Rp 394,937,417,936.04	90.37
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0.28%	Rp 11,095,453,394.56	Rp 9,983,724,973.15	89.98
	TOTAL		100%	Rp 3,945,861,940,316.08	Rp 3,445,784,572,399.31	87.33

Realisasi anggaran Kabupaten sebesar Rp3.445.784.572.399,31 dari pagu Rp3.945.861.940.316,08 atau mencapai 87,33 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik, karena mayoritas program dan kegiatan telah terlaksana sesuai perencanaan. Tingkat serapan yang tinggi mencerminkan efektivitas pelaksanaan belanja serta konsistensi perangkat daerah dalam menjalankan anggaran.

Selisih antara pagu dan realisasi sebesar Rp500.077.367.916,77 mengindikasikan adanya efisiensi dan penghematan sesuai dengan arahan Presiden RI yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Secara keseluruhan, capaian 87,33 persen menggambarkan pengelolaan keuangan yang relatif optimal, sekaligus menjadi dasar untuk meningkatkan perencanaan dan penyerapan anggaran pada periode berikutnya agar semakin mendekati target yang ditetapkan.

H. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI.

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFISIENSI
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif					
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	101.34	89.10	0.99
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik	98.18	91.54	0.99
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	106.52	82.58	0.99
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota					
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	103.87	69.22	0.99
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	99.68	61.92	0.99
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	108.01	86.61	0.99
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	98.08	70.78	0.99

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFISIENSI
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah					
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	94.42	80.56	0.99
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	110.00	67.64	0.99
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	32.60	86.20	0.97
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah					
T.4	Tujuan : Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	98.48	92.75	0.99
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	103.04	92.21	0.99
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	101.84	94.64	0.99
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	99.36	91.38	0.99
		Prevalensi Stunting	105.06	93.79	0.99

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFISIENSI
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik					
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	97.42	90.37	0.99
		Tingkat Pengangguran Terbuka	108.83	89.98	0.99
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	90.65	90.37	0.99
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	100	89.98	0.99
	RATA-RATA		97.76	87.33	0.99

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 yaitu batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. . Berikut rumus perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

I. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG	OPD PENUNJANG
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif				
T.1	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	• Dinas Kominfo dengan menyusun arsitektur dan peta rencana, • Sekretariat Daerah (bagian Organisasi) dengan melakukan pendampingan dan evaluasi mandiri kualitas pelayanan publik. dan pemantauan hasil survei kepuasan masyarakat seluruh opd secara berkala setiap 1 bulan sekali. • Inspektorat : Sosialisasi integritas ke seluruh OPD • Sekretariat Daerah (bagian layanan Pengadaan Barang jasa) : melakukan monitoring dan pendampingan perangkat daerah dalam pencatatan pengandaan non transaksional • Bagian Hukum : melakukan kajian dan harmonisasi kebijakan yang disusun	• DINAS KOMINFO • BAPPEDA • SETDA • INSPEKTORAT • DINAS PERPUSTAKAAN • BKPSDM
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik	• Reviu Kebijakan SPBE • Perbaikan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE • Perbaikan Peta Proses Bisnis • Penerapan Manajemen SPBE • Pelaksanaan Audit TIK • Pengembangan Layanan Elektronik	• DINAS KOMINFO • BAPPEDA
S.2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	• bimbingan teknis terkait pembangunan inovasi • desk kelengkapan data dukung inovasi • penyelenggaraan kompetisi inovasi baik oleh masyarakat dan perangkat daerah • pemberian penghargaan kepada perangkat daerah yang telah mengimplementasikan inovasi dan memberikan dampak langsung pada layanan • melibatkan akademisi dalam mengawal pembangunan inovasi perangkat daerah	• BAPPEDA • SEKRETARIAT DAERAH

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG	OPD PENUNJANG
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota				
T.2	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	• Peningkatan cakupan imunisasi dan skrining penyakit tidak menular (PTM) • Intervensi gizi spesifik (PMT balita, tablet tambah darah, edukasi ibu hamil) • pembangunan sarana air bersih, sanitasi, jamban sehat • Program Open Defecation Free (ODF) tingkat desa • Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) • Pengawasan uji kelayakan kendaraan umum • Pengendalian limbah industri dan emisi	• DINAS PUTR • DINAS CKPKP • DPMPTSP • DINAS PERHUBUNGAN • DINAS KESEHATAN • DLH
S.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	• Normalisasi dan pengerukan waduk • normalisasi jaringan irigasi • Program peningkatan dan rehabilitasi jalan secara bertahap • permohonan izin pemanfaatan ruang melalui aplikasi Go-putar dan OSS • Penerapan sistem inventarisasi dan monitoring berkala Peran serta Himpunan Perkumpulan Petani Pemakai Air (HIPPA) • Koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa Pemanfaatan teknologi konstruksi yang lebih tahan lama • Program rehabilitasi dan konservasi DAS • Normalisasi dan pengerukan kali • Pemasangan SR Air Bersih sebanyak 1071 SR, tersedianya SPALDS sebanyak 752 SR, dan drainase dengan kondisi baik sepanjang 500 m. • Pengurangan luas kawasan kumuh seluas 14.57 Ha • Penanganan jalan lingkungan sepanjang 4757 m dan saluran lingkungan sepanjang 517 m • Pengerjaan drainase yang ditangani sepanjang 10039 m	• DISKOPERINDAG • DINAS PUTR • DINAS PMD • DINAS CKPKP

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG	OPD PENUNJANG
S.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	• Pengelolan terpadu air limbah domestik dan aksi bersih sungai dan badan air • Pengujian udara dengan aktifasi sistem pemantauan kualitas udara (AQMS) yang trletak di 10 lokasi • Pengukuran kualitas lahan meliputi 66 lokasi RTH, 34 lokasi taman, 6 jalur hijau, 1 lokasi hutan, 49 lokasi area mangrove, dan 6 lokasi sempadan • Pelayanan dan pengolahan sampah 16 kecamatan melalui Bank Sampah, TPS3R/TPST, Pengolahan di TPA, dan Pengelolaan Mandiri • Program SAJI SAPO (Satu Jiwa Satu Pohon)	DINAS LH
S.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	• Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota • Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	DINAS KBPPPA

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG	OPD PENUNJANG
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah				
T.3	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	• pemberian pelatihan pada pengurus koperasi sehingga jumlah seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Gresik 1.960 koperasi, dan jumlah koperasi aktif sebesar 1.211 koperasi. • fasilitasi perijinan UMKM sehingga pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah 533 usaha mikro • pemberian kemudahan dalam prosedur ekspor Pertumbuhan nilai neraca perdagangan dg nilai 2.622.885.248,18 USD • adanya program 1 usaha i NIB sehingga menambahan IKM sebanyak 96 IKM • Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal • Peningkatan promosi investasi baik melalui kegiatan pameran, promosi melalui media cetak dan digital • Reviu SOP dan SP secara berkala terkait perijinan usaha • Peningkatan pengawasan perizinan kepada perusahaan • Penyusunan peta potensi investasi sektor manufaktur dan mempromosikannya • Bimtek pelaporan LKPM kepada pelaku usaha • Fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar	• KECAMATAN • DISKOPERINDAG • DPMPTSP

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG	OPD PENUNJANG
MISI 3 : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah				
S.6	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	• Peserta pelatihan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui • pelatihan UMKM dan fasilitasi pengurusan ijin usaha • Penguatan peran bursa kerja, dan sistem informasi pasar kerja online • Pelatihan mencakup keterampilan teknis dan soft skills yang relevan dengan pasar kerja • Job matching dan pendampingan Penempatan khusus Penyandang Disabilitas dengan perusahaan	• BAPPEDA • DINAS KOMINFO • DISPAREKRAFBUD PORA • SEKRETARIAT DAERAH • DINAS PMD
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	• penyediaan prasarana pertanian seperti Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Pertanian, Embung Pertanian, DAM Parit, Long Storage, Sumur Bor • penyediaan sarana pertanian seperti alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida, maupun benih/bibit, serta peningkatan kapasitas petani maupun penyuluh pertanian. • Mengantisipasi potensi penurunan produksi melalui penerapan teknik budidaya yang tepat, penyediaan benih unggul, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara berkelanjutan • Membantu kemitraan usaha bagi petani tembakau serta melakukan peremajaan terhadap tanaman • Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi generasi muda sebagai peternak milenial serta mengoptimalkan peran tenaga medik dan paramedik veteriner • Meningkatkan produktivitas komoditas padi melalui penerapan teknik budidaya yang tepat, penyediaan benih unggul, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara berkelanjutan	• DINAS PERTANIAN • DINAS PERIKANAN

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG	OPD PENUNJANG
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
T.4	Tujuan : Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	• pembangunan ruang kelas baru, pembangunan laboratorium, serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dan PAUD g • pengelolaan dana BOS dan BOP serta penyediaan biaya personil peserta didik pada jenjang SD, SMP, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan • Peningkatan mutu proses pembelajaran, melalui penyelenggaraan proses belajar, pembinaan minat dan bakat siswa, serta koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan. • Penguatan kapasitas pendidik dan tata kelola satuan pendidikan, melalui penyediaan dan pengembangan karir pendidik, bimbingan teknis, serta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pada seluruh jenjang.	• DINAS PENDIDIKAN • DINAS KESEHATAN • DINAS KBPPPA
S.7	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	• Revitalisasi Pendidikan dan Literasi Sosial-Keagamaan (kurikulum non-formal) • Penguatan Kapasitas Tokoh Agama dan Masyarakat seperti menyelenggarakan pelatihan dan workshop tematik dengan pendekatan interfaith dan dialog lintas budaya • Fokus Intervensi di Wilayah Rawan Konflik (Kecamatan Driyorejo, Manyar, Kebomas, dan Cerme) • Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyampaikan pesan-pesan kesalehan sosial • monevi Berkala terhadap perkembangan IKS di setiap kecamatan	• BAKESBANGPOL • SATPOL PP

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG	OPD PENUNJANG
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	• Perluasan akses dan daya tampung pendidikan, melalui pembangunan ruang kelas baru, • Penguatan pembiayaan pendidikan, melalui pengelolaan dana BOS dan BOP serta penyediaan biaya personil peserta didik. • Peningkatan mutu proses pembelajaran, melalui penyelenggaraan proses belajar, pembinaan minat dan bakat siswa, serta koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan. • penyediaan dan pengembangan karir pendidik, bimbingan teknis, serta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pada seluruh jenjang. • Penyediaan layanan pendidikan alternatif, bagi peserta didik yang berisiko putus sekolah. • Pelaksanaan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan • Pemberian honorarium bagi guru tidak tetap (GTT/PTT) s • Penyediaan basis data dan dukungan pembiayaan sebagai dasar penataan dan pemerataan pendidik sesuai standar yang dipersyaratkan dalam SNP.	DINAS PENDIDIKAN
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	• Universal Health Coverage (UHC) yang memastikan seluruh warga memiliki akses jaminan kesehatan • beroperasinya RS Gresik Sehati untuk pemerataan layanan • program makanan bergizi dan kampanye aksi sehat di sekolah-sekolah • peningkatan tunjangan kinerja tenaga kesehatan • melibatkan masyarakat dalam pencegahan penyakit melalui posyandu, polindes dan poskestren • menyiapkan tenaga medis spesialis di puskesmas • pembangunan reservoir raksasa untuk atasi krisis air bersih	DINAS KESEHATAN, DINAS KBPPPA DAN DINAS PUTR

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG	OPD PENUNJANG
MISI 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah				
S.8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Prevalensi Stunting	• Edukasi dan Pendampingan Ibu Hamil dan Neonatus Meningkatkan edukasi • kepada ibu hamil mengenai pentingnya pola makan sehat, kunjungan neonatal, dan tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir Program Kolaborasi Multisektor Melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat,	DINAS KESEHATAN

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG	OPD PENUNJANG
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik				
T.5	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	• PKH Inklusif diluar program pusat pada 991 orang, • BOSDA (dana BOS dari APBD), • Pemberian santunan janda miskin 13.958 orang, • pemberian santunan anak yatim 2.562 anak, • pemberian makan anak panti asuhan 150 anak, • bantuan alat bantu disabilitas pada 25 orang berupa kursi roda, hearing aid, kaki palsu • Pembangunan Rumah tidak layak huni • job fair	• DINAS SOSIAL • DINAS TENAGA KERJA
		Tingkat Pengangguran Terbuka	• Tersedianya aplikasi gresikkerja.gresikkab.go.id untuk memfasilitasi para pencari kerja • Penyelenggaraan kegiatan ReDINAKER (Recruitmen Dinas Tenaga Kerja yang menghubungkan antara pencari kerja dengan pemberi kerja. • Pemberian pelatihan berbasis kompetensi dasar seperti digital marketing yang disebarluaskan melalui platform media sosial • Mulai berkembangnya UMKM dan usaha mikro : Fasilitasi pembiayaan mikro, pendampingan usaha, dan akses pasar digital.	• DINAS TENAGA KERJA • DISPAREKRAFBUDPORA • DISKOPERINDAG

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG	OPD PENUNJANG
MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik				
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	• pemberian Bantuan langsung tunai berupa PKH inklusif pada 991 orang • Pemberian santunan janda miskin 13.958 orang • pemberian santunan anak yatim 2.562 anak • pemberian makan anak panti asuhan 150 anak • bantuan alat bantu disabilitas pada 25 orang berupa kursi roda, hearing aid, kaki palsu • Pemberian Pelatihan kerja	• DINAS TENAGA KERJA • DISPAREKRAF BUDPORA • DISKOPERINDAG
S.9	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	• Peserta pelatihan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui • pelatihan UMKM dan fasilitasi pengurusan ijin usaha • Monitoring data penempatan tenaga kerja ke perusahaan • Dialog pencegahan perselisihan hubungan industrial dan peningkatan fungsionalisasi mediator hubungan industrial. • Penguatan peran bursa kerja, dan sistem informasi pasar kerja online • Pelatihan mencakup keterampilan teknis dan soft skills yang relevan dengan pasar kerja • Job matching dan pendampingan Penempatan khusus Penyandang Disabilitas dengan perusahaan • Fasilitasi pendaftaran pekerja miskin sebagai peserta aktif melalui pembiayaan iuran • Optimalisasi Pengawasan dan Kepatuhan Perusahaan	• DINAS SOSIAL • DINAS KESEHATAN • DINAS TENAGA KERJA

Berdasarkan tabel diatas pelaksanaan dokumen perencanaan periode 2021–2026, kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 menunjukkan kondisi sangat baik dan berada pada jalur yang tepat menuju pencapaian target akhir periode perencanaan. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian kinerja sebesar 97,76%, yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utama telah berhasil direalisasikan sesuai target yang ditetapkan.

Dari sisi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran sebesar 87,33% menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi dan mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam mengimplementasikan program dan kegiatan secara efektif. Meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mengoptimalkan serapan hingga mendekati 100%, kondisi ini telah menggambarkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang relatif matang serta terkendali.

Selanjutnya, nilai efisiensi sebesar 0,99 berdasarkan 214/PMK.02/2017 yaitu batas efisiensi dalam rentang -20 s/d 20 mengindikasikan bahwa setiap satuan anggaran yang digunakan hampir sepenuhnya mampu menghasilkan output dan outcome sesuai yang direncanakan. Dengan kata lain, pelaksanaan program dan kegiatan telah berlangsung hampir optimal, dengan tingkat pemborosan yang sangat minimal.

Secara keseluruhan, kombinasi antara capaian kinerja yang sangat tinggi, penyerapan anggaran yang baik, serta tingkat efisiensi yang mendekati sempurna menunjukkan bahwa pelaksanaan dokumen perencanaan periode 2021–2026 hingga Tahun 2025 telah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Kondisi ini menjadi dasar penguatan strategi pada tahun berikutnya agar kualitas kinerja dan tata kelola dapat terus ditingkatkan.



TUJUAN 1:

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan hasil evaluasi sementara kementrian PAN RB capaian Indeks reformasi birokrasi Tahun 2025 sebesar 88.01 persen dari target yang ditetapkan (86.85). Kondisi ini menunjukkan bahwa target IRB telah tercapai, dengan selisih sebesar 1.16 poin. kategori A (sangat baik). faktor penunjang tercapainya IRB karena beberapa komponen RB general mengalami peningkatan seperti :

1. Tingkat digitalisasi arsip 90.19 menjadi 92.91,
2. indeks reformasi hukum 96.24 menjadi 99.70,
3. indeks tata kelola pengadaan 76.93 menjadi 85.66
4. indeks pelayanan pelayanan publik 4.16 menjadi 4.35
5. capaian iku makro 83.28 menjadi 86.97
6. survei penilaian integritas 59.78 menjadi 75.75
7. Survei kepuasan masyarakat 88.19 menjadi 90.97

Komponen RB tematik juga mengalami peningkatan seperti :

1. Pengentasan Kemiskinan dari skor 0.67 menjadi 0.75
2. Realisasi investasi dari skor 0.5 menjadi 0.73

dalam upaya pencapaian tujuan tersebut diperlukan pagu anggaran sebesar Rp.1,226,946,750,917.55 dan terealisasi Rp. 1,093,179,447,244.89 atau 89.01%, perangkat daerah yang menunjang ketercapaian tujuan antara lain :

1. Dinas Kominfo dengan menyusun arsitektur dan peta rencana,
2. Sekretariat Daerah (bagian Organisasi) dengan melakukan pendampingan dan evaluasi mandiri kualitas pelayanan publik. dan pemantauan hasil survei kepuasan masyarakat seluruh opd secara berkala setiap 1 bulan sekali.
3. Inspektorat : Sosialisasi integritas ke seluruh OPD
4. Sekretariat Daerah (bagian layanan Pengadaan Barang jasa) : melakukan monitoring dan pendampingan perangkat daerah dalam pencatatan pengandaan non transaksional
5. Bagian Hukum : melakukan kajian dan harmonisasi kebijakan yang disusun



Inspektorat Kabupaten Gresik Bersama KPK RI Lakukan Pemantauan Tindak Lanjut SPI 2024 dan Persiapan SPI 2025



Sasaran 1:

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI

1 INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Tahun 2025 tidak dilakukan penilaian indeks SPBE dan terdapat perubahan formulasi perhitungan yang semula indeks SPBE menjadi indeks pemerintah digital, sehingga untuk nilai indeks SPBE menggunakan nilai tahun 2024.

Berdasarkan surat keputusan Kementrian PANRB nomor 663 tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE tahun 2024 sebesar 4.32 kategori "memuaskan" dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 4.4 sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 98.18% indeks tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata indeks Kabupaten sebesar 3.21 dan rata-rata indeks provinsi sebesar 4.04.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gresik antara lain :

1. Melaksanakan Reviu Kebijakan SPBE
2. Penyusunan Arsitektur SPBE
3. Penyusunan Peta Rencana SPBE
4. Perubahan Peta Proses Bisnis dengan mengacu pada RPJMD 2025-2029
5. Penerapan Manajemen SPBE
6. Pelaksanaan Audit TIK
7. Pengembangan Layanan Elektronik



Bimtek Penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Gresik



SPBE Gresik Masuk 6 Terbaik Nasional di Ajang SPBE Summit 2024



Rakor Manajemen pengetahuan SPBE

Sasaran 2:

Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan

2 INDEKS INOVASI DAERAH

berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 400.10.11-6097 tahun 2025 indeks inovasi daerah kabupaten gresik sebesar 57,98 dari target yang ditetapkan (54.43). Kondisi ini menunjukkan bahwa target indeks inovasi daerah telah tercapai, upaya dilakukan untuk mencapai nilai tersebut antara lain :

1. bimbingan teknis terkait pembangunan inovasi
2. desk kelengkapan data dukung inovasi
3. penyelenggaraan kompetisi inovasi baik oleh masyarakat dan perangkat daerah
4. pemberian penghargaan kepada perangkat daerah yang telah mengimplementasikan inovasi dan memberikan dampak langsung pada layanan
5. melibatkan akademisi dalam mengawal pembangunan inovasi perangkat daerah





Bimtek dan desk inovasi



pemberian penghargaan inovasi



kompetisi inovasi

TUJUAN 2:

Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan

2 INDEKS DAYA SAING DAERAH

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 terealisasi sebesar 3,76, atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,62. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan daya saing daerah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi nasional sebesar 3,50, capaian IDSD Kabupaten Gresik berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat daya saing Kabupaten Gresik relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar daerah lain di Indonesia, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan iklim usaha.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur sebesar 3,91, capaian Kabupaten Gresik masih berada di bawah rata-rata provinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah penyangga dan pusat industri di Jawa Timur, masih terdapat ruang peningkatan daya saing agar sejajar dengan kinerja provinsi secara keseluruhan.

Secara umum, capaian IDSD Tahun 2025 menempatkan Kabupaten Gresik pada posisi yang cukup kompetitif, yaitu lebih baik dari capaian nasional namun masih perlu ditingkatkan untuk mendekati capaian Provinsi Jawa Timur.

Beberapa faktor utama yang mendukung capaian dan keberhasilan melampaui target IDSD antara lain:

- Struktur Ekonomi Industri yang Kuat dan Terdiferensiasi : Kabupaten Gresik memiliki basis industri manufaktur, petrokimia, semen, dan logistik yang matang, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pilar efisiensi pasar, produktivitas tenaga kerja, dan nilai tambah ekonomi.
- Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah : Perbaikan tata kelola pemerintahan, perencanaan berbasis data, serta sinergi lintas perangkat daerah turut mendukung efektivitas kebijakan peningkatan daya saing
- Dukungan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Industri : Ketersediaan infrastruktur energi, air industri, dan kawasan terintegrasi menjadi faktor penopang utama dalam meningkatkan efisiensi produksi dan daya tarik investasi.

program / kegiatan penunjang keberhasilan IDSD antara lain :

1. Peningkatan cakupan imunisasi dan skrining penyakit tidak menular (PTM)
2. Intervensi gizi spesifik (PMT balita, tablet tambah darah, edukasi ibu hamil)
3. pembangunan sarana air bersih, sanitasi, jamban sehat
4. Program Open Defecation Free (ODF) tingkat desa
5. Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
6. Pengawasan uji kelayakan kendaraan umum
7. Pengendalian limbah industri dan emisi

Sasaran 3:

Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing

INDEKS KEPUASAN INFRASTRUKTUR

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditargetkan sebesar 90. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, realisasi indeks mencapai 89,71, atau 99,68% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai kualitas layanan infrastruktur di Kabupaten Gresik dalam kategori sangat baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai target optimal. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan kepuasan infrastuktur antara lain :

1. Normalisasi dan pengerukan waduk sehingga peningkatan volume daya tampung waduk kabupaten sebesar 11.154.060,14 m3
2. normalisasi jaringan irigasi sehingga panjang jaringan irigasi kondisi baik sebesar 147.356 m
3. Program peningkatan dan rehabilitasi jalan secara bertahap sehingga jalan yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang sebesar 403,52 km (71,22%).
4. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR) melalui Adanya kemudahan permohonan izin pemanfaatan ruang melalui aplikasi Go-putar dan OSS
5. Penerapan sistem inventarisasi dan monitoring berkala Peran serta Himpunan Perkumpulan Petani Pemakai Air (HIPPA)
6. Koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa Pemanfaatan teknologi konstruksi yang lebih tahan lama
7. Program rehabilitasi dan konservasi DAS
8. Normalisasi dan pengerukan kali
9. Pemasangan SR Air Bersih sebanyak 1071 SR, tersedianya SPALDS sebanyak 752 SR, dan drainase dengan kondisi baik sepanjang 500 m.
10. Pengurangan luas kawasan kumuh seluas 14.57 Ha
11. Penanganan jalan lingkungan sepanjang 4757 m dan saluran lingkungan sepanjang 517 m
12. Pengerjaan drainase yang ditangani sepanjang 10039 m



Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan, 2025

Gambar 3.2 Pembangunan Jalan



Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan, 2025

Gambar 3. 1 Pintu Air dan Jaringan Irigasi dan waduk

Sasaran 4:

Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang melampaui target serta mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Target IKLH Kabupaten Gresik ditetapkan sebesar 60,93, sementara realisasi berdasarkan aplikasi SITALA (Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) capaian mencapai 65,81 Kategori "Sedang". Capaian ini melampaui target sebesar 4,94 poin, yang mengindikasikan adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup secara nyata serta efektivitas kebijakan dan program pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 60,12, IKLH Kabupaten Gresik mengalami peningkatan sebesar 5,72 poin. Jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang berada pada angka 71,24, capaian Kabupaten Gresik masih berada di bawah rata-rata provinsi, dengan selisih sebesar 5,40 poin. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Gresik telah menunjukkan perbaikan yang positif, masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut agar dapat menyamai capaian kualitas lingkungan hidup di tingkat provinsi.

Secara keseluruhan, capaian IKLH Kabupaten Gresik mencerminkan tren perbaikan yang kuat dan berkelanjutan, berikut upaya yang dilakukan :

1. Pengelolan terpadu air limbah domestik dan aksi bersih sungai dan badan air
2. Pengujian udara dengan aktifasi sistem pemantauan kualitas udara (AQMS) yang trletak di 10 lokasi
3. Pengukuran kualitas lahan meliputi 66 lokasi RTH, 34 lokasi taman, 6 jalur hijau, 1 lokasi hutan, 49 lokasi area mangrove, dan 6 lokasi sempadan
4. Pelayanan dan pengolahan sampah 16 kecamatan melalui Bank Sampah, TPS3R/TPST, Pengolahan di TPA, dan Pengelolaan Mandiri
5. Program SAJI SAPO (Satu Jiwa Satu Pohon)



Gerakan Menanam Pohon



Tindak Lanjut Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Sasaran 5:

Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Gresik mencerminkan tingkat kesetaraan pembangunan antara perempuan dan laki-laki dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan penghidupan, yaitu bagaimana setiap gender dapat memperoleh capaian pembangunan yang seimbang. Menurut data sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS), IPG Kabupaten Gresik pada tahun 2025 mencapai sekitar 91,25, dari target yang ditetapkan 93.04 menunjukkan tren peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya meskipun sedikit di bawah rata-rata Provinsi jawa timur (92.19). Nilai IPG tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam mengurangi kesenjangan gender, meskipun masih terdapat ruang untuk mendekati nilai ideal 100 yang mencerminkan kesetaraan penuh antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian pembangunan manusia

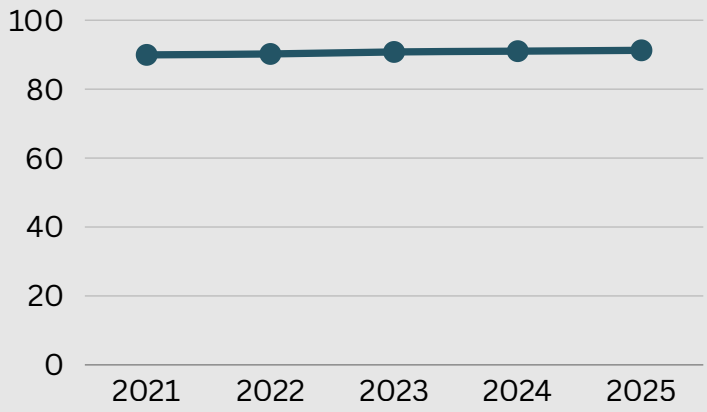
Beberapa faktor penunjang pencapaian tujuan tersebut antara lain :

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota



forum diskusi kelompok perempuan

Tahun 2025 merupakan tahun ke-lima atau terakhir dari RPJMD periode 2021-2026 dan Tahun pertama dari RPJMD periode 2025-2029. berikut merupakan tren peningkatan pembangunan gender di Kabupaten Gresik :





Pembelajaran sekolah perempuan

TUJUAN 3 :

Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,2%. Berdasarkan hasil penghitungan BPS tahun 2025, realisasi pertumbuhan ekonomi 4.91, sehingga dapat dikatakan belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Beberapa faktor penunjang pertumbuhan ekonomi antara lain :

- Iklim investasi relatif kondusif dan lokasi strategis di kawasan industri
- Belanja pemerintah dan program pembangunan mendorong aktivitas ekonomi
- Tersedianya lapangan kerja di sektor industri dan jasa pendukung.

Beberapa program kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut antara lain :

1. pemberian pelatihan pada pengurus koperasi sehingga jumlah seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Gresik 1.960 koperasi, dan jumlah koperasi aktif sebesar 1.211 koperasi.
2. fasilitasi perijinan UMKM sehingga pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah 533 usaha mikro
3. pemberian kemudahan dalam prosedur ekspor Pertumbuhan nilai neraca perdagangan dg nilai 2.622.885.248,18 USD
4. adanya program 1 usaha 1 NIB sehingga menambahan IKM sebanyak 96 IKM
5. Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal
6. Peningkatan promosi investasi baik melalui kegiatan pameran, promosi melalui media cetak dan digital
7. Reviu SOP dan SP secara berkala terkait perijinan usaha
8. Peningkatan pengawasan perizinan kepada perusahaan
9. Penyusunan peta potensi investasi sektor manufaktur dan mempromosikannya
10. Bimtek pelaporan LKPM kepada pelaku usaha
11. Fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar



Sasaran 6:

Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah

INDEKS WILLIAMSON

Indeks Williamson Kabupaten Gresik menunjukkan capaian yang baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, ndeks Williamson Kabupaten Gresik tercatat sebesar 0.43, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 0,33. Capaian ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan dikategorikan sedang distribusi pendapatan di Kabupaten Gresik berada pada kondisi lebih merata daripada yang direncanakan, sehingga kinerja pengendalian ketimpangan dapat dinilai melampaui target. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar 0,330, Indeks Williamsoni Kabupaten Gresik mengalami peningkatan sebesar 0,1 poin. peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan bertahap dalam pemerataan ekonomi masyarakat, yang mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan secara lebih inklusif oleh berbagai kelompok pendapatan. Formula perhitungan indeks williamson sebagai berikut :

$$IW=\sqrt{((\left[\Sigma(Y\_i-Y)\right]\text{^}2\ (f\_i/n))/Y)}\ x\ 100$$

Yi = PDRB per Kapita per Kecamatan di Kabupaten Gresik
Y = PDRB per Kapita Kabupaten Gresik
fi = Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kab. Gresik
n = Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik

berdasarkan proyeksi yang ditetapkan : Indeks Williamson< 0,35 maka Dikategorikan Ketimpangan Wilayah Rendah; 0,35 < Indeks Williamson < 0,5 maka Dikategorikan Ketimpangan Wilayah Sedang; Indeks Williamson > 0,5 maka Dikategorikan Ketimpangan Wilayah Tinggi

Faktor Pennjang Indeks WIlliamson antar lain :

- pemeliharaan sarana distribusi perdagangan (pasar sidayu dan sentra IKM)
- fasilitasi ijin usaha perdagangan seperti pengurusan merk dan sertifikat halal
- pembinaan pedagang di pasar atau sentra IKM
- monitoring harga kebutuhan pokok dan ketersediaan bahan pokok setiap hari
- promosi dan misi dagang
- tera ulang alat ukuran, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) agar tidak merugikan warga
- pemeliharaan lumbung pangan, lantai jemur, rumah penggilingan padi
- pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi
- pemberian pupuk cair gratis ke petani
- pendampingan sertifikasi benih agar dapat dipasarkan
- pengadaan alat mesin pertanian
- penetapan peta lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan
- rehabilitasi jalan usaha tani,
- pembentukan sekolah lapang kelompok tani
- pengembangan inovasi pertanian seperti pembuatan peptisida hayati.

Sasaran 6:

Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah

PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN



pemberian bantuan pupuk oleh wakil bupati Gresik

Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditargetkan sebesar 5-6%. Berdasarkan capaian tahun 2025, realisasi mencapai 1.63, sehingga jauh dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak memiliki daya tahan dan kontribusi yang positif terhadap perekonomian daerah, karena bergeser menjadi kawasan industri. upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- penyediaan prasarana pertanian seperti Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Pertanian, Embung Pertanian, DAM Parit, Long Storage, Sumur Bor
- penyediaan sarana pertanian seperti alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida, maupun benih/bibit, serta peningkatan kapasitas petani maupun penyuluh pertanian.
- Mengantisipasi potensi penurunan produksi melalui penerapan teknik budidaya yang tepat, penyediaan benih unggul, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara berkelanjutan
- Membantu kemitraan usaha bagi petani tembakau serta melakukan peremajaan terhadap tanaman
- Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi generasi muda sebagai peternak milenial serta mengoptimalkan peran tenaga medik dan paramedik veteriner
- Meningkatkan produktivitas komoditas padi melalui penerapan teknik budidaya yang tepat, penyediaan benih unggul, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara berkelanjutan



pembangunan Embung Pertanian



Petani Dapat Bantuan Combine

TUJUAN 4 :

Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama beberapa tahun terakhir, mencerminkan perbaikan komponen-komponen dasar pembangunan manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, IPM Gresik pada tahun 2025 mencapai 79.69, meningkat 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan pada ketiga dimensi utama penyusun IPM, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Secara komparatif, IPM Gresik juga berada di atas rata-rata kualitas IPM wilayah Provinsi Jawa Timur (76.15), yang menunjukkan performa relatif kuat dalam pembangunan manusia di tingkat regional. Faktor penunjang peningkatan IPM di Kabupaten Gresik antara lain:

- perbaikan layanan kesehatan, dengan pembangunan infrastruktur kesehatan seperti RSUD Ibnu SIna dan RSGS;
- pemerataan akses dan kualitas pendidikan, sehingga anak-anak usia sekolah memiliki peluang yang lebih besar untuk mengenyam pendidikan lebih lama;
- sektor industri pengolahan dan aktivitas ekonomi pendukungnya, membuka peluang pendapatan bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan di tahun 2025 :

1. pembangunan ruang kelas baru, pembangunan laboratorium, serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dan PAUD
2. pengelolaan dana BOS dan BOP serta penyediaan biaya personil peserta didik pada jenjang SD, SMP, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan
3. Peningkatan mutu proses pembelajaran, melalui penyelenggaraan proses belajar, pembinaan minat dan bakat siswa, serta koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan.
4. Penguatan kapasitas pendidik dan tata kelola satuan pendidikan, melalui penyediaan dan pengembangan karir pendidik, bimbingan teknis, serta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pada seluruh jenjang.
5. beroperasinya RS Gresik Sehati untuk pemerataan layanan kesehatan



Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE)



Peresmian RSUD Gresik Sehati sebagai fasilitas layanan kesehatan masyarakat Gresik Selatan

Sasaran 7 :

Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat

INDEKS KESALEHAN SOSIAL

ICapaian kinerja Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar 80 realisasi tahun 2025 mencapai 82,43, atau melampaui target sebesar 2.43 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial, keagamaan, dan solidaritas sosial berjalan efektif dan konsisten.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, indeks tercatat sebesar 80,32, sehingga terjadi kenaikan sebesar 2,11 poin pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam perilaku sosial masyarakat, seperti meningkatnya kepedulian sosial, toleransi antarwarga, partisipasi dalam kegiatan sosial-keagamaan, serta penguatan nilai gotong royong di lingkungan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan bahwa pembangunan sosial di Kabupaten Gresik tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan fisik, tetapi juga pada penguatan karakter dan nilai-nilai sosial masyarakat. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga keberlanjutan capaian ini melalui penguatan program pembinaan sosial, kolaborasi lintas sektor, serta adaptasi terhadap dinamika sosial yang terus berkembang, agar Indeks Kesalehan Sosial dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan inklusif.

Beberapa faktor penunjang pencapaian tujuan tersebut antara lain :

1. Revitalisasi Pendidikan dan Literasi Sosial-Keagamaan (kurikulum non-formal dalam bentuk pendidikan publik (public education) mengenai kesalehan sosial)
2. Penguatan Kapasitas Tokoh Agama dan Masyarakat seperti menyelenggarakan pelatihan dan workshop tematik dengan pendekatan interfaith dan dialog lintas budaya
3. Fokus Intervensi di Wilayah Rawan Konflik (Kecamatan Driyorejo, Manyar, Kebomas, dan Cerme)
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyampaikan pesan-pesan kesalehan sosial
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap perkembangan IKS di setiap kecamatan



Lembaga Filantropi Gresik berkolaborasi dengan MUI untuk tingkatkan pelayanan umat



Pemberian Dana Hibah dalam rangka pembinaan umat dan pemberdayaan masyarakat

Sasaran 8 :

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan

INDEKS PENDIDIKAN

Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditargetkan sebesar 82,7. Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, realisasi indeks mencapai 84,22, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan kinerja pembangunan sektor pendidikan yang berjalan efektif dan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gresik. Peningkatan nilai indeks tersebut dipengaruhi oleh membaiknya indikator pendukung, seperti meningkatnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta perluasan akses pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, dukungan program beasiswa bagi siswa kurang mampu, rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru turut berkontribusi terhadap capaian ini.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan antara lain :

- Perluasan akses dan daya tampung pendidikan, melalui pembangunan ruang kelas baru,
- Penguatan pembiayaan pendidikan, melalui pengelolaan dana BOS dan BOP serta penyediaan biaya personil peserta didik.
- Peningkatan mutu proses pembelajaran, melalui penyelenggaraan proses belajar, pembinaan minat dan bakat siswa, serta koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan.
- penyediaan dan pengembangan karir pendidik, bimbingan teknis, serta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pada seluruh jenjang.
- Penyediaan layanan pendidikan alternatif, bagi peserta didik yang berisiko putus sekolah.
- Pelaksanaan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
- Pemberian honorarium bagi guru tidak tetap (GTT/PTT) s
- Penyediaan basis data dan dukungan pembiayaan sebagai dasar penataan dan pemerataan pendidik sesuai standar yang dipersyaratkan dalam SNP.



pembangunan sekolah rakyat



sosialisasi sekolah rakyat

Sasaran 8 :

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditargetkan sebesar 85. Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, realisasi IPKM mencapai 84,46, sehingga selisih 0.54 dari target yang telah ditetapkan.
Faktor penunjang keberhasilan IPKM meliputi : peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar, perbaikan kesehatan ibu dan anak, peningkatan status gizi masyarakat, ketersediaan sanitasi dan air bersih yang layak, pengendalian penyakit, dukungan kebijakan dan anggaran kesehatan, serta kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat

upaya yang dilakukan pada tahun 2025 antara lain :

1. pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yang memastikan seluruh warga Gresik memiliki akses jaminan kesehatan
2. beroperasinya RS Gresik Sehati untuk pemerataan layanan
3. program makanan bergizi dan kampanye aksi sehat di sekolah-sekolah
4. peningkatan tunjangan kinerja tenaga kesehatan
5. melibatkan masyarakat dalam pencegahan penyakit melalui posyandu, polindes dan poskestren
6. menyiapkan tenaga medis spesialis di puskesmas
7. pembangunan reservoir raksasa untuk atasi krisis air bersih



sinkronisasi pelayanan jaminan kesehatan



sosialisasi sanitasi aman di desa manyar sidomukti



pengelolaan air limbah domestik

Sasaran 8 :

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan

PREVALENSI STUNTING

Prevalensi stunting Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditargetkan berada pada rentang 8,5%–7%, sebagai bagian dari komitmen percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan. Namun berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, realisasi prevalensi stunting tercatat sebesar 8.07%, sehingga melebihi mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai intervensi spesifik dan sensitif telah dilaksanakan, masih terdapat tantangan dalam penanganan stunting, antara lain keterbatasan perubahan perilaku pola asuh dan konsumsi gizi seimbang, masih adanya balita dengan berat badan lahir rendah (BBLR), serta faktor sanitasi dan akses air bersih di beberapa wilayah. Berdasarkan Laporan Program Gizi (Sigizi) Penghambat ketercapaian target prevalensi stunting antara lain :

1. Adanya ibu balita yang tidak mau anaknya dirujuk ke rumah sakit untuk diperiksa dokter spesialis anak dan mendapatkan resep susu PKMK untuk intervensi stunting
2. Terbatasnya susu PKMK untuk intervensi balita stunting
3. Pola asuh ibu balita yang masih salah
4. Penyakit infeksi berulang pada balita

Upaya yang dilakukan untuk penanganan stunting antara lain : pemeriksaan menyeluruh, edukasi gizi, dan deteksi dini risiko kehamilan, Pengadaan Fasilitas Kesehatan Neonatal

Edukasi dan Pendampingan Ibu Hamil dan Neonatus Meningkatkan edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya pola makan sehat, kunjungan neonatal, dan tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir Program Kolaborasi Multisektor Melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat,



komitmen bersama penanganan stunting



sosialisasi pencegahan stunting



Kolaborasi Dinkes Gresik dan Cargill Perkuat Literasi Cegah Stunting Lewat Buku KIA

Tujuan 4:

Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan

TINGKAT KEMISKINAN

Berdasarkan berita resmi statistik nomor 15/09/3525/Th.VI, 22 September 2025 tentang Profil Kemiskinan di Kabupaten Gresik sebesar 9.95 persen dari target yang ditetapkan 9.4-9.7. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Tingkat Kemiskinan menunjukkan hasil yang tidak sesuai target, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 10.32 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0.37 poin

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Gresik pada bulan Maret 2025 mencapai 138,55 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 3,84 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 142,39 ribu jiwa.

faktor penunjang penurunan tingkat kemiskinan dikabupaten Gresik antara lain :

1. Inflasi Maret 2024–Maret 2025 relatif terkendali, yaitu sebesar 0,59 persen. Berbagai upaya untuk menekan inflasi seperti menjaga ketersediaan berbagai kebutuhan pokok dan gerakan pasar murah mampu menjaga daya beli masyarakat.
2. Selain itu, berbagai program intervensi kemiskinan antara lain :
   a. PKH Inklusif diluar program pusat pada 991 orang,
   b. BOSDA (dana BOS dari APBD),
   c. Pemberian santunan janda miskin 13.958 orang,
   d. pemberian santunan anak yatim 2.562 anak,
   e. pemberian makan anak panti asuhan 150 anak,
   f. bantuan alat bantu disabilitas pada 25 orang berupa kursi roda, hearing aid, kaki palsu ,
   g. Pembangunan rumah tidak layak hudi bagi masyarakat miskin, jaminan kesehatan,
   h. penyelenggaraan bursa kerja dan
   i. pelatihan tenaga kerja.



Tren Penurunan tingkat kemiskinan



bantuan PKH inklusif

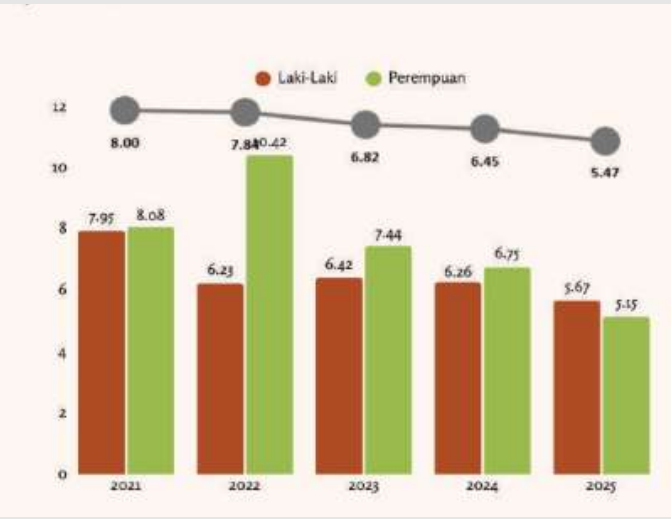


Bansos kepada Tukang Becak dan Dhuafa

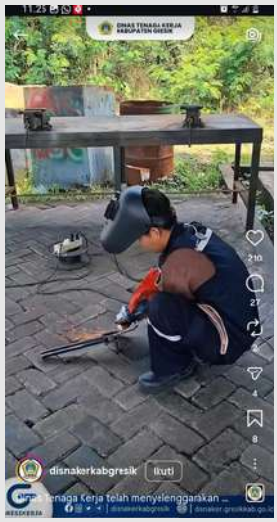
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Berdasarkan berita resmi statistik nomor 57/11/35/Th.XXIII, 1 Desember 2025 tentang Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik 2025. Tingkat pengangguran terbuka Tahun 2025 sebesar 5.47 dari target yang ditetapkan 6. Kondisi ini menunjukkan bahwa target TPT telah tercapai, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 6.45 mengalami peningkatan sebesar 0.98 poin
Penduduk yang bekerja pada Agustus 2025 sebanyak 695,66 ribu orang, turun sebanyak 19,95 ribu orang dari Agustus 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah dari sektor Jasa yang mengalami pertambahan sebesar 285,90 ribu orang. Di sisi lain, lapangan usaha yang mengalami penurunan terbanyak adalah dari sektor Pertanian yaitu sebesar 1,75 persen poin. Pada Agustus 2025 sebanyak 56,16 persen bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 2,00 persen poin dibanding Agustus 2024.
faktor penunjang pencapaian target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka antara lain :

1. Tersedianya aplikasi gresikkerja.gresikkab.go.id untuk memfasilitasi para pencari kerja
2. Penyelenggaraan kegiatan ReDINAKER (Recruitmen Dinas Tenaga Kerja yang menghubungkan antara pencari kerja dengan pemberi kerja.
3. Pemberian pelatihan berbasis kompetensi dasar seperti digital marketing yang disebarluaskan melalui platform media sosial
4. Mulai berkembangnya UMKM dan usaha mikro : Fasilitasi pembiayaan mikro, pendampingan usaha, dan akses pasar digital.
5. Optimalisasi Pengawasan dan Kepatuhan Perusahaan dalam memperkerjakan tenaga kerja lokal



Tren Penurunan pengangguran dalam 5 tahun



Pelatihan Las



Kegiatan ReDINAKER

Sasaran 9:

Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Berdasarkan berita resmi statistik nomor 57/11/35/Th.XXIII, 1 Desember 2025 tentang Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik 2025. Tingkat Partisipasi angkatan kerja Tahun 2025 sebesar 67.99 dari target yang ditetapkan 75 Kondisi ini menunjukkan bahwa target TPAK belum tercapai tercapai dengan selisih sekitar 7.01 poin, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 71.61 mengalami penurunan sebesar 3.62 poin Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Gresik pada Agustus 2025 mencapai 735, 90 ribu orang. Angka ini bertambah 29,07 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Gresik mencapai 67,99 persen, turun 3,62 persen poin dibandingkan TPAK pada Agustus 2024.

faktor penghambat menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja antara lain :

1. Ketersediaan Lapangan Kerja yang Tidak Memadai tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja
2. Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga perusahaan banyak merekrut tenaga kerja dari luar negeri atau luar kabupaten gresik

solusi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja antara lain :

1. Peserta pelatihan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui
2. pelatihan UMKM dan fasilitasi pengurusan ijin usaha
3. Monitoring data penempatan tenaga kerja ke perusahaan
4. Dialog pencegahan perselisihan hubungan industrial dan peningkatan fungsionalisasi mediator hubungan industrial.
5. Penguatan peran bursa kerja, dan sistem informasi pasar kerja online
6. Pelatihan mencakup keterampilan teknis dan soft skills yang relevan dengan pasar kerja
7. Job matching dan pendampingan Penempatan khusus Penyandang Disabilitas dengan perusahaan
8. Fasilitasi pendaftaran pekerja miskin sebagai peserta aktif melalui pembiayaan iuran
9. Optimalisasi Pengawasan dan Kepatuhan Perusahaan



pelatihan kewirausahaan


BBSPJILM & Diskoperindag Gresik Laksanakan Program Penguatan IKM Logam dan Mesin 2025

Sasaran 9:

Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan

CAKUPAN PERLINDUNGAN SOSIAL WARGA MISKIN

Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin di Kabupaten Gresik pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Dengan target sebesar 100%, realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga seluruh warga miskin yang telah terdata dalam basis data terpadu berhasil mendapatkan akses terhadap program perlindungan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memastikan tidak ada warga miskin yang terlewat dari intervensi bantuan sosial, baik dalam bentuk bantuan tunai, bantuan pangan, jaminan kesehatan, maupun program perlindungan sosial lainnya. Keberhasilan ini didukung oleh validasi dan pemutakhiran data yang berkelanjutan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Realisasi 100% ini juga menunjukkan efektivitas mekanisme penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan akuntabel, sehingga mampu mendukung upaya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik.

cakupan perlindungan sosial warga miskin diberikan pada :

1. pemberian Bantuan langsung tunai berupa PKH inklusif pada 991 orang
2. Pemberian santunan janda miskin 13.958 orang
3. pemberian santunan anak yatim 2.562 anak
4. pemberian makan anak panti asuhan 150 anak
5. bantuan alat bantu disabilitas pada 25 orang berupa :
    a. kursi roda,
    b. hearing aid,
    c. kaki palsu dll.



Bantuan langsung tunai berupa PKH inklusif



bantuan alat bantu disabilitas

PENGUKURAN KINERJA PERIODE 2025-2029



Visi & Misi 2025-2029

VISI

Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat

MISI

- Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.
- Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat
- Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

A. PERJANJIAN KINERJA 2025

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
MISI 1: Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.			
T.1	Tujuan : Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	79,84
		Indeks Pembangunan Gender	91,06
		Indeks Kesalehan Sosial	80,52
S.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	10.37
		Harapan Lama Sekolah	13.99
S.2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	74.57
s.3	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak	71,62
s.4	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Pemberdayaan Gender	70,72
		Indeks Ketimpangan Gender	0.402
		Indeks Inklusi (GEDSI)	60
s.5	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Harmoni	3.78

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
MISI 2: Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.			
T.2	Tujuan : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekenomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	4,72
S.6	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	50,32
s.7	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor	10,77
s.8	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	4.6
MISI 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat			
T.3	Tujuan : Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	22,77
		Penurunan Emisi GRK	40,331.31
s.9	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio Government Expenditure	1.95
s.10	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah	3.75
		Indeks Infrastuktur	63.23
		Indeks Konektivitas Wilayah	0.745
s.11	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	135,9
s.12	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.9

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
MISI 4: Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat			
T.4	Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	86.17
s.13	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Indeks Pemerintah Digital	4.37
		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	80.9
		Indeks Sistem Merit	315
		Indeks Pelayanan Publik	2.25
MISI 5: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar			
T.5	Tujuan : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan	Tingkat kemiskinan	9,95
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,91
s.14	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi	48
s.15	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	80
s.16	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini	0,351
s.17	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	32

Perjanjian kinerja inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Dalam pencapaian target kinerja yang diperjanjikan di perlukan anggaran (PAPBD 2025) sebesar Rp.3,945,861,940,316.08 mengalami penurunan sebanyak Rp.28,899,630,605.92 atau 0,73% dari anggaran tahun 2024 sebanyak Rp.3,974,761,570,922

B. PENGUKURAN KINERJA 2025

Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Gresik Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis dituangkan dalam PK Bupati merupakan tahun ke-1 (pertama) pada periode RPJMD 2025-2029. Secara rata-rata capaian kinerja pada 2025 setelah dilakukan normalisasi adalah 101.5 yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
MISI 1: Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.						
T.1	Tujuan : Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	79,84	79.69	99.81	Sangat Tinggi
		Indeks Pembangunan Gender	91,06	91.25	100.21	Sangat Tinggi
		Indeks Kesalehan Sosial	80,52	82.43	102.37	Sangat Tinggi
S.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	10.37	10.13	97.69	Sangat Tinggi
		Harapan Lama Sekolah	13.99	13.99	100.00	Sangat Tinggi
S.2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	74.57	74.9	100.44	Sangat Tinggi
s.3	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak	71,62	81.39	113.64	Sangat Tinggi
s.4	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Pemberdayaan Gender	70,72	62.32	88.12	Tinggi
		Indeks Ketimpangan Gender	0.402	0.335	83.33	Tinggi
		Indeks Inklusi (GEDSI)	60	56.2	93.67	Sangat Tinggi

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
s.5	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Harmoni	3.78	3.56	94.18	Sangat Tinggi
MISI 2: Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.						
T.2	Tujuan : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekenomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	4,72	4.91	104.03	Sangat Tinggi
S.6	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	50,32	51.86	103.06	Sangat Tinggi
s.7	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor	10,77	62.88	583.84	Sangat Tinggi
s.8	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	4.6	4.9	106.52	Sangat Tinggi
MISI 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat						
T.3	Tujuan : Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	22,77	23.88	104.87	Sangat Tinggi
		Penurunan Emisi GRK	40,331.31	52,525.84	130.24	Sangat Tinggi
s.9	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio Government Expenditure	1.95	2.75	141.03	Sangat Tinggi

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
s.10	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah	3.75	3.76	100.27	Sangat Tinggi
		Indeks Infrastuktur	63.23	63.23	100.00	Sangat Tinggi
		Indeks Konektivitas Wilayah	0.745	0.745	100.00	Sangat Tinggi
s.11	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	135,9	119.66	88.05	Tinggi
s.12	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.9	65.81	108.06	Sangat Tinggi
MISI 4: Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat						
T.4	Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	86.17	88.01	102.14	Sangat Tinggi
s.13	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Indeks Pemerintah Digital	4.37	4.32	98.86	Sangat Tinggi
		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	80.9	77.15	95.36	Sangat Tinggi
		Indeks Sistem Merit	315	310.5	98.57	Sangat Tinggi
		Indeks Pelayanan Publik	2.25	4.35	193.33	Sangat Tinggi

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
MISI 5: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar						
T.5	Tujuan : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan	Tingkat kemiskinan	9,95	9.95	100.00	SANGAT TINGGI
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,91	5.47	120.84	SANGAT TINGGI
s.14	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi	48	43.79	108.77	SANGAT TINGGI
s.15	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	80	100	125.00	SANGAT TINGGI
s.16	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini	0,351	0.327	106.84	SANGAT TINGGI
s.17	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	32	30.62	95.69	SANGAT TINGGI
	rata-rata capaian kinerja				120.06	SANGAT TINGGI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 20
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak .4
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 10
4. Terdapat 2 indikator sasaran yang tidak dilakukan penilaian oleh kementrian yaitu indeks sistem Merit dan dan indeks pemerintah digital sehingga menggunakan realisasi tahun lalu.

dari 9 indikator tujuan dan 25 indikator Sasaran, terdapat 31 indikator "SANGAT TINGGI" dan 3 Indikator "Tinggi. akan tetapi Rata-rata Kinerja tahun 2025 setelah dilakukan normalisasi sebesar 101.5% kategori "SANGAT TINGGI", sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik telah berhasil menjalankan amanah yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

C. Pengukuran Kinerja Dibandingkan realisasi Tahun Sebelumnya

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	PENINGKATAN / (PENURUNAN)
MISI 1: Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.					
T.1	Tujuan : Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	78.93	79.69	PENINGKATAN KINERJA
		Indeks Pembangunan Gender	91.01	91.25	PENINGKATAN KINERJA
		Indeks Kesalehan Sosial	80.32	82.43	PENINGKATAN KINERJA
S.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	10.03	10.13	PENINGKATAN KINERJA
		Harapan Lama Sekolah	13.98	13.99	PENINGKATAN KINERJA
S.2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	74.48	74.9	PENINGKATAN KINERJA
s.3	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak	71.57	81.39	PENINGKATAN KINERJA
s.4	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Pemberdayaan Gender	70.13	62.32	PENURUNAN KINERJA
		Indeks Ketimpangan Gender	0,407*	0.335	PENINGKATAN KINERJA
		Indeks Inklusi (GEDSI)	56.2	56.2	N/A

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	PENINGKATAN / (PENURUNAN)
s.5	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Harmoni	3.77	3.56	PENURUNAN KINERJA
MISI 2: Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.					
T.2	Tujuan : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekenomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	4.79	4.91	PENINGKATAN KINERJA
S.6	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	50,39*	51.86	PENINGKATAN KINERJA
s.7	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor	10,51*	62.88	PENINGKATAN KINERJA
s.8	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	4,96*	4.9	PENINGKATAN KINERJA
MISI 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat					
T.3	Tujuan : Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23,58	23.88	PENINGKATAN KINERJA
		Penurunan Emisi GRK	13,813.27	52,525.84	PENINGKATAN KINERJA
s.9	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio Government Expenditure	1.91	2.75	PENINGKATAN KINERJA

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	PENINGKATAN / (PENURUNAN)
s.10	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah	3.77	3.76	PENURUNAN KINERJA
		Indeks Infrastuktur	61.62	63.23	PENINGKATAN KINERJA
		Indeks Konektivitas Wilayah	0.725	0.745	PENINGKATAN KINERJA
s.11	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	91.42	119.66	PENINGKATAN KINERJA
s.12	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.12	65.81	PENINGKATAN KINERJA
MISI 4: Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat					
T.4	Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	85.55	88.01	PENINGKATAN KINERJA
s.13	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Indeks Pemerintah Digital	4.32	4.32	TDK ADA PENILAIAN
		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	80.60	77.15	PENURUNAN KINERJA
		Indeks Sistem Merit	310.5	310.5	TDK ADA PENILAIAN
		Indeks Pelayanan Publik	4.16	4.35	PENINGKATAN KINERJA

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	PENINGKATAN / (PENURUNAN)
MISI 5: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar					
T.5	Tujuan : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan	Tingkat kemiskinan	10.32	9.95	PENINGKATAN KINERJA
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6.45	5.47	PENINGKATAN KINERJA
s.14	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi	48.87	43.79	PENURUNAN KINERJA
s.15	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	100	100	PENINGKATAN KINERJA
s.16	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini	0.33	0.327	PENINGKATAN KINERJA
s.17	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	13.52	30.62	PENINGKATAN KINERJA

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 6 indikator tujuan seluruhnya mengalami peningkatan.

Untuk indikator sasaran jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024 dari 25 terdapat 20 indikator mengalami peningkatan kinerja, 5 indikator mengalami penurunan.

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
MISI 1: Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.					
T.1	Tujuan : Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	80.70 - 82.90	79.69	-
		Indeks Pembangunan Gender	91.26 - 92.26	91.25	-
		Indeks Kesalehan Sosial	81.32 - 84.32	82.43	-
S.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	10.92	10.13	-
		Harapan Lama Sekolah	14.23	13.99	-
S.2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	75.59	74.9	-
s.3	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak	71.82 - 74.00	81.39	+
s.4	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Pemberdayaan Gender	74.12 - 75.50	62.32	-
		Indeks Ketimpangan Gender	0.347	0.335	+
		Indeks Inklusi (GEDSI)	76	56.2	-
s.5	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Harmoni	3.82	3.56	-

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
MISI 2: Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.					
T.2	Tujuan : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekenomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	4.85 - 5.52	4.91	-
S.6	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	50.77 - 52.80	51.86	-
s.7	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor	10.91 - 12.60	62.88	+
s.8	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	5.1	4.9	-
MISI 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat					
T.3	Tujuan : Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	22.93 - 23.63	23.88	+
		Penurunan Emisi GRK	43.655,90	52,525.84	+
s.9	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio Government Expenditure	2.15	2.75	+

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
s.10	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah	4.15	3.76	+
		Indeks Infrastuktur	71.57	63.23	-
		Indeks Konektivitas Wilayah	0.827	0.745	-
s.11	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	123.55 - 120.79	119.66	-
s.12	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.4	65.81	+
MISI 4: Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat					
T.4	Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	88.28	88.01	-
s.13	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Indeks Pemerintah Digital	2.09 - 2.54	4.32	tidak ada penilaian
		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	82.1	77.15	-
		Indeks Sistem Merit	375	310.5	tidak ada penilaian
		Indeks Pelayanan Publik	3.25	4.35	+

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
MISI 5: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar					
T.5	Tujuan : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan	Tingkat kemiskinan	5.61 - 8.37	9.95	-
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6.67 - 5.02	5.47	-
s.14	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi	40	43.79	-
s.15	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	95-100	100	+
s.16	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini	0.279 - 0.319	0.327	-
s.17	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	45 - 55	30.62	-

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 9 indikator tujuan terdapat 2 indikator yang sudah melampaui target akhir periode RPJMD (2029) pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan penurun emisi gas rumah kaca.

Untuk indikator sasaran dari 25 indikator terdapat 8 indikator (positif) yang sudah melampaui target akhir periode RPJMD , 2 indikator tidak dilakukan penilaian, 15 indikator (negatif) atau belum melampaui target akhir periode RPJMD (2029)

E. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Nasional / Prov. Jatim

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
MISI 1: Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.					
T.1	Tujuan : Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	76.15	79.69	LEBIH TINGGI DARI PROV JATIM
		Indeks Pembangunan Gender	92.19	91.25	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
		Indeks Kesalehan Sosial	N/A	82.43	-
S.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	8.39	10.13	LEBIH TINGGI DARI PROV JATIM
		Harapan Lama Sekolah	13.44	13.99	LEBIH TINGGI DARI PROV JATIM
S.2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	75.36	74.9	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
s.3	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak	75.62	81.39	LEBIH TINGGI DARI PROV JATIM
s.4	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Pemberdayaan Gender	75.32	62.32	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
		Indeks Ketimpangan Gender	0.345	0.335	LEBIH TINGGI DARI PROV JATIM
		Indeks Inklusi (GEDSI)	N/A	56.2	-
s.5	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Harmoni	N/A	3.56	-

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
MISI 2: Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.					
T.2	Tujuan : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekenomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	5.23	4.91	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
S.6	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	N/A	51.86	-
s.7	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor	N/A	62.88	-
s.8	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	N/A	4.9	-
MISI 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat					
T.3	Tujuan : Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	N/A	23.88	-
		Penurunan Emisi GRK	N/A	52,525.84	-
s.9	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio Government Expenditure	N/A	2.75	-

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
s.10	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah	3.91	3.76	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
		Indeks Infrastuktur	N/A	63.23	-
		Indeks Konektivitas Wilayah	N/A	0.745	-
s.11	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	N/A	119.66	-
s.12	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.24	65.81	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
MISI 4: Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat					
T.4	Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	93,82	88.01	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
s.13	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Indeks Pemerintah Digital	3.62	4.32	LEBIH TINGGI DARI PROV JATIM
		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	64.89	77.15	LEBIH TINGGI DARI kab/kota
		Indeks Sistem Merit	383	310.5	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
		Indeks Pelayanan Publik	4.75	4.35	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
MISI 5: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar					
T.5	Tujuan : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan	Tingkat kemiskinan	9.5	9.95	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3.88	5.47	LEBIH RENDAH DARI PROV JATIM
s.14	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi	N/A	43.79	-
s.15	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	N/A	100	-
s.16	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini	0.36	0.327	LEBIH TINGGI DARI PROV JATIM
s.17	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	-	30.62	-

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 9 indikator tujuan terdapat 1 indikator memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi dari capain kinerja provinsi jawa timur, 5 indikator memiliki capaian kinerja yang lebih rendah dari capain kinerja provinsi jawa timur dan 3 indikator tidak ada data pembanding.

Untuk indikator sasaran jika dibandingkan dengan capain kinerja provinsi jawa timur dari 25 indikator sasaran terdapat 7 indikator dengan capaian lebih tinggi, 6 indikator dengan capaian lebih rendah dan sisanya tidak ada data pembanding.

F. Analisis penyebab Keberhasilan / Kegagalan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
MISI 1: Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.				
T.1	Tujuan : Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	• Peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah, • Perbaikan layanan kesehatan dasar. • Tersedianya lapangan kerja industri dan jasa pendukung yang menyerap tenaga kerja terdidik. • Implementasi PUG dalam perencanaan pembangunan daerah. • Kesadaran kesetaraan gender mulai tumbuh di masyarakat.	• pembangunan dan rehabilitasi sarana sekolah, serta dukungan pembiayaan pendidikan yang menekan angka putus sekolah dan meningkatkan harapan lama sekolah. • Perluasan RSUD Ibnu sina dan Pengoperasian RSGS • Pemberian pelatihan tenaga kerja lokal • Penguatan kapasitas OPD, monitoring dan evaluasi PUG. • Edukasi kesetaraan gender berbasis komunitas dan keluarga.
		Indeks Pembangunan Gender	• Akses pendidikan dasar–menengah relatif setara antara perempuan dan laki-laki. • Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta kesadaran kesehatan reproduktif. • Peluang ekonomi perempuan meningkat melalui UMKM dan sektor perdagangan.	• Beasiswa pendidikan perempuan, pelatihan vokasi dan keterampilan kerja. • Penguatan layanan kesehatan primer dan kesehatan reproduktif perempuan. • Fasilitasi UMKM perempuan, akses permodalan, dan pemasaran digital.

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
T.1	Tujuan : Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	Indeks Kesalehan Sosial	• Aktifnya lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. • Nilai religius mendorong perilaku saling membantu dan toleransi. • Adanya kebijakan dan program pembinaan sosial-keagamaan. • Kondisi sosial relatif kondusif dan harmonis.	• Pembentukan komunitas sosial pemuda, kegiatan sosial kreatif, dan pemberian insentif/non-materi bagi relawan. • Edukasi dan kampanye kesalehan sosial yang menekankan praktik sosial, bukan hanya ritual. • Sinergi dengan ormas, CSR perusahaan, dan komunitas lokal untuk perluasan program sosial. • Dialog lintas komunitas, forum kerukunan, dan kegiatan sosial lintas agama.
S.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	• Tingginya kecenderungan kerja dini di kecamatan zonasi industri • Daya tarik sektor industri menyebabkan sebagian penduduk usia sekolah memilih bekerja dibanding melanjutkan pendidikan	• Penguatan pendidikan kesetaraan (Paket C) yang fleksibel • Kerja sama dengan dunia usaha dan industri melalui program CSR pendidikan dan dukungan kelanjutan sekolah
		Harapan Lama Sekolah	• Ketersediaan layanan pendidikan dasar dan menengah yang relatif memadai di kecamatan perkotaan • Dukungan program bantuan pendidikan dan keterlibatan masyarakat melalui sekolah dan desa. • Peran dunia usaha melalui program CSR pendidikan mulai berkontribusi dalam mendukung keberlanjutan sekolah.	• Perluasan akses SMA/SMK, kelas jauh, dan pendidikan jarak jauh • Penguatan CSR pendidikan di kecamatan industri • Bantuan pendidikan tepat sasaran dan pendampingan keluarga

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
S.2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	• Ketersediaan dan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang relatif baik di wilayah perkotaan dan kecamatan, • tingginya cakupan kepesertaan JKN, • berjalannya layanan kesehatan ibu dan anak melalui puskesmas dan posyandu.	• Penguatan layanan kesehatan keliling dan rujukan wilayah kepulauan • Perluasan kepesertaan JKN PBI dan reaktivasi kepesertaan • Penguatan layanan KIA, gizi ibu hamil, dan pencegahan stunting
s.3	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak	• Adanya kebijakan daerah perlindungan anak • Sosialisasi perlindungan anak dan kampanye ramah anak • Program bantuan sosial dan rehabilitasi sosial	• Penguatan peran Gugus Tugas KLA; monitoring pelaksanaan kebijakan • Edukasi pencegahan berbasis sekolah & desa; sistem pelaporan mudah • Intervensi berbasis kasus; kolaborasi OPD dan LSM
s.4	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Pemberdayaan Gender	• Adanya PUG dan kelembagaan pengarusutamaan gender • Perempuan terlibat dalam UMKM dan sektor informal • Program perlindungan perempuan tersedia	• Penguatan focal point gender OPD; integrasi PUG dalam perencanaan & penganggaran • Pelatihan kewirausahaan; fasilitasi akses permodalan dan pasar • Perluasan UPTD PPA; layanan mobile dan berbasis desa
		Indeks Ketimpangan Gender	• Akses layanan KIA dan KB relatif baik • Keterwakilan perempuan mulai meningkat	• Penguatan layanan kesehatan reproduksi; pencegahan perkawinan anak • Program kepemimpinan perempuan; afirmasi dalam pengisian jabatan
		Indeks Inklusi (GEDSI)	• Komitmen daerah pada PUG dan perlindungan kelompok rentan • Akses pendidikan dan kesehatan relatif luas • Keterlibatan perempuan dalam UMKM dan komunitas	• Integrasi GEDSI dalam RPJMD/RKPD; penguatan focal point inklusi • Penyesuaian infrastruktur ramah disabilitas; layanan inklusif • Peningkatan partisipasi berbasis komunitas; forum inklusi desa

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
s.5	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Harmoni	• Tradisi toleransi dan kearifan lokal kuat • Peran aparat dan masyarakat dalam menjaga kamtibmas • Program sosial menjangkau masyarakat	• Dialog lintas agama & budaya • Penguatan sistem keamanan berbasis komunitas • Transparansi layanan; afirmasi kelompok rentan
MISI 2: Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.				
T.2	Tujuan : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekenomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	• Iklim investasi relatif kondusif dan lokasi strategis di kawasan industri Jawa Timur. • Belanja pemerintah dan program pembangunan mendorong aktivitas ekonomi. • Tersedianya lapangan kerja di sektor industri dan jasa pendukung.	• Penyederhanaan perizinan, pengembangan kawasan industri baru, dan fasilitasi pembiayaan usaha. • Optimalisasi PAD, kemitraan dengan swasta, dan pemanfaatan CSR untuk pembangunan ekonomi. • Pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri dan link and match dunia usaha–pendidikan.
S.6	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	• Basis industri manufaktur kuat (semen, petrokimia, makanan-minuman) • Kawasan industri dan akses logistik mendukung	• Diversifikasi subsektor bernilai tambah tinggi (hilirisasi) • Simplifikasi perizinan; penyediaan utilitas & kepastian lahan
s.7	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor	• Basis industri berorientasi ekspor (semen, petrokimia, kimia, makanan) • Kedekatan dengan Pelabuhan Besar seperti Pelabuhan Tanjung Perak • Skala industri besar mendukung volume ekspor	• Diversifikasi produk ekspor bernilai tambah • Optimalisasi rantai logistik; dry port dan konsolidasi ekspor • Substitusi impor; penguatan pemasok lokal

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
s.8	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	• Dominasi investasi pada sektor produktif (manufaktur, industri pengolahan) • Tenaga kerja industri relatif tersedia • Pasar output regional dan nasional tersedia	• Diversifikasi investasi ke sektor bernilai tambah tinggi dan cepat berproduksi • Pelatihan vokasi industri; upskilling tenaga kerja lokal • Penguatan local content; kemitraan industri–UMKM
MISI 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat				
T.3	Tujuan : Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	• Masih tersedia lahan industri di beberapa kawasan. • Adopsi teknologi industri oleh perusahaan besar. • Aktivitas industri relatif stabil.	• Penataan ruang, pengembangan kawasan industri baru, dan bank tanah daerah. • Pelatihan teknologi, insentif modernisasi alat produksi, dan pendampingan usaha. • Diversifikasi investasi dan penguatan pasar domestik.
		Penurunan Emisi GRK	• Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung target penurunan emisi nasional dan provinsi. • Sebagian industri besar mulai menerapkan efisiensi energi dan teknologi ramah lingkungan. • Penggunaan energi lebih efisien dan peningkatan kesadaran hemat energi. •	• Penyusunan dan penguatan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK lintas sektor. • Insentif penerapan energi bersih, audit energi industri, dan kemitraan teknologi rendah karbon. • Pengembangan transportasi umum, kendaraan rendah emisi, dan pemanfaatan energi terbarukan. •

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
s.9	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio Government Expenditure	• Perencanaan berbasis kinerja mulai diterapkan • Program strategis berdampak ekonomi • Belanja mendukung UMKM dan tenaga kerja lokal	• Penguatan performance-based budgeting dan value for money • Optimalisasi PAD; diversifikasi sumber pendapatan • Local content policy dalam pengadaan barang/jasa
s.10	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah	• Stabilitas pemerintahan dan regulasi daerah • Layanan publik digital berkembang	• Reformasi layanan perizinan; penguatan kepastian regulasi • Digitalisasi UMKM; peningkatan literasi digital
		Indeks Infrastuktur	• Jaringan jalan utama dan akses kawasan industri memadai • Kedekatan dengan pelabuhan dan jalur nasional • Dokumen perencanaan infrastruktur tersedia	• Peningkatan kapasitas jalan; pemeliharaan rutin berbasis kondisi • Optimalisasi akses logistik; pengembangan logistics hub • Integrasi perencanaan infrastruktur lintas sektor
		Indeks Konektivitas Wilayah	• Terhubung dengan jalan nasional dan kawasan industri • Akses antarkecamatan relatif tersedia • Akses laut ke Pulau Bawean tersedia • Jaringan telekomunikasi berkembang	• Pelebaran jalan; perbaikan ruas prioritas • Peningkatan jalan penghubung; jembatan dan akses kepulauan • Penambahan armada dan jadwal kapal • Perluasan BTS; internet desa
s.11	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	• Tersedianya peta rawan bencana • BPBD aktif dan koordinatif • Regulasi tata ruang berbasis risiko	• Pemutakhiran peta risiko berbasis SIG • Penguatan kapasitas BPBD dan relawan • Penegakan RTRW dan zonasi rawan bencana

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
s.12	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	• Adanya program saji sapo (Satu Jiwa Satu Pohon). • Pemantauan kualitas air badan air secara rutin yang mewakili musim penghujan dan musim kemarau • Pemantauan kualitas udara ambien secara rutin yang mewakili musim penghujan dan kemarau • Adanya pengolahan sampah dari sumber (hulu)	
MISI 4: Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat				
T.4	Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	• Dukungan pimpinan daerah terhadap pelaksanaan RB dan peningkatan tata kelola pemerintahan. • Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pengembangan. • Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). • Penguatan sistem pengawasan internal dan akuntabilitas keuangan.	• Penguatan kepemimpinan RB, penetapan target kinerja RB yang jelas di setiap OPD. • Pelatihan berbasis kompetensi, manajemen talenta, dan sistem reward and punishment. • Penguatan arsitektur SPBE dan integrasi data lintas perangkat daerah. • Penguatan peran APIP dan monitoring tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
s.13	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Indeks Pemerintah Digital	• Adanya kebijakan SPBE dan transformasi digital daerah • Tersedianya arsitektur dan peta rencana SPBE • Tersedianya berbagai aplikasi layanan publik	• Penyusunan pedoman teknis SPBE; harmonisasi regulasi lintas OPD • Review dan penajaman roadmap SPBE; pengendalian pelaksanaan berbasis monev • Integrasi layanan melalui portal terpadu; rasionalisasi dan konsolidasi aplikasi
		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	• Dokumen RPJMD, Renstra, dan Renja telah tersedia dan selaras • Perjanjian Kinerja telah ditetapkan hingga level OPD	• Penyelarasan perencanaan berbasis outcome; perbaikan kualitas indikator kinerja • Penguatan cascading kinerja dari pimpinan hingga individu
s.13	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Indeks Sistem Merit	• Telah tersedia Perbup dan kebijakan teknis manajemen ASN • Anjab dan ABK telah disusun untuk seluruh OPD	• Penegasan kebijakan merit melalui surat edaran Bupati; monitoring implementasi per OPD • Review Anjab–ABK berbasis kebutuhan pelayanan publik dan kawasan industri
		Indeks Pelayanan Publik	• Tersedianya standar pelayanan dan maklumat layanan di unit pelayanan • Sarpras layanan dasar tersedia di sebagian besar lokus • Informasi layanan tersedia secara daring dan luring	• Review dan pemutakhiran standar pelayanan; sosialisasi internal dan eksternal • Pemenuhan sarpras ramah difabel (jalur, toilet, loket khusus); perbaikan ruang tunggu • Standarisasi informasi layanan; pembaruan rutin media informasi layanan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
MISI 5: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
T.5	Tujuan : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan	Tingkat kemiskinan	• Pertumbuhan ekonomi daerah relatif stabil dan ditopang sektor industri pengolahan. • Tersedianya lapangan kerja di sektor industri dan jasa pendukung. • Bantuan sosial membantu menjaga daya beli kelompok rentan. • Mulai berkembangnya UMKM dan usaha mikro.	• Pengembangan ekonomi lokal dan padat karya di wilayah perdesaan. • Pelatihan vokasi, reskilling, dan link and match dunia kerja. • Pemutakhiran data kemiskinan dan integrasi program perlindungan sosial. • Fasilitasi pembiayaan mikro, pendampingan usaha, dan akses pasar digital. •
		Tingkat Pengangguran Terbuka	• Dominasi sektor industri dan jasa pendukung yang menyerap tenaga kerja. • Sebagian tenaga kerja terserap sesuai kebutuhan industri. • Peningkatan akses pendidikan menengah dan kejuruan. • Keberadaan kawasan industri menciptakan peluang kerja. •	• Pengembangan sektor padat karya dan diversifikasi lapangan kerja. • Pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri dan sertifikasi kompetensi. • Program magang, link and match SMK–industri, dan pelatihan siap kerja. • Prioritas tenaga kerja lokal dan kerja sama rekrutmen dengan perusahaan. •
s.14	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi	• Tersedianya DTKS dan data sektoral • Program RTLH, air bersih, dan sanitasi berjalan • Industri besar menyerap tenaga kerja	• Pemutakhiran DTKS berbasis desa dan integrasi data • Percepatan air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni • Pelatihan vokasi dan padat karya berbasis wilayah

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
s.15	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	• Penggunaan DTSE/DTKS sebagai basis sasaran program perlindungan sosial • PKH inklusif menjangkau kelompok prioritas seperti lansia/difabel	• Pemutakhiran data terpadu berbasis verifikasi lapangan dan koordinasi desa • Perluasan sosialisasi PKH; peningkatan pendampingan sosial di tingkat desa; pemutakhiran daftar sasaran
s.16	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini	• Pertumbuhan pendapatan kelompok menengah-bawah • Penerapan UMK dan perlindungan pekerja formal	• Intervensi peningkatan pendapatan kelompok 40% terbawah melalui program produktif • Peningkatan produktivitas pekerja informal dan UMKM
s.17	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	• Tenaga kerja lokal melimpah usia produktif • Industri besar dan stabil menyerap tenaga kerja • Tumbuhnya kawasan industri dan logistik	• Pelatihan vokasi spesifik industri (operator pabrik, mekanik, K3, teknisi proses) • Program pelatihan operator produksi & maintenance berbasis industri semen • Perjanjian kerja sama kawasan industri dengan Pemda untuk prioritas tenaga lokal

G. Alokasi Anggaran dalam pencapaian tujuan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	alokasi	PAGU	REALISASI	CAPAIAN ANGGARAN
MISI 1: Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.						
T.1	Tujuan : Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	21.16	835.098.228.704.03	773,388,066,753.08	92.61
		Indeks Pembangunan Gender	16.45	649,084,035,044.04	603,906,508,293.68	93.04
		Indeks Kesalehan Sosial	1.44	56,918,858,976.25	52,114,363,715.71	91.56
S.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	5.46	215,566,517,255.34	202,744,132,417.56	94.05
		Harapan Lama Sekolah	2.55	100,672,251,737.87	96,533,812,115.50	95.89
S.2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	5.16	203,662,694,182.05	182,723,814,534.67	89.72
s.3	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak	7.99	315,196,765,528.76	291,386,307,685.35	92.45
s.4	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Pemberdayaan Gender	4.07	160,497,840,459.12	150,402,040,376.64	93.71

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	alokasi	PAGU	REALISASI	CAPAIAN ANGGARAN
s.4	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Ketimpangan Gender	4.00	157,869,108,133.76	148,192,711,022.18	93.87
		Indeks Inklusi (GEDSI)	8.38	330,717,086,451.16	305,311,756,894.87	92.32
s.5	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Harmoni	1.44	56,918,858,976.25	52,114,363,715.71	91.56

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	alokasi	PAGU	REALISASI	CAPAIAN ANGGARAN
MISI 2: Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.						
T.2	Tujuan : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekenomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	2.94	116,007,817,194.29	93,458,711,502.95	80.56
S.6	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	0.96	37,937,335,413.25	32,026,724,300.14	84.42
s.7	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor	1.09	42,819,500,621.16	37,587,465,108.61	87.78
s.8	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	0.89	35,250,981,159.88	23,844,522,094.20	67.64
MISI 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat						
T.3	Tujuan : Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	13.38	527,923,695,184.75	350,521,509,046.47	66.40
		Penurunan Emisi GRK	2.17	85,778,730,308.44	74,294,822,933.34	86.61
s.9	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio Government Expenditure	5.10	201,177,776,000.82	177,037,155,554.66	88.00

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	alokasi	PAGU	REALISASI	CAPAIAN ANGGARAN
s.10	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah	1.66	65,615,128,815.00	11,794,530,052.70	17.98
		Indeks Infrastuktur	4.87	192,319,465,744.00	99,622,318,325.77	51.80
		Indeks Konektivitas Wilayah	1.74	68,811,324,624.93	62,067,505,113.34	90.20
s.11	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	1.24	48,816,738,396.00	38,792,353,479.86	79.47
s.12	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	0.94	36,961,991,912.44	35,502,469,453.48	96.05
MISI 4: Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat						
T.4	Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	31.09	1,226,946,750,917.55	1,093,179,447,244.89	89.10

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	alokasi	PAGU	REALISASI	CAPAIAN ANGGARAN
MISI 4: Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat						
T.4	Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	31.09	1,226,946,750,917.55	1,093,179,447,244.89	89.10
s.13	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Indeks Pemerintah Digital	0.52	20,615,578,739.00	19,149,679,025.10	92.89
		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	22.11	872,285,843,342.59	798,171,815,307.67	91.50
		Indeks Sistem Merit	0.42	16,553,553,975.27	15,025,795,523.52	90.77
		Indeks Pelayanan Publik	8.05	317,491,774,860.68	260,832,157,388.60	82.15

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	alokasi	PAGU	REALISASI	CAPAIAN ANGGARAN
MISI 5: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar						
T.5	Tujuan : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan	Tingkat kemiskinan	11.08	437,008,370,592.18	394,937,417,936.04	90.37
		Tingkat Pengangguran Terbuka	0.28	11,095,453,394.56	9,983,724,973.15	89.98
s.14	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi	5.62	221,756,041,716.17	197,809,932,043.10	89.20
s.15	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	4.23	166,816,169,682.34	155,539,914,334.71	93.24
s.16	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini	1.23	48,436,159,193.67	41,587,571,558.23	85.86
s.17	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	0.28	11,095,453,394.56	9,983,724,973.15	89.98
	TOTAL			3,945,861,940,316.08	3,445,784,572,399.31	87.33

Realisasi anggaran Kabupaten tahun 2025 sebesar Rp3.445.784.572.399,31 dari pagu Rp3.945.861.940.316,08 atau mencapai 87,33 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik, karena mayoritas program dan kegiatan telah terlaksana sesuai perencanaan. Tingkat serapan yang tinggi mencerminkan efektivitas pelaksanaan belanja serta konsistensi perangkat daerah dalam menjalankan anggaran.

Selisih antara pagu dan realisasi sebesar Rp500.077.367.916,77 mengindikasikan adanya efisiensi dan penghematan sesuai dengan arahan Presiden RI yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.. Secara keseluruhan, capaian 87,33 persen menggambarkan pengelolaan keuangan yang relatif optimal, sekaligus menjadi dasar untuk meningkatkan perencanaan dan penyerapan anggaran pada periode berikutnya agar semakin mendekati target yang ditetapkan.

H. Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah dicapai.

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	NORMALISASI	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
MISI 1: Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.						
T.1	Tujuan : Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	99.81	99.81	92.61	0.99
		Indeks Pembangunan Gender	100.21	100.21	93.04	0.99
		Indeks Kesalehan Sosial	102.37	102.37	91.56	0.99
S.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	97.69	97.69	94.05	0.99
		Harapan Lama Sekolah	100.00	100.00	95.89	0.99
S.2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	100.44	100.44	89.72	0.99
s.3	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak	113.64	110.00	92.45	0.99
s.4	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Pemberdayaan Gender	88.12	88.12	93.71	0.99
		Indeks Ketimpangan Gender	83.33	83.33	93.87	0.99
		Indeks Inklusi (GEDSI)	93.67	93.67	92.32	0.99
s.5	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Harmoni	94.18	94.18	91.56	0.99

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	NORMALISASI	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
MISI 2: Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.						
T.2	Tujuan : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekenomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	104.03	104.03	80.56	0.99
S.6	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	103.06	103.06	84.42	0.99
s.7	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor	583.84	110.00	87.78	1.00
s.8	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	106.52	106.52	67.64	0.99
MISI 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat						
T.3	Tujuan : Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	104.87	104.87	66.40	0.99
		Penurunan Emisi GRK	130.24	110.00	86.61	0.99
s.9	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio Government Expenditure	141.03	110.00	88.00	0.99

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	NORMALISASI	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
s.10	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah	100.27	100.27	17.98	1.00
		Indeks Infrastuktur	100.00	100.00	51.80	0.99
		Indeks Konektivitas Wilayah	100.00	100.00	90.20	0.99
s.11	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	88.05	88.05	79.47	0.99
s.12	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	108.06	108.06	96.05	0.99
MISI 4: Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat						
T.4	Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	102.14	102.14	89.10	0.99
s.13	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Indeks Pemerintah Digital	98.86	98.86	92.89	0.99
		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	95.36	95.36	91.50	0.99
		Indeks Sistem Merit	98.57	98.57	90.77	0.99
		Indeks Pelayanan Publik	193.33	110.00	82.15	1.00

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	NORMALISASI	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
MISI 5: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar						
T.5	Tujuan : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan	Tingkat kemiskinan	100.00	100.00	90.37	0.99
		Tingkat Pengangguran Terbuka	120.84	110.00	89.98	0.99
s.14	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi	108.77	108.77	89.20	0.99
s.15	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	125.00	110	93.24	0.99
s.16	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini	106.84	106.84	85.86	0.99
s.17	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	95.69	95.69	89.98	0.99
	rata-rata		120.26	101.50	87.33	0.99

berdasarkan Permenpan no 22 tahun 2024 maka capaian kinerja >110% maka dilakukan normalisasi menjadi 110. sedangkan untuk efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 yaitu batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. . Berikut rumus perhitungan efisiensi

Rumus Efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:
E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

- Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :
  - dari 6 indikator tujuan seluruhnya telah efisien dalam penggunaan anggaran karna masih dalam batas -20% sampai dengan 20%
  - dari 25 indikator seluruhnya telah efisien dalam penggunaan anggaran karna masih dalam batas -20% sampai dengan 20%

- Rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 adalah sebesar 101.50% kategori “SANGAT TINGGI”

- Rata-rata Penyerapan anggaran tahun 2025 adalah sebesar 87.33% dengan kategori “ TINGGI”

- Efisiensi adalah sebesar 0.99% sehingga dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Gresik Efisien dalam penggunaan sumber daya

I. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
MISI 1: Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.			
T.1	Tujuan : Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	• pembangunan ruang kelas baru, pembangunan laboratorium, serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dan PAUD • pengelolaan dana BOS dan BOP serta penyediaan biaya personil peserta didik pada jenjang SD, SMP, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan • Peningkatan mutu proses pembelajaran, melalui penyelenggaraan proses belajar, pembinaan minat dan bakat siswa, serta koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan. • Penguatan kapasitas pendidik dan tata kelola satuan pendidikan, melalui penyediaan dan pengembangan karir pendidik, bimbingan teknis, serta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pada seluruh jenjang.
		Indeks Pembangunan Gender	• Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota • Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota • Penyelenggaraan musrenbang khusus perempuan

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
MISI 1: Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.			
S.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	• Program Pendidikan Kesetaraan “JAKETKU -kEJAR PAKET” • Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Daerah (BOSDA) • try out gratis untuk meningkatkan minat anak untuk melanjutkan sekolah • Perluasan akses dan daya tampung dengan pembangunan ruang kelas baru • penyediaan dan pengembangan karir pendidik, serta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pada seluruh jenjang. • Penyediaan layanan pendidikan alternatif, bagi siswa putus sekolah. • Pelaksanaan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan • Pemberian honorarium bagi guru tidak tetap (GTT/PTT) s • Penyediaan basis data dan dukungan pembiayaan sebagai dasar penataan dan pemerataan pendidik sesuai standar yang dipersyaratkan dalam SNP.
		Harapan Lama Sekolah	• pemberian reward bagi pemuda yang berprestasi dibidang olah raga dan pembinaan anggota organisasi kepemudaan • pengembangan olah raga rekreasi dan prestasi • pembangunan sarana dan prasarana olah raga • sosialisasi budaya baca dan literasi • pemilihan duta baca/bunda baca/ bunda literasi • pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingka kabupaten • pengembangan perpustakaan sekolah berstandart nasional • prmbinaan pustakawan dalam mewujudkan standart nasional perpustakaan • penyelenggaraan sertifikasi tenaga perpustakaan • pengadaan buku bacaan • penyelenggaraan layanan perpustakaan elektronik • pendirian ruang baca digital ramah anak • pembangunan perpustakaan ditempat umum • pelatihan PKK (Pos PAUD) dan karangtaruna • pengadaan buku teks pelajaran muatan lokaL

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
MISI 1: Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.			
S.2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	• penyediaan sanitasi layak bagi rumah tangga • pemberian layanan pengelolaan limbah cair domestik • penyediaan layanan kontrasepsi modern gratis • pembinaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB • penyelenggaraan program kampung keluarga berkualitas mandiri • pemberdayaan ekonomi keluarga dengan polatihan • pemeriksaan menyeluruh edukasi gizi, dan deteksi dini risiko kehamilan • Penguatan Sistem Rujukan Dini Berencana (RDB) • Melengkapi rumah sakit dengan fasilitas NICU
s.3	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak	• penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak Pekerja Migran yang Lahir di Luar Negeri • fasilitasi kepemilikan KIA melalui sekolah-sekolah • pemberian bimbingan konseling kesehatan reproduksi dan perlindungan anak dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak • pemberian layanan psikososial anak pekerja migran pasca pemulangan • sosialisasi sekolah ramah anak • pemberian layanan konsultasi dan pengaduan keluarga • penyediaan ruang menyusui dan tempat bermain anak yang layak pada puskesmas • sosialisasi pencegahan bulliying di sekolah-sekolah • sosialisasi perlindungan anak dan lansia tangguh di desa/kelurahan • pendirian tempat penitipan anak gratis “MASMUNDARI”

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
s.4	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Pemberdayaan Gender	• pelatihan dan penempatan tenaga kerja perempuan • pelayanan antar kerja bagi pencari kerja perempuan • pembinaan perempuan desa/kelurahan • advokasi dan sosialisasi ARG (anggaran responsif gender) • pendampingan penyelenggaran PUG • fasilitasi kelompok perempuan dalam APBDes • sosialisasi bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada perempuan • bimtek perempuan potensial, penyintas kekerasan atau rentan
		Indeks Ketimpangan Gender	• Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) • Memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi anak perempuan di semua jenjang • Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi perempuan. • Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak (KIA). • Pemberian pelayanan akseptor Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) • sosialisasi program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana • sosialisasi pusat pelayanan keluarga sejahtera
		Indeks Inklusi (GEDSI)	• pembinaan atlit disabilitas • pemberian penghargaan bagi atlit disabilitas yang berprestasi • penempatan pekerja penyandang disabilitas • fasilitasi pelayanan antar kerja bagi disabilitas • fasilitasi pelayanan ULD • penyediaan taman ramah anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia • pemberian pelayanan anak berkebutuhan khusus melalui UPT LPABK • pembinaan kelembagaan dan menejerial sekolah non formal / kesetaraan • fasilitasi pemulangan tenaga migran korban kekerasan ke desa/kelurahan asal • bimbingan fisik dan mental penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) • bimbingan sosial dan rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis • sosialisasi taruna siaga bencana • pemantauan dan pendampingan keluarga beresiko stunting

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
s.5	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Harmoni	• operasi penegakan perda perkada • pembinaan penyidik pegawai negeri sipil penegak perda • sosialisasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah • penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum • pelestarian kesenian tradisional • pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya • pelatihan SDM kesenian tradisional • pembinaan kesadaran berbangsa • penyusunan kebijakan teknis bidang ideologi wawasan kebangsaaan • penanganan konflik sosial dan kewaspadaan nasional
MISI 2: Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.			
T.2	Tujuan : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekenomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	• pemberian pelatihan pada pengurus koperasi sehingga jumlah seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Gresik 1.960 koperasi, dan jumlah koperasi aktif sebesar 1.211 koperasi. • fasilitasi perijinan UMKM sehingga pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah 533 usaha mikro • pemberian kemudahan dalam prosedur ekspor Pertumbuhan nilai neraca perdagangan dg nilai 2.622.885.248,18 USD • adanya program 1 usaha i NIB sehingga menambahan IKM sebanyak 96 IKM • Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal • Peningkatan promosi investasi baik melalui kegiatan pameran, promosi melalui media cetak dan digital • Reviu SOP dan SP secara berkala terkait perijinan usaha • Peningkatan pengawasan perizinan kepada perusahaan • Penyusunan peta potensi investasi sektor manufaktur dan mempromosikannya • Bimtek pelaporan LKPM kepada pelaku usaha • Fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
S.6	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	• Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota • Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota • Penempatan Tenaga Kerja Sektor Manufaktur • Peningkatan Kompetensi Pencari/Tenaga Kerja Manufaktur sesuai standar kompetensi kerja (SKKN) • fasilitasi layanan antar kerja bagi pekerja sektor manufaktur • penyusunan rencana pembangunan industri (RPIK) • pemberian kemudahan izin usaha industri dan kawasan industri • bimtek perizinan berusaha berbasis resiko • pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko • penyusunan Perda rencana umum penanaman modal (RUPM) • Penyelenggaraan promosi penanaman modal
s.7	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor	• Adanya kemudahan kemudahan dalam prosedur ekspor (seperti adanya elektronik form ke bbrp negara tujuan ekspor, eksportir bisa mengajukan self declare sendiri berupa Deklarasi Asal Barang untuk tujuan Uni Eropa) • Adanya kemudahan-kemudahan pelayanan dalam penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) • Adanya beberapa eksportir baru Kabupaten Gresik yang penerbitan SKA lewat IPSKA (Diskoperindag) Gresik • pemasaran pariwisata • fasilitasi HAKI terhadap pelaku ekonomi kreatif • pembangunan sarana prasarana kota kreatif • penyediaan benih bersertifikat tanaman pangan • penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan • pembangunan embung pertanian • pemeliharaan jalan usaha tani dan jaringan irigasi

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
s.8	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	• Penyesuaian NJOP PBBP2 dan BPHTB • Sosialisasi kebijakan pajak • penggunaan sistem informasi perpajakan berbasis digital • Adanya Gerakan Gemar Menabung melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) • Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi (PBK) • Program Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja • Penempatan kerja bagi lulusan pelatihan • Pemagangan bagi peserta yang telah selesai bagi pelatihan • Optimalisasi pendaftaran Wajib Pajak baru dan pemeriksaan tarif Pajak

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
MISI 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat			
T.3	Tujuan : Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	• pembangunan sarana dan prasarana desa seperti Pasar desa, jalan poros desa • Penyusunan standar barang milik daerah • optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah • penilaian barang milik daerah • pembangunan dan pemeliharaan gedung puskesmas • pembangunan waduk kabupaten • perbaikan jaringan irigasi • peningkatan jalan dan jembatan • Koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa Pemanfaatan teknologi konstruksi yang lebih tahan lama • Program rehabilitasi dan konservasi DAS • Pemasangan SR Air Bersih
		Penurunan Emisi GRK	• Pengujian udara yang didukung dengan aktivasi Sistem Pemantauan Kualitas Udara (AQMS) • Pemataun dan pengawasan baik tidak langsung maupun langsung ke para pelaku usaha • Pengujian Sampel Kualitas Udara • Verifikasi penerbitan rekomendasi dan persetujuan LH secara selektif sesuai ketetentuan dan SOP yang berlaku • Penindakan bagi pelanggaran sesuai tingkatannya • Koordinasi, kolaborasi, dan pembinaan • Edukasi pencegahan kebakaran ke masyarakat dan sekolah • pengadaan alat pemadam kebakan, • diklat pasukan pemadam kebakaran • pembangunan sistem komunikasi informasi kebakaran dan penyelamatan • kerjasama dengan perusahaan yang memiliki armada kebakaran yang tergabung dalam forum pemadam kebakaran • penyusunan rencana induk SPKP terkait peta rawan kebakaran dan kebutuhan sarpras penanganan kebakaran • pendataan perusahaan atau bangunan yang memiliki alat proteksi kebakaran • uji kelayakan alat proteksi kebakaran bangunan gedung/ perusahaan • pembentukan relawan pemadam kebakaran • SIG dan Pemkab Gresik Kolaborasi Manfaatkan refuse-derived fuel (RDF)dari Sampah untuk Bahan Bakar Alternatif • Gresik Tanam 1.000 Mangrove, Kolaborasi Selamatkan Pesisir dan Turunkan Emisi

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
MISI 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat			
s.9	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio Government Expenditure	• Melakukan sinkronisasi yang lebih teliti data aset saat pencatatan aset • melakukan penilaian barang milik daerah • optimalisasi pemanfaatan aset • penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP • Penguatan pengendalian internal pada tahap pelaksanaan dan meningkatkan kompetensi SDM pengelola aset • Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi pajak daerah dan pendapatan dari sumber lain yang ada agar bisa target bisa tercapai • Penetapan prioritas berbasis data kondisi infrastruktur • Berjalannya Koordinasi yang baik antara tiap opd baik kecamatan, kelurahan, dan desa
s.10	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah	• Peningkatan cakupan imunisasi dan skrining penyakit tidak menular (PTM) • Intervensi gizi spesifik (PMT balita, tablet tambah darah, edukasi ibu hamil) • pembangunan sarana air bersih, sanitasi, jamban sehat • Program Open Defecation Free (ODF) tingkat desa • Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) • Pengawasan uji kelayakan kendaraan umum • Pengendalian limbah industri dan emisi

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
MISI 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat			
s.10	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Infrastuktur	• Normalisasi dan pengerukan waduk sehingga peningkatan volume daya tampung waduk kabupaten sebesar 11.154.060,14 m3 • normalisasi jaringan irigasi sehingga panjang jaringan irigasi kondisi baik sebesar 147.356 m • Program peningkatan dan rehabilitasi jalan secara bertahap sehingga jalan yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang sebesar 403,52 km (71,22%). • Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR) melalui Adanya kemudahan permohonan izin pemanfaatan ruang melalui aplikasi Go-putar dan OSS • Penerapan sistem inventarisasi dan monitoring berkala Peran serta Himpunan Perkumpulan Petani Pemakai Air (HIPPA) • Koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa Pemanfaatan teknologi konstruksi yang lebih tahan lama • Program rehabilitasi dan konservasi DAS • Normalisasi dan pengerukan kali • Pemasangan SR Air Bersih sebanyak 1071 SR, tersedianya SPALDS sebanyak 752 SR, dan drainase dengan kondisi baik sepanjang 500 m. • Pengurangan luas kawasan kumuh seluas 14.57 Ha • Penanganan jalan lingkungan sepanjang 4757 m dan saluran lingkungan sepanjang 517 m • Pengerjaan drainase yang ditangani sepanjang 10039 m

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
MISI 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat			
s.10	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Konektivitas Wilayah	• melaksanakan uji kelayakan angkutan darat / kendaraan bermotor secara berkala • revitalisasi terminal penumpang tipe C • pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ • pemantauan sistem keselamatan perusahaan angkutan umum • pengawasan ketersediaan angkutan umum • penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan • penyusunan rencana umum jaringan trayek perdesaan • penyediaan dan pemeliharaan PJU • pengawasan ijin persetujuan pengoperasian angkutan air • pemeliharaan pelabuhan /dermaga sungai • penyediaan peralatan keselamatan perlintasan keretaapi • peningkatan kompetensi penilai analisa dampak lalu lintas (andalalin) • pemasangan marka jalan
s.11	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	• Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) • Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota • Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota • Infrastruktur mitigasi memadai seperti sistem peringatan dini berfungsi, adanya sarana evakuasi, jalur aman dan tempat pengungsian tersedia • Terbentuknya forum pengurangan risiko bencana desa • menyusun kajian resiko bencana • penyelesaian akar masalah resiko bencona • penyediaan peralatan siaga bencana • pelatihan keluarga tanggap bencana dan Tim reaksi cepat bencana • pelaksanaan kerjasama kemitraan penanggulangan bencana • rehabilitasi pintu air /bendung pengendali banjir • pemeliharaan embung penampung air • normalisasi kali lamong • sosialisasi pencegahan kebakaran dan pembinaan relawan kebakaran

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
s.12	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	• Pengelolan terpadu air limbah domestik dan aksi bersih sungai dan badan air • Pengujian udara dengan aktifasi sistem pemantauan kualitas udara (AQMS) yang trletak di 10 lokasi • Pengukuran kualitas lahan meliputi 66 lokasi RTH, 34 lokasi taman, 6 jalur hijau, 1 lokasi hutan, 49 lokasi area mangrove, dan 6 lokasi sempadan • Pelayanan dan pengolahan sampah 16 kecamatan melalui Bank Sampah, TPS3R/TPST, Pengolahan di TPA, dan Pengelolaan Mandiri • Program SAJI SAPO (Satu Jiwa Satu Pohon)
MISI 4: Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat			
T.4	Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	• Dinas Kominfo dengan menyusun arsitektur dan peta rencana, • Sekretariat Daerah (bagian Organisasi) dengan melakukan pendampingan dan evaluasi mandiri kualitas pelayanan publik. dan pemantauan hasil survei kepuasan masyarakat seluruh opd secara berkala setiap 1 bulan sekali. • Inspektorat : Sosialisasi integritas ke seluruh OPD • Sekretariat Daerah (bagian layanan Pengadaan Barang jasa) : melakukan monitoring dan pendampingan perangkat daerah dalam pencatatan pengandaan non transaksional • Bagian Hukum : melakukan kajian dan harmonisasi kebijakan yang disusun

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
s.13	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Indeks Pemerintah Digital	• Reviu Kebijakan SPBE • Perbaikan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE • Perbaikan Peta Proses Bisnis • Penerapan Manajemen SPBE • Pelaksanaan Audit TIK • Pengembangan Layanan Elektronik
		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	• Pendampingan penyusunan Pohon Kinerja Perangkat Daerah; • Pendampingan penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah; • Pendampingan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029; • Optimalisasi Aplikasi SIAKRI (Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi) melalui : ◦ Penyusunan Dokumen AKIP yakni Pohon Kinerja, Cascading Kinerja, IKU, IKI, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi ◦ Monitoring Kinerja Utama Perangkat Daerah berkala ◦ Monitoring Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah berkala ◦ Pengisian Kertas Kerja Evaluasi AKIP Internal ◦ Evaluasi AKIP Internal oleh Inspektorat

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
s.13	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Indeks Sistem Merit	• Pembangunan aplikasi Sistem Administrasi Manajemen Talenta (SATMATA) Kabupaten Gresik. • pelaksanaan Assessment sebanyak 1.115 pegawai untuk pemetaan kompetensi ASN sebagai dasar pengembangan karier dan penguatan penerapan manajemen talent • Terbitnya peraturan – peraturan mutasi dan promosi sesuai penguatan aplikasi manajemen talenta seperti : • Keputusan Bupati Gresi Nomor : 800/369/HK/437.12/2025 tentang Jabatan Target Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Gresik • Keputusan Bupati Gresik Nomor 800/368/HK/437.12/2025 tentang penetapan jabatan kritikal di lingkungan pemerintah kabupaten Gresik • Keputusan Bupati Nomor 800/428/HK/437.12/2025 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik • Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Gerbang Pengembangan Kompetensi Menuju Smart ASN (GAPURA) merupakan aplikasi e-Learning berbasis web yang menyediakan berbagai pelatihan secara daring untuk dapat diakses oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Selama Tahun 2025, Gapura telah diikuti oleh pegawai dan telah mencetak sertifikat sebanyak 7.778.
		Indeks Pelayanan Publik	• melakukan reviu standart pelayanan, menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat dan menjalankan maklumat pelayanan • optimalisasi peningkatan profesionalisme SDM dengan cara memberikan motivasi kerja seperti capacity building , bimtek dan pemberian penghargaan bagi petugas layanan yang berprestasi • Perbaikan sarana prasarana layanan yang menunjang kelompok rentan • setiap layanan di publikasikan melalui SIPPN • penanganan pengaduan yang kurang dari 1x24 jam • pengembangan inovasi guna menunjang kemudahan layanan • penyelenggaraan penilaian mandiri pada seluruh perangkat daerah dan UPT untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
MISI 5: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar			
T.5	Tujuan : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan	Tingkat kemiskinan	• pemberian bantuan kepada anak panti asuhan maupun anak terlantar di luar panti • Update data warga miskin, Bimtek bagi potensi sumber kesejahteraan sosial • penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan diluar panti sosial • PKH Inklusif diluar program pusat pada 991 orang, • BOSDA (dana BOS dari APBD), • Pemberian santunan janda miskin 13.958 orang, pemberian santunan anak yatim 2.562 anak, pemberian makan anak panti asuhan 150 anak, • bantuan alat bantu disabilitas pada 25 orang berupa kursi roda, hearing aid, kaki palsu , • Pembangunan rumah tidak layak hudi bagi masyarakat miskin, jaminan kesehatan, • penyelenggaraan bursa kerja dan • pelatihan tenaga kerja.

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
MISI 5: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar			
T.5	Tujuan : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka	• Tersedianya aplikasi gresikkerja.gresikkab.go.id untuk memfasilitasi para pencari kerja • Penyelenggaraan kegiatan ReDINAKER (Recruitmen Dinas Tenaga Kerja yang menghubungkan antara pencari kerja dengan pemberi kerja. • Pemberian pelatihan berbasis kompetensi dasar seperti digital marketing yang disebarluaskan melalui platform media sosial • Mulai berkembangnya UMKM dan usaha mikro : Fasilitasi pembiayaan mikro, pendampingan usaha, dan akses pasar digital. • Peserta pelatihan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui • pelatihan UMKM dan fasilitasi pengurusan ijin usaha • Monitoring data penempatan tenaga kerja ke perusahaan • Dialog pencegahan perselisihan hubungan industrial dan peningkatan fungsionalisasi mediator hubungan industrial. • Penguatan peran bursa kerja, dan sistem informasi pasar kerja online • Pelatihan mencakup keterampilan teknis dan soft skills yang relevan dengan pasar kerja • Job matching dan pendampingan Penempatan khusus Penyandang Disabilitas dengan perusahaan • Fasilitasi pendaftaran pekerja miskin sebagai peserta aktif melalui pembiayaan iuran • Optimalisasi Pengawasan dan Kepatuhan Perusahaan

NO	MISI/TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
MISI 5: Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar			
s.14	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi	• pemberdayaan kepala rumah tangga perempuan yang miskin oleh Dinas KBPPPA • penyelenggaraan sidak harga kebutuhan pokok pada pusat perbelanjaan oleh Tim TPID • penyelenggaraan pasar murah Oleh dinas KOPERINDAG • penyelenggaraan high level meeting Oleh Bagian Perekonomian • fokus pada pelaksanaan 5 indikator inflasi Oleh Tim TPID • pemberian bantuan hukum bagi warga miskin oleh Bagian Hukum • monitoring peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama terkait pemberian Jaminan sosial bagi pekerja miskin • pembangunan rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah • penyediaan rumah susun dan rumah khusus yang nyaman • rehabilitasi rumah korban bencana • rehabilitasi rumah swadaya tidak layak huni • pembentukan kelompok swadaya masyarakat di pemukiman kumuh • pembangunan jalan lingkungan dan saluran di permukiman kumuh • pembangunan sambungan pipa air bersih oleh dinas CKPKP • monitoring anggaran desa terkait program pengentasan kemiskinan oleh PMD • peningkatan kapasitas petugas lembaga kemasyarakatan desa • penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
s.15	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	• pemberian bantuan kepada anak panti asuhan maupun anak terlantar di luar panti • Update data warga miskin • Bimtek bagi potensi sumber kesejahteraan sosial • penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan diluar panti sosial • PKH Inklusif diluar program pusat pada 991 orang, • BOSDA (dana BOS dari APBD), • Pemberian santunan janda miskin 13.958 orang, • pemberian santunan anak yatim 2.562 anak, • pemberian makan anak panti asuhan 150 anak, • bantuan alat bantu disabilitas pada 25 orang berupa kursi roda, hearing aid, kaki palsu , • Pembangunan rumah tidak layak hudi bagi masyarakat miskin, jaminan kesehatan, • penyelenggaraan bursa kerja dan • pelatihan tenaga kerja.
s.16	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini	• pemeliharaan sarana distribusi perdagangan (pasar sidayu dan sentra IKM) • fasilitasi ijin usaha perdagangan seperti pengurusan merk dan sertifikat halal • pembinaan pedagang di pasar atau sentra IKM • monitoring harga kebutuhan pokok dan ketersediaan bahan pokok setiap hari • promosi dan misi dagang • tera ulang alat ukuran, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) agar tidak merugikan warga • pemeliharaan lumbung pangan, lantai jemur, rumah penggilingan padi • pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi • pemberian pupuk cair gratis ke petani • pendampingan sertifikasi benih agar dapat dipasarkan • pengadaan alat mesin pertanian • penetapan peta lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan • rehabilitasi jalan usaha tani • pembentukan sekolah lapang kelompok tani • pengembangan inovasi pertanian seperti pembuatan peptisida hayati. •

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
s.17	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	• Peserta pelatihan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui • pelatihan UMKM dan fasilitasi pengurusan ijin usaha • Monitoring data penempatan tenaga kerja ke perusahaan • Dialog pencegahan perselisihan hubungan industrial dan peningkatan fungsionalisasi mediator hubungan industrial. • Penguatan peran bursa kerja, dan sistem informasi pasar kerja online • Pelatihan mencakup keterampilan teknis dan soft skills yang relevan dengan pasar kerja • Job matching dan pendampingan Penempatan khusus Penyandang Disabilitas dengan perusahaan • Fasilitasi pendaftaran pekerja miskin sebagai peserta aktif melalui pembiayaan iuran • Optimalisasi Pengawasan dan Kepatuhan Perusahaan •

TUJUAN 1:

Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia

1.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama beberapa tahun terakhir, mencerminkan perbaikan komponen-komponen dasar pembangunan manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, IPM Gresik pada tahun 2025 mencapai 79.69, meningkat 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan pada ketiga dimensi utama penyusun IPM, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Secara komparatif, IPM Gresik juga berada di atas rata-rata kualitas IPM wilayah Provinsi Jawa Timur (76.15), yang menunjukkan performa relatif kuat dalam pembangunan manusia di tingkat regional. Faktor penunjang peningkatan IPM di Kabupaten Gresik antara lain:

- perbaikan layanan kesehatan, dengan pembangunan infrastruktur kesehatan seperti RSUD Ibnu SIna dan RSGS;
- pemerataan akses dan kualitas pendidikan, sehingga anak-anak usia sekolah memiliki peluang yang lebih besar untuk mengenyam pendidikan lebih lama;
- sektor industri pengolahan dan aktivitas ekonomi pendukungnya, membuka peluang pendapatan bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan di tahun 2025 :

- pembangunan ruang kelas baru, pembangunan laboratorium, serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dan PAUD
- pengelolaan dana BOS dan BOP serta penyediaan biaya personil peserta didik pada jenjang SD, SMP, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan
- Peningkatan mutu proses pembelajaran, melalui penyelenggaraan proses belajar, pembinaan minat dan bakat siswa, serta koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan.
- Penguatan kapasitas pendidik dan tata kelola satuan pendidikan, melalui penyediaan dan pengembangan karir pendidik, bimbingan teknis, serta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pada seluruh jenjang.



Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE)



Peresmian RSUD Gresik Sehati sebagai fasilitas layanan kesehatan masyarakat Gresik Selatan

1.2 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Gresik mencerminkan tingkat kesetaraan pembangunan antara perempuan dan laki-laki dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan penghidupan, yaitu bagaimana setiap gender dapat memperoleh capaian pembangunan yang seimbang. Menurut data sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS), IPG Kabupaten Gresik pada tahun 2025 mencapai sekitar 91,25, dari target yang ditetapkan 91,06 menunjukkan tren peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya meskipun sedikit di bawah rata-rata Provinsi jawa timur (92.19). Nilai IPG tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam mengurangi kesenjangan gender, meskipun masih terdapat ruang untuk mendekati nilai ideal 100 yang mencerminkan kesetaraan penuh antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian pembangunan manusia

Beberapa faktor penunjang pencapaian tujuan tersebut antara lain :

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota
4. Penyelenggaraan musrenbang khusus perempuan

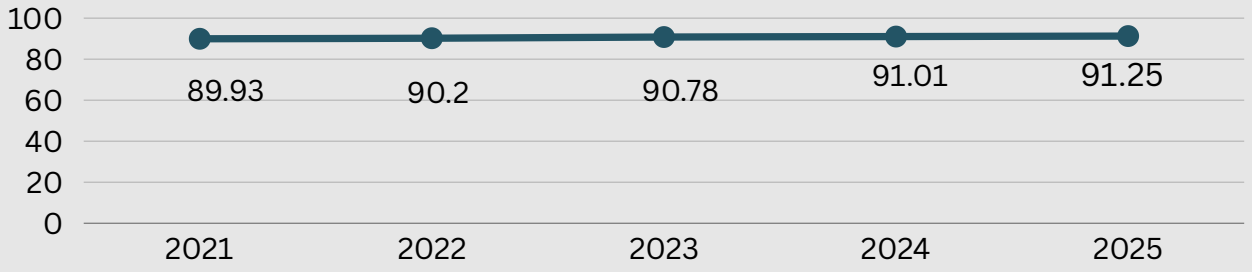


forum diskusi kelompok perempuan



Pembelajaran sekolah perempuan

Tahun 2025 merupakan tahun ke-lima atau terakhir dari RPJMD periode 2021-2026 dan Tahun pertama dari RPJMD periode 2025-2029. berikut merupakan tren peningkatan pembangunan gender di Kabupaten Gresik :

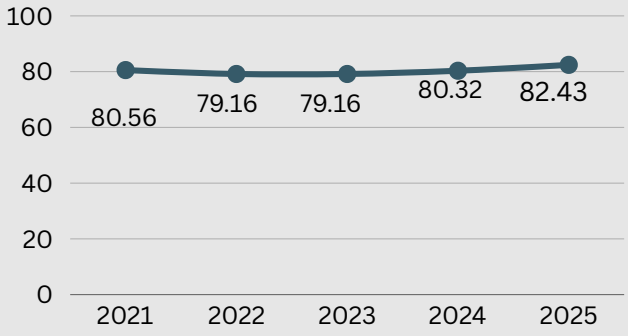


1.3 INDEKS KESALEHAN SOSIAL

Capaian kinerja Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar 80,52, realisasi tahun 2025 mencapai 82,43, atau melampaui target sebesar 1,91 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial, keagamaan, dan solidaritas sosial berjalan efektif dan konsisten.

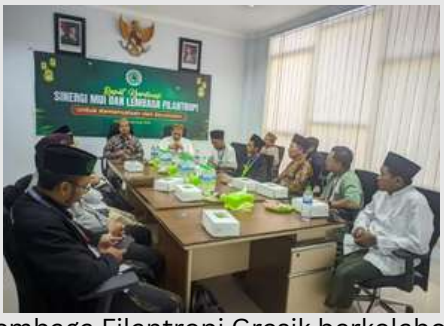
Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, indeks tercatat sebesar 80,32, sehingga terjadi kenaikan sebesar 2,11 poin pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam perilaku sosial masyarakat, seperti meningkatnya kepedulian sosial, toleransi antarwarga, partisipasi dalam kegiatan sosial-keagamaan, serta penguatan nilai gotong royong di lingkungan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan bahwa pembangunan sosial di Kabupaten Gresik tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan fisik, tetapi juga pada penguatan karakter dan nilai-nilai sosial masyarakat. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga keberlanjutan capaian ini melalui penguatan program pembinaan sosial, kolaborasi lintas sektor, serta adaptasi terhadap dinamika sosial yang terus berkembang, agar Indeks Kesalehan Sosial dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan inklusif.



Beberapa faktor penunjang pencapaian tujuan tersebut antara lain :

1. Revitalisasi Pendidikan dan Literasi Sosial-Keagamaan (kurikulum non-formal dalam bentuk pendidikan publik (public education) mengenai kesalehan sosial)
2. Penguatan Kapasitas Tokoh Agama dan Masyarakat seperti menyelenggarakan pelatihan dan workshop tematik dengan pendekatan interfaith dan dialog lintas budaya
3. Fokus Intervensi di Wilayah Rawan Konflik (Kecamatan Driyorejo, Manyar, Kebomas, dan Cerme)
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyampaikan pesan-pesan kesalehan sosial
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap perkembangan IKS di setiap kecamatan



Lembaga Filantropi Gresik berkolaborasi dengan MUI untuk tingkatkan pelayanan umat



Pemberian Dana Hibah dalam rangka pembinaan umat dan pemberdayaan masyarakat

TUJUAN 2:

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekenomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing

2.1 PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditargetkan sebesar 4.72%. Berdasarkan hasil penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025, realisasi pertumbuhan ekonomi belum rilis tercatat sebesar 4,91%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor penunjang pertumbuhan ekonomi antara lain :

- Iklim investasi relatif kondusif dan lokasi strategis di kawasan industri
- Belanja pemerintah dan program pembangunan mendorong aktivitas ekonomi
- Tersedianya lapangan kerja di sektor industri dan jasa pendukung.

Beberapa program kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut antara lain :

1. pemberian pelatihan pada pengurus koperasi sehingga jumlah seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Gresik 1.960 koperasi, dan jumlah koperasi aktif sebesar 1.211 koperasi.
2. fasilitasi perijinan UMKM sehingga pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah 533 usaha mikro
3. pemberian kemudahan dalam prosedur ekspor Pertumbuhan nilai neraca perdagangan dg nilai 2.622.885.248,18 USD
4. adanya program 1 usaha 1 NIB sehingga menambahan IKM sebanyak 96 IKM
5. Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor Lokal
6. Peningkatan promosi investasi baik melalui kegiatan pameran, promosi melalui media cetak dan digital
7. Reviu SOP dan SP secara berkala terkait perijinan usaha
8. Peningkatan pengawasan perizinan kepada perusahaan
9. Penyusunan peta potensi investasi sektor manufaktur dan mempromosikannya
10. Bimtek pelaporan LKPM kepada pelaku usaha
11. Fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar



TUJUAN 3:

Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan

3.1 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah perbandingan nilai investasi dalam bentuk aset tetap (fixed capital formation) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam periode tertentu. Pembentukan modal tetap bruto sendiri mencakup investasi pada:

1. Bangunan (gedung, rumah, infrastruktur);
2. Mesin dan perlengkapan;
3. Alat angkutan; dan
4. Aset tetap lainnya.

Berdasarkan berita resmi statistik realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tahun 2025 sebesar 23.88 persen dari target yang ditetapkan (22,77). Kondisi ini menunjukkan bahwa target PMTB sepenuhnya tercapai, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 23.58 mengalami peningkatan sebesar 0.30 poin

faktor penunjang meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) antara lain :

1. pembangunan sarana dan prasarana desa seperti Pasar desa, jalan poros desa
2. Penyusunan standar barang milik daerah
3. optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah
4. penilaian barang milik daerah
5. pembangunan dan pemeliharaan gedung puskesmas
6. pembangunan waduk kabupaten
7. perbaikan jaringan irigasi
8. peningkatan jalan dan jembatan
9. Koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa Pemanfaatan teknologi konstruksi yang lebih tahan lama
10. Program rehabilitasi dan konservasi DAS
11. Pemasangan SR Air Bersih





3.2 PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu.

Target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditetapkan sebesar 40.331,31 ton CO_2e, sedangkan realisasinya mencapai 52.525,84 ton CO_2e. Dengan demikian, capaian kinerja melampaui target sebesar 12.194,53 ton CO_2e atau sekitar 130,24% dari target yang ditetapkan.

Adapun faktor pendukung capaian Penurunan Emisi GRK antara lain :

1. Pengujian udara yang didukung dengan aktivasi Sistem Pemantauan Kualitas Udara (AQMS)
2. Pemataуan dan pengawasan baik tidak langsung maupun langsung ke para pelaku usaha
3. Pengujian Sampel Kualitas Udara
4. Verifikasi penerbitan rekomendasi dan persetujuan LH secara selektif sesuai ketetentuan dan SOP yang berlaku
5. Penindakan bagi pelanggaran sesuai tingkatannya
6. Koordinasi, kolaborasi, dan pembinaan
7. Edukasi pencegahan kebakaran ke masyarakat dan sekolah
8. pengadaan alat pemadam kebakan,
9. diklat pasukan pemadam kebakaran
10. pembangunan sistem komunikasi informasi kebakaran dan penyelamatan
11. kerjasama dengan perusahaan yang memiliki armada kebakaran yang tergabung dalam forum pemadam kebakaran
12. penyusunan rencana induk SPKP terkait peta rawan kebakaran dan kebutuhan sarpras penanganan kebakaran
13. pendataan perusahaan atau bangunan yang memiliki alat proteksi kebakaran
14. uji kelayakan alat proteksi kebakaran bangunan gedung/ perusahaan
15. pembentukan relawan pemadam kebakaran
16. SIG dan Pemkab Gresik Kolaborasi Manfaatkan refuse-derived fuel (RDF)dari Sampah untuk Bahan Bakar Alternatif
17. Gresik Tanam 1.000 Mangrove, Kolaborasi Selamatkan Pesisir dan Turunkan Emisi

TUJUAN 4:

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance

4.1 INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan hasil evaluasi sementara kementrian PAN RB capaian Indeks reformasi birokrasi Tahun 2025 sebesar 88.01 persen dari target yang ditetapkan (86.85). Kondisi ini menunjukkan bahwa target IRB telah tercapai, dengan selisih sebesar 1.16 poin. kategori A (sangat baik). faktor penunjang tercapainya IRB karena beberapa komponen RB general mengalami peningkatan seperti :

1. Tingkat digitalisasi arsip 90.19 menjadi 92.91,
2. indeks reformasi hukum 96.24 menjadi 99.70,
3. indeks tata kelola pengadaan 76.93 menjadi 85.66
4. indeks pelayanan pelayanan publik 4.16 menjadi 4.35
5. capaian iku makro 83.28 menjadi 86.97
6. survei penilaian integritas 59.78 menjadi 75.75
7. Survei kepuasan masyarakat 88.19 menjadi 90.97

Komponen RB tematik juga mengalami peningkatan seperti :

1. Pengentasan Kemiskinan dari skor 0.67 menjadi 0.75
2. Realisasi investasi dari skor 0.5 menjadi 0.73

dalam upaya pencapaian tujuan tersebut diperlukan pagu anggaran sebesar Rp.1,226,946,750,917.55 dan terealisasi Rp. 1,093,179,447,244.89 atau 89.01%, perangkat daerah yang menunjang ketercapaian tujuan antara lain :

1. Dinas Kominfo dengan menyusun arsitektur dan peta rencana,
2. Sekretariat Daerah (bagian Organisasi) dengan melakukan pendampingan dan evaluasi mandiri kualitas pelayanan publik. dan pemantauan hasil survei kepuasan masyarakat seluruh opd secara berkala setiap 1 bulan sekali.
3. Inspektorat : Sosialisasi integritas ke seluruh OPD
4. Sekretariat Daerah (bagian layanan Pengadaan Barang jasa) : melakukan monitoring dan pendampingan perangkat daerah dalam pencatatan pengandaan non transaksional
5. Bagian Hukum : melakukan kajian dan harmonisasi kebijakan yang disusun



Inspektorat Kabupaten Gresik Bersama KPK RI Lakukan Pemantauan Tindak Lanjut SPI 2024 dan Persiapan SPI 2025



penghargaan manajeman ASN



Bansos kepada Tukang Becak dan Dhuafa



bantuan PKH inklusif

TUJUAN 5:

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan

5.1 TINGKAT KEMISKINAN

Berdasarkan berita resmi statistik nomor 15/09/3525/Th.VI, 22 September 2025 tentang Profil Kemiskinan di Kabupaten Gresik sebesar 9.95 persen dari target yang ditetapkan 9.95. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Tingkat Kemiskinan menunjukkan hasil yang sesuai target, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 10.32 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0.37 poin

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Gresik pada bulan Maret 2025 mencapai 138,55 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 3,84 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 142,39 ribu jiwa.

faktor penunjang penurunan tingkat kemiskinan dikabupaten Gresik antara lain :

1. Inflasi Maret 2024–Maret 2025 relatif terkendali, yaitu sebesar 0,59 persen. Berbagai upaya untuk menekan inflasi seperti menjaga ketersediaan berbagai kebutuhan pokok dan gerakan pasar murah mampu menjaga daya beli masyarakat.
2. Selain itu, berbagai program intervensi kemiskinan pada Januari–Maret 2025 baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Gresik, antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Gresik Seger sebagai program khusus pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Gresik, juga berbagai bantuan pemberdayaan ekonomi lainnya.

Upaya yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan anatara lain :

- pemberian bantuan kepada anak panti asuhan maupun anak terlantar di luar panti
- Update data warga miskin, Bimtek bagi potensi sumber kesejahteraan sosial
- penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan diluar panti sosial
- PKH Inklusif diluar program pusat pada 991 orang,
- BOSDA (dana BOS dari APBD),
- Pemberian santunan janda miskin 13.958 orang, pemberian santunan anak yatim 2.562 anak, pemberian makan anak panti asuhan 150 anak,
- bantuan alat bantu disabilitas pada 25 orang berupa kursi roda, hearing aid, kaki palsu ,
- Pembangunan rumah tidak layak hudi bagi masyarakat miskin, jaminan kesehatan,
- penyelenggaraan bursa kerja dan
- pelatihan tenaga kerja.

5.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Berdasarkan berita resmi statistik nomor 57/11/35/Th.XXIII, 1 Desember 2025 tentang Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik 2025. Tingkat pengangguran terbuka Tahun 2025 sebesar 5.47 dari target yang ditetapkan 6.91. Kondisi ini menunjukkan bahwa target TPT telah tercapai tercapai, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 6.45 mengalami peningkatan sebesar 0.98 poin

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2025 sebanyak 695,66 ribu orang, turun sebanyak 19,95 ribu orang dari Agustus 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah dari sektor Jasa yang mengalami pertambahan sebesar 285,90 ribu orang. Di sisi lain, lapangan usaha yang mengalami penurunan terbanyak adalah dari sektor Pertanian yaitu sebesar 1,75 persen poin. Pada Agustus 2025 sebanyak 56,16 persen bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 2,00 persen poin dibanding Agustus 2024.

faktor penunjang pencapaian target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka antara lain :

1. Tersedianya aplikasi gresikkerja.gresikkab.go.id untuk memfasilitasi para pencari kerja
2. Penyelenggaraan kegiatan ReDINAKER (Recruitmen Dinas Tenaga Kerja yang menghubungkan antara pencari kerja dengan pemberi kerja.
3. Pemberian pelatihan berbasis kompetensi dasar seperti digital marketing yang disebarluaskan melalui platform media sosial
4. Mulai berkembangnya UMKM dan usaha mikro : Fasilitasi pembiayaan mikro, pendampingan usaha, dan akses pasar digital.
5. Peserta pelatihan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui
6. pelatihan UMKM dan fasilitasi pengurusan ijin usaha
7. Monitoring data penempatan tenaga kerja ke perusahaan
8. Dialog pencegahan perselisihan hubungan industrial dan peningkatan fungsionalisasi mediator hubungan industrial.
9. Penguatan peran bursa kerja, dan sistem informasi pasar kerja online
10. Pelatihan mencakup keterampilan teknis dan soft skills yang relevan dengan pasar kerja
11. Job matching dan pendampingan Penempatan khusus Penyandang Disabilitas dengan perusahaan
12. Fasilitasi pendaftaran pekerja miskin sebagai peserta aktif melalui pembiayaan iuran
13. Optimalisasi Pengawasan dan Kepatuhan Perusahaan

Sasaran 1:

MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PENYELENGGARAAN LAYANAN DASAR PENDIDIKAN



1.1 RATA - RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK USIA DIATAS 15 TAHUN (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Gresik pada tahun berjalan mencapai 10,13 tahun, menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 10,03 tahun. Capaian ini menandakan adanya kemajuan akses dan partisipasi pendidikan, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target 10,37 tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 8,39 tahun, RLS Kabupaten Gresik berada pada posisi yang lebih baik, mencerminkan kualitas pendidikan dan akses sekolah yang relatif lebih tinggi di tingkat daerah.

Namun demikian, capaian RLS masih menghadapi sejumlah hambatan struktural. Salah satu faktor utama adalah tingginya kecenderungan kerja dini di kecamatan dengan zonasi industri, di mana daya tarik sektor industri yang menyediakan peluang kerja cepat mendorong sebagian penduduk usia sekolah memilih bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan formal. Kondisi ini berpotensi menahan laju peningkatan RLS, terutama pada jenjang pendidikan menengah atas, sehingga diperlukan intervensi kebijakan antara lain :

1. Program Pendidikan Kesetaraan "JAKETKU -kEJAR PAKET"
2. Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Daerah (BOSDA)
3. try out gratis untuk meningkatkan minat anak untuk melanjutkan sekolah
4. Perluasan akses dan daya tampung dengan pembangunan ruang kelas baru
5. penyediaan dan pengembangan karir pendidik, serta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pada seluruh jenjang.
6. Penyediaan layanan pendidikan alternatif, bagi siswa putus sekolah.
7. Pelaksanaan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
8. Pemberian honorarium bagi guru tidak tetap (GTT/PTT) s
9. Penyediaan basis data dan dukungan pembiayaan sebagai dasar penataan dan pemerataan pendidik sesuai standar yang dipersyaratkan dalam SNP.



Pre TRY OUT TKA SMP Se Gresik Gratis



penghargaan akreditasi status A



perkuat numerasi guru

1.2 HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator penting yang mencerminkan besarnya ekspektasi jumlah tahun pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anak di suatu daerah. Target HLS yang ditetapkan untuk Kabupaten Gresik pada tahun 2025 sebesar 13,99 tahun berhasil tercapai secara penuh, dengan realisasi 13,99 tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan telah berhasil mempertahankan tingkat harapan lama sekolah sesuai dengan yang direncanakan. upaya yang dilakukan antara lain :

- pemberian reward bagi pemuda yang berprestasi dibidang olah raga dan pembinaan anggota organisasi kepemudaan
- pengembangan olah raga rekreasi dan prestasi
- pembangunan sarana dan prasarana olah raga
- sosialisasi budaya baca dan literasi
- pemilihan duta baca/bunda baca/ bunda literasi
- pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingka kabupaten
- pengembangan perpustakaan sekolah berstandart nasional
- prmbinaan pustakawan dalam mewujudkan standart nasional perpustakaan
- penyelenggaraan sertifikasi tenaga perpustakaan
- pengadaan buku bacaan
- penyelenggaraan layanan perpustakaan elektronik
- pendirian ruang baca digital ramah anak
- pembangunan perpustakaan ditempat umum
- pelatihan PKK (Pos PAUD) dan karangtaruna
- pengadaan buku teks pelajaran muatan lokaL





Pojok Baca Digital (elibrary.gresikkab.go.id), ruang multimedia Aquarium Digital (AQUDIG), Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

Sasaran 2:

MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PENYELENGGARAAN LAYANAN DASAR KESEHATAN



2.1 USIA HARAPAN HIDUP (UHH)

Pada tahun 2025, Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Gresik mencapai 74,90 tahun, sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar 74,57 tahun. Hal ini menunjukkan pencapaian yang positif, dimana upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan penduduk Gresik berhasil mendorong peningkatan kualitas hidup secara nyata.

Perbandingan dari tahun sebelumnya juga menunjukkan tren yang membaik. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Gresik tercatat sebesar 74,48 tahun, sehingga terjadi peningkatan sebesar 0,42 tahun pada 2025. Kenaikan ini menandakan keberlanjutan program-program pemerintah daerah, termasuk peningkatan akses layanan kesehatan, pencegahan penyakit, serta intervensi sosial lainnya.

Secara umum, capaian UHH Kabupaten Gresik yang melampaui target dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan progres positif dikarenakan faktor :

- Ketersediaan dan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang relatif baik di wilayah perkotaan dan kecamatan,
- tingginya cakupan kepesertaan JKN,
- berjalannya layanan kesehatan ibu dan anak melalui puskesmas dan posyandu.

Program kegiatan penunjang ketercapaian target usia harapan hidup adalah :

- penyediaan sanitasi layak bagi rumah tangga
- pemberian layanan pengelolaan limbah cair domestik
- penyediaan layanan kontrasepsi modern gratis
- pembinaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB
- penyelenggaraan program kampung keluarga berkualitas mandiri
- pemberdayaan ekonomi keluarga dengan polatihan
- pemeriksaan menyeluruh edukasi gizi, dan deteksi dini risiko kehamilan
- Penguatan Sistem Rujukan Dini Berencana (RDB)
- Melengkapi rumah sakit dengan fasilitas NICU





PUSKESMAS GENDING HADIRKAN FASILITAS RAWAT INAP

Sasaran 3:

MENJAMIN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN PEMENUHAN HAK - HAK ANAK SECARA INKLUSIF



Sosialisasi Pencegahan Bullying, Santri Daruttaawa II

3.1 INDEKS PERLINDUNGAN ANAK

Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Gresik pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Target Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 ditetapkan sebesar 71,62, sementara realisasi capaian tercatat sebesar 81,39. Capaian ini melampaui target sebesar 9,77 poin, yang mengindikasikan bahwa upaya perlindungan, pemenuhan hak, dan peningkatan kesejahteraan anak di Kabupaten Gresik telah berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang signifikan. berikut faktor pendukung indeks perlindungan anak :

- penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak Pekerja Migran yang Lahir di Luar Negeri
- fasilitasi kepemilikan KIA melalui sekolah-sekolah
- pemberian bimbingan konseling kesehatan reproduksi dan perlindungan anak dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak
- pemberian layanan psikososial anak pekerja migran pasca pemulangan
- sosialisasi sekolah ramah anak
- pemberian layanan konsultasi dan pengaduan keluarga
- penyediaan ruang menyusui dan tempat bermain anak yang layak pada puskesmas
- sosialisasi pencegahan bulliying di sekolah-sekolah
- sosialisasi perlindungan anak dan lansia tangguh di desa/kelurahan
- pendirian tempat penitipan anak gratis “MASMUNDARI”



Dinas KBPPPA bersama forum puspa Gayatri Roadshow Perlindungan Anak



Gresik Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak 2025 Kategori Nindya



tempat penitipan anak gratis “MASMUNDARI”

Sasaran 4:

MENINGKATKAN KEADILAN DAN KESETERAAN GENDER SERTA KEBERDAYAAN INKLUSI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA



4.1 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

Indeks Kabupaten Gresik pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang belum memenuhi target serta mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Target IDG Kabupaten Gresik tahun 2025 ditetapkan sebesar 70,72, sementara realisasi capaian tercatat sebesar 62,32. Dengan demikian, capaian ini masih berada di bawah target dengan selisih sebesar 8,40 poin, yang mengindikasikan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan dalam aspek ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan secara lebih optimal. upaya yang dilakukan dalam menunjang IDG antara lain :

- pelatihan dan penempatan tenaga kerja perempuan
- pelayanan antar kerja bagi pencari kerja perempuan
- pembinaan perempuan desa/kelurahan
- advokasi dan sosialisasi ARG (anggaran responsif gender)
- pendampingan penyelenggaran PUG
- fasilitasi kelompok perempuan dalam APBDes
- sosialisasi bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada perempuan
- bimtek perempuan potensial, penyintas kekerasan atau rentan

ISecara keseluruhan, capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Gresik tahun 2025 menunjukkan perlunya perhatian dan intervensi yang lebih serius seperti :

1. Rendahnya Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
2. Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi formal masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki
3. Akses perempuan terhadap pendidikan lanjutan, pelatihan vokasi, dan pengembangan keterampilan kerja masih belum merata
4. Perempuan masih memikul peran domestik yang dominan, seperti pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga.


Solusi Ibu Pekerja Rentan, TPA Masmundari Gresik Sediakan Layanan Penitipan Anak Gratis

Fajar Yuliyanto
Selasa, 16 Desember 2025 | 11:59 WIB

4.2 INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Gresik pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dan melampaui target yang telah ditetapkan. Target IKG Kabupaten Gresik tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,402, sementara realisasi capaian tercatat sebesar 0,335. Karena nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin kecil, capaian ini menandakan bahwa kondisi kesetaraan gender di Kabupaten Gresik berada jauh lebih baik dari target yang direncanakan.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang tercatat sebesar 0,409, IKG Kabupaten Gresik tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,074 poin.

Jika dibandingkan dengan Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Jawa Timur yang berada pada angka 0,345, capaian Kabupaten Gresik tercatat lebih baik, dengan selisih sebesar 0,010 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Gresik relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, yang mengindikasikan efektivitas kebijakan dan program pengarusutamaan gender yang telah dilaksanakan di daerah.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan ketimpanngan gender antara lain :

1. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
2. Memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi anak perempuan di semua jenjang
3. Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi perempuan.
4. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak (KIA).
5. Pemberian pelayanan akseptor Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
6. sosialisasi program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana
7. sosialisasi pusat pelayanan keluarga sejahtera



sosialisasi pusat pelayanan keluarga sejahtera



kolaborasi program bangga kencana (pembangunan keluarga berencana)

4.3 INDEKS INKLUSI (GEDSI)

Indeks Inklusi Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditargetkan sebesar 60, namun realisasi yang dicapai sebesar 56,2. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Gresik telah berjalan, namun masih belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan.

Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya akses dan partisipasi kelompok rentan—terutama perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal—dalam berbagai bidang pembangunan, baik dalam aspek pendidikan, ketenagakerjaan, maupun partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang ramah disabilitas di sejumlah fasilitas publik serta penguatan kelembagaan dan kebijakan yang responsif terhadap prinsip GEDSI masih perlu ditingkatkan. beberapa program kegiatan penunjang antara lain :

- pembinaan atlit disabilitas
- pemberian penghargaan bagi atlit disabilitas yang berprestasi
- penempatan pekerja penyandang disabilitas
- fasilitasi pelayanan antar kerja bagi disabilitas
- fasilitasi pelayanan ULD
- penyediaan taman ramah anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia
- pemberian pelayanan anak berkebutuhan khusus melalui UPT LPABK
- pembinaan kelembagaan dan menejerial sekolah non formal / kesetaraan
- fasilitasi pemulangan tenaga migran korban kekerasan ke desa/kelurahan asal
- bimbingan fisik dan mental penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- bimbingan sosial dan rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis
- sosialisasi taruna siaga bencana
- pemantauan dan pendampingan keluarga beresiko stunting



Pemkab Gresik Sediakan Antar Jemput Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus

Sasaran 5:

MEWUJUDKAN KOHESI DAN HARMONISASI SOSIAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA



5.1 INDEKS HARMONI

Capaian kinerja Indeks Harmoni Kabupaten Gresik tahun 2025 menunjukkan hasil yang belum optimal. Dengan target yang ditetapkan sebesar 3,78, realisasi tahun 2025 hanya mencapai 3,56, sehingga terdapat selisih negatif sebesar 0,22 poin dari target. Selain belum mencapai sasaran, capaian ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 3,77, atau turun 0,21 poin. beberapa hambatan yang dihadapi antara lain :



Majelis Dzikir dan Haul Akbar Gresik 2025

1. Pemahaman dan internalisasi nilai toleransi serta literasi digital di kalangan pendidik, pelajar, dan pemuda
2. Akses layanan pendidikan dan kewarganegaraan di wilayah terpencil dan kepulauan
3. peningkatan Kapasitas FKUB di tingkat kecamatan dalam menjalankan fungsi mediasi
4. Deteksi dini potensi gesekan sosial dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan.
5. operasi penegakan perda perkada
6. pembinaan penyidik pegawai negeri sipil penegak perda
7. sosialisasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah
8. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
9. pelestarian kesenian tradisional
10. pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya
11. pelatihan SDM kesenian tradisional
12. pembinaan kesadaran berbangsa
13. penyusunan kebijakan teknis bidang ideologi wawasan kebangsaaan
14. penanganan konflik sosial dan kewaspadaan nasional

Sasaran 6:

MENINGKATKAN DAYA SAING SEKTOR MANUFAKTUR BERTEKNOLOGI MAJU

6.1 RASIO KONTRIBUSI SEKTOR MANUFAKTUR

Rasio kontribusi sektor manufaktur Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditargetkan sebesar 50,32%, dengan realisasi mencapai 51,86%. Dengan demikian, capaian kinerja melampaui target sebesar 103,06% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur tetap menjadi penopang utama struktur perekonomian daerah dan mampu tumbuh lebih baik dari yang direncanakan.

Peningkatan kontribusi tersebut mencerminkan kinerja industri pengolahan yang stabil, didukung oleh keberadaan kawasan industri, peningkatan aktivitas produksi, serta iklim investasi yang relatif kondusif. Kontribusi Sektor Manufaktur didominasi oleh seperti pertambangan, industri kimia/farmasi, serta industri mineral nonlogam terutama di kawasan KEK (JIIPE) dan kawasan industri lainnya
Adapun program penunjang dalam Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur yakni:

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Penempatan Tenaga Kerja Sektor Manufaktur
4. Peningkatan Kompetensi Pencari/Tenaga Kerja Manufaktur sesuai standar kompetensi kerja (SKKN)
5. fasilitasi layanan antar kerja bagi pekerja sektor manufaktur
6. penyusunan rencana pembangunan industri (RPIK)
7. pemberian kemudahan izin usaha industri dan kawasan industri
8. bimtek perizinan berusaha berbasis resiko
9. pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko
10. penyusunan Perda rencana umum penanaman modal (RUPM)
11. Penyelenggaraan promosi penanaman modal


Industri Manufaktur Gresik


Gresik Universal Science

Sasaran 7:

MENINGKATKAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN BERBASIS POTENSI LOKAL

7.1 RASIO NET EKSPOR

Rasio Net Ekspor Kabupaten Gresik Tahun 2025 melampaui hasil yang signifikan. Realisasi Rasio Net Ekspor Tahun 2025 mencapai 62,88% atau 583,84% dari target sebesar 10,77%. Capaian ini melampaui proyeksi awal secara signifikan. Tingginya rasio net ekspor tersebut mengindikasikan bahwa nilai ekspor yang dihasilkan sektor industri dan komoditas unggulan Kabupaten Gresik jauh melampaui target. Kondisi ini mencerminkan daya saing produk daerah yang baik, terutama dari sektor manufaktur dan industri pengolahan yang menjadi basis ekonomi Gresik.

Capaian ini didukung oleh adanya basis industri berorientasi ekspor seperti semen, petrokimia, kimia, dan makanan, kedekatan dengan pelabuhan besar seperti Pelabuhan JIIPE dan skala industri besar mendukung volume ekspor. Secara keseluruhan, kinerja net ekspor Tahun 2025 memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat struktur ekonomi berbasis industri dan perdagangan. Adapun upaya yang dilakukan dalam menunjang ketercapaian rasio net ekspor adalah :

1. Fasilitasi pengurusan ijin ekspor seperti Surat keterangan Asal.
2. Adanya kemudahan kemudahan dalam prosedur ekspor (seperti adanya elektronik form ke bbrp negara tujuan ekspor, eksportir bisa mengajukan self declare sendiri berupa Deklarasi Asal Barang untuk tujuan Uni Eropa)
3. Adanya kemudahan-kemudahan pelayanan dalam penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)
4. Adanya beberapa eksportir baru Kabupaten Gresik yang penerbitan SKA lewat IPSKA (Diskoperindag) Gresik
5. pemasaran pariwisata
6. fasilitasi HAKI terhadap pelaku ekonomi kreatif
7. pembangunan sarana prasarana kota kreatif
8. penyediaan benih bersertifikat tanaman pangan
9. penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan
10. pembangunan embung pertanian
11. pemeliharaan jalan usaha tani dan jaringan irigasi



Ekspor Pakan Ternak ke Malaysia



Tumbuhnya Aktivitas Industri di Pelabuhan Gresik

Sasaran 8:

MENINGKATKAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS INVESTASI GUNA MEMPERKUAT KINERJA EKONOMI DAERAH PADA SEKTOR MANUFAKTUR DAN SEKTOR STRATEGIS LAINNYA YANG BERNILAI TAMBAH TINGGI

8.1 INCREMENTAL CAPITAL - OUTPUT RATIO (ICOR)

Target Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditetapkan sebesar 4,6, dengan realisasi tahun 2025 sebesar 4,9 atau 106,52% dari target. Secara persentase capaian melebihi target, namun pada indikator ICOR nilai yang lebih rendah menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang lebih baik. Dengan demikian, realisasi 4,9 mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan modal dalam menghasilkan output ekonomi masih di bawah target yang direncanakan.

Faktor Pendukung peningkatan indikator ICOR yakni :

1. Melaksanakan penggalian potensi sumber-sumber pendap atan daerah khususnya pajak daerah
2. Optimalisasi pendaftaran Wajib Pajak baru dan pemeriksaan tarif Pajak
3. Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi pajak daerah maupun pendapatan dari sumber lain yang ada agar bisa mencapai indeks kemandirian fiskal yang diinginkan / sangat mandiri

Adapun program penunjang indikator Incremental Capital - Output Ratio yakni:

1. Penyesuaian NJOP PBBP2 dan BPHTB
2. Sosialisasi kebijakan pajak
3. penggunaan sistem informasi perpajakan berbasis digital
4. Adanya Gerakan Gemar Menabung melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)
5. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi (PBK)
6. Program Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja
7. Penempatan kerja bagi lulusan pelatihan
8. Pemagangan bagi peserta yang telah selesai bagi pelatihan
9. Optimalisasi pendaftaran Wajib Pajak baru dan pemeriksaan tarif Pajak



Grand Launching Ekspor PT Xinyi Glass Indonesia



Bupati Jamin Iklim Investasi Kondusif pada Para Investor



Program Klinik Investasi Keliling

Sasaran 9:

MENINGKATKAN AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS DAERAH

9.1 RASIO GOVERNMENT EXPENDITURE

Rasio Government Expenditure Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditargetkan sebesar 1,95. Capaian realisasi mencapai 2,75 atau sebesar 141,03% dari target yang ditetapkan. Secara persentase, capaian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah memberikan kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih besar dari yang direncanakan.

Peningkatan rasio tersebut mengindikasikan bahwa peran belanja pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah relatif meningkat pada Tahun 2025. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh percepatan realisasi belanja pembangunan, belanja infrastruktur, serta program-program strategis yang memiliki efek pengganda terhadap perekonomian daerah.

Adapun faktor penunjang Rasio Government Expenditure antara lain :

1. Melakukan sinkronisasi yang lebih teliti data aset saat pencatatan aset
2. melakukan penilaian barang milik daerah
3. optimalisasi pemanfaatan aset
4. penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP
5. Penguatan pengendalian internal pada tahap pelaksanaan dan meningkatkan kompetensi SDM pengelola aset
6. Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi pajak daerah dan pendapatan dari sumber lain yang ada agar bisa target bisa tercapai
7. Penetapan prioritas berbasis data kondisi infrastruktur
8. Berjalannya Koordinasi yang baik antara tiap opd baik kecamatan, kelurahan, dan desa



Anugrah Program Inovasi Pembangunan Terpuji


Musrenbang 2025



Pembangunan RSUD Gresik Sehati

Sasaran 10:

MENGUATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS DAERAH YANG BERDAYA SAING

10.1 INDEKS DAYA SAING DAERAH

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 terealisasi sebesar 3,76, atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,75. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan daya saing daerah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi nasional sebesar 3,50, capaian IDSD Kabupaten Gresik berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat daya saing Kabupaten Gresik relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar daerah lain di Indonesia, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan iklim usaha.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur sebesar 3,91, capaian Kabupaten Gresik masih berada di bawah rata-rata provinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah penyangga dan pusat industri di Jawa Timur, masih terdapat ruang peningkatan daya saing agar sejajar dengan kinerja provinsi secara keseluruhan.

Secara umum, capaian IDSD Tahun 2025 menempatkan Kabupaten Gresik pada posisi yang cukup kompetitif, yaitu lebih baik dari capaian nasional namun masih perlu ditingkatkan untuk mendekati capaian Provinsi Jawa Timur. Beberapa faktor utama yang mendukung capaian dan keberhasilan melampaui target IDSD antara lain:

- Struktur Ekonomi Industri yang Kuat dan Terdiferensiasi : Kabupaten Gresik memiliki basis industri manufaktur, petrokimia, semen, dan logistik yang matang, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pilar efisiensi pasar, produktivitas tenaga kerja, dan nilai tambah ekonomi.
- Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah : Perbaikan tata kelola pemerintahan, perencanaan berbasis data, serta sinergi lintas perangkat daerah turut mendukung efektivitas kebijakan peningkatan daya saing
- Dukungan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Industri : Ketersediaan infrastruktur energi, air industri, dan kawasan terintegrasi menjadi faktor penopang utama dalam meningkatkan efisiensi produksi dan daya tarik investasi.

program / kegiatan penunjang keberhasilan IDSD antara lain :

1. Peningkatan cakupan imunisasi dan skrining penyakit tidak menular (PTM)
2. Intervensi gizi spesifik (PMT balita, tablet tambah darah, edukasi ibu hamil)
3. pembangunan sarana air bersih, sanitasi, jamban sehat
4. Program Open Defecation Free (ODF) tingkat desa
5. Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
6. Pengawasan uji kelayakan kendaraan umum
7. Pengendalian limbah industri dan emisi



Pemkab Gresik Tingkatkan Transparansi Tata Kelola Desa Lewat Pengawasan dan Pembinaan Aparatur

10.2 INDEKS INFRASTUKTUR

Indeks Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditargetkan sebesar 63.23. Berdasarkan hasil survei, realisasi indeks mencapai 63.23, atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang ada mampu mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas, serta menunjang kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan kepuasan infrastuktur antara lain :

1. Normalisasi dan pengerukan waduk sehingga peningkatan volume daya tampung waduk kabupaten sebesar 11.154.060,14 m3
2. normalisasi jaringan irigasi sehingga panjang jaringan irigasi kondisi baik sebesar 147.356 m
3. Program peningkatan dan rehabilitasi jalan secara bertahap sehingga jalan yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang sebesar 403,52 km (71,22%).
4. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR) melalui Adanya kemudahan permohonan izin pemanfaatan ruang melalui aplikasi Go-putar dan OSS
5. Penerapan sistem inventarisasi dan monitoring berkala Peran serta Himpunan Perkumpulan Petani Pemakai Air (HIPPA)
6. Koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa Pemanfaatan teknologi konstruksi yang lebih tahan lama
7. Program rehabilitasi dan konservasi DAS
8. Normalisasi dan pengerukan kali
9. Pemasangan SR Air Bersih sebanyak 1071 SR, tersedianya SPALDS sebanyak 752 SR, dan drainase dengan kondisi baik sepanjang 500 m.
10. Pengurangan luas kawasan kumuh seluas 14.57 Ha
11. Penanganan jalan lingkungan sepanjang 4757 m dan saluran lingkungan sepanjang 517 m
12. Pengerjaan drainase yang ditangani sepanjang 10039 m
13. pembangunan dan rehabilitasi jembatan
14. pengelolaan leger jalan
15. peningkatan jalan poros desa



Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan, 2025
Gambar 3.2 Pembangunan Jalan

Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan, 2025
Gambar 3. 1 Pintu Air dan Jaringan Irigasi dan waduk



Peningkatan Jalan Morowudi



Peresmian Universal Science, Destinasi Wisata Edukasi Digital Baru di Balongpanggang



Perbaikan 1.511 Titik Jalan Rusak

10.3 INDEKS KONEKTIVITAS WILAYAH

Indeks Konektivitas Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,745, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 0,745 atau 100% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat keterhubungan antarwilayah, baik melalui jaringan jalan, akses transportasi, maupun dukungan infrastruktur penunjang lainnya, telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Meskipun target telah tercapai secara penuh, peningkatan kualitas konektivitas tetap perlu dilanjutkan untuk mengantisipasi pertumbuhan kawasan industri, perkembangan wilayah permukiman, serta peningkatan volume lalu lintas di masa mendatang. Dengan demikian, konektivitas wilayah tidak hanya terjaga dari sisi kuantitas, tetapi juga dari aspek kapasitas dan kualitas layanan infrastruktur.

Program penunjang Indeks Konektivitas Wilayah antara lain :

1. melaksanakan uji kelayakan angkutan darat / kendaraan bermotor secara berkala
2. revitalisasi terminal penumpang tipe C
3. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ
4. pemantauan sistem keselamatan perusahaan angkutan umum
5. pengawasan ketersediaan angkutan umum
6. penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan
7. penyusunan rencana umum jaringan trayek perdesaan
8. penyediaan dan pemeliharaan PJU
9. pengawasan ijin persetujuan pengoperasian angkutan air
10. pemeliharaan pelabuhan /dermaga sungai
11. penyediaan peralatan keselamatan perlintasan keretaapi
12. peningkatan kompetensi penilai analisa dampak lalu lintas (andalalin)
13. pemasangan marka jalan



Giat Rampcheck oleh Satlantas, Dishub Prov Jatim, dan Dishub Kab. Gresik



Aturan Jam Operasional Truk

Sasaran 11:

MENINGKATKAN KETANGGUHAN INFRASTRUKTUR DAERAH

11.1 INDEKS RISIKO BENCANA

Realisasi Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2025 tercapai sebesar 119,66 atau 88,05% dari target sebesar 135,9. Secara persentase capaian berada di bawah 100%, namun pada indikator risiko bencana, nilai yang lebih rendah menunjukkan tingkat risiko yang semakin menurun.

Dengan demikian, realisasi sebesar 119,66 mengindikasikan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Gresik lebih rendah dari yang diproyeksikan dalam target tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana.

Program penunjang Indeks Risiko Bencana antara lain :

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
3. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
4. Infrastruktur mitigasi memadai seperti sistem peringatan dini berfungsi, adanya sarana evakuasi, jalur aman dan tempat pengungsian tersedia
5. Terbentuknya forum pengurangan risiko bencana desa
6. menyusun kajian resiko bencana
7. penyelesaian akar masalah resiko bencona
8. penyediaan peralatan siaga bencana
9. pelatihan keluarga tanggap bencana dan Tim reaksi cepat bencana
10. pelaksanaan kerjasama kemitraan penanggulangan bencana
11. rehabilitasi pintu air /bendung pengendali banjir
12. pemeliharaan embung penampung air
13. normalisasi kali lamong
14. sosialisasi pencegahan kebakaran dan pembinaan relawan kebakaran



Sosialisasi dan Simulasi Penanganan Gempa Bumi



Pelatihan JITUPASNA dalam rangka Peningkatan Penanganan Pasca Bencana

Sasaran 12:

MEMPERKUAT UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

12.1 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang melampaui target serta mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Target IKLH Kabupaten Gresik ditetapkan sebesar 60,90, sementara realisasi berdasarkan aplikasi SITALA (Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) capaian mencapai 65,81 Kategori "Sedang". Capaian ini melampaui target sebesar 4,94 poin, yang mengindikasikan adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup secara nyata serta efektivitas kebijakan dan program pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 60,12, IKLH Kabupaten Gresik mengalami peningkatan sebesar 5,72 poin. Jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang berada pada angka 71,24, capaian Kabupaten Gresik masih berada di bawah rata-rata provinsi, dengan selisih sebesar 5,40 poin. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Gresik telah menunjukkan perbaikan yang positif, masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut agar dapat menyamai capaian kualitas lingkungan hidup di tingkat provinsi.

Secara keseluruhan, capaian IKLH Kabupaten Gresik mencerminkan tren perbaikan yang kuat dan berkelanjutan, berikut upaya yang dilakukan :

- Pengelolan terpadu air limbah domestik dan aksi bersih sungai dan badan air
- Pengujian udara dengan aktifasi sistem pemantauan kualitas udara (AQMS) yang trletak di 10 lokasi
- Pengukuran kualitas lahan meliputi 66 lokasi RTH, 34 lokasi taman, 6 jalur hijau, 1 lokasi hutan, 49 lokasi area mangrove, dan 6 lokasi sempadan
- Pelayanan dan pengolahan sampah 16 kecamatan melalui Bank Sampah, TPS3R/TPST, Pengolahan di TPA, dan Pengelolaan Mandiri
- Program SAJI SAPO (Satu Jiwa Satu Pohon)



Gerakan Menanam Pohon



Tindak Lanjut Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Sasaran 13:

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG ADAPTIF DAN TRANSPARAN MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL, PENGUATAN KOLABORASI LINTAS SEKTOR, SERTA PENGELOLAAN SDM APARATUR BERBASIS SISTEM MERIT

13.1 INDEKS PEMERINTAH DIGITAL (IPD)



SPBE Gresik Masuk 6 Terbaik Nasional di Ajang SPBE Summit 2024



Bimtek Penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Gresik



Rakor Manajemen pengetahuan SPBE

Indeks Pemerintah Digital adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu memanfaatkan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan (maturity) transformasi digital pemerintahan dalam aspek tata kelola, layanan, dan pemanfaatan data/teknologi.

Tahun 2025 tidak dilakukan penilaian indeks pemerintah digital sehingga menggunakan nilai indeks SPBE tahun 2024. Berdasarkan surat keputusan Kementrian PANRB nomor 663 tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE sebesar 4.32 kategori "memuaskan". indeks tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten sebesar 3.21 dan rata-rata provinsi 4.04. beberapa upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten gresik antara lain :

1. Reviu Kebijakan SPBE
2. Perbaikan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
3. Perbaikan Peta Proses Bisnis
4. Penerapan Manajemen SPBE
5. Pelaksanaan Audit TIK
6. Pengembangan Layanan Elektronik

13.2 NILAI AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAHAN

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik menunjukkan nilai sebesar 77,15 dengan predikat "BB". Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PANRB, 4 (empat) komponen utama evaluasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Berikut merupakan rincian penilaian AKIP Pemerintah Kabupaten Gresik :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	2024	2025	SELISIH
1	Perencanaan Kinerja	25,24	23,28	1,96
2	Pengukuran Kinerja	23,72	22,43	1,29
3	Pelaporan Kinerja	13,03	12,94	0,09
4	Evaluasi Internal	18,61	18,50	0,11
Nilai AKIP/Predikat		80,60 (A)	77,15 (BB)	3,45

Penurunan nilai terjadi di seluruh lini evaluasi, dengan poin krusial pada Perencanaan Kinerja yang memiliki selisih nilai 1,96 poin (dari 25,24 menjadi 23,28). Hal ini mengindikasikan bahwa dokumen perencanaan tahun 2025 belum mampu menggambarkan strategi pemecahan masalah yang tajam dan selaras antara sasaran strategis dengan penggunaan anggaran. Komponen Pengukuran Kinerja juga menurun sebesar 1,29 poin, yang menandakan adanya kelemahan dalam validitas data pendukung kinerja maupun monitoring berkala.



Pelaksanaan Evaluasi
Implementasi SAKIP 2025



Sinkronisasi Dokumen AKIP
Kabupaten Gresik

Berbagai upaya perbaikan dan penguatan tetap dilakukan, terutama dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain :

1. Pendampingan penyusunan Pohon Kinerja Perangkat Daerah;
2. Pendampingan penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah;
3. Pendampingan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
4. Optimalisasi Aplikasi SIAKRI (Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi) melalui :
   a. Penyusunan Dokumen AKIP yakni Pohon Kinerja, Cascading Kinerja, IKU, IKI, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi
   b. Monitoring Kinerja Utama Perangkat Daerah berkala
   c. Monitoring Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah berkala
   d. Pengisian Kertas Kerja Evaluasi AKIP Internal
   e. Evaluasi AKIP Internal oleh Inspektorat

13.3 INDEKS SISTEM MERIT

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 511 Tahun 2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan bahwa penerapan Sistem Merit kategori Baik, dengan Nilai 310,5

Pada Tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian Sistem Merit oleh BKN. Meskipun demikian, berbagai upaya perbaikan dan penguatan tetap dilakukan, terutama dalam rangka peningkatan penerapan manajemen talenta antara lain :

1. Pembangunan aplikasi Sistem Administrasi Manajemen Talenta (SATMATA) Kabupaten Gresik.
2. pelaksanaan Assessment sebanyak 1.115 pegawai untuk pemetaan kompetensi ASN sebagai dasar pengembangan karier dan penguatan penerapan manajemen talent
3. Terbitnya peraturan – peraturan mutasi dan promosi sesuai penguatan aplikasi manajemen talenta seperti :
   a. Keputusan Bupati Gresi Nomor : 800/369/HK/437.12/2025 tentang Jabatan Target Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Gresik
   b. Keputusan Bupati Gresik Nomor 800/368/HK/437.12/2025 tentang penetapan jabatan kritikal di lingkungan pemerintah kabupaten Gresik
   c. Keputusan Bupati Nomor 800/428/HK/437.12/2025 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik
4. Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Gerbang Pengembangan Kompetensi Menuju Smart ASN (GAPURA) merupakan aplikasi e-Learning berbasis web yang menyediakan berbagai pelatihan secara daring untuk dapat diakses oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Selama Tahun 2025, Gapura telah diikuti oleh pegawai dan telah mencetak sertifikat sebanyak 7.778.



13.4 INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan keputusan Menteri PAN RB no 3 tahun 2026 tentang hasilpemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementrian, lembaga dan Daerah tahun 2025 maka diperoleh capaian Indeks pelayanan publik sebesar 4.35 kategori sangat baik (A-) dari target yang ditetapkan 2,25. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi indek pelayanan publik mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 4.16.

ika dibandingkan dengan Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur yang berada pada angka 4,75, capaian Kabupaten Gresik masih berada sedikit di bawah rata-rata provinsi, dengan selisih sebesar 0,40 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gresik sudah sangat baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat menyamai bahkan melampaui standar pelayanan publik di tingkat provinsi.

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Gresik tersebut diperoleh berdasarkan hasil sampling kualitas pelayanan pada beberapa perangkat daerah strategis, yaitu RSUD Ibnu Sina, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pendidikan. Ketiga unit pelayanan ini merepresentasikan sektor layanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga hasil pengukuran mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas layanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan pendidikan.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks pelayanan publik antara lain :

1. melakukan reviu standart pelayanan, menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat dan menjalankan maklumat pelayanan
2. optimalisasi peningkatan profesionalisme SDM dengan cara memberikan motivasi kerja seperti capacity building , bimtek dan pemberian penghargaan bagi petugas layanan yang berprestasi
3. Perbaikan sarana prasarana layanan yang menunjang kelompok rentan
4. setiap layanan di publikasikan melalui SIPPN
5. penanganan pengaduan yang kurang dari 1x24 jam
6. pengembangan inovasi guna menunjang kemudahan layanan
7. penyelenggaraan penilaian mandiri pada seluruh perangkat daerah dan UPT untuk meningkatkan kualitas pelayanan.



Inovasi “Pak Dalang Kepasar” (Pelayanan Datang Langsung kepada Masyarakat Rentan).



Peresmian Fasilitas “Rawat Jalan dan Diagnostik Terpadu”

Sasaran 14:

MENINGKATKAN KEBERDAYAAN DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT SECARA MELUAS DI BERBAGAI ASPEK KESEJAHTERAAN



14.1 INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSI

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 48, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 43,79. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan multidimensi di Kabupaten Gresik berada pada tingkat yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan.

Perbaikan capaian tersebut didukung oleh berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, di antaranya :

1. pemberdayaan kepala rumah tangga perempuan yang miskin oleh Dinas KBPPPA
2. penyelenggaraan sidak harga kebutuhan pokok pada pusat perbelanjaan oleh Tim TPID
3. penyelenggaraan pasar murah Oleh dinas KOPERINDAG
4. penyelenggaraan high level meeting Oleh Bagian Perekonomian
5. fokus pada pelaksanaan 5 indikator inflasi Oleh Tim TPID
6. pemberian bantuan hukum bagi warga miskin oleh Bagian Hukum
7. monitoring peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama terkait pemberian Jaminan sosial bagi pekerja miskin
8. pembangunan rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah
9. penyediaan rumah susun dan rumah khusus yang nyaman
10. rehabilitasi rumah korban bencana
11. rehabilitasi rumah swadaya tidak layak huni
12. pembentukan kelompok swadaya masyarakat di pemukiman kumuh
13. pembangunan jalan lingkungan dan saluran di permukiman kumuh
14. pembangunan sambungan pipa air bersih oleh dinas CKPKP
15. monitoring anggaran desa terkait program pengentasan kemiskinan oleh PMD
16. peningkatan kapasitas petugas lembaga kemasyarakatan desa
17. penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan

Sasaran 15:

MEMPERLUAS PARTISIPASI DAN INKLUSIFITAS PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MAYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN

15.1 PERSENTASE PARTISIPASI PERLINDUNGAN SOSIAL OLEH KELUARGA MISKIN

Berdasarkan hasil evaluasi kementrian PAN RB nomor ... capaian Indeks reformasi birokrasi Tahun 2025 sebesar ..... persen dari target yang ditetapkan (86.17). Realisasi IPM tercatat sebesar 79,69, sedikit di bawah batas bawah target. Kondisi ini menunjukkan bahwa target IPM belum sepenuhnya tercapai, namun secara capaian kinerja menunjukkan hasil yang mendekati target, dengan selisih sebesar 0,15 poin.

1. pemberian bantuan kepada anak panti asuhan maupun anak terlantar di luar panti
2. Update data warga miskin
3. Bimtek bagi potensi sumber kesejahteraan sosial
4. penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan diluar panti sosial
5. PKH Inklusif diluar program pusat pada 991 orang,
6. BOSDA (dana BOS dari APBD),
7. Pemberian santunan janda miskin 13.958 orang,
8. pemberian santunan anak yatim 2.562 anak,
9. pemberian makan anak panti asuhan 150 anak,
10. bantuan alat bantu disabilitas pada 25 orang berupa kursi roda, hearing aid, kaki palsu ,
11. Pembangunan rumah tidak layak hudi bagi masyarakat miskin, jaminan kesehatan,
12. penyelenggaraan bursa kerja dan
13. pelatihan tenaga kerja.



Launching Penyaluran Bantuan Sosial Pangan

Sasaran 16:

MEWUJUDKAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN DAN MENGHAPUS KETIMPANGAN SOSIAL EKONOMI



16.1 RASIO GINI

Rasio Gini Kabupaten Gresik menunjukkan capaian yang baik dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan rilis BPS Pada tahun 2025, Rasio Gini Kabupaten Gresik tercatat sebesar 0,327, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 0,351. Capaian ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Gresik berada pada kondisi lebih merata daripada yang direncanakan, sehingga kinerja pengendalian ketimpangan dapat dinilai melampaui target.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar 0,330, Rasio Gini Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 0,003 poin. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan bertahap dalam pemerataan ekonomi masyarakat, yang mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan secara lebih inklusif oleh berbagai kelompok pendapatan.

Upaya yang dilakukan guna mengirangi ketimpangan ekonomi antara lain :

1. pemeliharaan sarana distribusi perdagangan (pasar sidayu dan sentra IKM)
2. fasilitasi ijin usaha perdagangan seperti pengurusan merk dan sertifikat halal
3. pembinaan pedagang di pasar atau sentra IKM
4. monitoring harga kebutuhan pokok dan ketersediaan bahan pokok setiap hari
5. promosi dan misi dagang
6. tera ulang alat ukuran, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) agar tidak merugikan warga
7. pemeliharaan lumbung pangan, lantai jemur, rumah penggilingan padi
8. pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi
9. pemberian pupuk cair gratis ke petani
10. pendampingan sertifikasi benih agar dapat dipasarkan
11. pengadaan alat mesin pertanian
12. penetapan peta lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan
13. rehabilitasi jalan usaha tani
14. pembentukan sekolah lapang kelompok tani
15. pengembangan inovasi pertanian seperti pembuatan peptisida hayati.



Sasaran 17:

MENINGKATKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL

17.1 RASIO PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL

Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Gresik pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Target Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal tahun 2025 ditetapkan sebesar 32, sedangkan realisasi capaian tercatat sebesar 30,62. Dengan demikian, tingkat pencapaian kinerja mencapai sekitar 95,69 persen dari target, yang menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran penyerapan tenaga kerja lokal telah berhasil direalisasikan.

solusi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja antara lain :

- Peserta pelatihan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui
- pelatihan UMKM dan fasilitasi pengurusan ijin usaha
- Monitoring data penempatan tenaga kerja ke perusahaan
- Dialog pencegahan perselisihan hubungan industrial dan peningkatan fungsionalisasi mediator hubungan industrial.
- Penguatan peran bursa kerja, dan sistem informasi pasar kerja online
- Pelatihan mencakup keterampilan teknis dan soft skills yang relevan dengan pasar kerja
- Job matching dan pendampingan Penempatan khusus Penyandang Disabilitas dengan perusahaan
- Fasilitasi pendaftaran pekerja miskin sebagai peserta aktif melalui pembiayaan iuran
- Optimalisasi Pengawasan dan Kepatuhan Perusahaan

PK 2025

PERIODE RPJMD 2021-2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Gresik, 20 Januari 2025

BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan		1	Indeks Daya Saing Daerah	3.62
1	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	1	Indeks Kepuasan Infrastruktur	90
2	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.93
3	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	1	Indeks Pembangunan Gender	93.04
Tujuan 2 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance		1	Indeks Reformasi Birokrasi	86.85
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.4
2	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	1	Indeks Inovasi Daerah	54.43
Tujuan 3 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif		1	Pertumbuhan Ekonomi	5.2
1	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	1	Indeks Williamson	0.33
		2	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	5-6 %
Tujuan 4 : Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah		1	Indeks Pembangunan Manusia	80.92
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	1	Indeks Pendidikan	82.7
		2	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	85

PK 2025
PERIODE RPJMD 2021-2026

		3	Prevalensi Stunting	8.5-7
2	Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	1	Indeks Kesalehan Sosial	80
Tujuan 5 : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan		1	Tingkat Kemiskinan	9,4-9,7
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka	6
1	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75 %
		2	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	100

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 555,844,829,517.69	APBD
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 430,552,412,097.00	APBD
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 32,490,366,000.00	APBD
4	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 546,958,444,959.90	APBD
5	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 158,793,374,847.00	APBD
6	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 7,017,389,350.00	APBD
7	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp. 236,284,000.00	APBD
8	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp. 1,732,746,162.00	APBD
9	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 600,000,000.00	APBD

237	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 111,172,524.00	APBD
238	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 68,103,600.00	APBD
239	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5,066,481,345.48	APBD
240	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp. 2,674,218,621.00	APBD
241	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp. 6,404,707,400.00	APBD
242	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp. 319,535,000.00	APBD
243	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp. 2,143,199,883.00	APBD
244	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp. 6,836,829,580.26	APBD
Jumlah			Rp. 3,843,558,853,647.60	

Gresik, 20 Januari 2025

BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

PK 2025
PERIODE RPJMD 2025-2029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Gresik, 9 Oktober 2025

BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Paraf Hierarki

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tujuan 1 : Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia		1	Indeks Pembangunan Manusia	79.84
		2	Indeks Pembangunan Gender	91.06
		3	Indeks Kesalehan Sosial	80.52
1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	1	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	10.37
		2	Harapan Lama Sekolah	13.99
2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	74.57
3	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	1	Indeks Perlindungan Anak	71.62
4	Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	1	Indeks Pemberdayaan Gender	70.72
		2	Indeks Ketimpangan Gender	0.402
		3	Indeks Inklusi (GEDSI)	60
5	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	1	Indeks Harmoni	3.78
Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekenomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing		1	Pertumbuhan ekonomi	4,72
1	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	1	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	50.32

Paraf Hierarki
Sekretaris Daerah
Asisten Administasi Umum
Kepala BAPPEDA

PK 2025
PERIODE RPJMD 2025-2029

2	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	1	Rasio Net Ekspor	10.77
3	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	1	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	4.6
Tujuan 3 : Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan		1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	22,77
		2	Penurunan Emisi GRK	40331.31
1	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	1	Rasio Government Expenditure	1.95
2	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	1	Indeks Daya Saing Daerah	3.75
		2	Indeks Infrastuktur	63.23
		3	Indeks Konektivitas Wilayah	0.745
3	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	1	Indeks Risiko Bencana	135.90
4	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	6.09
Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani		1	Indeks Reformasi Birokrasi	86,17
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	1	Indeks Pemerintah Digital	4.37
		2	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	80.9
		3	Indeks Sistem Merit	315
		4	Indeks Pelayanan Publik	2.25

Tujuan 5 : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif		1	Tingkat kemiskinan	9.95
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.91
1	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	1	Indeks Kemiskinan Multidimensi	48
2	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan	1	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	80
3	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	1	Rasio gini	0.351
4	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	32

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 589,351,630,518.07	PAPBD
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 419,470,747,088.00	PAPBD
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 61,461,636,000.00	PAPBD
4	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 547,427,714,888.39	PAPBD
5	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 199,499,639,248.00	PAPBD
6	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 5,786,530,350.00	PAPBD

Jumlah	Rp. 3,843,658,853,846.91	

Gresik, 9 Oktober 2025

BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan, pembagian urusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Pada Tahun 2025 Kabupaten Gresik tidak melaksanakan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Gresik tidak menerima penugasan dari Pemerintah Pusat melalui mekanisme Tugas Pembantuan. Dengan tidak adanya alokasi tersebut, maka tidak terdapat pelaksanaan program, kegiatan, maupun pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik selama tahun pelaporan. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pengalokasian program dan kegiatan Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional serta kebutuhan daerah tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun pelaporan, program dan kegiatan yang menjadi prioritas kementerian /lembaga tidak dialokasikan melalui skema Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal. Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Gresik secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan dasar terdiri atas:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;

b. Pendidikan Dasar

Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang terbagi dalam dua jenjang pendidikan, yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Target dan indikator kinerja capaian SPM Bidang Pendidikan yang ditetapkan oleh Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.1 Target SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	**Target**	**Batas Waktu Capaian**	**Indikator**	**Target**	**Batas Waktu Capaian**
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	38.042 orang	Tahun 2025	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	91,77%	Tahun 2025
					Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	94,28%	Tahun 2025
			Target 100% (SPM)	**APS Tahun N-1**	**Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N**		
		Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	80,76%	77,79%	2.97%		
2.	Pendidikan	Jumlah warga negara usia 7-		Tahun 2025	Sekolah Dasar (SD)		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
	Dasar	15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi/SMP/MTs)	174.736 orang		1. Kemampuan literasi	72,97 Nilai	Tahun 2025
					2. Kemampuan numerasi	63,09 Nilai	Tahun 2025
					3. Indeks iklim keamanan	78,90 Nilai	Tahun 2025
					4. Indeks iklim kebinekaan	76,57 Nilai	Tahun 2025
					5. Indeks iklim inklusivitas	64,80 Nilai	Tahun 2025
					Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
					1. Kemampuan literasi	81,86 Nilai	Tahun 2025
					2. Kemampuan numerasi	70,63 Nilai	Tahun 2025
					3. Indeks iklim keamanan	74,50 Nilai	Tahun 2025
					4. Indeks iklim kebinekaan	73,67 Nilai	Tahun 2025
					5. Indeks iklim inklusivitas	63,51 Nilai	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
		Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	99,44%	99,33%	0,11%		
		Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	99,3%	99,19%	0,11%		
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	610 orang	Tahun 2025	Angka partisipasi sekolah	29,51 Nilai	Tahun 2025
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
		Angka Partisipasi Sekolah (7-	29,51%	24,54%	4,97%		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		18 tahun) Kesetaraan *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan					

4.1.3 Realisasi

Hasil realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan tiga jenis pelayanan dasar mencapai 99,27%. Berikut realisasi SPM Pendidikan Tahun 2025:

Tabel 4.1.3.1 Realisasi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini 100%	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (80% X 100% = 80 %)	38.042 orang	38.042 orang	100%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 100% = 20%)			100%
						1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	91,77	91,77	100%
						2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	94,28	94,28	100%
2.	Pendidikan Dasar 99.13%	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi	174.736 orang	174.736 orang	100%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 95.67% = 19.13%)			95.67%
						Sekolah Dasar (SD)			

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
		dalam pendidikan dasar (SD/Mi/ SMP/MTs) (80% X 100% = 80%)				1. Kemampuan literasi	72,97	70,54	96,67%
						2. Kemampuan numerasi	63,09	60,99	96,67%
						3. Indeks iklim keamanan	78,90	74,96	95%
						4. Indeks iklim kebinekaan	76,57	72,74	95%
						5. Indeks iklim inklusivitas	64,80	61,56	95%
						Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
						1. Kemampuan literasi	81,86	79,13	96,67%
						2. Kemampuan numerasi	70,63	68,28	96,67%
						3. Indeks iklim keamanan	74,50	70,78	95%
						4. Indeks iklim kebinekaan	73,67	69,99	95%
						5. Indeks iklim inklusivitas	63,51	60,33	95%
3.	Pendidikan Kesetaraan 98.66%	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum	610 orang	610 orang	100%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 93.32**%**= 18.66 **%)**			93.32**%**

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
		menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (80% X 100% = 80%)				Angka partisipasi sekolah	29,51	27,54	93,32%

4.1.4 Alokasi Anggaran

Anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pada Dinas Pendidikan bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.4.1 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
Urusan Pendidikan Kab. Gresik	**233.202.574.300**	**197.771.627.062**	**84,81%**
Program Pengelolaan Pendidikan			
1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**22.168.653.966**	**21.847.281.778**	**98,55%**
Angka Partisipasi Sekolah			
1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	14.099.906.000	14.089.000.000	99,92%
Kekhususan PAUD			
1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7.694.400.000	7.466.400.000	97,04%
2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	287.630.966	206.001.460	71,62%
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	86.717.000	85.880.318	99,04%
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	**52.726.207.566**	**45.066.926.609**	**85,47%**
Angka Partisipasi Sekolah			
1. Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.455.086.347	1.446.956.187	99,44%
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	16.536.567.019	15.712.793.786	95,02%
3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	19.042.305.000	19.037.586.863	99,98%
Literasi			
1. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	70.596.000	58.772.000	83,25%

Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Numerasi			
1. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	99.003.200	92.260.172	93,19%
Inklusifitas			
1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	15.522.650.000	8.718.557.600	56,17%
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	**37.552.234.882**	**32.353.832.341**	**86,16%**
Angka Partisipasi Sekolah			
1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.474.402.482	7.788.486.287	91,91%
2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	20.661.400.000	20.661.400.000	100%
3. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	206.080.400	166.934.819	81%
Literasi			
1. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	32.202.000	20.776.900	64,52%
Numerasi			
1. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	85.500.000	84.150.000	98,42%
Inklusifitas			
1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.092.650.000	3.632.084.335	44,88%
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya			
Program Pengelolaan Pendidikan			
4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**59.293.841.886**	**40.840.090.614**	**68,88%**
Angka Partisipasi Sekolah			

	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	39.407.702.000	39.376.090.000	99,92%
2.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	19.850.721.286	1.428.759.193	7,20%
3.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	35.418.600	35.241.421	99,50%
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
5.	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	61.461.636.000	57.663.495.720	93,82%
Literasi				
1.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	61.461.636.000	57.663.495.720	93,82%

4.1.5 Dukungan Personil

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut tabel jumlah personil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2025:

Tabel 4.1.5.1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenis / Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
1.	**Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)**		**1**
	a. Pangkat/Golongan:		
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
	b. Pendidikan		
	S3	1	

No.	Jenis / Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
	Administrator		4
	a. Pangkat/Golongan:		
	Pembina Tk. I (IV/b)	1	
	Pembina (IV/a)	2	
	Penata (III/c)	1	
	b. Pendidikan		
	S3	3	
	S2	1	
	Pengawas		**10**
	a. Pangkat/Golongan		
	Pembina (IV/a)	1	
	Penata Tk. I (III/d)	6	
	Penata (III/c)	2	
	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	
	b. Pendidikan		
	S2	3	
	S1	7	
	Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum		**72**
	a. Pangkat/Golongan		
	Pembina (IV/a)	1	
	Penata Tk. I (III/d)	8	
	Penata (III/c)	2	
	Penata Muda Tk. I (III/b)	6	
	Penata Muda (III/a)	34	
	Pengatur Tk. I (II/d)	14	
	Pengatur (II/c)	6	
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	
	b. Pendidikan		
	S1	45	
	D3	3	
	SMA	24	
2.	**Jabatan Fungsional Tertentu**		**4945**
	a. Pangkat/Golongan		
	Pembina Utama Madya (IV/d)	3	

No.	Jenis / Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
	Pembina Utama Muda (IV/c)	170	
	Pembina Tk. I (IV/b)	331	
	Pembina (IV/a)	322	
	Penata Tk. I (III/d)	479	
	Penata (III/c)	307	
	Penata Muda Tk. I (III/b)	458	
	Penata Muda (III/a)	219	
	Pengatur Tk. I (II/d)	4	
	Pengatur (II/c)	1	
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	
	PPPK Guru (IX)	2084	
	Paruh Waktu S1	566	
b.	Pendidikan		
	S2	229	
	S1	4680	
	D4	3	
	D3	8	
	D2	23	
	SMA	2	
3.	**NON ASN**		**33**
a.	Pendidikan		
	S1	15	
	SMA	13	
	SMP	1	
	SD	4	
	JUMLAH TOTAL PERSONIL		**5065**

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun Permasalahan dan solusi yang ada dalam pelaksanaan SPM di Urusan Pendidikan antara lain:

1. Permasalahan

   Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

a) Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar perhitungan jumlah penerima layanan;
b) Analisis perhitungan kebutuhan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum sepenuhnya didukung oleh data yang memadai sebagai akibat dari keterbatasan waktu dan sumber daya manusia dalam menyesuaikan proses pengolahan data dengan siklus dan waktu penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda);
c) Format isian tahapan penerapan SPM Bidang Pendidikan belum sepenuhnya selaras dengan capaian kinerja yang hendak dicapai serta terdapat ambiguitas dalam pemahaman dan pengisian format sehingga berpengaruh pada kualitas perencanaan dan pelaporan SPM;
d) Capaian mutu layanan belum didukung oleh dasar perhitungan yang baku dan sesuai standar, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengukur ketercapaian indikator SPM Bidang Pendidikan sebagai *outcome* dari kegiatan yang dilaksanakan.

2. Solusi

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan atas permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

a) Optimalisasi sistem pendataan dan pengelolaan data pendidikan secara terintegrasi melalui pemutakhiran data berkala, peningkatan kualitas validasi dan verifikasi data, serta pengembangan basis data terpadu lintas sektor (*backbone*) sebagai dasar perhitungan jumlah penerima layanan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan;
b) Penguatan proses perencanaan dan penganggaran berbasis data melalui sinkronisasi siklus pengumpulan dan pengolahan data dengan tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda), peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana, serta pengembangan mekanisme kerja terpadu internal organisasi (Dinas Pendidikan) guna memastikan ketersediaan data

yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar analisis perhitungan kebutuhan;

c) Penyesuaian dan penyempurnaan format isian tahapan penerapan SPM Bidang Pendidikan melalui harmonisasi indikator kinerja dan kebutuhan pelaporan terkini, disertai penguatan pemahaman pelaksana melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyusunan pedoman teknis pengisian format, serta penguatan koordinasi dengan kementerian terkait guna mendorong pembaruan dan penyesuaian regulasi/ format sesuai dengan kebutuhan;

d) Menyusun dan menerapkan metodologi perhitungan capaian mutu layanan yang baku dan terstandar, sehingga setiap sub kegiatan memiliki keterkaitan yang jelas dengan indikator *outcome* yang diukur. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis perhitungan capaian indikator, penguatan integrasi data sub kegiatan dengan indikator SPM, serta pengembangan sistem *monitoring* dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Dengan demikian, pengukuran capaian SPM tidak hanya berbasis realisasi kegiatan, tetapi juga berbasis hasil (*outcome*) yang terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal di Urusan Kesehatan digunakan sebagai dasar untuk menerapkan standar pelayanan minimal. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebagai Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan SPM Urusan Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang mencakup 12 jenis pelayanan dasar, yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes melitus
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan Kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Kemenkes telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/ Kota, yaitu:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

$$\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja puskesmas tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

$$\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.}}{} \times 100\%$$

persalinan		*Jumlah Sasaran Ibu Bersalin di Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja puskesmas tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)*	

c. Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	=	*Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir* / *Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama*	*x 100%*

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	=	*Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar* / *Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama*	x 100%

e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang	

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	=	*ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran* *Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama*	x 100%

f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	=	*Jumlah orang usia 15–59 tahun di wilayah kerja Puskesmas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standard dalam kurun waktu satu tahun* *Jumlah orang usia 15–59 tahun di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama*	x 100%

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	=	*Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun (numerator)* *Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja PKM dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)*	*x 100%*

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

$$\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

$$\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah}} \times 100\%$$

kerjanya dalam kurun waktu satu tahun yang sama

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)

$$\text{Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu tahun yang sama}} \times 100\%$$

l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

$$\text{Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh daerah adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik di Tahun Anggaran 2025 sebagai OPD pelaksana SPM Bidang Kesehatan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.1 Target SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat layanan kesehatan	16.462 orang	Tahun 2025	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1362 Ampul	Tahun 2025
					2. Tablet tambah darah (180 tablet X jumlah ibu hamil)	2963160 Tablet	Tahun 2025
					3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	16462 paket	Tahun 2025
					4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	16462 Paket	Tahun 2025
					5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	16462 Paket	Tahun 2025
					6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2469 Paket	Tahun 2025
					7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining Triple Eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	16462 Paket	Tahun 2025
					8. Kartu ibu/rekam medis ibu	16462 Paket	Tahun 2025
					9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9993 Buku	Tahun 2025
					10. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	325 Paket	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	489 Botol	Tahun 2025
					12. Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal: dengan rasio 1;2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1;16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	147 Orang	Tahun 2025
					13. Tenaga kesehatan: Perawat (angka ideal: dengan rasio 1:885 penduduk)	132 Orang	Tahun 2025
					14. Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)	314 Orang	Tahun 2025
					15. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	20 Orang	Tahun 2025
					16. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	32 Orang	Tahun 2025
					17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada	16462 Orang	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	16.462 orang	Tahun 2025	1. Formulir Partograf	16462 Formulir	Tahun 2025
					2. Kartu ibu (rekam medis)	16462 Paket	Tahun 2025
					3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2469 Buku	Tahun 2025
					4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	320 Paket	Tahun 2025
					5. Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	147 Orang	Tahun 2025
					6. Tenaga kesehatan: Bidan	132 Orang	Tahun 2025
					7. Tenaga kesehatan: Perawat	314 Orang	Tahun 2025
					8. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	32 Orang	Tahun 2025
					9. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	32 Orang	Tahun 2025
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan	16.259 Oarng	Tahun 2025	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	16259 Vaksin	Tahun 2025
					2. Vitamin K1 injeksi	16259 Ampul	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		kesehatan			3. Salep/tetes mata antibiotik	16259 Orang	Tahun 2025
					4. Formulir bayi baru lahir	16259 Formulir	Tahun 2025
					5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	48777 Formulir	Tahun 2025
					6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	7487 Buku	Tahun 2025
					7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	320 Paket	Tahun 2025
					8. Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis Anak	53 Orang	Tahun 2025
					9. Tenaga kesehatan: Bidan	132 Orang	Tahun 2025
					10. Tenaga kesehatan: Perawat	149 Orang	Tahun 2025
					11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	20 Orang	Tahun 2025
					12. Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	35 Orang	Tahun 2025
					13. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	35 Orang	Tahun 2025
					14. Kader Kesehatan	1337 Orang	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	76.109 Orang	Tahun 2025	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	22.833 Dokumen	Tahun 2025
					2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	53.276 Formulir	Tahun 2025
					3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	70.979 Orang	Tahun 2025
					4. Vitamin A Biru	28.576 Kapsul	Tahun 2025
					5. Vitamin A Merah	240.449 Kapsul	Tahun 2025
					6. Vaksin imunisasi dasar: B CG	23.795 Vaksin	Tahun 2025
					7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	95.544 Vaksin	Tahun 2025
					8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	47.772 Vaksin	Tahun 2025
					9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	71.658 Vaksin	Tahun 2025
					10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubela	23.886 Vaksin	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					11. Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB -Hib	23.929 Vaksin	Tahun 2025
					12. Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	23.929 Vaksin	Tahun 2025
					13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	137.394 Unit	Tahun 2025
					14. Peralatan Anafilaktik	778 Paket	Tahun 2025
					15. Formula Terapi Gizi Buruk	250 Paket	Tahun 2025
					16.Tenaga medis: Dokter	149 Orang	Tahun 2025
					17.Tenaga medis: Bidan	132 Orang	Tahun 2025
					18. Tenaga kesehatan: Perawat	149 Orang	Tahun 2025
					19. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	35 Orang	Tahun 2025
					20. Guru PAUD	5794 Orang	Tahun 2025
					21. Kader Kesehatan	1337 Orang	Tahun 2025
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan	186.069 Orang	Tahun 2025	1. Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	186.069 Buku	Tahun 2025
					2. Form pencatatan /Buku pemantauan kesehatan	27.672 Buku	Tahun 2025
					3. Kuesioner skrining kesehatan	110.687 Dokumen	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		kesehatan			4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	186.069 Formulir	Tahun 2025
					5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	16.604 Formulir	Tahun 2025
					6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	3.108.716 Tablet	Tahun 2025
					7. Alat Pemeriksaan Hb	64 Alat	Tahun 2025
					8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	18.448 Strip	Tahun 2025
					9. Media promosi kesehatan	574 Paket	Tahun 2025
					10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	73.791 Vaksin	Tahun 2025
					11. Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	147 Orang	Tahun 2025
					12. Tenaga kesehatan: Bidan	132 Orang	Tahun 2025
					13. Tenaga kesehatan: Perawat	314 Orang	Tahun 2025
					14. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	32 Orang	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					15. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	32 Orang	Tahun 2025
					16. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	32 Orang	Tahun 2025
					17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	427 Orang	Tahun 2025
					18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	427 Orang	Tahun 2025
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	887.789 Orang	Tahun 2025	1. Media promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	8.878 Paket	Tahun 2025
					2. Alat ukur lingkar lengan atas (ULA)	1.174 Unit	Tahun 2025
					3. Alat: Tensimeter	367 Unit	Tahun 2025
					4. Alat: Glukometer	367 8 Unit	Tahun 2025
					5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	32 Unit	Tahun 2025
					6.Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	887.789 Paket	Tahun 2025
					7. Alat: KIT IVA Tes	32 Unit	Tahun 2025
					8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	8.247 Unit	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					9. Kit Opthalmologi Komunitas	32 Unit	Tahun 2025
					10. Kuesioner PUMA	139.087 Dokumen	Tahun 2025
					11. Alat Pelayanan KB	600 Unit	Tahun 2025
					a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	350 Unit	Tahun 2025
					b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	250 Unit	Tahun 2025
					c. Vasektomi set	0 Unit	Tahun 2025
					12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1 Dokumen	Tahun 2025
					13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	2724 Vaksin	Tahun 2025
					14. Tenaga medis: Dokter	147 Orang	Tahun 2025
					15. Tenaga medis: Bidan	132 Orang	Tahun 2025
					16. Tenaga kesehatan: Perawat	314 Orang	Tahun 2025
					17. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	32 Orang	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					18. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	32 Orang	Tahun 2025
					19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	1337 Orang	Tahun 2025
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	170.496 Orang	Tahun 2025	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	254 Paket	Tahun 2025
					2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	367 Paket	Tahun 2025
					3. Alat pemeriksaan kolesterol	367 Paket	Tahun 2025
					4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	170.496 Paket	Tahun 2025
					5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	32 Paket	Tahun 2025
					6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	32 Buku	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	53 Paket	Tahun 2025
					8. Tenaga kesehatan: Dokter	53 Orang	Tahun 2025
					9. Tenaga kesehatan: Bidan	74 Orang	Tahun 2025
					10. Tenaga kesehatan: Perawat	106 Orang	Tahun 2025
					11. Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	32 Orang	Tahun 2025
					12. Tenaga Kesehatan Masyarakat	32 Orang	Tahun 2025
					13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	1337 Orang	Tahun 2025
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	98.476 Orang	Tahun 2025	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	32 Paket	Tahun 2025
					2. Obat Hipertensi	98.476 Paket	Tahun 2025
					3. Tensimeter	1.750 Unit	Tahun 2025
					4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1 Dokumen	Tahun 2025
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	32 Paket	Tahun 2025
					6. Tenaga kesehatan: Dokter	147 Orang	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					7. Tenaga kesehatan: Bidan	132 Orang	Tahun 2025
					8. Tenaga kesehatan: Perawat	314 Orang	Tahun 2025
					9. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	32 Orang	Tahun 2025
					10. Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	32 Orang	Tahun 2025
					11. Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	32 Orang	Tahun 2025
					12. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	32 Orang	Tahun 2025
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	46.550 Orang	Tahun 2025	1. Obat Diabetes Melitus	46.550 Paket	Tahun 2025
					2. Fotometer atau Glukometer	1750 Unit	Tahun 2025
					3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	46.550 Unit	Tahun 2025
					4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus	46.550 Formulir	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					(Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)		
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	32 Pedoman	Tahun 2025
					6. Tenaga kesehatan: Dokter	147 Orang	Tahun 2025
					7. Tenaga kesehatan: Bidan	132 Orang	Tahun 2025
					8. Tenaga kesehatan: Perawat	314 Orang	Tahun 2025
					9. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	32 Orang	Tahun 2025
					10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	32 Orang	Tahun 2025
					11. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	32 Orang	Tahun 2025
					12. Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	32 Orang	Tahun 2025
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga negara dengan ganguan jiwa berat yang mendapatkan layanan	2.540 Orang	Tahun 2025	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	32 Buku	Tahun 2025
					2. Penyediaan Psikofarmaka	2.540 Paket	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		kesehatan			3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	2.540 Formulir	Tahun 2025
					4.Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	2540 Formulir	Tahun 2025
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	32 Media	Tahun 2025
					6. Tenaga kesehatan: Dokter	32 Orang	Tahun 2025
					7. Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	32 Orang	Tahun 2025
					8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	32 Orang	Tahun 2025
					9. Tenaga profesional lainnya	32 Orang	Tahun 2025
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan	19.217 Orang	Tahun 2025	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	115 Paket	Tahun 2025
					2. Reagen Zn TB	500 Kit	Tahun 2025
					3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	4.227 Paket	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		layanan kesehatan			4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	23.792 Paket	Tahun 2025
					5. Catridge tes cepat molekuler	19.565 Tes	Tahun 2025
					6. Formulir pencatatan dan pelaporan	1 Dokumen	Tahun 2025
					7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	10 Dokumen	Tahun 2025
					8. Tubeerkulin	200 Vial	Tahun 2025
					9. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	115 Orang	Tahun 2025
					10. Tenaga kesehatan: Perawat	115 Orang	Tahun 2025
					11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	115 Orang	Tahun 2025
					12. Tenaga kesehatan masyarakat	32 Orang	Tahun 2025
					13. Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	53 Orang	Tahun 2025
					14. Tenaga kesehatan: Radiografer	19 Orang	Tahun 2025
					15. Kader Kesehatan	508 Orang	Tahun 2025
12	Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah warga negara dengan	19.402 Orang	Tahun 2025	1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	115 Paket	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
	Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	20910 Tes	Tahun 2025
					3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	19402 Paket	Tahun 2025
					4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	19402 Paket	Tahun 2025
					5. Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	21 Orang	Tahun 2025
					6. Tenaga kesehatan: Bidan	53 Orang	Tahun 2025
					7. Tenaga kesehatan: Perawat	53 Orang	Tahun 2025
					8. Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	53 Orang	Tahun 2025
					9. Tenaga kesehatan masyarakat	32 Orang	Tahun 2025
					10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	32 Orang	Tahun 2025

4.2.3 Realisasi

Hasil Capaian adalah realisasi dari target yang dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Realisasi pencapaian seluruh indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2025 mencapai 97,93%. Berikut rincian capaian urusan kesehatan di Kabupaten Gresik:

Tabel 4.2.3.1 Realisasi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 93.18 %**	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat layanan kesehatan (80% X 91.59 % -=73.27 %)	16.462 orang	15.078 orang	91.59 %	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 99.51 = 19.90 %)			**99.51 %**
						1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1362 Ampul	1362 Ampul	100%
						2. Tablet tambah darah (180 tablet X jumlah ibu hamil)	2963160 Tablet	2.963.160 Tablet	100%
						3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	16462 paket	16.462 paket	100%
						4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	16462 Paket	16.462 Paket	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	16462 Paket	16.462 Paket	100%
						6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2469 Paket	2.469 Paket	100%
						7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining Triple Eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	16462 Paket	16.462 Paket	100%
						8. Kartu ibu/rekam medis ibu	16462 Paket	16.462 Paket	100%
						9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9993 Buku	9.993 Buku	100%
						10. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	325 Paket	325 Paket	100%
						11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG)	489 Botol	489 Botol	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						(proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)			
						12.Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal: dengan rasio 1;2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1;16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	147 Orang	147 Orang	100%
						13. Tenaga kesehatan: Perawat (angka ideal: dengan rasio 1:885 penduduk)	132 Orang	132 Orang	100%
						14. Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)	314 Orang	314 Orang	100%
						15. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	20 Orang	20 Orang	100%
						16. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	32 Orang	32 Orang	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	16.462 Orang	15.078 orang	91.59 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 96.09 %	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan (80% X 95.11% = 76.09 %)	16.462 orang	15.657 orang	95.11 %	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 100% = 20%)			100%
						1. Formulir Partograf	16462 Formulir	16462 Formulir	100%
						2. Kartu ibu (rekam medis)	16462 Paket	16462 Paket	100%
						3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2469 Buku	2469 Buku	100%
						4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	320 Paket	320 Paket	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						5. Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	147 Orang	147 Orang	100%
						6. Tenaga kesehatan: Bidan	132 Orang	132 Orang	100%
						7. Tenaga kesehatan: Perawat	314 Orang	314 Orang	100%
						8. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	32 Orang	32 Orang	100%
						9. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	32 Orang	32 Orang	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 96.23%	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (80% X 95.28% = 76.23%)	16.259 Orang	15492 Orang	95.28%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 100% = 20%)			100%
						1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	16259 Vaksin	16259 Vaksin	100%
						2. Vitamin K1 injeksi	16259 Ampul	16259 Ampul	100%
						3. Salep/tetes mata antibiotik	16259 Orang	16259 Orang	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						4. Formulir bayi baru lahir	16259 Formulir	16259 Formulir	100%
						5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	48777 Formulir	48777 Formulir	100%
						6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	7487 Buku	7487 Buku	100%
						7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	320 Paket	320 Paket	100%
						8. Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis Anak	53 Orang	53 Orang	100%
						9. Tenaga kesehatan: Bidan	132 Orang	132 Orang	100%
						10. Tenaga kesehatan: Perawat	149 Orang	149 Orang	100%
						11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	20 Orang	20 Orang	100%
						12. Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	35 Orang	35 Orang	100%
						13. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	35 Orang	35 Orang	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						14. Kader Kesehatan	1337 Orang	1337 Orang	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita 90.94**%**	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan (80% X 88.67 % = 70.94 %)	76.109 Orang	67488 Orang	88.67%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 100% = 20%)			100%
						1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	22.833 Dokumen	22.833 Dokumen	100%
						2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	53.276 Formulir	53.276 Formulir	100%
						3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	70.979 Orang	70.979 Orang	100%
						4. Vitamin A Biru	28.576 Kapsul	28.576 Kapsul	100%
						5. Vitamin A Merah	240.449 Kapsul	240.449 Kapsul	100%
						6. Vaksin imunisasi dasar: B CG	23.795 Vaksin	23.795 Vaksin	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	95.544 Vaksin	95.544 Vaksin	100%
						8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	47.772 Vaksin	47.772 Vaksin	100%
						9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	71.658 Vaksin	71.658 Vaksin	100%
						10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubela	23.886 Vaksin	23.886 Vaksin	100%
						11. Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB -Hib	23.929 Vaksin	23.929 Vaksin	100%
						12. Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	23.929 Vaksin	23.929 Vaksin	100%
						13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	137.394 Unit	137.394 Unit	100%
						14. Peralatan Anafilaktik	778 Paket	778 Paket	100%
						15. Formula Terapi Gizi Buruk	250 Paket	250 Paket	100%
						16.Tenaga medis: Dokter	149 Orang	149 Orang	100%
						17.Tenaga medis: Bidan	132 Orang	132 Orang	100%
						18. Tenaga kesehatan: Perawat	149 Orang	149 Orang	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						19. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	35 Orang	35 Orang	100%
						20. Guru PAUD	5794 Orang	5794 Orang	100%
						21. Kader Kesehatan	1337 Orang	1337 Orang	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 99.04**%**	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (80% X 98.80% = 79.04%)	186.069 Orang	183827 Orang	98.80%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 100% = 20%)			100%
						1. Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	186.069 Buku	186.069 Buku	100%
						2. Form pencatatan /Buku pemantauan kesehatan	27.672 Buku	27.672 Buku	100%
						3. Kuesioner skrining kesehatan	110.687 Dokumen	110.687 Dokumen	100%
						4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	186.069 Formulir	186.069 Formulir	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	16.604 Formulir	16.604 Formulir	100%
						6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	3.108.716 Tablet	3.108.716 Tablet	100%
						7. Alat Pemeriksaan Hb	64 Alat	64 Alat	100%
						8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	18.448 Strip	18.448 Strip	100%
						9. Media promosi kesehatan	574 Paket	574 Paket	100%
						10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	73.791 Vaksin	73.791 Vaksin	100%
						11. Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	147 Orang	147 Orang	100%
						12. Tenaga kesehatan: Bidan	132 Orang	132 Orang	100%
						13. Tenaga kesehatan: Perawat	314 Orang	314 Orang	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						14. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	32 Orang	32 Orang	100%
						15. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	32 Orang	32 Orang	100%
						16. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	32 Orang	32 Orang	100%
						17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	427 Orang	427 Orang	100%
						18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	427 Orang	427 Orang	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 99.65 **%**	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan	887.789 Orang	957.822 Orang	100**%**	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 98.25 % = 19.65%)			98.25 %
						1. Media promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	8.878 Paket	8.878 Paket	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
		kesehatan (80% X 100% = 80%)				2. Alat ukur lingkar lengan atas (ULA)	1.174 Unit	1.174 Unit	100%
						3. Alat: Tensimeter	367 Unit	367 Unit	100%
						4. Alat: Glukometer	367 8 Unit	367 8 Unit	100%
						5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	32 Unit	32 Unit	100%
						6.Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	887.789 Paket	887.789 Paket	100%
						7. Alat: KIT IVA Tes	32 Unit	32 Unit	100%
						8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	8.247 Unit	8.247 Unit	100%
						9. Kit Opthalmologi Komunitas	32 Unit	32 Unit	100%
						10. Kuesioner PUMA	139.087 Dokumen	139.087 Dokumen	100%
						11. Alat Pelayanan KB	600 Unit	600 Unit	100%
						a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	350 Unit	350 Unit	100%
						b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	250 Unit	250 Unit	100%
						c. Vasektomi set	0 Unit	0 Unit	0%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	2724 Vaksin	2724 Vaksin	100%
						14. Tenaga medis: Dokter	147 Orang	147 Orang	100%
						15. Tenaga medis: Bidan	132 Orang	132 Orang	100%
						16. Tenaga kesehatan: Perawat	314 Orang	314 Orang	100%
						17. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	32 Orang	32 Orang	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 100%	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (80% X 100% = 80%)	170.496 Orang	173014 Orang	100%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 100% = 20%)			100%
						1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	254 Paket	254 Paket	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	367 Paket	367 Paket	100%
						3. Alat pemeriksaan kolesterol	367 Paket	367 Paket	100%
						4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	170.496 Paket	170.496 Paket	100%
						5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	32 Paket	32 Paket	100%
						6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	32 Buku	32 Buku	100%
						7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	53 Paket	53 Paket	100%
						8. Tenaga kesehatan: Dokter	53 Orang	53 Orang	100%
						9. Tenaga kesehatan: Bidan	74 Orang	74 Orang	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						10. Tenaga kesehatan: Perawat	106 Orang	106 Orang	100%
						11. Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	32 Orang	32 Orang	100%
						12. Tenaga Kesehatan Masyarakat	32 Orang	32 Orang	100%
						13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	1337 Orang	1337 Orang	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100%	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan (80% X 100% =	98.476 Orang	98.476 Orang	100%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 100% = 20%)			100%
						1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	32 Paket		
						2. Obat Hipertensi	98.476 Paket		
						3. Tensimeter	1.750 Unit		

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
		80%)				4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1 Dokumen		
						5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	32 Paket		
						6. Tenaga kesehatan: Dokter	147 Orang		
						7. Tenaga kesehatan: Bidan	132 Orang		
						8. Tenaga kesehatan: Perawat	314 Orang		
						9. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	32 Orang		
						10. Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	32 Orang		
						11. Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	32 Orang		
						12. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	32 Orang		
9	Pelayanan Kesehatan	Jumlah warga negara	46.550 Orang	48499 Orang	100%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayar (20% X 100% = 20%)			100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
	Penderita Diabetes Militus 100%	penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan (80% X 100% = 80%)				1. Obat Diabetes Melitus	46.550 Paket	46.550 Paket	100%
						2. Fotometer atau Glukometer	1750 Unit	1750 Unit	100%
						3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	46.550 Unit	46.550 Unit	100%
						4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	46.550 Formulir	46.550 Formulir	100%
						5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	32 Pedoman	32 Pedoman	100%
						6. Tenaga kesehatan: Dokter	147 Orang	147 Orang	100%
						7. Tenaga kesehatan: Bidan	132 Orang	132 Orang	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						8. Tenaga kesehatan: Perawat	314 Orang	314 Orang	100%
						9. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	32 Orang	32 Orang	100%
						10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	32 Orang	32 Orang	100%
						11. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	32 Orang	32 Orang	100%
						12. Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	32 Orang	32 Orang	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 100%	Jumlah warga negara dengan ganguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan (80% X 100% = 80%)	2.540 Orang	2543 Orang	100%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayar (20% X 100% = 20%)			100%
						1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	32 Buku	32 Buku	100%
						2. Penyediaan Psikofarmaka	2.540 Paket	2.540 Paket	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	2.540 Formulir	2.540 Formulir	100%
						4.Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	2540 Formulir	2540 Formulir	100%
						5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	32 Media	32 Media	100%
						6. Tenaga kesehatan: Dokter	32 Orang	32 Orang	100%
						7. Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	32 Orang	32 Orang	100%
						8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	32 Orang	32 Orang	100%
						9. Tenaga profesional lainnya	32 Orang	32 Orang	100%
11	Pelayanan Kesehatan	Jumlah warga negara terduga	19.217 Orang	26.686 Orang	100%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayar (20% X 100% = 20%)			100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
	Orang Terduga Tuberkulosis 100%	tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan (80% X 100% = 80%)				1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	115 Paket	115 Paket	100%
						2. Reagen Zn TB	500 Kit	500 Kit	100%
						3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	4.227 Paket	4.227 Paket	100%
						4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	23.792 Paket	23.792 Paket	100%
						5. Catridge tes cepat molekuler	19.565 Tes	19.565 Tes	100%
						6. Formulir pencatatan dan pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
						8. Tubeerkulin	200 Vial	200 Vial	100%
						9. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	115 Orang	115 Orang	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						10. Tenaga kesehatan: Perawat	115 Orang	115 Orang	100%
						11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	115 Orang	115 Orang	100%
						12. Tenaga kesehatan masyarakat	32 Orang	32 Orang	100%
						13. Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	53 Orang	53 Orang	100%
						14. Tenaga kesehatan: Radiografer	19 Orang	19 Orang	100%
						15. Kader Kesehatan	508 Orang	508 Orang	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahka	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human	19.402 Orang	22.822 Orang	100%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayar (20% X 100% = 20%)			100%
						1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	115 Paket	115 Paket	100%
						2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	20910 Tes	20910 Tes	100%
						3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab,	19402 Paket	19402 Paket	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
	n Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 100%	Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan (80% X 100% = 80%)				Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai			
						4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	19402 Paket	19402 Paket	100%
						5. Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	21 Orang	21 Orang	100%
						6. Tenaga kesehatan: Bidan	53 Orang	53 Orang	100%
						7. Tenaga kesehatan: Perawat	53 Orang	53 Orang	100%
						8. Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	53 Orang	53 Orang	100%
						9. Tenaga kesehatan masyarakat	32 Orang	32 Orang	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	32 Orang	32 Orang	100%

4.2.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Ketersediaan dan realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.4.1 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan
	URUSAN KESEHATAN KAB.GRESIK	**9,484,436,233**	**8,674,498,988**	**91.46 %**
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9,484,436,233	8,674,498,988	91.46 %
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9,484,436,233	8,674,498,988	91.46 %
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	760,000,000	713,012,500	93.82 %
	2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	335,733,500	303,913,950	90.52 %
	3.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	717,633,178	564,704,150	78.69 %
	4.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	400,953,500	305,391,750	76.17 %
	5.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	633,791,900	619,818,300	97.80 %
	6.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	227,734,000	215,629,000	94.68 %
	7.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	138,955,000	117,208,000	84.35 %
	8.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25,000,000	19,276,368	77.11 %

No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan
	9.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	2,527,256,530	2,246,660,950	88.90 %
	10.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	25,000,000	23,412,920	93.65 %
	11.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	3,013,278,500	2,923,727,900	97.03 %
	12.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	679,100,125	621,743,200	91.55 %

4.2.5 Dukungan Personil

Ketersediaan sumber daya manusia dalam upaya memberikan pelayanan minimal urusan kesehatan yang sesuai standar di Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.5.1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis / Kualifikasi	Keterangan	Jumlah
1.	**JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)**		**1**
	a. Eselon 2	Kepala Dinas	1
	Pangkat / Golongan	Pembina Utama Muda/IV.c	1
	Pendidikan	S2	1
2	**ADMINISTRATOR**		**5**
	a. Eselon 2	Sekretaris.	1
		Kepala Bidang	4
	Pangkat / Golongan	Pembina Tk. I	2
		Pembina	3
	Pendidikan	S2	4
		S1	1
3.	**JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)**		
	a. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi		**2**
	Pangkat / Golongan		
		Penata Muda Tk. I	1
		Penata Tk. I	1
	Pendidikan	S2	2

No	Jenis / Kualifikasi	Keterangan	Jumlah
	b. Dokter spesialis anak		**3**
	Pangkat / Golongan	Pembina Tk I	1
		Pembina	1
		Penata Tk. I	1
	Pendidikan	S2	1
	b.Dokter Umum		**149**
	Pangkat / Golongan	Pembina Muda Tk I	52
		Penata	20
		Penata Tk. I	18
		Pembina	4
		Pembina Tk. I	16
		Pembina Utama Muda	19
		PPPK	20
	Pendidikan	S2	7
		S1	142
	c. Dokter gigi		**43**
	Pangkat / Golongan	Pembina Muda Tk I	6
		Penata	9
		Penata Tk. I	5
		Pembina	1
		Pembina Tk. I	12
		Pembina Utama Muda	2
		PPPK	8
	Pendidikan	S2	0
		S1	43
	d. Perawat		**885**
	Pangkat / Golongan	Pengatur	2
		Pengatur Tk. I	124
		Penata Muda	8
		Penata Muda Tk. I	133
		Penata	38
		Penata Tk. I	85
		Pembina	3

No	Jenis / Kualifikasi	Keterangan	Jumlah
		Pembina Tk.I	8
		Pembina Utama Muda	11
		PPPK – D3	408
		PPPK – Profesi	65
	Pendidikan	S2	2
		S1	222
		D3	661
	e. Bidan		**670**
	Pangkat / Golongan	Pengatur	0
		Pengatur Tk. I	113
		Penata Muda	52
		Penata Muda Tk. I	135
		Penata	26
		Penata Tk. I	101
		Pembina Tk. I	1
		PPPK - D3	242
	Pendidikan	S1	585
		D3	85
	f. Tenaga Kefarmasian		**111**
	Pangkat / Golongan	Pengatur	0
		Pengatur Tk. I	22
		Penata Muda	0
		Penata Muda Tk. I	32
		Penata	9
		Penata Tk. I	11
		Pembina Tk. I	7
		Pembina Utama Muda	3
		PPPK - D3	15
		PPPK – S1	12
	Pendidikan	S1	51
		D3	60
	g. Tenaga Kesehatan Masyarakat		**52**
	Pangkat / Golongan	Penata Muda	5

No	Jenis / Kualifikasi	Keterangan	Jumlah
		Penata Muda Tk. I	24
		Penata	1
		Penata Tk. I	3
		Pembina Utama Muda	1
		PPPK – S1	7
		PPPK – D3	11
	Pendidikan	S2	0
		S1	40
		D3	12
	h. Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)		**112**
	Pangkat / Golongan	Pengatur	0
		Pengatur Tk. I	38
		Penata Muda	3
		Penata Muda Tk. I	6
		Penata	7
		Penata Tk. I	14
		Pembina	2
		Pembina Utama Muda	1
	Pendidikan	S1	8
		D3	104
	i. Radiografer		**14**
	Pangkat / Golongan	Pengatur	2
		Pengatur Tk. I	4
		Penata Muda	1
		Penata Muda Tk. I	5
		Penata	2
	Pendidikan	D4	4
		D3	10
	TOTAL		**2.047**

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun Permasalahan dan Solusi yang ada dalam pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan antara lain:

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil

Salah satu tantangan dalam pencapaian target indikator pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Gresik disebabkan oleh tingginya mobilitas ibu hamil, serta adanya ibu hamil yang tidak memiliki tempat tinggal tetap (*nomaden*) atau mengikuti suami/ keluarga dengan pekerjaan tidak tetap. Kondisi tersebut menjadi kendala tersendiri dalam proses pencatatan dan pelaporan SPM indikator pelayanan kesehatan ibu hamil.

Standar kuantitas indikator pelayanan kesehatan ibu hamil adalah minimal 6 (enam) kali kunjungan selama periode kehamilan (K6). Namun demikian, masih ditemukan K1 akses yang merupakan kontak pertama ibu hamil dengan petugas kesehatan yang tidak dilakukan pada trimester pertama (usia kehamilan ≤ 12 minggu), melainkan setelah usia kehamilan > 12 minggu. Keterlambatan kunjungan pertama (K1 ≥ 12 minggu) berdampak bagi ibu dan janin, antara lain terbatasnya informasi yang diperoleh ibu hamil mengenai perawatan kehamilan yang benar, tidak terdeteksinya secara dini pertumbuhan dan perkembangan janin serta kondisi kesehatan ibu, serta tidak teridentifikasinya tanda bahaya kehamilan sejak awal.

Tidak terdeteksinya tanda bahaya kehamilan sejak dini akibat keterlambatan akses K1 dapat meningkatkan risiko terjadinya abortus pada ibu hamil. Kejadian abortus pada kehamilan sebelum trimester ketiga menjadi salah satu tantangan dalam pencapaian target SPM indikator pelayanan kesehatan ibu hamil.;

b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Salah satu tantangan dalam pencapaian target indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Gresik disebabkan oleh tingginya mobilitas ibu hamil serta masih

adanya ibu bersalin yang berpindah tempat saat persalinan sehingga tidak terlaporkan. Selain itu, tidak terdeteksinya tanda bahaya kehamilan sejak dini akibat keterlambatan K1 akses dapat meningkatkan risiko terjadinya abortus pada ibu hamil. Kejadian abortus pada kehamilan di bawah trimester ketiga tersebut turut menjadi tantangan dalam pencapaian target SPM indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin. Di samping itu, adanya persalinan yang terjadi di luar wilayah Kabupaten Gresik dan tidak tercatat dalam sistem pelaporan juga mempengaruhi capaian kinerja SPM;

c) Pelayanan kesehatan balita

Tantangan dalam upaya pencapaian target SPM pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Gresik antara lain belum optimalnya kehadiran balita ke posyandu pada saat pelaksanaan SDDITK serta adanya penduduk musiman dengan tingkat mobilitas yang tinggi.

d) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Tantangan dalam upaya pencapaian target SPM pelayanan kesehatan usia produktif di Kabupaten Gresik antara lain sasaran usia produktif tidak berada di rumah pada saat dilakukan kunjungan karena bekerja atau bersekolah, serta masih adanya yang lupa terhadap jadwal pelayanan posyandu;

e) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Salah satu permasalahan dalam pelayanan kesehatan usia lanjut adalah masih rendahnya kunjungan lansia ke Puskesmas maupun Posbindu yang disebabkan karena ketidaktahuan atau lupa terhadap jadwal posyandu lansia;

f) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Salah satu permasalahan dalam pencapaian pelaporan pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah pelaporan masih terbatas pada fasilitas kesehatan milik pemerintah, yaitu RSUD dan Puskesmas;

g) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Salah satu tantangan dalam pencapaian SPM pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat (ODGJ) ialah masih adanya anggapan tabu dan malu yang berkembang di masyarakat untuk memeriksakan kesehatan jiwanya di Puskesmas maupun di RS setempat;

h) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

Tantangan dalam pencapaian SPM pelayanan kesehatan orang terduga TB di Kabupaten Gresik ialah pelaporannya terbatas pada fasilitas kesehatan milik pemerintah (RSUD dan Puskesmas);

i) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Tantangan dalam pencapaian SPM pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) di Kabupaten Gresik ialah pelaporannya terbatas pada fasilitas kesehatan milik pemerintah (RSUD dan Puskesmas);

2. Solusi

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan atas permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

a) Pelayanan kesehatan ibu hamil

Untuk mengatasi tantangan dalam pencapaian SPM indikator pelayanan kesehatan pada ibu hamil dapat dilakukan dengan cara memberikan komunikasi, informasi dan edukasi pada ibu hamil tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan (K6) dan bekerja sama dengan pihak swasta (klinik dan RS Swasta) terkait pelayanan kesehatan ibu hamil yang telah dilakukan. Selain itu juga dilakukan kemitraan dengan PKK dan

kader desa untuk melaporkan ke Bidan Desa apabila terdapat warga yang hamil, memantau catin baik yang berKB atau yang tidak ber KB melalui edukasi tentang pentingnya ANC rutin, serta melakukan koordinasi lintas sektor guna mendorong integrasi dalam rangka pencapaian SPM;

b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Untuk mengatasi tantangan dalam pencapaian SPM indikator pelayanan kesehatan pada ibu bersalin dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait terkait data yang digunakan serta melakukan promosi kesehatan dalam hal kesehatan ibu dan anak yang dimulai sejak masa kehamilan hingga pasca persalinan;

c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Untuk mengatasi tantangan dalam pencapaian SPM indikator pelayanan kesehatan bayi baru lahir dapat dilakukan dengan cara memberikan komunikasi, informasi dan edukasi pada keluarga tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan (K4) dan bekerja sama dengan pihak swasta (klinik dan RS Swasta) terkait pelayanan kesehatan ibu hamil yang telah dilakukan. Selain itu juga dilakukan kemitraan dengan PKK dan kader desa untuk melaporkan ke Bidan Desa apabila terdapat warga yang melahirkan, memantau catin baik yang ber KB atau yang tidak ber KB terkait edukasi tentang pentingnya ANC rutin, serta melakukan koordinasi lintas sektor untuk koordinasi lebih lanjut dalam rangka pencapaian SPM;

d) Pelayanan kesehatan balita

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai target SPM pelayanan kesehatan balita yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan kelas balita dan bekerja sama lintas program untuk melakukan kunjungan rumah serta meningkatkan edukasi kepada orang tua bayi dan balita;

e) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk pencapaian pelayanan kesehatan usia produktif antara lain dengan melakukan kunjungan ke rumah sasaran dengan berkoordinasi bersama Bidan Desa maupun Perawat Desa untuk meningkatkan cakupan melalui pembuatan jadwal pelaksanaan Posbindu dan melakukan kunjungan rumah serta kunjungan sekolah;

f) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Adapun strategi yang dapat dilakukan antara lain melaksanakan *sweeping* serta melaksanakan kegiatan posyandu lansia ke desa dengan Prokes yang lebih baik, mengakumulasi data jumlah kunjungan lansia pada laporan Bidan Desa dan Perawat Desa serta meningkatkan promosi kesehatan khususnya dengan sasaran lansia dan keluarga. Selain itu juga dilakukan advokasi dengan Kepala Desa untuk memenuhi kebutuhan stik pemeriksaan (kolesterol, DM dan asam urat) dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD);

g) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Untuk meningkatkan pencapaian SPM pelayanan kesehatan antara lain dengan melakukan kerjasama dengan klinik dan RS Swasta untuk melaporkan pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang telah dilakukan;

h) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

Upaya mencapai target SPM pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bidan Desa maupun Perawat Desa agar segera melaporkan jika ditemukan pasien DM;

i) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Adapun strategi pemecahan masalah dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ ialah melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan (deteksi dini) terhadap pasien ODGJ;

j) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

Untuk meningkatkan capaian SPM pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis antara lain dengan melakukan kerjasama dengan klinik serta RS Swasta untuk melaporkan pelayanan kesehatan;

k) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Untuk meningkatkan capaian SPM pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia antara lain dengan melakukan kerjasama dengan klinik dan juga RS Swasta untuk melaporkan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar sub urusan pekerjaan umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota pada urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik diampu oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jenis pelayanan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum terdiri atas:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan

pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.2.1 Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	3.908 Orang	Tahun 2025	JARINGAN PERPIPAAN		
					Kuantitas SPAM		
					Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	977 Rumah Tangga	Tahun 2025
					Kualitas SPAM		
					Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	977 Rumah Tangga	Tahun 2025
					BUKAN JARINGAN PERPIPAAN		
					Kuantitas SPAM		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	0	Tahun 2025
					Kuantitas SPAM		
					Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	0	Tahun 2025
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	4.392 Orang	Tahun 2025	Kuantitas SPALD.		
					Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	1.098 Rumah Tangga	Tahun 2025
					Kualitas SPALD.		
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	739 Rumah Tangga	Tahun 2025
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)		
					1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	350 Rumah Tangga	Tahun 2025
					2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki	9 Rumah Tangga	Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar		

4.3.3 Realisasi

Hasil realisasi dari target yang telah dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Realisasi pencapaian seluruh indikator Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik Tahun 2025 mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.3.1 Realisasi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100%	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari (80% X 100% = 80%)	3.908 Orang	4.284 Orang	100%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 100% = 20%)			100%
						JARINGAN PERPIPAAN			
						Kuantitas SPAM			
						Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal	977 Rumah Tangga	1.071 Rumah Tangga	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)			
						Kualitas SPAM			
						Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	977 Rumah Tangga	1.071 Rumah Tangga	100%
						BUKAN JARINGAN PERPIPAAN			
						Kuantitas SPAM			
						Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok	0	0	0

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)			
						Kuantitas SPAM			
						Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	0	0	0
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	4.392 Orang	7.492 Orang	100%	Kuantitas SPALD.			
						Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	1.098 Rumah Tangga	1.873 Rumah Tangga	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
		domestik				Kualitas SPALD.			
						Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)			
						Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	739 Rumah Tangga	742 Rumah Tangga	100%
						Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)			
						1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas	350 Rumah Tangga	1.121 Rumah Tangga	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota			
						2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	9 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	100%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran yang dianggarkan dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar Rp 27.852.148.789,5- dan terealisasi sebesar Rp 22.964.001.205,62 (82.45%), yang mana didalamnya terdapat unsur APBD Murni, dan APBD DAK Fisik. Anggaran tersebut dialokasikan untuk peningkatan dan perluasan SPAM jaringan perpipaan, pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Gresik sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara di bidang Pekerjaan Umum. Adapun alokasi dana penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik antara lain:

Tabel 4.3.4.1 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
URUSAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK		**27,852,148,599**	**22,964,001,205**	**82.45%**
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			
	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**18.073.824.100,5**	**13.924.792.056,28**	**77.04 %**
	26. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.252.897.482,90	1.231.319.681,65	98.28%
	30. Fasilitasi Kerja Sama	638.223.939,60	599.366.140,36	93.91%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
32.	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	16.182.702.678	12.094.106.234,27	74.73%
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			
2.	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**	**9.778.324.499**	**9.039.209.149,34**	**92.44%**
19.	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	49.206.689	13.105.357	26.63%
22.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	8.634.170.000	8.018.152.945	92.87%
32.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	223.204.000	203.307.999	91.09%
33.	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	178.812.110	178.804.900	99.99%
38.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan	433.930.000	433.900.000	99.99%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Air Limbah Domestik (SPALD)			
39.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	259.001.700	191.937.948,34	74.11%

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan SPM oleh Kabupaten Gresik bidang urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.5.1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Jenis/ Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
1	**Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama**		**1**
	- Pangkat Golongan :		
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
	- Pendidikan :		
	S2	1	
	Administrator		**1**
	- Pangkat Golongan :		
	Penata Tk.I (III/d)	1	
	- Pendidikan :		
	S1	1	
	Pelaksana / JFU		**14**

No	Jenis/ Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
	- Pangkat Golongan :		
	Pengatur Tk. I (II/d)	4	
	Penata Muda (III/a)	5	
	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	
	Penata (III/c)	1	
	PPPK Paruh Waktu	3	
	- Pendidikan :		
	S1	6	
	D3	5	
	SMA	3	
2	**Jabatan Fungsional Tertentu**		**3**
	- Pangkat Golongan :		
	Penata (III/c)	1	
	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	
	Pengatur (II/c)	1	
	- Pendidikan :		
	D3	1	
	S1	2	
	JUMLAH TOTAL PERSONIL		**19**

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun Permasalahan dan solusi yang ada dalam pelaksanaan SPM di Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

1. Permasalahan

   Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

a) Tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal masih rendah sehingga penyedotan lumpur tinja belum menjadi prioritas masyarakat. Masyarakat hanya akan melakukan penyedotan apabila telah terjadi permasalahan;
b) Usia armada penyedotan lumpur tinja sudah cukup tua sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yg cukup besar untuk meningkatkan kualitas layanan;
c) Kondisi eksisting IPLT yang dibangun pada tahun 2014 membutuhkan *monitoring* dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengolahan lumpur tinja;
d) Pelayanan sanitasi aman di seluruh wilayah kabupaten belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh karena ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) masih terbatas pada 1 unit;
e) Jumlah pengusaha sedot tinja swasta yang mengolah lumpur tinja di IPLT cenderung kecil;
f) Pendataan pelanggan yang melakukan penyedotan melalui pengusaha sedot swasta pengelola lumpur tinja di IPLT belum dilakukan dengan baik;
g) Proses penyaluran dana membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan;

2. Solusi

Upaya atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

a) Melakukan sosialisasi terkait peningkatan sanitasi aman melalui layanan lumpur tinja terjadwal dan pengenalan inovasi KAMPUNG PUDAK AYU (Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan melalui Penyedotan Lumpur Tinja untuk Dasawisma secara Kolektif, Aman, dan Kontinyu);
b) Segera melakukan pemeliharaan armada untuk meningkatkan kualitas layanan;
c) Melakukan penyusunan FS terkait peningkatan IPLT oleh Bappeda Gresik;

d) Penyusunan *masterplan* pengelolaan air limbah domestik untuk menentukan sistem yang akan digunakan serta lokasi yang sesuai;
e) Melakukan sosialisasi kepada pengusaha sedot swasta untuk melakukan pengolahan di IPLT;
f) Melakukan sosialisasi kepada pengusaha sedot swasta yang mengolah lumpur tinja di IPLT untuk melakukan pendataan pelanggan dengan baik sebagai data dasar penghitungan sanitasi aman;
g) Percepatan pekerjaan dengan menambah tenaga kerja untuk mencapai target pekerjaan.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, Standar Pelayanan Minimal sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas:

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan oleh daerah itu sendiri. Adapun jenis pelayanan dasar SPM bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota

   Penerima layanan dasar SPM Perumahan Rakyat merupakan jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

Penerima layanan dasar SPM Perumahan Rakyat merupakan jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.2.1 Target Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	936 Orang	Tahun 2025	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	130 Rumah	Tahun 2025
					2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	104 Rumah	
					3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	0	
					4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	0	Tahun 2025	Pada tahun 2025 tidak terdapat program relokasi pemerintah		Tahun 2025

4.4.3 Realisasi

Hasil realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Tahun 2025 capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik mencapai angka 96,06% dengan dua jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 4.4.3.1 Realisasi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100%	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari (80% X 100% = 80%)	3.908 Orang	4.284 Orang	100%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 100% = 20%)			100%
						JARINGAN PERPIPAAN			
						Kuantitas SPAM			
						Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	977 Rumah Tangga	1.071 Rumah Tangga	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						Kualitas SPAM			
						Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	977 Rumah Tangga	1.071 Rumah Tangga	100%
						BUKAN JARINGAN PERPIPAAN			
						Kuantitas SPAM			
						Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	0	0	0
						Kuantitas SPAM			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	0	0	0
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	4.392 Orang	7.492 Orang	100%	Kuantitas SPALD.			
						Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	1.098 Rumah Tangga	1.873 Rumah Tangga	100%
						Kualitas SPALD.			
						Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)			
						Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang	739 Rumah Tangga	742 Rumah Tangga	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota			
						Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)			
						1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	350 Rumah Tangga	1.121 Rumah Tangga	100%
						2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki	9 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian
						septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar			

4.4.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran yang dianggarkan dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar Rp 289.027.585,00,- dan terealisasi sebesar Rp 126.491.717,00-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk indikator identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau relokasi program kabupaten/ kota dan pemenuhan pada program lain seperti program pelaksanaan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh dan pengelolaan dana darurat dan mendesak, mengingat Kabupaten Gresik merupakan daerah rawan bencana.

Tabel 4.4.4.1 Anggaran Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. GRESIK	**9.544.027.585**	**9.102.491.171**	**95.37%**
1.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			
1.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			
	1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	60.155.000	48.614.437	80.82%
2.	**Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	228.872.585	77.876.734	34.03%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. GRESIK	**9.544.027.585**	**9.102.491.171**	**95.37%**
2.	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**			
	1. Dana BNPB	9.255.000.000	8.976.000.000	96.99%

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

Tabel 4.4.5.1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Jenis/ Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
1	**Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama**		**1**
	- Pangkat Golongan :		
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
	- Pendidikan :		
	S2	1	
	Administrator		**1**
	- Pangkat Golongan :		
	Penata Tk.I (III/d)	1	
	- Pendidikan :		
	S1	1	
	Pelaksana / JFU		**14**
	- Pangkat Golongan :		

No	Jenis/ Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
	Pengatur Tk. I (II/d)	4	
	Penata Muda (III/a)	5	
	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	
	Penata (III/c)	1	
	PPPK Paruh Waktu	3	
	- Pendidikan :		
	S1	6	
	D3	5	
	SMA	3	
2	**Jabatan Fungsional Tertentu**		**3**
	- Pangkat Golongan :		
	Penata (III/c)	1	
	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	
	Pengatur (II/c)	1	
	- Pendidikan :		
	D3	1	
	S1	2	
	JUMLAH TOTAL PERSONIL		**19**

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, serta langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM di bidang urusan perumahan rakyat diantaranya:

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan

pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

a) Belum optimalnya ketersediaan basis data;
b) Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi sehingga perencanaan dan penganggaran untuk rumah korban bencana di awal tahun tidak dilakukan pada pagu APBD;
c) Beberapa penerima bantuan kesulitan menyiapkan data/ dokumen administrasi sehingga pencairan dana mengalami keterlambatan;
d) Kondisi cuaca ekstrem dan lokasi dampak bencana yang berada di kepulauan dan area perbukitan yang sulit dijangkau;

2. Solusi

Upaya atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

a) Melakukan perencanaan kegiatan pada tahun 2025 untuk identifikasi dan pendataan guna melengkapi kekurangan data-data yang belum terakomodir pada tahun 2024;
b) Mengajukan bantuan ke BNPB;
c) Melakukan pendataan secara berkelanjutan menyesuaikan kondisi di lapangan;
d) Melakukan koordinasi dengan BNPB terkait kendala yang dialami;
e) Dilakukan pendampingan dan kerjasama dengan perangkat desa terkait kelengkapan dokumen administrasi

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibumlinmas adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/ Kota. Adapun SPM bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

Tabel 4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Kategori	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Kategori pencapaian Trantibum	1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2	Kategori pencapaian kebencanaan	1. Pelayanan informasi rawan bencana
		2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
3	Kategori pencapaian damkar	1. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Damkar)
		2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
		3. Pelayanan Pemadaman Kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun target SPM di bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

Tabel 4.5.2.1 Target SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

- Kategori Pencapaian **Trantibum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM							
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (TRANTIBUM)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	1490 Orang	Tahun 2025	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	125 Unit	Tahun 2025
					2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan,	1 Dokumen	Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)		
					3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	105 Orang	Tahun 2025
					4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	1 Dokumen	Tahun 2025
					5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda	0	Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)		
					6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	0	Tahun 2025

➢ Kategori Pencapaian **Kebencanaan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN							
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	654.446 Orang	Tahun 2025	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana		
					a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	1 Dokumen	Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		informasi rawan bencana			b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	1 Dokumen	Tahun 2025
					2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		
					1). Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana		
					a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	20 eksemplar	Tahun 2025
					b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	23 desa	Tahun 2025
					c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	1 orang	Tahun 2025
					d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	6 orang	Tahun 2025
					2). Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia		
					a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	11 media	Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	11 buah	Tahun 2025
					c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	5 unit	Tahun 2025
					d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	5 unit	Tahun 2025
					e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	5 orang	Tahun 2025
					3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik		
					a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	105 buah	Tahun 2025
					b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	5 buah	Tahun 2025
					c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	3 orang	Tahun 2025
					d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	3 orang	Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	3 orang	Tahun 2025
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	91.337 Orang	Tahun 2025	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana *Ada : Sudah Lama dibuat (masih berlaku s/d saat ini)*		
					a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada perkada	1 dokumen	Tahun 2025
					b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk dilegalkan sebagai lampiran perkada	1 dokumen	Tahun 2025
					2. Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		
					a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	1 dokumen	Tahun 2025
					b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	1 dokumen	Tahun 2025
					c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	3 orang	Tahun 2025
					d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	6 orang	Tahun 2025
					3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					1). Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur		
					a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Tahun 2025
					b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Tahun 2025
					c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	22 buah	Tahun 2025
					d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Tahun 2025
					e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	1 orang	Tahun 2025
					f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	6 orang	Tahun 2025
					2). Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara		
					a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Tahun 2025
					b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	23 buah	Tahun 2025
					d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	1 orang	Tahun 2025
					e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	6 orang	Tahun 2025
					4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
					1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)		
					a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	0 paket	Tahun 2025
					b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	0 dokumen	Tahun 2025
					c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	0 orang	Tahun 2025
					2) . Gladi Lapang		
					a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	1 dokumen	Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Tahun 2025
					c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	6 orang	Tahun 2025
					5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana		
					1). Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
					a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	365 hari	Tahun 2025
					b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1 pertemuan	Tahun 2025
					c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	1 orang	Tahun 2025
					d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1 orang	Tahun 2025
					e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	5 orang	Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					2). Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana		
					a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	5 unit	Tahun 2025
					b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	9 unit	Tahun 2025
					c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	1 unit	Tahun 2025
					3). Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast		
					a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Tahun 2025
					b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Tahun 2025
					4). Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	7 paket	Tahun 2025
					b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Tahun 2025
					6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
					a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Tahun 2025
					b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Tahun 2025
					c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Tahun 2025
					e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	14 unit	Tahun 2025
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	132.510 Orang	Tahun 2025	Kejadian Bencana		
					1. Respon Cepat Darurat Bencana		
					a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	1 dokumen	Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		penyelamatan dan evakuasi korban bencana			b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	100 orang	Tahun 2025
					2. Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana		
					a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	Tahun 2025
					b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	14 unit	Tahun 2025
					c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	4 unit	Tahun 2025
					d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1 dokumen	Tahun 2025
					e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	1 dokumen	Tahun 2025
					f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	43 orang	Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	15 orang	Tahun 2025
					h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	42 orang	Tahun 2025

➢ Kategori Pencapaian **Pemadam Kebakaran**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR							
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan	651 Orang	Tahun 2025	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	173 Layanan	Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
	kebakaran (DAMKAR)	dan evakuasi korban kebakaran			2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (Upload data dukung)	2 Dokumen	Tahun 2025
					3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	100 Unit	Tahun 2025
					4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	2 Orang	Tahun 2025
					5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	0 Orang	Tahun 2025
					6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	0 Orang	Tahun 2025

4.5.3 Realisasi

Hasil realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Adapun capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Gresik pada tahun 2025 mencapai angka 100% dengan lima jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 4.5.3.1 Realisasi Penerapan SPM Urusan Trantibum Tahun 2025

- Kategori Pencapaian **Trantibum**

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM									
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (TRANTIBUM) 100%	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota (80% X 100% = 80%)	1490 Orang	3716 Orang	100%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 100% = 20%)			100%
						1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	125 Unit	125 Unit	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas	105 Orang	105 Orang	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)			
						4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	0	0	100%

- Kategori Pencapaian **Kebencanaan**

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN									
1					100%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani			100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
	Pelayanan Informasi rawan bencana 100%	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (80% X 100% = 80%)	654.446 Orang	654.446 Orang		(20% X 100% = 20%)			
						1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana			
						a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana			
						1). Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana			

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	20 eksemplar	20 eksemplar	100%
						b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	23 desa	23 desa	100%
						c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	1 orang	1 orang	100%
						d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	6 orang	6 orang	100%
						2). Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia			
						a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	11 media	11 media	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	11 buah	11 buah	100%
						c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	5 unit	5 unit	100%
						d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	5 unit	5 unit	100%
						e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	5 orang	5 orang	100%
						3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik			

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	105 buah	105 buah	100%
						b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	5 buah	5 buah	100%
						c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	3 orang	3 orang	100%
						d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	3 orang	3 orang	100%
						e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	3 orang	3 orang	100%
2	Pelayanan pencegahan dan	Jumlah Warga Negara yang	91.337 Orang	91.337 Orang	100%	Jumlah Mutu Yang Hjarus Dilayanio (20% X 100% = 20%)			100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
	kesiapsiagaan terhadap bencana 100%	memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (80% X 100% = 80%)				1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana *Ada : Sudah Lama dibuat (masih berlaku s/d saat ini)*			
						a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada perkada	1 dokumen	1 dokumen	100%
						b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk dilegalkan sebagai lampiran perkada	1 dokumen	1 dokumen	100%
						2. Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)			
						a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	1 dokumen	1 dokumen	100%
						b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	3 orang	3 orang	100%
						d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	6 orang	6 orang	100%
						3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi			
						1). Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur			
						a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	1 paket	100%
						b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	1 paket	100%
						c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	22 buah	22 buah	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	1 paket	100%
						e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	1 orang	1 orang	100%
						f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	6 orang	6 orang	100%
						2). Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara			
						a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	1 paket	100%
						b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	1 paket	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	23 buah	23 buah	100%
						d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	1 orang	1 orang	100%
						e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	6 orang	6 orang	100%
						4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
						1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)			
						a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	0 paket	0 paket	100%
						b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung	0 dokumen	0 dokumen	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)			
						c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	0 orang	0 orang	100%
						2) . Gladi Lapang			
						a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	1 dokumen	1 dokumen	100%
						b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	1 paket	100%
						c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	6 orang	6 orang	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana			
						1). Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
						a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	365 hari	365 hari	100%
						b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1 pertemuan	1 pertemuan	100%
						c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	1 orang	1 orang	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1 orang	1 orang	100%
						e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	5 orang	5 orang	100%
						2). Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana			
						a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	5 unit	5 unit	100%
						b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	9 unit	9 unit	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	1 unit	1 unit	100%
						3). Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast			
						a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	1 paket	100%
						b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	1 paket	100%
						4). Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini			

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						Kebencanaan berbasis Masyarakat			
						a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	7 paket	7 paket	100%
						b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	1 paket	100%
						6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
						a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	1 paketv	1 paketv	100%
						b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	1 paket	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	1 paket	100%
						e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	14 unit	14 unit	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100%	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (80% X 100% = 80%)	132.510 Orang	161.913 Orang	100%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 100% = 20%)			100%
						Kejadian Bencana			
						1. Respon Cepat Darurat Bencana			
						a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	1 dokumen	1 dokumen	100%
						b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	100 orang	100 orang	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						2. Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana			
						a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket	1 paket	100%
						b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	14 unit	14 unit	100%
						c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	4 unit	4 unit	100%
						d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1 dokumen	1 dokumen	100%
						e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan,	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar & Capaian	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)			
						f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	43 orang	43 orang	100%
						g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	15 orang	15 orang	100%
						h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	42 orang	42 orang	100%

➢ Kategori Pencapaian **Pemadam Kebakaran**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR									
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (DAMKAR) 100%	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (80% X 100% = 80%)	651 Orang	1.006 Orang	100%	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani (20% X 100% = 20%)			100%
						1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	173 Layanan	173 Layanan	100%
						2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (Upload data dukung)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
						3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	100 Unit	100 Unit	100%
						4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan	2 Orang	2 Orang	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						penyelamatan/Sumber Daya Manusia			
						5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	0 Orang	0 Orang	100%
						6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	0 Orang	0 Orang	100%

4.5.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

Tabel 4.5.4.1 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

- Kategori Pencapaian **Trantibum**

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**	**4,672,074,182**	**3,505,327,108**	**75.03%**
	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**2,251,380,232**	**1,198,060,786**	**53.21%**
	2. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1,176,790,950	153,190,950	13.02%
	3. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	579,630,800	573,740,776	98.98%
	14. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui	227,056,757	206,228,600	90.83%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
15.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	267,901,725	264,900,460	**98.88** %
	2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**2,377,476,750**	**2,278,009,322**	**95.82 %**
	10. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	655,256,350	578,399,541	88.27 %
	11. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,664,964,200	1,642,408,781	98.65%
	12. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	57,256,200	57,201,000	99.90%
	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**43,217,200**	**29,257,000**	**67.70%**
5.	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	43,217,200	29,257,000	**67.70** %

➢ Kategori Pencapaian **Kebencanaan**

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
2.	**Program Penanggulangan Bencana (KEBENCANAAN)**	**2,513,301,71**	**2,040,107,042**	**81.17 %**
	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**235,026,500**	**211,292,070**	**89.90 %**
	1. Penyusunan kajian resiko bencana Kabupaten/Kota	189,050,40	166,599,750	**88.12 %**
	2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	45,976,10	44,692,320	**97.21 %**
	2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**993,315,900**	**869,775,672**	**87.56 %**
	6. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	32,163,000	22,520,000	**70.02 %**
	8. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	103,332,80	92,874,661	**89.88 %**
	9. Penyusunan rencana kontijensi	140,370,400	137,414,1	**97.89 %**
	10. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	74,202,90	53,243,800	**71.75 %**
	11. Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	750,000	747,500	**99.67 %**
	12. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	13,890,000	13,622,000	**98.07 %**
	14. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	142,210,80	134,107,800	**94.30 %**
	15. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan	53,772,400	27,039,611	**50.29**

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			
	16. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	403,420,000	360,262,600	**89.30**
	17. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	29,203,600	27,943,600	**95.69 %**
	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**864,375,050**	**589,660,950**	**68.22 %**
1.	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	2,880,000	2,880,000	100.00 %
2.	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	342,025,000	245,769,500	**71.86 %**
6.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	514,467,250	341,011,450	**66.28 %**
7.	**Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit**	3,000,000	0	0,00%
8.	**Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana**	2,002,800	0	0,00%
	4.Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**420,584,260**	**369,378,350**	**87.83 %**
2.	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	16,994,600	16,892,000	99.40 %
3.	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	37,444,700	24,590,000	**65.67 %**

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
5.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	366,144,960	327,896,350	**89.55** %

➢ Kategori Pencapaian **Pemadam Kebakaran**

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
3.	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)**	**2,397,114,302**	**1,133,933,675**	**47.30%**
	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**2,075,545,65**	**1,009,838,675**	**48.65%**
1.	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	19,015,200	3,680,000	19.35%
2.	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	311,522,000	218,586,265	70.17%
5.	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	251,046,799	211,074,110	84.08%
6.	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	132,231,200	23,747,500	17.96 %
7.	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi	140,785,640	0	0,00%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)			
14.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1,128,884,812	550,590,800	48.77%
15.	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	92,060,000	2,160,000	**2.35 %**
2.	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**27,516,600**	**23,358,000300**	**84.89%**
1.	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	4,066,300	962,000	**23.66**%
2.	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	23,450,300	22,396,000	**95.50**%
4.	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**150,376,300**	**99,777,000**	**66.35%**
1.	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	57,911,800	47,982,500	82.85%
2.	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	92,464,500	51,794,500	56.02%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**143,675,751**	**960,000**	**0.67%**
	1. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	32,492,000	960,000	2.95%
	4. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	111,183,751	0	0.00%

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di tangani oleh 3 organisasi perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Tabel 4.5.5.1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas

- Kategori Dukungan Personil **Trantibum**

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1.	**Jabatan Pimpinan Tinggi**	**1**
	a. Pangkat/Golongan:	
	Pembina Tingkat I / (IV/c) 1	
	b. Pendidikan:	

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah	
	Strata 2 (S2)	1	
	Administrator		**4**
	a. Pangkat/Golongan:		
	Pembina Tingkat I / (IV/b)	1	
	Pembina / (IV/a)	2	
	Penata Tk. I / (III/d)	1	
	b. Pendidikan:		
	Strata 2 (S2)	3	
	Strata 1 (S1)	1	
	Pengawas		**7**
	a. Pangkat/Golongan:		
	Pembina / (IV/a)	3	
	Penata Tk.1 / (III/d)	3	
	Penata Muda Tk.1 / (III/b)	1	
	b. Pendidikan:		
	Strata 2 (S2)	4	
	Strata 1 (S1)	2	
	SMA	1	
	Pelaksana /JFU		**12**
	a. Pangkat/Golongan:		
	Penata Muda Tk.1 / (III/b)	3	
	Penata / (III/a)	1	
	Pengatur Tk. I / (II/d)	4	
	Pengatur / (II/c)	2	
	Pengatur Muda / (II/a)	1	
	Juru Tk. I /(I/d)	1	
	b. Pendidikan:		
	Strata 2 (S2)	1	
	Strata 1 (S1)	4	
	D3	5	

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah	
	SMA	2	
2.	**Jabatan Fungsional Tertentu**		**104**
	a. Pangkat Golongan:		
	Penata Muda Tk.1 / (III/b)	11	
	Penata Muda (III/a)	58	
	Pengatur Tingkat I / (II/d)	15	
	Pengatur (II/c)	8	
	Pengatur Muda / (II/a)	12	
	b. Pendidikan:		
	Strata 1 (S1)	16	
	SMA	88	
3.	**Non ASN**		**108**
	Total		**236**

➢ Kategori Dukungan Personil **Kebencanaan**

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah	
1.	**Jabatan Pimpinan Tinggi**		**1**
	a. Pangkat/Golongan:		
	Pembina Tingkat I / (IV/c)	1	
	b. Pendidikan:		
	Strata 2 (S2)	1	
	Administrator		**3**
	a. Pangkat/Golongan:		
	Pembina / (IV/a)	3	
	b. Pendidikan:		
	Strata 2 (S2)	2	
	Strata 1 (S1)	1	
	Pengawas		**7**

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah	
	a. Pangkat/Golongan:		
	Penata Tk.I / (III/d)	3	
	Penata Muda (III/a)	4	
	b. Pendidikan		
	Strata Satu (S1)	7	
	Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum		**18**
	a. Pangkat/Golongan		
	Penata Tk. I / (III/d)	2	
	Penata / (III/c)	1	
	Penata Muda Tk.1 / (III/b)	4	
	Penata / (III/a)	3	
	Pengatur Tingkat I / (II/d)	1	
	Pengatur / (II/c)	2	
	Pengatur Muda / (II/a)	5	
	b. Pendidikan		
	Strata Satu (S1)	8	
	Diploma III (D3)	3	
	SMA	7	
2.	**PPPK**		**26**
	Pendidikan:		
	Strata 1 (S1)	7	
	D3	2	
	SMA	17	
	TOTAL		**55**

- Kategori Dukungan Personil **Pemadam Kebakaran**

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah	
1.	**Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)**		**1**
	a. Pangkat/Golongan:		
	Pembina Tingkat I / (IV/c)	1	

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah	
	b. Pendidikan:		
	Strata 2 (S2)	1	
	Administrator		**2**
	a. Pangkat/Golongan:		
	Pembina / (IV/a)	2	
	b. Pendidikan:		
	Strata 2 (S2)	2	
	Pengawas		**4**
	a. Pangkat/Golongan:		
	Pembina / (IV/a)	2	
	Penata Tk.I / (III/d)	1	
	Penata / (III/c)	1	
	b. Pendidikan		
	Strata Satu (S1)	1	
	Strata Dua (S2)	3	
	Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum		**39**
	a. Pangkat/Golongan		
	Penata Muda Tk. I / (III/b)	6	
	Penata / (III/a)	9	
	Pengatur Tingkat I / (II/d)	8	
	Pengatur / (II/c)	1	
	Pengatur Muda Tingkat I / (II/b)	15	
	b. Pendidikan		
	Strata Dua (S2)	2	
	Strata Satu (S1)	11	
	D3	1	
	SMA	25	
2.	**Jabatan Fungsional Tertentu**		**26**
	a. Pendidikan:		
	SMA	26	
3.	**PPPK/Paruh Waktu**		**44**
	a. Pendidikan:		
	Strata Satu (S1)	14	
	D3	4	
	SMA	26	
4.	**Non ASN**		**23**
	a. Pendidikan:		

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
	Strata Satu (S1)	9
	SMA	14
	JUMLAH TOTAL PERSONIL	**139**

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal serta langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah:

1. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Kategori Permasalahan **Trantibumlinmas**
  a) Tidak adanya QR *code* pada reklame/ iklan;
  b) PKL yang sebelumnya telah ditertibkan tetap kembali lagi pada keesokan harinya;
  c) Tempat yang disediakan untuk menampung tangkapan yang telah dilakukan luasnya terbatas;
- Kategori Permasalahan **Kebencanaan**
  a) Minimnya personil yang menguasai teknologi informasi dan Geografis Information System (GIS);
  b) Terbatasnya tenaga yang memiliki berkualifikasi khusus *Damage and Loss Assessment* (DALA) untuk melakukan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian akibat bencana;
  c) Gudang penyimpanan logistik dan peralatan belum memadai;
  d) Kurangnya Komunikasi antar instansi/ dinas dan lembaga lain dalam hal pencapaian SPM;

e) Terbatasnya alokasi anggaran;

- Kategori Permasalahan **Pemadam Kebakaran**

a) Kesenjangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Analisis beban kerja menunjukkan adanya defisit personel yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan ideal berdasarkan rasio populasi dan luas wilayah pelayanan. Selain itu, tingkat kualifikasi kompetensi spesialis bagi personel lapangan masih berada pada tahap pengembangan;

b) Amortisasi dan Keterbatasan Sarana Kritis

Sebagian armada kendaraan operasional telah melampaui usia teknis ideal, sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi. Kesenjangan juga terdeteksi pada ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) standar bagi petugas serta belum tersedianya jaringan hidran perkotaan yang fungsional secara menyeluruh;

c) Disparitas Jangkauan Pelayanan Spasial

Masalah geografis wilayah kepulauan dan perbatasan menciptakan titik buta pelayanan (*blank spot*) di mana kehadiran fisik pos permanen masih dalam tahap perencanaan, sehingga waktu tanggap di wilayah tersebut masih menghadapi tantangan aksesibilitas;

d) Asimetri Validitas Data Pelaporan

Terdapat selisih informasi antara pelaporan administratif dengan dinamika risiko di lapangan yang memerlukan penguatan sistem integrasi data secara *real-time* guna mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko;

2. Solusi

Adapun yang solusi yang diupayakan guna meningkatkan penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah:

- Kategori pencapaian **Trantibumlinmas**
  a) Penambahan QR *code* pada reklame/ iklan untuk memudahkan anggota dalam melakukan penertiban;
  b) Penyediaan kawasan yang dikhususkan untuk relokasi PKL;
  c) Penambahan alokasi anggaran yang dikhususkan untuk perluasan penampungan serta biaya makan dan minum bagi tangkapan;

- Kategori Capaian **Kebencanaan**
  a) Penambahan personil melalui seleksi CPNS yang disesuaikan dengan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
  b) Mengajukan anggaran ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Jatim maupun ke pusat Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
  c) Melakukan rapat koordinasi secara rutin dengan *stakeholder* terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  d) Diperlukan penambahan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan skala prioritas;

- Kategori Capaian **Kebakaran**
  a) Reformasi Perencanaan dan Pengembangan SDM

     Mengalihkan orientasi kinerja menuju hasil yang lebih sensitif terhadap resiliensi daerah serta menyusun peta jalan rekrutmen dan pelatihan kompetensi secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran;

b) Advokasi Investasi Sarana Prasarana

Mendorong prioritas kebijakan penganggaran bagi pembangunan pos pemadam baru di wilayah strategis serta melakukan peremajaan armada secara periodik guna menjamin keandalan operasional dalam situasi darurat;

c) Optimalisasi Sumber Pembiayaan Alternatif

Menggali potensi dukungan melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta pemanfaatan dana pembangunan di tingkat lingkungan guna mempercepat pemenuhan peralatan keselamatan publik;

d) Penguatan Tata Kelola Berbasis Teknologi

Mengintegrasikan sistem pelaporan operasional ke dalam *platform* digital guna meningkatkan validitas data kinerja serta memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi bencana secara mandiri.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota, jenis Pelayanan Dasar pada Bidang Sosial ada 5 jenis, yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/ Kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.2.1 Target SPM Urusan Sosial Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	2.545 orang	Tahun 2025	1.	Layanan data dan pengaduan	1.000 orang	Tahun 2025
					2.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	3 orang	
					3.	Penyediaan permakanan	1.545 orang	
					4.	Penyediaan sandang	722 orang	
					5.	Penyediaan alat bantu	95 orang	
					6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	136 orang	
					7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	8 orang	
					8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	84 orang	
					9.	Fasilitan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah, dan /atau kartu identitas anak/ bukti dokumen kependudukan	4 orang	
					10.	Akses kelanyanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas	6 orang	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					layanan pendidikan dan kesehatan		
					11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2 orang	
					12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2 orang	
					13. Layanan rujukan	5 orang	
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	6.063 orang	Tahun 2025	1. Layanan data dan pengaduan	4.309Orang	Tahun 2025
					2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	54 Orang	
					3. Penyediaan permakanan	150 Orang	
					4. Penyediaan sandang	1700 Orang	
					5. Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	10 Orang	
					6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	2.609 Orang	
					7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	50- Orang	
					8. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah, dan /atau kartu	35 Orang	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
						identitas anak/ bukti dokumen kependudukan		
					9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	10 Orang	
					10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5 Orang	
					11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5 Orang	
					12.	Layanan rujukan	20 Orang	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	16.546 Orang	Tahun 2025	1.	Layanan data dan pengaduan	15.350 Orang	Tahun 2025
					2.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	20 Orang	
					3.	Penyediaan permakanan	740 Orang	
					4.	Penyediaan sandang	546 Orang	
					5.	Penyediaan alat bantu	13 Orang	
					6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	40 Orang	
					7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	14.551 Orang	
					8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	15 Orang	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					9. Fasilitan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah/ bukti dokumen kependudukan	10 Orang	
					10. Akses pelayanan kesehatan dasar /fasilitas layanan kesehatan	40 Orang	
					11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5 Orang	
					12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5 Orang	
					13. Layanan rujukan	20 Orang	
4	Rehabilitasi social dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	120 Orang	Tahun 2025	1. Layanan data dan pengaduan	120 Orang	120
					2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	120 Orang	
					3. Penyediaan permakanan	100 Orang	
					4. Penyediaan sandang	100 Orang	
					5. Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	100 Orang	
					6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritua, dan sosial	100 Orang	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	50 Orang	
					8. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak/ bukti dokumen kependudukan	50 Orang	
					9. Akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	25 Orang	
					10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100 Orang	
					11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100 Orang	
					12. Layanan rujukan	50 Orang	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap	8.649 Orang	Tahun 2025	1. Penyediaan pemakanan	8.200 Orang	Tahun 2025
					2. Penyediaan sandang	320 Orang	
					3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	206 Orang	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
	bagi korban bencana	darurat & pasca bencana			4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	49 Orang	
					5. Pelayanan dukungan psikososial	80 Orang	

4.6.3 Realisasi

Hasil realisasi dari target yang telah dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2025 capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan lima jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 4.6.3.1 Tabel Realisasi Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2025

No.	Jenis Layanan Dasar/Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Capaian/Output		Total Capaian
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	
1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**				**100%**
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	2.545	2.545	100%
	B. Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi				
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1.000	1.000	100%

No.	Jenis Layanan Dasar/Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Capaian/Output		Total Capaian
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	orang	3	3	100%
1.	Penyediaan permakanan	orang	1.545	1.545	100%
2.	Penyediaan sandang	orang	722	722	100%
3.	Penyediaan alat bantu	orang	95	95	100%
4.	Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	orang	136	136	100%
5.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	orang	8	8	100%
6.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	orang	84	84	100%
7.	Fasilitan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah, dan /atau kartu identitas anak/ bukti dokumen kependudukan	orang	4	4	100%
8.	Akses kelanyanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	orang	6	6	100%
9.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	orang	2	2	100%
10.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	2	2	100%
11.	Layanan rujukan	orang	5	5	100%
2.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti**				**100%**
A.	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	2.545	2.545	100%
B.	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi				
1.	Layanan data dan pengaduan	Orang	4.309	4.309	100%
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	orang	54	54	100%
3.	Penyediaan permakanan	orang	150	150	100%
4.	Penyediaan sandang	orang	1700	1700	100%
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	orang	10	10	100%

No.	Jenis Layanan Dasar/Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Capaian/Output		Total Capaian
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	orang	2.609	2.609	100%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	orang	50	50	100%
	8. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah, dan /atau kartu identitas anak/ bukti dokumen kependudukan	orang	35	35	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	orang	10	10	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	orang	5	5	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang			100%
	12. Layanan rujukan	orang	20	20	100%
3.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**				**100%**
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	6.063	6.063	100%
	B. Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi				
	1. Layanan data dan pengaduan	orang	15.350	15.350	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	orang	20	20	100%
	3. Penyediaan permakanan	orang	740	740	100%
	4. Penyediaan sandang	orang	546	546	100%
	5. Penyediaan alat bantu	orang	13	13	100%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	orang	40	40	100%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	orang	14.551	14.551	100%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	orang	15	15	100%

No.	Jenis Layanan Dasar/Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Capaian/Output		Total Capaian
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	
	9. Fasilitan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah/ bukti dokumen kependudukan	orang	10	10	100%
	10. Akses pelayanan kesehatan dasar /fasilitas layanan kesehatan	orang	40	40	100%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	orang	5	5	100%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	5	5	100%
	13. Layanan rujukan	orang	20	20	100%
4.	**Rehabilitasi Social Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**				**100%**
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	6.063	6.063	100%
	B. Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi				
	1. Layanan data dan pengaduan	orang	120	120	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	orang	120	120	100%
	3. Penyediaan permakanan	orang	100	100	100%
	4. Penyediaan sandang	orang	100	100	100%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	orang	100	100	100%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritua, dan sosial	orang	100	100	100%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	orang	50	50	100%
	8. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak/ bukti dokumen kependudukan	orang	50	50	100%
	9. Akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	orang	25	25	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	orang	100	100	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	100	100	100%

No.	Jenis Layanan Dasar/Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Capaian/Output		Total Capaian
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	
	12. Layanan rujukan	orang	50	50	100%
5.	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana**				**100%**
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	6.063	6.063	100%
	B. Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi				
	1. 2. Penyediaan pemakanan	orang	8.200	8.200	100%
	3. Penyediaan sandang	orang	320	320	100%
	4. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	orang	206	206	100%
	5. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	orang	49	49	100%
	6. Pelayanan dukungan psikososial	orang	80	80	100%

4.6.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2025 Dinas Sosial memiliki anggaran PAPBD sebesar sebesar Rp 24.892.018.506,00 dengan alokasi anggaran penerapan SPM sebesar Rp 4.880.449.050,00. Rincian alokasi anggaran pada pelaksanaan SPM Urusan Sosial tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.4.1 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2025

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	URUSAN SOSIAL KAB.GRESIK	**4.880..449.050**	**4.511.868.863**	**92,45 %**
1.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			
1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**4.723.071.450**	**4.378.7563.004**	**92,71 %**
	3. Penyediaan alat bantu	190.173.500	97.926.000	51,49 %
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	4,313,882,178	4,069,127,96	94.33%
	6. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	27,655,450	24,197,950	87,50 %
	8. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	17,112,000	16,223,400	94,81 %
	10. Pemberian layanan kedaruratan	85,616,795	85,388,790	99,73 %
	12. Pemberian layanan rujukan	88,631,527	85,698,900	96,69 %
2	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**157,377,600**	**133,305,859**	**84.70 %**

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1.	Penyediaan makanan	95,540,400	86,960,859	51,91 %
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	40,900,000	25,800,000	63,06 %
5.	Pelayanan dukungan Psikososial	20,937,200	20,545,000	98,13 %

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Dukungan personil pada Bidang Urusan Sosial antara lain:

Tabel 4.6.5.1 Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Sosial

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
1.	• **Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)**		1
	a. Pangkat/golongan		
	Pembina Tk. I - IV/b	1	
	b. Pendidikan		
	S2	1	
	• **Administrator**		3
	a. Pangkat/golongan		
	Pembina - IV/a	3	
	b. Pendidikan		
	S2	3	
	• **Pengawas**		6
	a. Pangkat/golongan		
	Penata Muda Tk. I - III/b	1	
	Penata Tk. I - III/d	4	
	Pembina - IV/a	1	
	b. Pendidikan		
	S2	2	
	S1	4	
	• **Pelaksana / JFU**		14

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah	Jumlah Personil
	a. Pangkat/golongan		
	Pengatur Muda Tk. I - II/b	1	
	Pengatur - II/c	4	
	Pengatur Tk. I - II/d	1	
	Penata Muda - III/a	3	
	Penata Muda Tk. I - III/b	4	
	Penata Tk. I - III/d	1	
	b. Pendidikan		
	SMA	3	
	D-III	2	
	S1	9	
2.	**PPPK**		**4**
	a. Pendidikan		
	SMA	3	
	S1	1	
3.	**Non ASN**		**25**
	a. Pendidikan		
	SD	1	
	SMA	6	
	D-III	1	
	S1	16	
	S2	1	
	JUMLAH TOTAL PERSONIL		**53**

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM serta langkah-langkah yang ditempuh untuk menanganinya. Adapun permasalahan SPM Urusan Sosial meliputi:

1. Permasalahan

   Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Urusan sosial adalah sebagai berikut:

   a) Terdapat kode rekening yang tidak tertagging di aplikasi sehingga harus menggunakan kode rekening lain untuk menghindari angka

nol, seperti pada kegiatan pemberian layanan rujukan (d) dan pemberian bimbingan fisik dan mental (d);

b) Terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sehingga menyebabkan penanganan PPKS, khususnya penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, serta tuna sosial (gelandangan dan pengemis) kurang optimal;

c) Terdapat bantuan sosial yang tidak tersalurkan dikarenakan penerima manfaat meninggal dan pindah tanpa keterangan (di luar kendali Dinas Sosial);

d) Terdapat beberapa sub kegiatan pendukung yang tidak mendapatkan alokasi anggaran akibat keterbatasan anggaran;

2. Solusi

Upaya pemecahan atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

a) Penambahan opsi "ketik/ *typing*" pada penulisan kode rekening;

b) Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk percepatan penanganan PPKS;

c) Melaksanakan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat;

d) Menyusun Rencana Aksi SPM agar sub kegiatan pendukung SPM mendapatkan alokasi anggaran dari Tim Anggaran Kabupaten mengingat SPM merupakan program prioritas.

BAB V Penutup

Demikian laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 kami sampaikan. Kegiatan penyusunan capaian LPPD Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah. Dalam prosesnya, evaluasi terhadap penerapan LPPD dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan dan regulasi yang berkaitan dengan LPPD dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) telah menjalankan penerapan LPPD secara konsisten, terarah, dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Selain itu, efektivitas pelaksanaan LPPD juga tercermin dari kemampuan OPD dalam menginterpretasikan berbagai peraturan yang ada ke dalam praktik pelaporan yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi indikator bahwa koordinasi, pemahaman regulasi, serta komitmen dari masing-masing OPD dalam mendukung penyusunan LPPD telah berjalan dengan optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelaporan semata, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai salah satu landasan dalam perumusan kebijakan dan arah pembangunan daerah. Melalui LPPD, Pemerintah Kabupaten Gresik dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, sehingga program-program pembangunan yang dirancang dapat lebih tepat sasaran, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Pada akhirnya, pemanfaatan LPPD secara optimal diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.